



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022



Bupati
SUHATRI BUR, SE, MM

Wakil Bupati
Drs. RAHMANG, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

7. Rencana....

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Program Startegis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Landasan penyusunan rancangan KUA Tahun 2022, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022; dan
 - c. Landasan Penyusunan rancangan APBD Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Bab VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab VII	Inovasi Daerah
Bab VIII	Penutup
- (2) Penjabaran RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Juli 2021

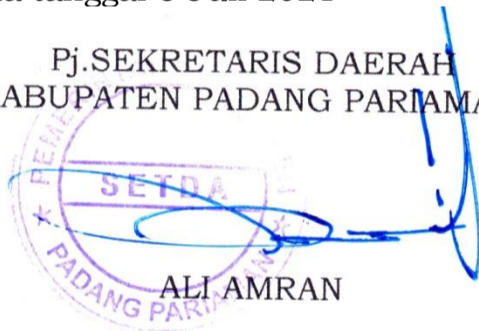
BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Juli 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



ALI AMRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 28



KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 75 Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyusunan RKPD mempedomani RPJMD.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 melalui beberapa tahapan, mulai dari konsinyir penyusunan draft Rancangan Awal RKPD, telaahan terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun RKPD Tahun 2022 dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini

Parit Malintang, Juli 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR



DAFTAR ISI, TABEL DAN GAMBAR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I- 6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I- 8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-12
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II- 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II- 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II- 6
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-23
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-79
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-86
2.3. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2020.....	II-86
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-95
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III- 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III- 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-38
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-38
3.3.2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-43
3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-44
3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-49
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV- 1
4.1. Visi, Misi, Tujuan Visi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV- 1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-16
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-16
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	IV-19
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-22



4.3.	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-26
4.3.1.	Sasaran Makro Pembangunan Daerah.....	IV-26
4.3.2.	Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	IV-26
4.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-30
4.5.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2022	IV-35
4.6.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-38
4.7.	Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-70
BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V- 1
BAB VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI- 1
6.1.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022	VI- 1
6.2.	Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2022	VI- 3
BAB VII.	INOVASI DAERAH	VII- 1
7.1.	Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman	VII- 1
BAB VIII.	PENUTUP	VIII - 1
LAMPIRAN		
1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju tahun 2023 Berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	
2.	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	I-2
Tabel 2.1.	Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-4
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020	II-4
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan pada Tahun 2016-2020 (jiwa)	II-5
Tabel 2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020	II-6
Tabel 2.5.	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-9
Tabel 2.6.	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Penggunaannya Tahun 2016-2020	II-11
Tabel 2.7.	Laju Inflasi Year on Years di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-13
Tabel 2.8.	Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran terhadap PDRB kabupaten Padang Pariaman	II-14
Tabel 2.9.	Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-14
Tabel 2.10.	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman	II-16
Tabel 2.11.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-19
Tabel 2.12.	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-19
Tabel 2.13.	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-20
Tabel 2.14.	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-20
Tabel 2.15.	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-21
Tabel 2.16.	Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-22
Tabel 2.17.	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lima Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	II-24
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-25
Tabel 2.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 2.20.	Perkembangan APM Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 2.21.	Perkembangan APK Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.22.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah Tahun 2019-2020	II-29
Tabel 2.23.	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah Tahun 2019-2020	II-29
Tabel 2.24.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Tahun 2016-2020	II-30
Tabel 2.25.	Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020	II-31
Tabel 2.26.	Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020	II-31



Tabel 2.27.	Perkembangan Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.28.	Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.29.	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.30.	Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2022	II-53
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Urusan Ketenaga Kerjaan Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-60
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016	II-61
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan Otonom Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.52.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.53.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber daya Mineral Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.55.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.56.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.57.	Luas Panen Produksi Padi dan Produktivitas Padi Kabupaten Padang Pariaman	II-74
Tabel 2.58.	Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.59.	Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-74



Tabel 2.60.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.61.	Populasi dan Pematangan Ternak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020	II-75
Tabel 2.62.	Populasi dan Pematangan Unggas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020	II-76
Tabel 2.63.	Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.64.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.65.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.66.	Pengeluaran Rata-Rata Per kapita Sebulan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2016-2020	II-79
Tabel 2.67.	Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman	II-81
Tabel 2.68.	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018-2020	II-83
Tabel 2.69.	Perincian Pendapatan Restribusi Daerah tahun Anggaran 2018-2020	II-84
Tabel 2.70.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.71.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2020	II-85
Tabel 2.72.	Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	II-86
Tabel 2.73.	Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020	II-88
Tabel 2.74.	Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-90
Tabel 2.75.	Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-90
Tabel 2.76.	Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020	II-92
Tabel 2.77.	Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020	II-93
Tabel 2.78.	Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	II-94
Tabel 3.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024	III-2
Tabel 3.2.	Kondisi Ekonomi Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021	III-5
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2022	III-7
Tabel 3.4	Kondisi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-7
Tabel 3.5	Kondisi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	III-11
Tabel 3.6	Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-13
Tabel 3.7	Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Padang Pariaman	III-15
Tabel 3.8	Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-16
Tabel 3.9	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-17
Tabel 3.10	Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-18
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2019-2021	III-19



Tabel 3.12	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-20
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-21
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-24
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-24
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-26
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-27
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-27
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-28
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-28
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-29
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-29
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-29
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-30
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-31
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-31
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-32
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Padang Pariaman	III-32
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-32
Tabel 3.31	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-33
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-33
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-34
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-34
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-34



Tabel 3.36	Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Padang Pariaman	III-35
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-35
Tabel 3.38	Target dan Realisasi SiLPA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-36
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-36
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman	III-36
Tabel 3.41	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman	III-37
Tabel 3.42	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman	III-37
Tabel 3.43	Proyeksi Pembiayaan daerah Tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman	III-38
Tabel 3.44	Struktur Belanja Daerah	III-46
Tabel 4.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	IV-3
Tabel 4.2.	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	IV-5
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022	IV-19
Tabel 4.4.	Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-23
Tabel 4.5.	Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-23
Tabel 4.6.	Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-27
Tabel 4.7.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-30
Tabel 4.8.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-37
Tabel 4.9.	Prioritas, Sasaran Pembangunan Daerah, Progam Pembangunan dan Pagu Indikatif Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	IV-39
Tabel 4.10.	Alokasi Pagu Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-70
Tabel 5.1.	Rancangan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022 menurut Perangkat Daerah	V-1
Tabel 6.1.	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022	VI-1
Tabel 6.2.	Target Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	VI-4
Tabel 7.1.	Daftar Rekapitulasi Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020	VII-6
Tabel 7.2.	Daftar Usulan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2019-2020	VII-18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD	I-2
Gambar 1.2.	Pendekatan Secara Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2022	I-4
Gambar 1.3.	Pendekatan Secara Proses Penyusunan RKPD Tahun 2022	I-4
Gambar 1.4.	Penggunaan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2022	I-6
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	II-2
Gambar 2.2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	II-3
Gambar 2.3.	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020	II-7
Gambar 2.4.	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2016-2020	II-8
Gambar 2.5.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-8
Gambar 2.6.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-15
Gambar 2.7.	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019	II-16
Gambar 2.8.	Angka Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-17
Gambar 2.9.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-18
Gambar 2.10.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020	II-22
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2021	III-19
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-20
Gambar 3.3.	Perumbuhan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021	III-21
Gambar 3.4.	Pertumbuhan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021	III-22
Gambar 3.5.	Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019-2021	III-25
Gambar 3.6.	Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019-2021	III-26
Gambar 4.1.	Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan RPJMN 2020-2024	IV-16
Gambar 4.2.	Keterkaitan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-36
Gambar 7.1.	Piagam Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> Peringkat II Tahun 2018 dari Kemendagri RI	VII-2
Gambar 7.2.	Penghargaan peringkat 1 di bidang pelayanan publik pada Penilaian Pelayanan Administrasi tingkat Sumatera Barat pada Disdukcapil dan juara 1 untuk Penilaian Pelaksanaan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) pada bulan tahun 2018	VII-3
Gambar 7.3.	Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 meraih Kategori Kabupaten Sangat Inovatif tingkat Kabupaten dalam penganugerahan <i>Innovative Government Award</i> 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri	VII-4



- bulan Desember 2020
- Gambar 7.4. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mendapatkan piagam VII-4
atas partisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Covid-19
- Gambar 7.5. Pada Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman menerima penghargaan VII-5
pelayanan public dalam kategori pelayanan prima tingkat kabupaten



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

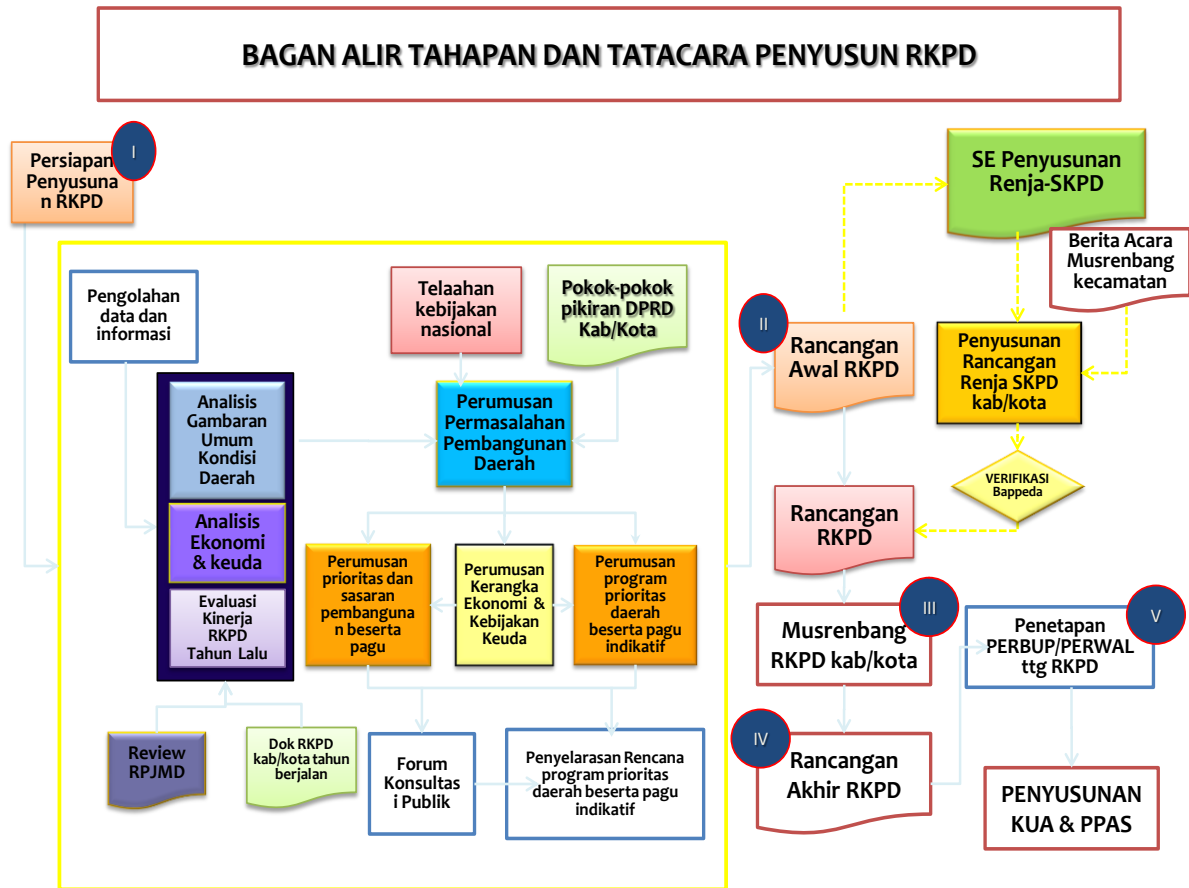
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 merupakan penjabaran dari tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan oleh Bupati Padang Pariaman dalam implementasi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Adapun tahapan Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD



Jadwal Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Persiapan Penyusunan RKPD - Pengumpulan data dan informasi - Penyusunan SK Tim Penyusunan RKPD	Des 2020 – Januari 2021
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD - Penyusunan Rancangan Awal RKPD - Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD - Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan	Januari 2021 – April 2021



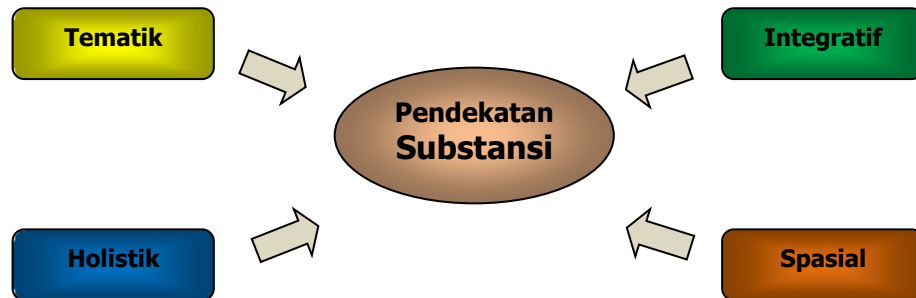
No.	Kegiatan	Tanggal
	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian Rancangan Awal RKPD dan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah- Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah- Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	
3.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2022- Penyampaian Surat Edaran Rancangan RKPD dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	Maret-April 2021
4.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	Mei 2021
5.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Draft Rancangan Akhir RKPD- Pembahasan Rancangan akhir bersama Perangkat Daerah	Mei – Juni 2021
6.	Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD ke Bappeda Propinsi Sumbar	Juni 2021
7.	Penetapan RKPD Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none">- Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2022- Penyusunan Rancangan Perbub RKPD- Penetapan Perbub RKPD Tahun 2021	Juli 2021
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none">- Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah- Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juli 2021

Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dilakukan secara terpadu antar Perangkat Daerah, sehingga memungkinkan untuk melengkapi dan saling memberi masukan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat menuju pencapaian visi Bupati Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu : **“Padang Pariaman Berjaya.”**

Proses penyusunan RKPD melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui inovasi kebijakan yang didasarkan pada kebijakan *money follows program*. Agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya yang dilaksanakan melalui pendekatan secara substansi dan pendekatan secara proses.

Pendekatan secara substansi melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan spasial.

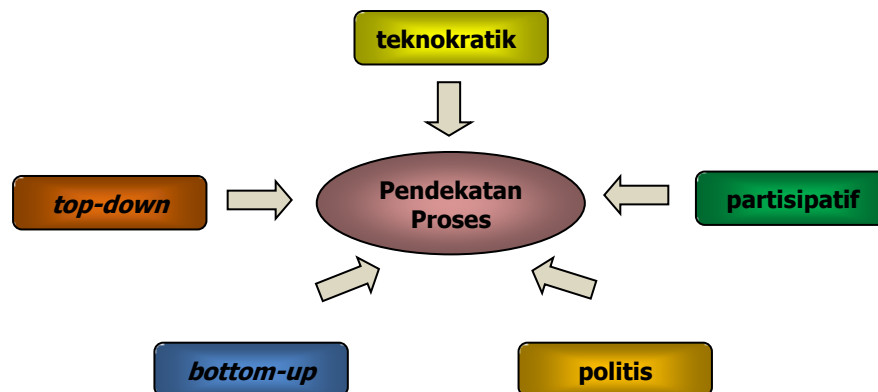
Gambar 1.2
Pendekatan Secara Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2022



1. Pendekatan secara tematik adalah tema dan prioritas RKPD yang berdasarkan dari hasil evaluasi, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun sebelumnya dan isu strategis yang berkembang di daerah.
2. Pendekatan secara holistik adalah pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir
3. Pendekatan secara integratif adalah pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan daerah termasuk integrasi pendanaan seperti halnya bahwa perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD) integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD).
4. Pendekatan perencanaan spasial adalah keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Di samping memenuhi pendekatan sebagaimana yang disebutkan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 juga dilakukan melalui pendekatan proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*.

Gambar 1.3
Pendekatan Secara Proses Penyusunan RKPD Tahun 2022





1. Pendekatan secara teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pendekatan secara partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022
3. Pendekatan secara politis dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan pemerintah kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.
4. Pendekatan secara top down dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 serat arahan dari pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
5. Pendekatan secara bottom up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan daerah.

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas maka ditetapkan Tema Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2022 sebagai berikut :

“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.”

dengan 8 (delapan) agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah;
4. Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah;
6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang;
7. Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana;

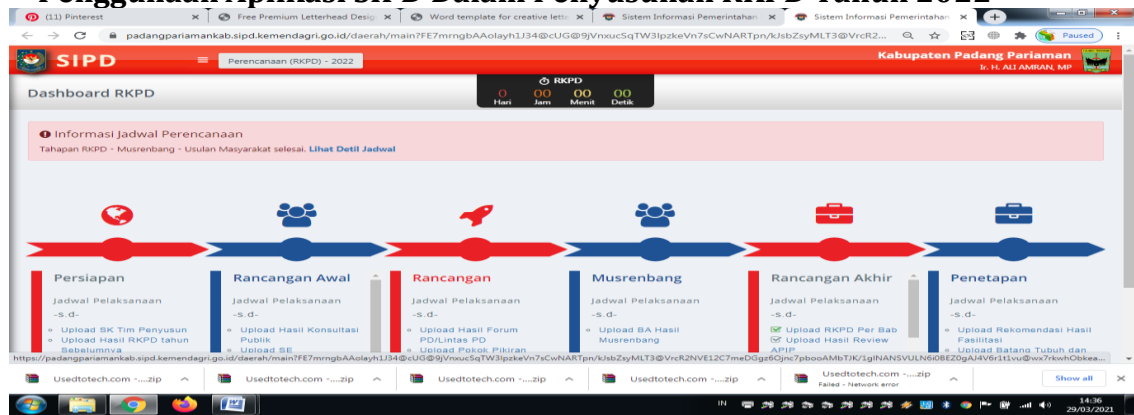


8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional;

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 disesuaikan dengan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dimana RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang tersusun akan di upload kedalam Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) yang difasilitasi oleh Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana RKPD Tahun 2022 untuk Pelaksanaan KUA-PPAS telah berpedoman Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 dengan menggunakan Indikator Kinerja yang mengacu Pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Gambar 1.4.

Penggunaan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2022



I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

I.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), yang juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2022 serta dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022.

I.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2022

Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 mengacu pada prioritas RKP Tahun 2022 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).



Keterkaitan RKPD Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terutama dalam perwujudan:

1. : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang berkualitas;
2. : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan;
3. : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
4. : Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. : Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar;
6. : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

I.3.2 RKPD dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi:

“Padang Pariaman Berjaya.”

Visi dimaksud diatas merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Visi diatas merupakan singkatan dan memiliki 4 (empat) kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman kedepan sebagai berikut:

1. Unggul **“BE”**rkelanjutan memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.



2. “R”eligius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Se”JA”htera merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. Berbuda”YA” merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang;
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;

Selanjutnya, terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda, terjadi berbagai permasalahan dan hal tersebut mengharuskan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota mengambil kebijakan dan hal ini telah diintegrasikan dengan Tema RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yaitu :

”Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.



I.3.3 RKPD dengan Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS Tahun 2022

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2022 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022, hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil Musrenbang serta disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan rancangan KUA Tahun 2022 dan rancangan PPAS Tahun 2022 untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Penyusunan KUA-PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

I.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. RKPD memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
2. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
3. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah
2. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
3. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;



4. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
7. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pemerintah daerah lainnya.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian penjelasan latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu, disamping itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen Tahun berjalan sebagai acuan serta permasalahan pembangunan daerah. penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2020 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan, realisasi target kinerja. permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan prioritas daerah dan layanan dasar serta pengelolaan potensi unggulan daerah.



BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sub ini menguraikan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKP Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun rencana.

1.1.1. Kondisi ekonomi daerah tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup : PDRB, tingkat inflasi, sumbangan sektoral, tingkat investasi (PMA dan PMDN), Ekspor, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman.

1.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2021 dan tahun 2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam sub ini menggambarkan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat



daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

- 1.1. Visi, Misi, Tujuan Visi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 1.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
- 1.3. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022
- 1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
- 1.5. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
- 1.6. Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
- 1.7. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2022

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat termasuk pendanaan daerah.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penjelasan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD))

BAB VII. INOVASI DAERAH

Memuat penjelasan Kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan

BAB VII. PENUTUP

Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematis penyajian rancangan awal pada bab-bab di atas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°19'15.68" Lintang Selatan-0°48'59.868" Lintang Selatan dan 99°57'43.325" Bujur Timur-100°27'28.94" Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.343,09 Km² atau sekitar 3,20% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.012,89 Km²). Membentang di pesisir barat pulau Sumatera, Kabupaten Padang Pariaman memiliki kontur wilayah yang beragam mulai dari bibir pantai sampai dengan perbukitan. Titik tertinggi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman berada di Kecamatan Patamuhan dengan tinggi wilayah mencapai 1925 mdpl. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam,
- Sebelah Selatan dengan Kota Padang,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar,
- Sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Sesuai dengan data BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021, rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah sebesar 4.678 (mm), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 246 setahun. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 26 derajat celsius dengan kelembaban relatif 85 persen dan tekanan udara rata-rata 995,8 miliar.

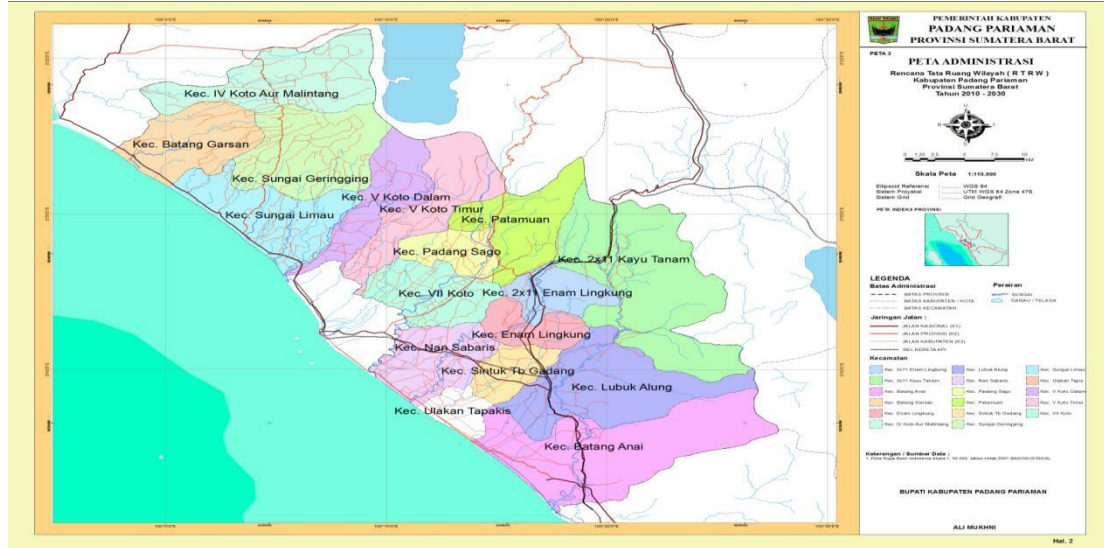
Berdasarkan data BPS Tahun 2021, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dimana kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 188,55 Km², sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakismemiliki luas terkecil, yakni 23,01 Km².

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 103 nagari dan 600 korong, sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang administrasi nagari. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang hanya mempunyai 3 (Tiga) nagari. Kecamatan VII Koto masih merupakan kecamatan yang memiliki korong

terbanyak, yakni 66 korong, dan yang paling sedikit adalah kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, yakni 12 korong.

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman

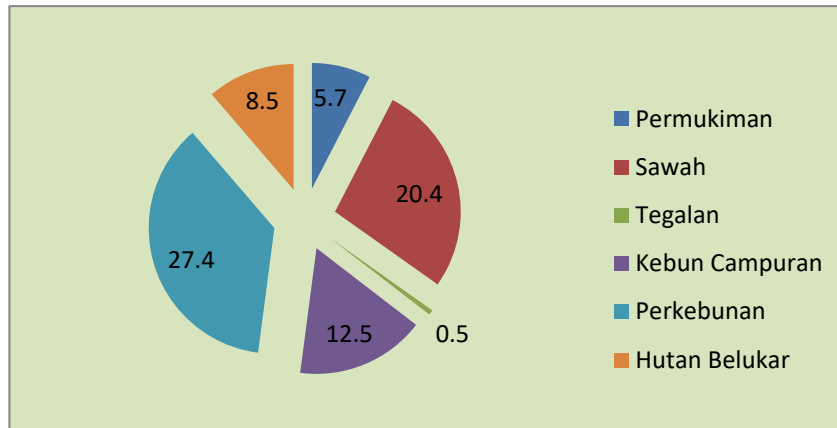


Sumber : Peta RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Lahan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yaitu untuk pertanian, perdagangan dan jasa, perumahan maupun untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan perkotaan. Disini penggunaan lahan dikelompokkan atas 3 kategori yaitu lahan hutan, lahan persawahan dan lahan non persawahan. Sekitar 30,05 % lahan Kabupaten Padang Pariaman berbentuk hutan. Jumlah ini cukup ideal yaitu 30 % dari luas lahan suatu wilayah.

Kabupaten Padang Pariaman dilalui oleh 11 (sebelas) sungai. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk mendukung pekerjaannya yang mayoritas merupakan petani dengan luas lahan untuk pertanian adalah 27.082,5 dari 132.878 Ha total lahan yang dipergunakan untuk segala jenis peruntukan lahan.

Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.2. di bawah ini:

Gambar 2.2.**Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019**

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2019

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (*catchment area*) Kabupaten Padang Pariaman yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai masalah seperti :

1. Terjadinya konversi lahan hutan menjadi lahan permukiman dan kebun
2. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan.



3. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
4. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah 430.626 jiwa yang terdiri dari 215.038 jiwa laki-laki dan 215.588 jiwa perempuan. Jumlah Penduduk menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 430.626 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 214.735 jiwa laki-laki dan 215.588 jiwa perempuan. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

TAHUN	PENDUDUK			SEX RASIO	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km ²)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
2016	201.130	207.472	408.612	96,94	308
2017	202.400	208.603	411.003	97	309
2018	203.602	209.670	413.272	97,11	308
2019	214.735	216.489	431.224	99,19	324.52
2020	216.961	217.688	434.649	99,67	323,62

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Untuk sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Batang Anai yaitu berjumlah 52.270 jiwa, dan diikuti oleh Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah 47.488 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 8.935 jiwa, pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk menurut Kecamatan.

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tahun 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	LUBUK ALUNG	23.993	23.495	47.488
2	BATANG ANAI	26.394	25.876	52.270
3	NAN SABARIS	14.833	15.141	29.974
4	2 X 11 KAYU TANAM	9.233	9.514	18.747
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	17.891	18.361	36.252
6	V KOTO KP DALAM	12.166	11.972	24.138



No.	Kecamatan	Tahun 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
7	SUNGAI GERINGGING	16.216	16.220	32.436
8	SUNGAI LIMAU	15.022	14.963	29.985
9	IV KOTO AUR MALINTANG	10.405	10.778	21.183
10	ULAKAN TAPAKIS	10.301	10.394	20.695
11	SINTUAK TOBOH GADANG	9.674	9.901	19.575
12	PADANG SAGO	4.378	4.557	8.935
13	BATANG GASAN	5.696	5.598	11.294
14	V KOTO TIMUR	7.565	7.563	15.128
15	2X11 ENAM LINGKUNG	14.335	14.318	28.653
16	PATAMUAN	8.781	8.876	17.657
17	ENAM LINGKUNG	10.078	10.161	20.239
JUMLAH		216.961	217.688	434.649

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Selanjutnya, perkembangan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 2.3.berikut ini :

Tabel 2.3.

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Pada Tahun 2016-2020 (Jiwa)**

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
2016	-	-	-
2016	104.510	65.259	169.769
2017	105.106	68.502	173.608
2018	105.401	65.115	170.516
2020	111.140	72.591	183.731

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang positif dimana untuk pengangguran terbuka laki-laki sebesar 7,69 persen dan perempuan 8,78 persen dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 83,44 persen dan perempuan sebesar 51,88 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
	TPAK		TPT	
2016	82,69	57,14	4,37	6,77
2017	78,87	49,42	4,44	9,99
2018	81,14	50,42	6,21	7,95
2019	79,81	47,02	5,33	6,99
2020	83,44	51,88	7,69	8,78

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

2.12. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan seni budaya dan olah raga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis Kinerja atas Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diwujudkan terhadap indikator - indikator pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun untuk PDRB atas harga berlaku di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp.17941.900,08 juta dari Rp.21.252.415,30 juta di tahun 2019, hal ini

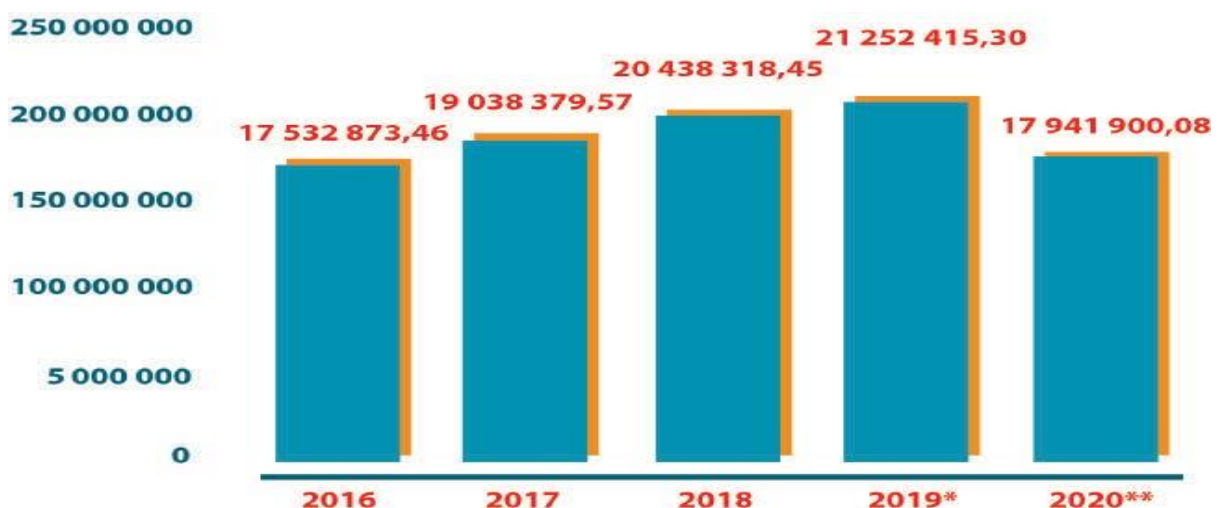
merupakan efek dari pandemic covid-19 yang terjadi di tahun 2020 hingga saat ini (2021).

Begitupun dengan PDRB atas harga konstans yang dapat menggambarkan produktivitas ekonomi secara riil juga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.395.446,48juta dari tahun 2019. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstans tersebut Rp. 13.334.921,66 juta dan pada tahun 2020 menjadi Rp.11.939.475,18 juta.

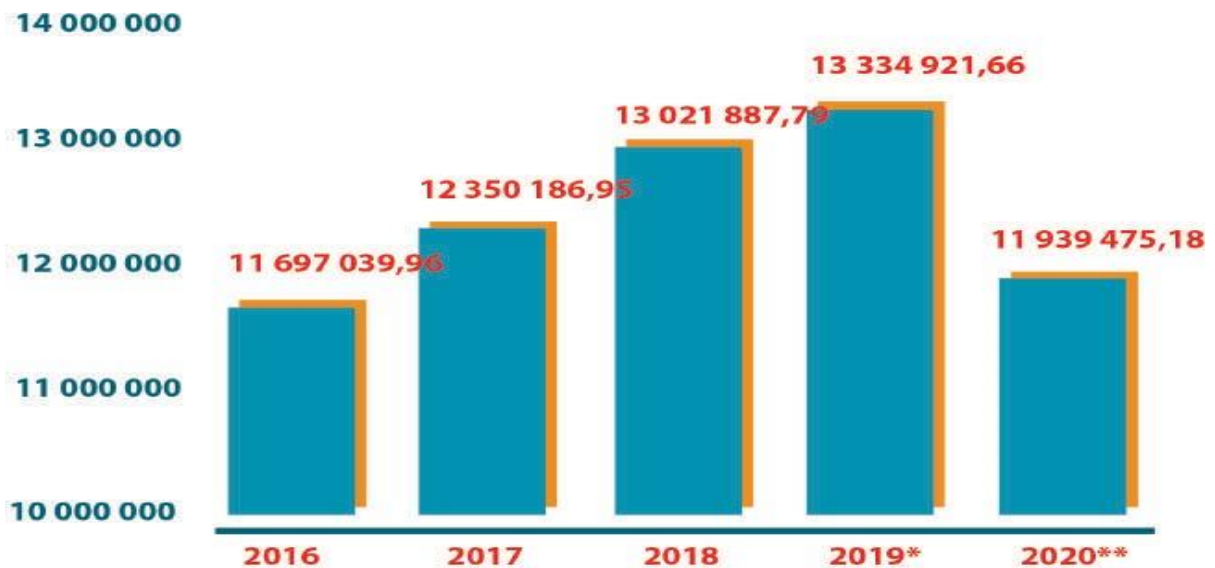
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariamanterus mengalami Penurunan Yang sangat Drastis yaitu Pada Tahun 2018 sebesar 5,47, Pada Tahun 2019 2,4 dan pada tahun 2020 -10,46.Sektor yang dominan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang nilai persentase PDRB atas harga berlaku sebesar 30,31 % terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman dimana pada tahun 2019 terjadi Penurunan Jumlah Penumpang angkutan udara yang disebabkan tingginya harga tiket. Tetapi Jika Nilai PDRB dari sektor Transportasi dan Pergudangan di keluarkan Pertumbuhan ekonomi kabupaten Padang Pariaman menurut Data BPS kab Padang Pariaman Tahun 2020 menjadi **6,48** . Di tahun 2020 sektor transportasi dan pergudangan tidak lagi yang menjadi paling berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman, melainkan dari sector pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar Perkembangan 22,66%. PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstans ini dapat dilihat pada gambar 2.3 dan 2.4 berikut ini :

Gambar 2.3.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

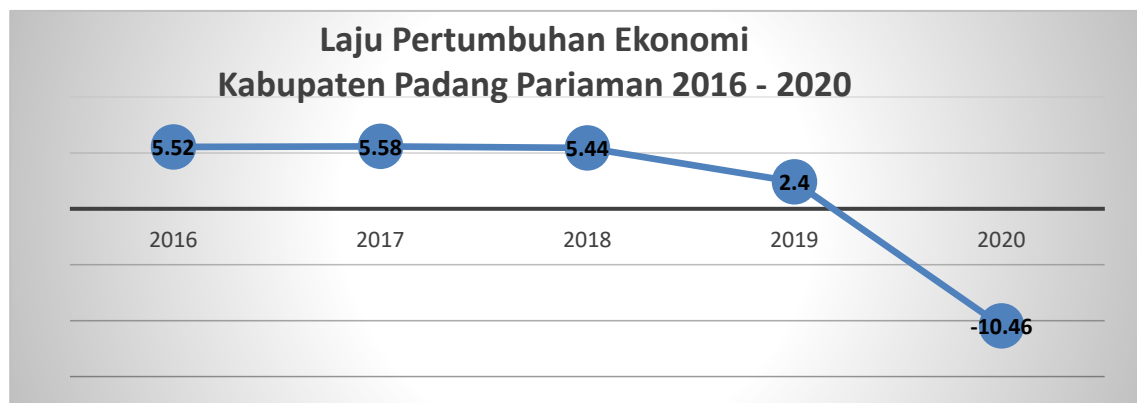


Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Gambar 2.4.**Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020**

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Dari perkembangan PDRB Atas Harga Konstans yang tergambar pada gambar 2.4 diatas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tergambar pada gambar 2.5 dibawah ini:

Gambar2.5.**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Padang pariaman atas harga berlaku dan Konstan ini secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 berikut ini:



Tabel 2.5.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstan	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstan	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstan	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstan	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.488.872,1	2.478.821,7 2	3.731.537, 4	2.580. 351,2	3.941.330, 2	2.671.238,2	4.082.657,3 2	2.785.158.5 2	4.065.464,1 5	2.791.280,4 2
2	Pertambangan dan penggalian	1.028.331,7	668.102,74	1.097.524, 8	696.430,3	1.202.663, 8	747.407,2	1.345.212,1 8	803.593,28	1.331.498,0 7	789.481,61
3	Industri pengolahan	1.883.643,2	1.551.134,3 7	1.949.723, 6	1.593. 125,9	1.979.852, 8	1.602.324,0	1.987.865,7 6	1.626.096,3 7	2.007.600,2 3	1.595.271,9 3
4	Pengadaan listrik dan gas	5.005,4	3.647,57	6.001,9	3.796,2	6.266,7	3.953,0	7.024,17	4.055,35	6.734,92	3.844,29
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	7.253,14	6.027,20	7843,4	6.270,9	8.397,9	6.516,4	9.094,93	7.157,44	9.431,47	7.410,50
6	Konstruksi '	1.291.854,8	926.580,89	1.415.070, 8	999.829,4	1.565.720, 1	1.071.968,5	1.796.923,0 3	1.186.824,9 8	1.882.694,6 2	1.135.142,5 5
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	1.475.558,2	1.156.316,4 0	1.596.549, 6	1.213. 926,6	1.714.538, 0	1.282.096,2	1.899,436,0 3	1.371.871,0 9	1.889.587,5 2	1.362.734,9 9
8	transportasi dan pergudangan	5.597.003,0	2.719.975,7 1	6.372.815, 9	2.931. 746,5	6.920.696, 7	3.165.376,9	6.452.186,4 1	2.893.059,3 5	2.930.076,3 5	1.518.951,9 5
9	Penyediaan akomodasi dan	149.494,6	93.852,21	159.050,9	99.911,9	174.801,0	107.362,0	202.157,67	118.743,07	187.959,41	107.914,29

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

	makan minum										
10	Informasi dan komunikasi	444.219,4	459.815,45	480.487,6	491.790,8	529.306,3	527.665,4	606.812,81	575.115,29	658.822,73	625.067,08
11	Jasa keuangan dan Asuransi	244.400,5	185.581,04	261.229,3	190.868,8	273.353,9	193.816,9	287.080,08	200.336,95	293.799,14	202.547,86
12	Real Estate	156.247,6	118.295,91	164.989,1	123.015,9	176.351,5	128.640,2	194.395,32	137.229,77	197.594,63	138.767,43
13	Jasa perusahaan	12.334,6	9.963,16	12.987,2	10.252,8	13.899,1	10.727,7	15.045,48	11.404,48	15.121,66	11.252,22
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib	737.175,7	584.431,70	778.378,6	610.200,0	840.078,8	647.113,1	960.236,99	691.517,01	1.018.986,39	679.148,50
15	Jasa Pendidikan	725.032,8	518.895,23	847.757,9	567.775,2	930.838,5	614.735,8	1.046.230,07	671.235,26	1.110.491,59	708.375,78
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	87.264,9	68.923,22	95.178,9	74.864,4	105.469,8	80.342,8	115.643,28	87.430,38	126.682,06	93.565,31
17	jasa lainnya	200.981,70	142.998,92	228.280,8	152.430,2	255.701,9	164.973,6	279.288,42	179.952,17	269.355,16	168.718,46
	Total PDRB	17.521.183,33	11.693.363,44	19.205.407,5	12.346.587,0	20.639.266,9	13.026.257,9	21.287.271,95	13.350.780,76	17.941.900,08	11.939.475,18

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021



Tabel 2.6.
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Penggunaannya
Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,89	21,20	19,43	4,03	19,10	3,52	19,18	4,26	22,66	-1,76
2	Penggalian	5,87	5,71	5,87	4,24	5,83	7,32	6,32	7,52	7,42	-1,88
3	Industri pengolahan	10,76	13,27	10,15	2,71	9,59	0,58	9,34	1,48	11,19	-5,20
4	Pengadaan listrik dan gas	0,03	0,03	0,03	4,08	0,03	4,13	0,03	2,59	0,04	-3,58
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,04	0,05	0,04	4,04	0,04	3,92	0,04	9,84	0,05	-4,28
6	Konstruksi '	7,30	7,92	7,37	6,29	7,59	8,85	8,44	10,71	10,16	-0,60
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	8,48	9,89	8,31	5,41	8,31	5,18	8,92	7,00	10,53	-47,30
8	transportasi dan pergudangan	31,94	23,26	33,18	8,22	33,53	7,46	30,31	-8,60	16,33	-9,12
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,85	0,80	0,83	6,46	0,85	7,46	0,95	10,60	1,05	8,78
10	Informasi dan komunikasi	2,48	3,93	2,50	6,95	2,56	7,29	2,85	9,41	3,67	1,10
11	Jasa keuangan dan Asuransi	1,39	1,59	1,36	2,85	1,32	1,54	1,35	3,36	1,64	1,12
12	Real Estat	0,89	1,01	0,86	3,99	0,85	4,57	0,91	6,68	1,10	-1,34
13	Jasa perusahaan	0,07	0,08	0,07	2,91	0,07	4,63	0,07	6,31	0,08	-1,72
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial	4,21	5,00	4,05	4,41	4,07	6,05	4,51	6,86	5,68	5,53



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

15	Jasa Pendidikan	4,14	4,44	4,41	9,42	4,51	8,27	4,91	9,19	6,19	6,99
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,50	0,59	0,50	8,62	0,51	7,32	0,54	8,82	0,71	-6,24
17	jasa lainnya	1,15	1,22	1,19	6,60	1,24	8,23	1,31	9,08	1,50	-1,76
	Total PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

b. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7.**Laju Inflasi Year on Yearsdi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Nasional	4,0	3,61	3,13	2,72	1,68
Inflasi Provinsi Sumatera Barat	4,47	1,74	2,72	1,66	2,11
Inflasi Kota Bukittinggi	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02
Inflasi Kota Padang	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12
Inflasi Kab. Padang Pariaman	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Laju inflasi di Sumatera Barat diukur pada dua daerah yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi di Kabupaten Padang Pariaman secara spasial cenderung mengikuti laju inflasi Kota Padang, karena sebagai kabupaten penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2020 inflasi Provinsi Sumatera Barat berada diatas laju inflasi Nasional. Inflasi Kota Padang/ Kab. Padang Pariaman mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2020 yaitu 2,12 dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2019 sebesar 1,72. Secara umum, penurunan daya beli pada sektor transportasi sehingga jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Barat khususnya Kab Padang Pariaman menurun sangat Signifikan sehingga berdampak terhadap daya beli pada kelompok makanan jadi, dan minuman.

c. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per Kapita. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Selama periode 2016-2020, PDRB per kapita Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan, namun tidak halnya dengan tahun 2020 PDRB per kapita Padang Pariaman



mengalami penurunan. PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 adalah sebesar 17.941.900,08 milyar rupiah. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku sebesar 21.287.271,95 milyar rupiah, berarti turun sekitar 3.345.371,87 milyar rupiah. Turunnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi secara riil.

Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.

**Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran terhadap PDRB
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

Uraian	Distribusi	Pertumbuhan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,87	4,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,10	9,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,77	4,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	27,70	5,41
Perubahan Inventori	-0,04	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	11,61	-

Sumber: Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman didukung oleh peningkatan semua komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,42 persen dan menyumbang 50,87 persen terhadap PDRB Padang Pariaman. PMTB yang merupakan kontributor terbesar kedua tumbuh sebesar 5,41 persen. Selain itu komponen konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,19 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 4,19 persen.

Tabel 2.9.

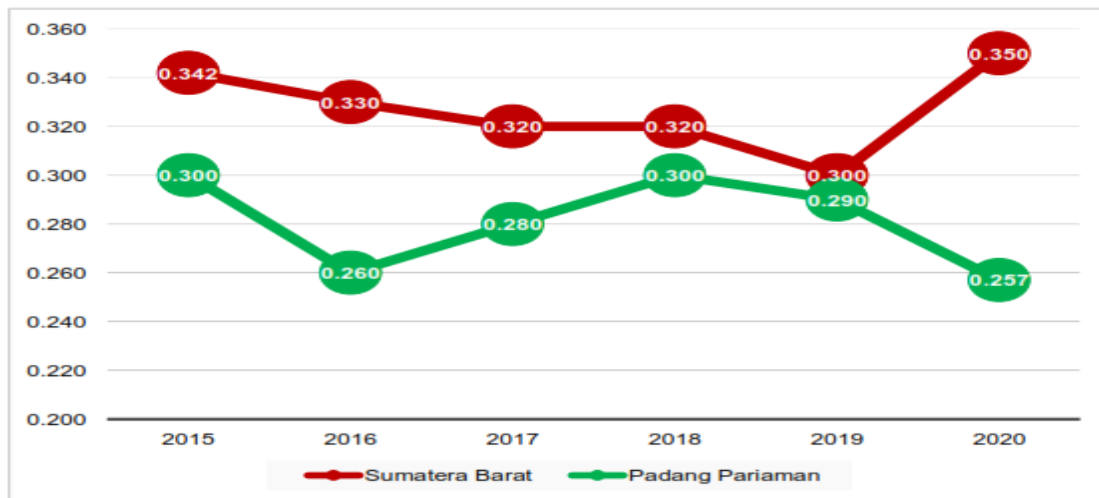
**Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	Juta Rupiah	17.532,87 3,46	19.038,37 9,57	20.441.906 ,97	21.287,27 1,95	17.941,90 0,08
PDRB ADHK	Juta Rupiah	11.697,03 9,96	12.350,18 6,95	13.024.257 ,87	13.350,78 0,76	11.939,47 5,18
PDRB/Kapita ADHB	Ribu Rupiah	42.908,37	46.321,75	49.463,57	49.364,77	42.781,67
PDRB/Kapita ADHK	Ribu Rupiah	28.626,28	30.048,90	31.514,98	30.960,20	
Penduduk	Jiwa	408.612	411.003	413.272	431.224	430.626

Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kab. Padang Pariaman, 2021

d. Indeks Gini

Salah Satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2016-2020 relatif fluktuatif dengan nilai berkisar 0,30 - 0,25 sebagaimana yang ditunjukkan gambar 2.6.

Gambar 2.6.**Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

Pada rentang tahun 2016-2020, indeks gini Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan trend fluktuatif. Nilai indeks gini mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan nilai 0,26 dan tahun 2020 dengan nilai 0,25. Kabupaten Padang Pariaman termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (nilai < 0,4). Keadaan ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Padang Pariaman, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki ekonomi rendah dan pemerataan terus menuju capaian yang maksimal.

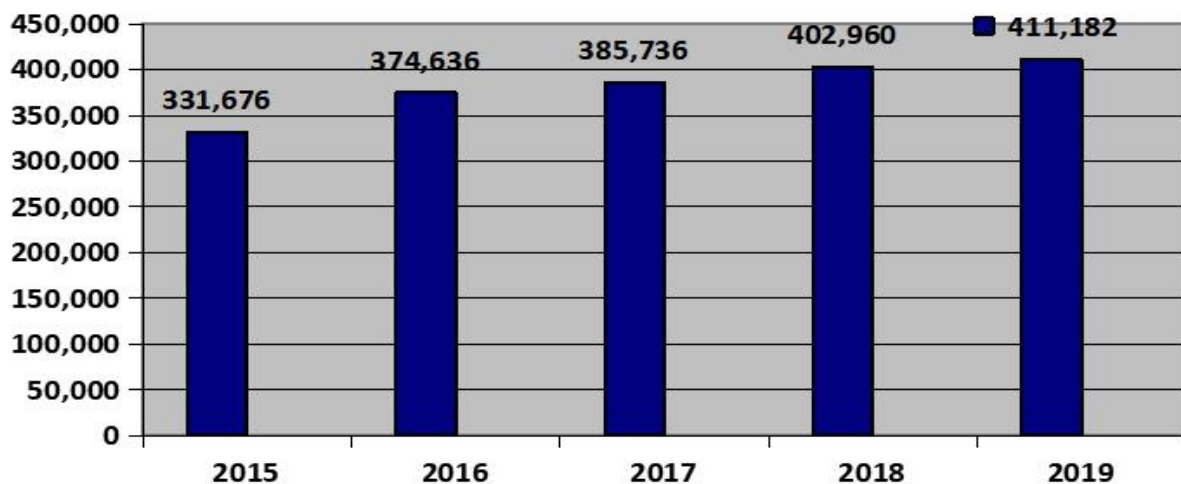
Salah satu upaya pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, pengembangan UMKM, dan peningkatan peran koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

e. Persentase penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran per bulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut ini :

Gambar 2.7.
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2015-2019



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Selanjutnya, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.10.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
2016	374.636	36,34	8,91	1,36	0,38
2017	385.736	34,70	8,46	1,13	0,23



Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
2018	402.960	33,20	8,04	1,25	0,29
2019	411.182	29,48	7,10	1,02	0,21
2020	455.463	28,98	6,95	0,67	0,11

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

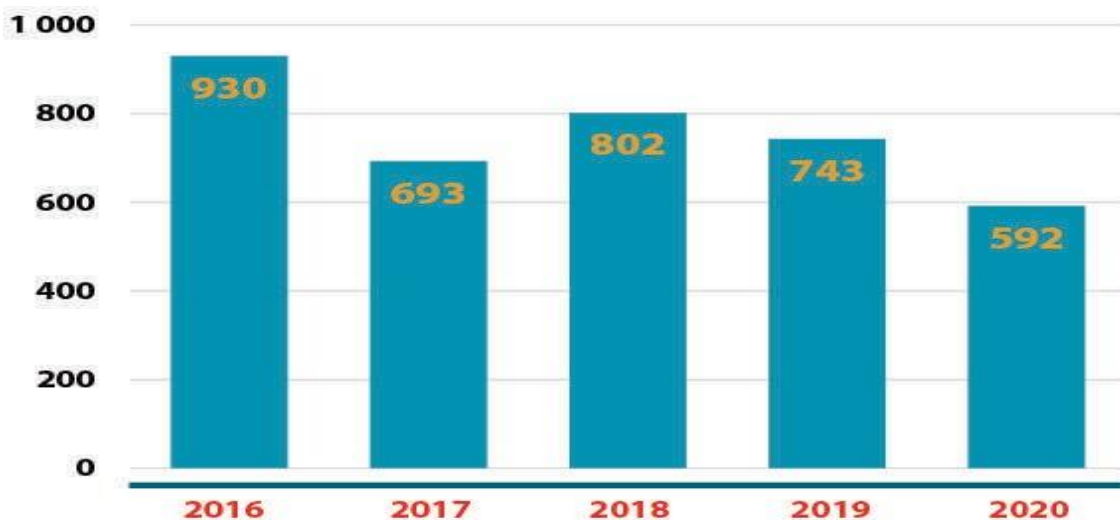
Dari gambar 2.9 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin berjumlah 6,95 persen sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan berjumlah 93,5 persen. Namun walaupun demikian, penduduk miskin masih rentan terhadap perubahan harga terutama kebutuhan pokok, biaya angkutan dan biaya kesehatan dan sebagian besar penduduk miskin tersebut berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar.

f. Angka Kriminalitas Tertangani

Letak Kabupaten Padang Pariaman yang strategis, disamping daerah penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat, juga perlintasan terhadap mobilitas dari kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu, Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada masalah kerentanan akan kriminalitas. Data statistik menunjukkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, masih bersifat fluktuatif. Berikut adalah rincian kriminalitas dan gangguan baik dari jumlah kasus maupun yang tertangani pada tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.8.

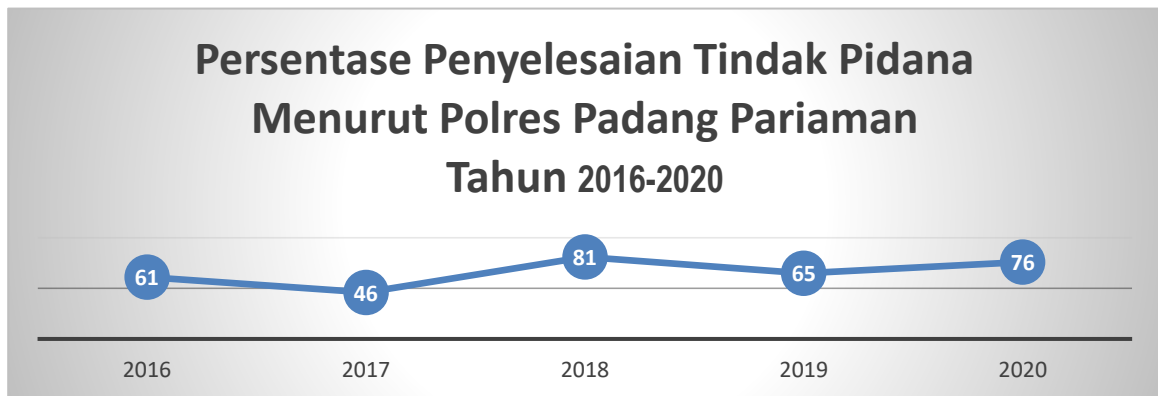
Angka Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman 2016-2020



Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Dari data olahan di atas, dapat digambarkan persentase penyelesaian tindak pidana dan gangguan di Kabupaten Padang Pariaman pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.9.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Gangguan
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020



Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021 (Data Olahan)

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah. Mulai tahun 2012 IPM dihitung menggunakan metode yang baru, mengikuti rekomendasi dari United Nations Development Programme (UNDP). Perubahan metode tersebut adalah pada penggunaan variabel rata-rata lama sekolah serta rata-rata indeksnya dihitung dengan rata-rata geometrik.

Perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini :



Tabel 2.11.

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

IPM	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
Provinsi Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Data BPS di atas, menunjukkan bahwa nilai IPM di Kabupaten Padang Pariaman di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, memang diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan dan ditunjang dengan pendapatan per kapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memperpanjang angka harapan hidup, meningkatkan angka melek huruf, memperpanjang angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan perkapita.

a. Angka Melek Huruf

Tabel 2.12.

**Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Pariaman	93,50	98,31	98,00	98,3	99,48
Provinsi Sumatera Barat	98,81	98,85	N/A	99,22	N/A

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan perbaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 yaitu 99,48 persen hal ini menunjukkan bahwa masyarakat padang pariaman berusia 15 tahun keatas yang masih belum bisa tulis baca adalah sebanyak 0,52% . Ini menandakan bahwa masyarakat padang pariaman berusia 15 tahun ke atas sudah meningkat dalam kemampuan baca tulis.

b. Angka Rata-Rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukan perbaikan. Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-

rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan yang relatif baik untuk angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13.**Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)	2020 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87
Provinsi Sumatera Barat	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Dari tabel 2.13 di atas dapat dijelaskan bahwa, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2016-2020, rata-rata lama sekolah berada di 7 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa di program belajar 9 tahun akan masih dioptimalkan.

c. Rata-Rata Harapan Lama Sekolah**Tabel 2.14.****Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)	2020 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67
Provinsi Sumatera Barat	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Dari tabel 2.14 di atas dapat dijelaskan bahwa, angka rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2016-2020 rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan peningkatan.

d. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka



Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15.

**Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)	2020 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79
Provinsi Sumatera Barat	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Dari tabel 2.15 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat. Ini menandakan adanya perbaikan status social ekonomi dan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

e. Daya beli Masyarakat

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda, semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir daya beli masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS sebagaimana tabel 2.16 di bawah ini :

Tabel 2.16.**Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Pariaman	10.455	10.579	10.919	11.158	N/A
Provinsi Sumatera Barat	10.126	10.306	10.638	10.925	N/A

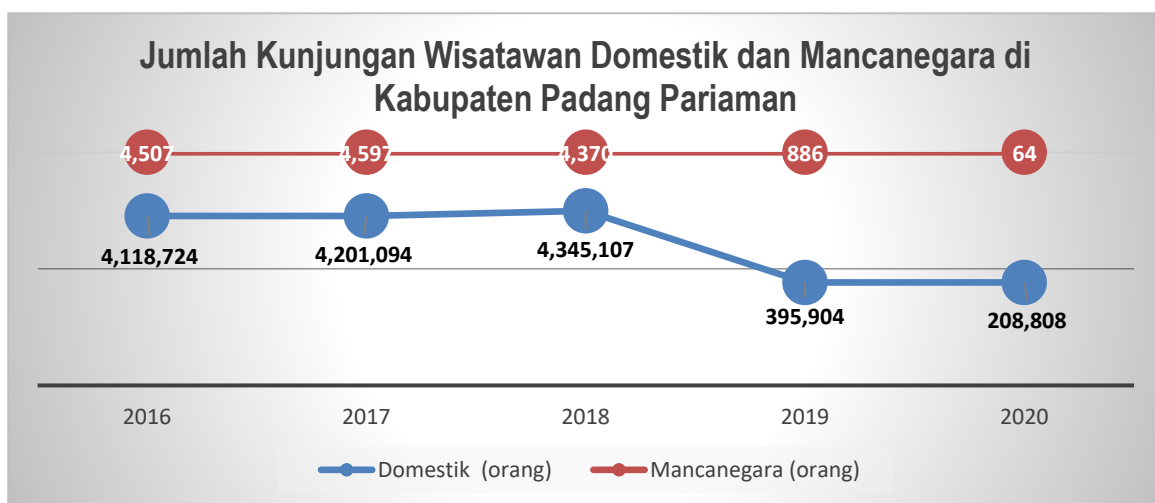
Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Dari tabel 2.16 di atas dapat dilihat bahwa kemampuan daya beli masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp. 10.579 juta per unit barangnya. Selama tahun 2016-2019, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, selalu berada di atas rata-rata daya beli masyarakat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan yang penting. Salah satu kinerja pengembangan seni dan budaya berdampak terhadap kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2020, terdapat 93 jumlah objek wisata yang terdiri dari, destinasi wisata alam dari 33, destinasi wisata budaya 3, destinasi wisata sejarah 38, destinasi wisata pantai 10, dan destinasi wisata minat khusus 9.

Selanjutnya selama kurun waktu 2 tahun terakhir, terjadi penurunan terhadap kunjungan jumlah wisatawan di Kabupaten Padang pariaman. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.10 di bawah ini :

Gambar 2.10.**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2021

Terjadinya Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara disebabkan oleh faktor transportasi udara dimana pada tahun 2019 dan 2020 naiknya harga tiket pesawat udara dan pandemic covid-19.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik yang berkualitas masih menjadi kendala bagi pemerintah karena berbagai hambatan-hambatan baik dari segi sikap, perilaku dan mentalitas SDM dalam hal ini PNS sebagai aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan melayani dan bukan untuk dilayani. Sekaligus berupaya mempertahankan dukungan, kepercayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan mengevaluasi kinerja sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya-upaya menuju peningkatan kualitas pelayanan tersebut dengan memahami: unsur-unsur dan jenis pelayanan publik, kegiatan pelayanan, penyelenggaraan publik, azas, prinsip, standar pelayanan publik, kualitas dan dimensi pelayanan agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami formulasi aspek-aspek pelayanan publik diharapkan pegawai sebagai aparatur negara dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dalam hal pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas.

Unit pelayanan yang menjadi sampel pada survey indeks kepuasan masyarakat ini dari tahun 2018 -2019 adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di Tahun 2020 ada penambahan sampel yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat masing-masing unit pelayanan diatas dapat kita lihat pada tabel 2.17 berikut ini :

Tabel 2.17.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lima Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No	Unit Pelayanan	2018			2019			2020		
		Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,01	B	Baik	86,27	B	Baik	90,42	A	Sangat Baik
2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	77,24	B	Baik	80,27	B	Baik	88,52	A	Sangat Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah	76,97	B	Baik	82,41	B	Baik	86,50	B	Baik
4	Perusahaan Daerah Air Minum	76,69	B	Baik	74,81	C	Kurang Baik	77,24	B	Baik
5	Badan Kepegawaian Daerah	70,22	C	Kurang Baik	78,90	B	Baik	78,15	B	Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	76,60	C	Kurang Baik	79,15	B	Baik
7	Dinas Sosail Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							75,09	C	Kurang Baik
	Rata-rata	76,83			79,88			82,15		

Sumber: Hasil Executive Report Bagian Organisasi dan PAN, 2021

Nilai survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 dengan sampel unit pelayanan tersebut memperoleh nilai rata-rata 82,15 dengan kategori B. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada urusan konkuren pemerintahan terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 8 urusan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari delapan belas urusan, dan urusan pemerintahan pilihan terdiri sebagaimana dijelaskan dibawah ini.



2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Adapun perkembangan pelayanan urusan Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18.

Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PENDIDIKAN					
Pendidikan dasar:					
Angka partisipasi sekolah	99,23	99,87	94,40	98,73	94,55
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	63,47	210,90	131	170	170
Rasio guru/murid	13,19	20,01	13,14	7,27	16,80
Fasilitas Pendidikan:					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	95,36	97,00	90,47	95,25	84,22
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	80,83	86,00	82,61	88,48	89,08
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):					
Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA	8.773	8.240	9.665	8.448	4.643
Angka melek huruf	93,50	98,31	98,00	98,3	99,48
Angka rata-rata lama sekolah	8,50	8,40	7,50	7,86	7,87

Sumber: *Disdikbud Kab. Pd. Pariaman 2021*



Dari tabel 2.16 diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah dasar pada tahun 2020 sebanyak 94,55 %, menurun dari tahun 2019, dengan rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah tetap yaitu 170, rasio guru/murid sebesar 16,80. Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar pada tahun 2020 untuk kelompok usia 7 hingga 12 tahun sebesar 99,84% dan umur 13 hingga 15 tahun sebesar 97,98% angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 97,63 % pada tahun 2019, dengan rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah naik sebesar 170. Sedangkan fasilitas pendidikan untuk sekolah pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik sebesar 84,22 %, Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik sebesar 89,08 %. Angka Melek huruf mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 99,48%.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Pendidikan anak tidak hanya tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA, namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun), bahkan balita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini akan sangar berpengaruh saat mereka dewasa nantinya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada tingkat dasar, APS merupakan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar 7-12 tahun atau setara SD dan usia 13-15 tahun atau setara SMP yang sedang bersekolah di SD dan SMP per 1.000 jumlah penduduk usia SD dan SMP. Berikut adalah tabell 2.19 gambaran APS pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2020:



Tabel 2.19.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016-2020

Kelompok Usia	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidikan Dasar					
7-12 tahun	99,44	99,87	99,49	99,83	99,84
13-15 tahun	96,95	98,30	98,52	97,63	97,98

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa APS untuk pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2020 relatif mengalami peningkatan dari tahun 2019 pada anak usia 7-12 tahun. Untuk anak pada usia 13-15 tahun juga mengalami peningkatan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan, pada anak dengan rentang usia 7-12 tahun keinginan dari masyarakat penduduk Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan pendidikan dan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan selalu meningkat setiap tahunnya.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, ditampilkan melalui tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20.

Perkembangan APM Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka Partisipasi Murni					
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	87,83	87,71	101,42	67,2	87,24

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan, 2021

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan dasar Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 sebesar 87,24 %. APM untuk pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman relatif berfluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2016-2020. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini:

Tabel 2.21.
Perkembangan APK
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka partisipasi kasar					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,39	101,29	116,45	95,70	100,08
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90	74,1	115,44	67,77	87,12

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan, 2021

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mencapai 100,08 % dan ditingkat SMP/MTS yaitu 87,12 % pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa APK untuk pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penurunan. Khusus untuk APK tingkat pendidikan dasar dan di tahun 2020 mengalami kenaikan 100,08%, hal ini menunjukkan bahwa adanya Siswa yang rentang umurnya melebihi standart umur untuk menempuh tingkat pendidikan dimaksud tapi masih menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan masih tinggi walaupun ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kemudahan mendapat akses pendidikan ditingkat dasar.

4) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar, pemerintah kabupaten Padang Pariaman senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah seperti yang tertera dalam tabel 2.22 berikut ini :



Tabel 2.22.

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah Tahun 2019-2020

Kelompok Usia	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah
Pendidikan Dasar (Usia 7-15)	498	79.542	1:160	409	76.073	1:186

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel 2.22 diatas memperlihatkan Tahun 2020 Rasio Ketersediaan sekolah Pendidikan dasar sebesar 186 yang berarti 186 sekolah tingkat pendidikan dasar tersedia untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman.

5) Rasio Guru Terhadap Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap muridnya pada jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel 2.23 di bawah ini :

Tabel 2.23.

Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019-2020

Kelompok Usia	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid
Pendidikan Dasar	3.484	49.767	14,28	4.034	49.238	12,21

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Dari tabel 2.23 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 pada pendidikan dasar, satu orang guru mendidik 12 sampai 13 murid. Padahal sesuai dengan PP 74 tahun 2008 tentang Guru, untuk TK, RA, atau yang sederajat memiliki rasio 15:1; untuk SD atau yang sederajat 20:1; untuk

MI atau yang sederajat 15:1; untuk SMP atau yang sederajat 20:1; untuk MTs atau yang sederajat 15:1. Hal ini membuktikan kita di Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan tambahan tenaga pendidik disamping masih belum adanya pemerataan Guru di tiap daerah.

6) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Persyaratan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Berikut tabel 2.24 mengenai perkembangan persentase Guru tingkat pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.24.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,23	94,00	91,88	93,21	93,55

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel 2.24 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 93,55. Hal ini menunjukkan bahwa mutu guru di Kabupaten Padang Pariaman yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 akan tetapi masih perlu ditingkatkan fungsi UKG sebagai salah satu syarat untuk mengukur kualitas guru serta memaksimalkan fungsi LPTK di daerah.

7) Angka Kelulusan Sekolah (AL)

Angka Kelulusan Sekolah (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS) juga mempengaruhi nilai IPM. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi



penyebab dari ketidak tercapaiannya rata-rata lama sekolah selama 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Untuk angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini :

Tabel 2.25.

Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka Kelulusan:					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,95	100	99,61	100	100,06
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86	99,89	98,10	98,20	87,49
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	70,85	99,50	98,40	93,20	82,26
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,00	94	91,88	93,21	93,55

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel 2.25 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 Angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup tinggi. Dimana pada tahun 2020 angka kelulusan (AL) SD/MI yaitu 100,06% mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu di angka 100%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs yaitu 87,49% di tahun 2020, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 98,20%. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik disamping faktor lain yang mendukung capaian dimaksud.

8) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator untuk menilai kinerja pendidikan yaitu angka putus sekolah adalah jumlah siswa yang *drop out* dibandingkan dengan seluruh siswa yang ada di sekolah.

Tabel 2.26.

Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka Putus Sekolah:					
Angka Putus Sekolah (APS)	0,03	0,12	0,10	0	0,51



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
SD/MI					
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,08	0,16	0,76	0,8	1,8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel 2.26 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 angka putus sekolah di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman sudah baik, hal ini karena ada beberapa faktor-faktor yang mendukung masyarakat untuk dapat tetap menerima layanan pendidikan seperti adanya program beasiswa yang diberikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Permasalahan yang sering kali dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal sesuai dengan SPM kesehatan serta pemerataan dan perluasan kesempatan kerja belum memenuhi target. Adapun perkembangan pelayanan urusan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut ini.

Tabel 2.27.
Perkembangan Kinerja Daerah Bidang Kesehatan
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KESEHATAN					
Rasio posyandu per satuan balita x 1000	22,41	22,88	19,86	19,12	1,99
Rasio puskesmas per satuan penduduk x 1000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rasio pustu per satuan penduduk x 1000	0,18	0,165	0,19	0,19	0,20
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Jumlah Seluruh Rumah Tangga	60	62,49	66,5	71,86	71,95
Persentase Rumah tangga Bersanitasi Layak	63,7	66,61	63,15	61,66	99,79
Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000	0,14	0,1460	0,174	0,21	0,22
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	0,07	0,08	0,152	0,122	0,079
Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	0,9	1,1	0,561	1,23	1,61
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	94,78	100,83	99,16	102,72	88,5
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	78,52	86	89,67	96	69,0



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
kebidanan (%)					
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	76,4	87,05	82,8	82,6	27,5
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	74,6	74,7	74	85,9	21,3
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	132	37
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan jamkesmas dan jemkesda	86,19	82,67	54,1	73,8	74,99
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	89,06	99,27	99,3	95,00	95
Cakupan kunjungan bayi (%)	95.02	95,02	92,71	98,9	91,3
Cakupan puskesmas (%)	142.36	143,36	143,53	143,53	143,53
Cakupan pembantu puskesmas (%)	38.58	39,08	39,08	39,08	39,08
Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%	0,03	3,5	3,1	1,26	0,15
Waktu Tunggu	30 menit	20	50	15	15



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
pasien di rawat jalan ≤ 60 menit					
Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	0,05	22,9	6	2,95	0,3
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	70	70	70	80	85
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥90%)	90	90	90	90	95
Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l, COD <80 mg/l, TSS < 30 mg/l dan PH 6 -9) mencapai (100%)	100	100	100	100	100
Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% - 85%)	0,36	29,24	55	62,69	49,44

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

1) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan [embangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup : kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana; imunisasi; gizi; serta

pengecahan dan penanggulangan diare. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama : bayi dan anak balita; ibu hamil; ibu nifas; dan ibu menyusui; pasangan usia subur serta pengasuhan anak.

Salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian dan kematian anak balita adalah dengan melakukan pemeliharaan kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan anak balita dititikberatkan kepada upaya pencegahan peningkatan kesehatan dan pada pengobatan dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan anak balita ini dapat dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, polindes terutama di posyandu. Untuk rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini:

Tabel 2.28.

**Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	22,41	22,88	24,36	19,12	48

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 Rasio Posyandu persatuan Balita mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2019 yaitu 48 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 posyandu melayani 48 orang balita dari 1000 balita yang ada. Hal ini masih dirasa sangat jauh dari kondisi ideal mengingat pentingnya peran posyandu dalam menyiapkan generasi yang berkualitas. Untuk diadakan Revitalisasi Posyandu dimasa yang akan datang.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan diantaranya ditunjukkan dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKHB, Angka Kematian Bayi AKB dan Angka Kematian Balita AKABA. AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah sebesar 86,6 Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 99,961. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.29 di bawah ini:

Tabel 2.29.

**Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka kelangsungan hidup bayi	993.11	998,23	993.00	999,961	86,6
Angka usia harapan hidup	69.55	67,98	69,76	69,87	68,79
Persentase gizi buruk dan Gizi kurang	10.01	11,6	9,8	9,34	10,3%
Persentase Cakupan Pelayanan gizi buruk	100.00	100,00	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun perkembangan angka usia harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30.

**Angka Usia Harapan Hidup
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	4	5	6	7	7
Angka usia harapan hidup	69.55	67,98	69,76	69,87	68,79
Persentase gizi buruk dan Gizi kurang	11,00	10.01	9,8	9,34	10,3%
Persentase Cakupan Pelayanan gizi buruk	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dari tabel 2.28 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 Angka usia harapan hidup menunjukkan penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 68,79. Hal perlu perhatian khusus dari pemerintah,



khususnya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang harus terus meningkat dari tahun ke tahun.

c. Pekerjaan Umum

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 Tahun 2014 urusan wajib /pelayanan dasar PU yaitu Sumber daya air/ pengairan (bidang infrastruktur pengairan/irigasi, termasuk operasional/pemeliharaan), Jalan dan Jembatan (Bidang infrastuktur jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan), Cipta Karya (Bidang Infrastruktur jaringan air bersih/ air minum, sanitasi/MCK, Bangunan Gedung, Drainase, dan Jalan Lingkung) dan Penataan Ruang (Bidang Perencanaan/ Pengendalian Ruang Kawasan).

Jalan merupakan faktor pendukung utama pembangunan, baik pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya maupun infrastruktur lain. Sampai dengan tahun 2019 terdapat panjang jalan 2.251,74 Km yang terdiri dari jalan Negara 83,57Km, jalan Provinsi 95,77 Km, jalan Kabupaten 2.072,4 Km.

Sejak tahun 2019 dalam rangka mengantisipasi perkembangan volume lalu lintas yang ditandai dengan bertambah padatnya arus lalu lintas pada jalur jalan Negara Padang- Bukittinggi setiap tahunnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merintis pembangunan jalan lingkaran dari Duku - Sicincin dan Sicincin - Malalak, serta pembangunan jalan Tol Padang - Pekan Baru. Dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas Ibu Kota Kabupaten - Kota Pariaman – Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maka dilakukan pelebaran jalan terutama dari Pakandangan menuju Sicincin dan Pasar Usang menuju Bandara Internasional Minangkabau. Disamping itu untuk meningkatkan lingkungan permukiman yang tertata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan termasuk saluran lingkungannya.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2016 s/d 2020 dapat terlihat dari tabel 2.31 dibawah ini :

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PEKERJAAN UMUM					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	45,36	46,71	62,28	63,68	67,00
Panjang jalan dilalui Roda 4	1855,5 Km	1878 Km	1878 Km	1.878 Km	1.666,00
Persentase Jalan Mantap (%)	57,75	59,47	62,28	63,68	64,28
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40)KM/Jam)	893,40 Km	968,02 Km	1053,75 Km	1274,06 Km	701,70
Rasio Jaringan Irigasi (%)	40,13	43,00	47,12	55,26	85,37
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	39,35	42,45	62,84	65,98	75,00
Panjang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (M)	52,00	55,00	55,10	55,10	2.417,28
Persentase Gedung Kantor yang terbangun di kawasan Ibukota Kabupaten	0,38	0,46	0,56	0,57	0,57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Dari Tabel 2.43 diatas menunjukkan bahwa kecendrungan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sebesar 63,68% sampai tahun 2020 sebesar 67,00%, naik sebesar 3,32%.

b. Panjang Jalan Dilalui Roda 4

Panjang jalan dilalui roda 4 terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, minus sebesar 212 Km karena tingkat kerusakan lebih tinggi dari tingkat perbaikan/pembangunan.

c. Persentase Jalan Mantap

Persentase jalan mantap mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sebesar 62,28% sampai tahun 2020 sebesar 67%



d. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/jam)

Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/jam) mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 893,40 Km dan tahun 2019 mencapai 1.274,06 Km. Tetapi di tahun 2020 jauh mengalami penurunan yaitu 701,70 Km

e. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi merupakan perbandingan antara panjang jaringan irigasi dengan luas area persawahan yang diairi, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan di tahun 2020 yaitu sebesar 85,37%

f. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Luas irigasi dalam kondisi baik terjadi peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 9,02%.

g. Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

Panjang drainase dalam kondisi baik tidak terjadi peningkatan antara tahun 2019 dengan tahun 2020.

h. Persentase Gedung Kantor yang Terbangun di Kawasan Ibukota Kabupaten

Gedung kantor yang terbangun di Kawasan Ibukota Kabupaten dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu Gedung Kantor Dinas PUPR, Gedung Kantor Bapelitbangda/BKPSDM, Masjid Raya Padang Pariaman dan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD. Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,17 persen.

d. Perumahan

Urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan perumahan, baik melalui swasta, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasrat masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan atau menempati rumah layak huni dalam lingkungan

yang sehat merupakan sasaran dan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dengan dianggarkannya melalui dana APBD untuk membantu pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2016 s/d 2020. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semakin besar lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik.

Pada tabel 2.32 berikut ini dapat dilihat perkembangan perumahan masyarakat yang menggunakan, listrik dan rumah layak huni.

Tabel 2.32.**Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERUMAHAN					
Persentase rumah tangga pengguna listrik	93,01	95,60	99,07	99,09	99,11
Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	3.996,15	3.996,15	3.996,15	886,77	886,85
Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	20	22	24	26	27
Rasio rumah layak huni (%)	58,7	60,1	62,3	65,5	63,1
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	60	62,49	66,5	71,86	71,95
Terbangunnya jaringan air bersih (%)	40,13	43,00	47,12	55,26	66,7
Rumah tangga bersanitasi layak (%)	59	60,7	62,67	63,26	63,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas LHPKPP, 2021

Dari Tabel 2.30 diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2016 s/d tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 cakupan rumah tangga pengguna listrik sebesar 93,01 % hingga pada tahun 2020 sudah mencapai 99,11 %, terjadi kenaikan rata-rata sebesar 2,94%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan Kawasan kumuh

sebesar 0,08 Ha. Sedangkan luas pemukiman yang tertata terjadi peningkatan sebesar 2% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

e. Penataan Ruang

Urusan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan penataan ruang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib.

Tabel 2.33.

**Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PENATAAN RUANG					
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	895	905	895	905	943,99
Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan	143	125	143	125	55,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Dari tabel 2.33 diatas menunjukkan bahwa Rasio Luas Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dimana pada tahun 2019 adalah 905 dan terus meningkat tiap tahun hingga pada akhir 2020 adalah 943,99. Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan dilihat dari tabel mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 sebesar 143.

f. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan merupakan embrio dari semua pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun



rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal yang dalam pelaksanaannya menggunakan 5 pendekatan yaitu ; teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimana prioritas pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan dengan mewujudkan sistem perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggalan gagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkan Good Governance.

Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan perencanaan masih terdapat kendala dan permasalahan, yaitu: belum efektifitasnya koordinasi dan hasil perencanaan pembangunan daerah; belum seimbangny perencanaan sosial budaya dengan perencanaan ekonomi maupun prasarana perwilayahan sumberdaya alam; belum efektifitasnya pelaksanaan musrenbang; dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mendukung proses perencanaan.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dimana Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan RPJMD Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan periode ketiga dari RPJPD. Sementara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini ukuran capaian kinerja perencanaan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Fungsi Penunjang Urusan perencanaan pada daerah tersebut, baik dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.Adapun dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2.34.

**Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2016 - 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	3	4	5	6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah	1	1	1	1	Ada



ditetapkan dgn PERDA					
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	2	2	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	1	1	1	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	97,61	98,6	100	100	93,00
Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	75	80	85	93	93,00
Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD	90	92	95	93	93,00
Peningkatan Kualitas SDM perencanaan	77	79	80	80	85,00

Sumber: Bapelitbangda 2021

Pada urusan Perencanaan Pembangunan rata-rata pencapaian kinerja tetap stabil sesuai indikator yang diukur, namun sinkronisasi antara Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD terjadi peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 hanya 80 % dan tahun 2019 menjadi 90,38 %. Hal ini berarti dalam penyusunan RKPD sudah mengacu pada RPJMD.

g. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana di Kabupaten Padang Pariaman penekanan pelayanannya mulai tahun 2016 s/d 2020 hanya pada layanan transportasi darat menyangkut layanan angkutan jalan raya. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini juga didorong oleh kestrategisan letak Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan jalur lalu lintas jalan negara yang dilalui oleh Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), disamping Angkutan Desa dan Angkutan Kota lainnya. Guna mendukung kelancaran angkutan tersebut penyediaan terminal orang dan terminal barang yang layak serta kondisi jalan yang baik yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang memadai merupakan suatu keharusan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Padang Pariaman. Adapun perkembangan pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERHUBUNGAN					
Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.932.364,45	5.178.951,02	5.204.846	5.803.000	5.995.318
Rasio izin trayek	27	38	38	48	17
Jumlah uji keur angkutan umum	5.266	5.433	6.309	5.510	4.093
Jumlah Terminal Bis	2	2	3	2	2
Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	3
Jumlah Bandar Udara (Bandara)	1	1	1	1	1
Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	15,00	16	16	16,7	17,2
Kepemilikan KIR angkutan umum	2.634	2700	2.132	2.800	3.282
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan berlaku selama 6 bulan	1	1	1	1	20
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	53,500	53,500	53.500	53.500	53.500
Pemasangan Rambu-rambu	325	445	558	900	975

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Dari tabel 2.33 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum terjadi peningkatan dari 5.803.000 pada tahun 2019 meningkat menjadi 5.995.318 pada tahun 2020. Jumlah angkutan umum yang mengurus izin keur sebanyak 4.093, kendaraan turun daripada tahun 2019 sebanyak 5.510 pelaksanaan uji keur kendaraan 2 x setahun (1 x enam bulan). Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas pada tahun 2020

bertambah menjadi 975 Unit dari 800 pada tahun 2019. Terminal yang ada di Padang Pariaman yang dikategorikan type C ada 3 yaitu : Terminal kasang, Terminal Sicincin dan terminal sungai limau.

Disamping perhubungan angkutan jalan raya sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 sudah ditunjang dengan adanya pelabuhan udara Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) yang berefek sangat signifikan terhadap kenaikan PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tahun 2020 PDRB Kabupaten Padang Pariaman turun sangat signifikan yang dipengaruhi PDRB pada jenis lapangan usaha transportasi dan pergudangan karena dipengaruhi lemahnya penumpang angkutan udara. Dalam rangka pengembangan urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun-tahun mendatang sedang diupayakan pembangunan jalur perhubungan laut dengan pembangunan Dermaga di Pantai Tiram Kecamatan Ulakan Tapakis.

h. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup yang terkait dalam hal ini adalah Penanganan Persampahan, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, Penanganan Pencemaran Air, Pengawasan AMDAL dan UKL-UPL dan Penanganan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.36 dibawah ini:

Tabel 2.36.

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase penanganan sampah	40,50	43,00	44,95	60,85	55,9
Pencemaran status mutu air yang ditangani	71,43%	80,33%	81,17%	82,83%	N/A
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan UKL-UPL	37,93%	34%	30%	28%	31%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	78,54	78,91	78,8	79,37	75,77
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara	48	48	48	48	48



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	47,6	48,7	49,8	55,42
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	86	97,83	97,83	94,42	93,32
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	47,6	48,7	49,8	55,42
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	86	97,83	97,83	94,42	93,32
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	35	37	46	48,78	48

Sumber : DLHPKPP Kab Padang pariaman Tahun 2021

i. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem



memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Adapun perkembangan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini.

Tabel 2.37.

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
Persentase kepemilikan KTP elektronik	79	80,00	95	98	98,68
Persentas kepemilikan akte kelahiran	65	71,00	83,03	87,14	91,73
persentase penerbitan akta kematian	100	78,00	77,00	100	100
persentase ketersediaan elemen data per NIK pada database	83	80	80	80	85



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
kependudukan					
IKM (indeks kepuasan masyarakat)	B	B	B	B	A

Sumber :Disdukcapil 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KTP elektronik tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 98% menjadi 98,68%. Angka dimaksud menunjukkan masyarakat diusia > 17 tahun atau sudah menikah hampir semuanya sudah memiliki KTP. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki KTP.Hal ini juga didukung dengan Data Kepemilikan KK dan Akta Catatan Sipil yang sudah mendekati dan mencapai 100%.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Inpres No.9 Tahun 2000, PUG didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dan kebutuhan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran dari semua kebijakan, program dan kegiatan disemua bidang kehidupan. dan juga melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan perbedaan permasalahan-permasalahan, pengalaman-pengalaman. Untuk memperkuat Inpres No. 9 tahun 2000 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Dalam Kep.Mendagri ini, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga Kelurahan/Desa.Demikian pula dalam rangka menjalankan fungsi keluarga yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan hak dan martabatnya diterbitkan undang undang perlindungan anak.Perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2, UU No 23/2002).Adapun perkembangan pelayanan Urusan



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,12	8,50	6,62	14,28	14,28%
Rasio KDRT	2:1000	2:1000	0	0	2:1000
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	20 orang	28 orang	18 orang	26 orang	26 orang

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

Dari tabel 2.36 di atas dapat dilihat bahwa Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah sudah tinggi. Artinya dari segi jumlah keterwakilan wanita dalam Pemerintahan tahun 2020 sebesar 14,28%. Untuk Rasio KDRT di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yaitu 2:1000. Akan tetapi angka tersebut masih belum bisa menjadi patokan pasti bahwa kejadian KDRT sudah berkurang, hal ini masih kejadian yang laporannya sudah sampai pada P2TP2A sedangkan kemungkinan masih ada kejadian yang tidak terdeteksi. Begitu juga dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016 walaupun tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu masih perlu sosialisasi tentang aturan-aturan yang mengatur tentang KDRT seperti Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 52 tahun 2009 (tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya pendewasaan usia perkawinan, upaya pengaturan kelahiran, upaya pembinaan ketahanan keluarga, dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Adapun perkembangan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini.

Tabel 2.39.

**Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,6	2,59	2,48	2,46	1,19
Rasio akseptor KB (%)	64,00	64,38	66,10	95,07	65,56
Cakupan peserta KB aktif (%)	64,00	64,38	66,10	95,97	65,56
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	32,00	27,52	25,42	23,46	23,64

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Dari tabel 2.37 diatas Indikator Capaian Indikator Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga tahun 2020 adalah 1,19 dari target 2,20 yang telah ditetapkan , capaian ini melebihi dari target yang direncanakan hal ini disebabkan karena adanya Kepala Keluarga yang tidak mempunyai anak yang kurang dari 19 tahun dalam keluarganya. Capaian Indikator Ratio Akseptor KB tahun 2020 adalah 65,56 % dari target 64% yang ditetapkan, capaian ini melebihi dari target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena PUS sebahagian besar menggunakan alat kotrasepsi non MKJP (suntik, pil dan kondom) sedangkan alat kontrasepsi MKJP memang tidak mencapai target karena adanya pandemic COVID-19 sehingga mengalami kendala adanya keterbatasan dalam pengumpulan masyarakat untuk memberikan penyuluha KB, pelayanan KB di klinik Kb, dan Pelayanan Pemasangan alat kontrasepsi di Puskesmas dan Rumah Sakit. Capaian Indikator Ratio Akseptor KB tahun 2020 adalah 65,56 % dari target 64% yang ditetapkan, capaian ini melebihi dari target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena PUS sebahagian besar menggunakan alat kotrasepsi non MKJP (suntik, pil dan kondom) sedangkan alat kontrasepsi MKJP memang tidak mencapai target karena adanya pandemic COVID-19 sehingga mengalami kendala adanya keterbatasan dalam pengumpulan masyarakat untuk memberikan penyuluha KB, pelayanan KB di klinik Kb, dan Pelayanan Pemasangan alat kontrasepsi di Puskesmas dan Rumah Sakit .Capaian Indikator Kelurga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 tahun 2020 adalah 0 % dari target 24 % yang ditetapkan, capaian ini tidak ada data dan tidak bisa disampaikan karena sesuai dengan permendagri 86

tahun 2017 indikator ini bukan kewenangan lagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman .

I. Urusan Sosial

Yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal, atau definisi masalah sosial yaitu keditaksesuaian unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelomok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada didalam kehidupan. Objek dari penyandang masalah ini disebut sebagai Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun perkembangan Urusan Sosial Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.40.

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
SOSIAL					
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13	7	7	7	7
PMKS yg memperoleh bantuan social	85.01	1.360	42,351	37,089	29,05
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	85.01	1.360	42,351	37,089	29,05

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Dari tabel 2.38 diatas dapat dilihat bahwa PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 hanya sebesar 29,05% turun dibandingkan dari tahun 2019 sebesar 37.08% ini dikarenakan pemotongan anggaran akibat terjadinya pandemic Covid-19. Sementara target yang harus dicapai sebesar 85,05% hal menjadi tanggung jawab yang besar bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 hanya sebesar 29.05% mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2019 sebesar 37.08%. Masalah penurunan yang



terjadi disebabkan pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

m. Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas kelembagaan, prodng wajar dan peningkatan kinerja dinas. Isu strategis dalam urusan tenaga di kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran dan pencari kerja, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Padang Pariaman sebagai dampak ekonomi serta perlunya program pelatihan bagi pencari kerja untuk menciptakan wirahusaha baru. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem informasi pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, kurangnya kompetensi pencari kerja serta masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pencari kerja. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaian masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan kenyamanan berusaha. Adapun

perkembangan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut ini :

Tabel 2.41.**Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KETENAGAKERJAAN					
Angka partisipasi angkatan kerja	70,91	64,51	67,58	48,90	52,25
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	121,74	69,57	40	6	8
Tingkat partisipasi angkatan kerja	1,5	1,6	2,56	2,65	1,85
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	38,02	60,02	65	65	5,10
Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,56	7,25	7,15	5,97	5,97
Keselamatan dan perlindungan (%)	58,26	58,26	50	58,25	57,7
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Tahun 2021

Dari tabel 2.39 diatas dapat dilihat bahwa Angka partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 52,25 % dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 48,90%. Hal ini memberikan gambaran tentang penduduk Padang Pariaman yang masih belum aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari tahun 2020. Dari segi iklim ketenagakerjaan kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 yaitu 8% jika dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 6%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 yaitu 5,97%. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah mengalami peningkatan.

n. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, namun sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Ada 3 indikator kinerja daerah yang diukur disini seperti ; keaktifan koperasi,

jumlah UMKM dan jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom yang dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut ini :

Tabel 2.42.

**Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
Persentase koperasi aktif	75,75	60,65	75	40	75,51
Jumlah UMKM	11.579	11.656	13.061	12.936	38.050
Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	51	51	31	31	50

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

Angka pengangguran terbuka merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah 5,97 persen. Realisasi tingkat pengangguran ini mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 7,68 persen dengan persentase capaian 122,26 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka pengangguran masuk kategori “Berhasil”. Angka pengangguran terbuka tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2019 tidak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruhnya dengan terjadinya pandemic covid-19 di tahun 2020.

Dari segi iklim ketenagakerjaan boleh dikatakan tidak terjadi kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini dapat dilihat pada Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak ada pada tahun 2020 dan tahun 2019. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah sesuai para pekerja dengan dunia lapangan usaha.

o. Urusan Penanaman Modal

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks

pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.43.**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	45	45	52	73	117
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	145	183	192,2	53,2	1330,3
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	100	100	70,87	75,28	100
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.700	1.983	-	2.577	3039

Sumber :Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, 2021

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Pada tahun 2016 berjumlah 45, tahun 2017 tetap 45, tahun 2018 berjumlah 52, tahun 2019 berjumlah 73 sedangkan tahun 2020 meningkat secara signifikan yaitu 117. Hal ini berbanding lurus dengan Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA) (Milyar) yang mengalami kenaikan secara signifikan yaitu 1330,3 Milyar pada tahun 2020 terlihat pada tabel 2.41 di atas.

Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk kinerja daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap investasi PMA dan PMDN serta bagaimana serapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2.41 di atas ini.

p. Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan – kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Dalam pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan Program pengembangan nilai budaya yaitu Pembinaan, Pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event-event baik yang berskala kecamatan, Kabupaten maupun Nasional. Dan juga pelestarian terhadap Benda, Status dan Kawasan cagar Budaya juga perlu dilakukan. Dari tabel 2.44 di bawah ini dapat dilihat perkembangan capaian kinerja Urusan Kebudayaan dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.44.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KEBUDAYAAN'					
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kali)	4	0	4	57	5
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Lokasi)	2	3	3	19	4



Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	37	25	24	25	45
Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	0,68	0,5	1,20	1,35	1,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel 2.44 di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator mengalami penurunan yang sangat drastis seperti intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya yang menunjukkan penurunan dari tahun 2016 yang awalnya 4 kali hingga akhir tahun 2019 sebanyak 57 kali penyelenggaraan, namun pada tahun 2020 sebanyak 5 kali hal ini sangat terkait dengan pandemic Covid 19. Pada tahun 2020 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 45 buah. Begitu juga dengan rasio grup kesenian per-10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 1,05 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,35. Dari beberapa indikator yang telah dijelaskan di atas kita mengharapkan wabah pandemic Covid 19 ini berakhir dan harapan kedepan adanya upaya maksimal dari perangkat daerah terkait nantinya supaya lebih merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran guna meningkatkan capaian secara keseluruhan pada urusan Kebudayaan ini.

Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pembinaan terhadap Urusan Pemuda dan Olah Raga. Jumlah Organisasi Pemuda yang tercakup dalam Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2020 dihitung berdasarkan Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif yang terdaftar di Kesbangpol yang mana pada tahun sebelumnya dihitung secara keseluruhan .

Untuk capaian kegiatan kepemudaan terjadi penurunan disebabkan karena tidak adanya anggaran kegiatan yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan karena adanya pengalihan anggaran/refocusing untuk covid 19 sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya 2 kegiatan.

Indikator Kinerja Daerah yakni Jumlah Lapangan Olahraga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya karena banyaknya lapangan olahraga yang tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat dan kurangnya dana pemeliharaan lapangan olahraga.

Perkembangan capaian Kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.45. di bawah ini.

Tabel 2.45.

**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Jumlah organisasi pemuda	10	52	52	52	10
Jumlah organisasi olahraga	40	41	35	35	36
Jumlah kegiatan kepemudaan	9	18	22	20	2
Jumlah kegiatan olahraga	5	10	36	36	36
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	104	108	110	112	112
Lapangan olahraga	265	270	279	279	246
a. Rasio klub olahraga/penduduk	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut ini.

Tabel 2.46.

**Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan)	2	2	1	1	1
Kegiatan pembinaan politik daerah	11	13	11	11	8
Jumlah LSM yang dibina oleh Kesbangpol	105	115	108	113	108
Jumlah demo (Kasus)	1	1	1	0	3

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ada beberapa indikator mengalami penurunan seperti Kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2020 yaitu 8 pada tahun sebelumnya yaitu 11. Jumlah LSM yang dibina oleh Kesbangpol pada tahun 2020 yaitu 108 dari tahun sebelumnya 113. Dan meningkatnya jumlah demo pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus.

r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Sebagai salah satu fungsi dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka berdasarkan urusan desentralisasi yang dikelola, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun perkembangan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut ini:

Tabel 2.47.

**Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,96	1,96	1	1,07	1
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	9,67	9,67	9,67	3,39	3,39
Rasio jumlah Pos Siskamling Perjumlah desa/Kelurahan	732	732	732	732	732
Penegakan PERDA (%) (Penyelesaian Pelanggaran Perda)	66,67	80	55	94,12	50%
Cakupan patroli petugas Satpol PP	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	16	95	11	106	100
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1,11	1,11	1,11	2,72	2,72
Sistim Informasi Manajemen Pemda	5	5	5	5	5
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar, 2021

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian belum mengalami peningkatan kecuali pada Indikator Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah sama dari tahun sebelumnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 5 serta Indikator Jumlah Pos Siskamling yang pada tahun 2016 sebanyak 732 Poskamling pada tahun 2020 tetap sama yaitu sebesar 732 Poskamling yang berarti setiap korong diwilayah Kabupaten Padang Pariaman rata-rata telah memiliki Poskamling.

s. Urusan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Dilihat dari pengertiannya bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dimaksud ada beberapa indikator yang bisa diukur sebagaimana terlihat pada tabel 2.48 dibawah ini.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KETAHANAN PANGAN					
Nilai PDRB Sektor Pertanian	2.499.408,7	2.624.586,7	3.812.952,29	4.082.657,32	4.065.464,15
Persentase Nilai Tukar Petani	96,45	96,97	95,16	95,99	100,58
Jumlah Produksi beras (000/Ton)	155,90	174,55	152,62	159,334	283,127
Regulasi	1	1	1	0	0



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Ketahanan Pangan					
Ketersediaan pangan utama kg/1000 pddk	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01	
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,23	5,26	4,51	4,75	4,77
Distribusi sektor pertanian Tan. Pangan terhadap PDRB (%)	19,90	19,33	18,65	19,19	22,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

t. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.49.berikut ini.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & NAGARI					
Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	60	70	90	100	95
Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0,6	35	35	33	45
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75
Persentase peningkatan kemampuan Nagari dan Pengurus Nagari	20	20	20	19	50
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang terbentuk dan berfungsi dengan baik	9	20	61	18	55
Persentase PKK Aktif	42,31	51,28	70,00	68,60	75
Persentase Posyandu aktif	70,70	70,70	70,70	68,50	70
Posyandu Purnama dan Mandiri	38,89	42,48	70,72	82,35	81,5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Berdasarkan tabel 2.49 diatas dapat kita lihat dari Indikator Jumlah Kelompok Binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) pada tahun 2020 sebesar 95. Pada Indikator Jumlah Posyandu aktif pada tahun 2020 sebesar 70%. Indikator Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang terbentuk dan berfungsi dengan baik pada tahun 2020 meningkat jauh yaitu sejumlah 55 pos.

u. Urusan Statistik
Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
STATISTIK					
Buku "kabupaten dalam angka"	1	1	1	1	1
Buku "PDRB kabupaten"	1	1	1	1	1

Sumber : Bapelitbangda 2021

v. Urusan Kearsipan

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan Nasional. Adapun perkembangan Urusan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada table 2.51. berikut ini.

Tabel 2.51.**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KEARSIPAN					
Persentase Pengelolaan arsip secara baku (%)	2,72	2,72	4,76	6,8	8,84
Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	8	20	30	40

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

Dari tabel capaian diatas dapat kita lihat bahwa Pada indikator kinerja untuk urusan kearsipan dengan indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku pada tahun 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target tahun 2020 yang ditetapkan yakni sebesar 8,84% dengan realisasi juga sebesar 8,84%. Artinya capaian untuk indikator ini dapat dilaksanakan 100%. Indikator pengelolaan arsip secara baku merupakan jumlah OPD yang memiliki nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) yang baik. Jumlah OPD yang mendapatkan nilai LAKI yang baik pada tahun 2020 adalah sebanyak 4 OPD dari total 43 OPD dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. 4 OPD di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman sudah dapat dikatakan sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan Audit Kearsipan, dimana pada tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan audit tata kelola kearsipan kepada 43 OPD dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pengelolaan arsip secara baku yakni kegiatan Pengumpulan Data, Kajian Sistem Administrasi Kearsipan, Pendataan dan Penelusuran arsip dan kegiatan money kearsipan juga turut mendukung indikator kinerja ini. Secara umum output maupun



outcome dari kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan arsip secara baku di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 40% jumlah SDM pengelola kearsipan. Capaian target ini dapat direalisasikan karena adanya dukungan program dan kegiatan tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Program dan kegiatan yang mendukung pada indikator kinerja tersebut adalah adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan serta kegiatan diklat kearsipan. Dimana output maupun outcome dari kegiatan ini dapat menghasilkan SDM pengelola kearsipan yang bersertifikasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah petugas pengelola kearsipan OPD, Kecamatan dan Nagari di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

w. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya.

Namun, saat ini pengertian tradisional dan paradigma lama mulai tergeser seiring perkembangan berbagai jenis perpustakaan, variasi koleksi dalam berbagai format memungkinkan perpustakaan secara fisik tidak lagi berupa gedung penyimpanan koleksi buku.

Banyak kalangan terfokus untuk memandang perpustakaan sebagai sistem, tidak lagi menggunakan pendekatan fisik. Sebagai sebuah sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintegrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya fungsi – fungsi perpustakaan.

Perkembangannya menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Dari istilah pustaka, berkembang istilah pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan. Adapun perkembangan Urusan perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut ini:

Tabel 2.52.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERPUSTAKAAN					
Jumlah perpustakaan	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 perpustakaan TBM, 9 perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan mesjid, 10 perpustakaan sekolah	1 Pustaka daerah, 103 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 7 Perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan mesjid, 20 Perpustakaan Sekolah	65 (1 Perpustakaan Daerah; 54 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)	85 (1 perpustakaan daerah; 64 perpustakaan nagari; 10 TBM, 10 perpustakaan sekolah)	85 (1 perpustakaan daerah; 74 perpustakaan nagari; 10 TBM)
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (%)	1,7	1,7	3	4	5
Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	13,33	15,60	24,17	42,86	53

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa Capaian untuk indikator kinerja pada jumlah perpustakaan urusan perpustakaan pada tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2020 yakni terlaksananya layanan perpustakaan pada perpustakaan umum daerah, pembinaan serta kunjungan pustaka keliling terhadap 85 perpustakaan yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 74 perpustakaan nagari dan 10 perpustakaan TBM. Capaian atas kinerja tersebut didorong oleh program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan pada tahun 2020 yang terdiri dari kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat; dan Operasional perpustakaan.



Realisasi atas capaian indikator kinerja pada jumlah pengunjung perpustakaan per tahun untuk tahun 2020 adalah sebesar 5% dari target yang ditetapkan juga sebesar 5%. Artinya untuk capaian indikator ini juga dapat dicapai 100%. Untuk target ini didapatkan dari jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan dibagi dengan total jumlah penduduk usia 10 s/d 59 tahun di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Target kunjungan perpustakaan ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca dan kegiatan operasional perpustakaan.

Capaian indikator kinerja pada koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Target pada tahun 2020 adalah sebesar 53% dan dapat dicapai juga sebesar 53%. Artinya capaian untuk tahun 2020 dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Tidak ada kegiatan yang mendukung capaian indikator ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran akibat covid-19. Sehingga pengadaan buku pada tahun 2020 melalui APBD tidak dapat dilaksanakan. Namun pada Tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendapatkan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sehingga koleksi yang ada di perpustakaan umum daerah dapat bertambah dan mencapai target yang ditetapkan.

x. Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Adapun perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut ini.

Tabel 2.53.

**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Jumlah jaringan komunikasi	112	112	112	112	112
Rasio wartel terhadap penduduk 10000	1	1	1	1	1
Rasio warnet terhadap penduduk 10000	6	7	7	7	7
Jumlah surat kabar nasional/lokal	0.03	0.03	0.03	0.03	0,03
Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Jika dilihat dari tabel 2.51 capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika terdapat beberapa indikator. Dilihat dari jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2020 sebesar 112, rasio wartel terhadap penduduk 10000 sebesar 1 % dan rasio warnet terhadap penduduk 10000 sebesar 7 %.

2.2.1.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan**a. Energi dan Sumber daya Mineral**

Tabel 2.54.

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
Jumlah Pelanggan Listrik	122.075	130.159	136.078	99.091	123.822
Jumlah Daya Listrik	138.919	148.120	159.011	123.575	151.073

Sumber : Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Dari tabel 2.54 diatas dapat terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 99.091 menjadi 123.822 pada tahun 2020 dan Jumlah Daya Listrik yang sebelumnya sebesar 123.575 pada tahun 2019 naik menjadi 151.073 pada tahun 2020.



b. Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting mempunyai peran dalam memacu pembangunan .Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya potensi destinasi wisata di Kabupaten Padang Pariaman, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk itu pembangunan kepariwisataan harus memberi perhatian pada pariwisata alternatif, seperti pariwisata minat khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas seperti adventure travel, cultural travel dan ecotourism. Pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan adanya peningkatan promosi wisata juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan .

Adapun indikator kinerja daerah tentang pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.55 berikut dibawah ini :

Tabel 2.55.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PARIWISATA					
Kunjungan wisata (jumlah orang)	48.000	156.445	183.600	396.790	208.872
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6.180.717,00	7.012.354,04	7.012.354,04	7.095.497,65	7.095.497,65

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 baik wisatawan nusantara maupun



manca negara adalah 208.872 orang. Jumlah ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 220.000 orang. Jumlah kunjungan wisata tahun 2020 ini mengalami penurunan persen dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisata 396.790. Meskipun demikian, jika dilihat persentase capaian kinerja sebesar 94,94 persen dengan kriteria berhasil merupakan sebuah hasil yang cukup baik apalagi ditengah pandemi covid 19 ini.

Penurunan jumlah kunjungan wisata dibandingkan dengan tahun lalu serta belum tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan oleh pandemi global covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sepanjang tahun 2020. Kehadiran virus ini mengakibatkan melemahnya aktivitas berbagai sektor perekonomian termasuk sektor pariwisata. Kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara seperti *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia termasuk Kabupaten Padang Pariaman untuk menekan penyebaran virus covid 19 sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata. Kebijakan ini bukan hanya membatasi pergerakan manusia namun juga melakukan penutupan objek-objek wisata dan hiburan serta hotel-hotel yang merupakan sarana penunjang sektor pariwisata.

Gairah sektor pariwisata kembali menggeliat setelah adanya kebijakan pelonggaran yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menggerakkan sektor perekonomian. Dengan diberlakukannya era new normal, pergerakan manusia tidak dibatasi lagi, serta akses transportasi dan tempat-tempat wisata mulai dibuka dengan ketentuan tetap memberlakukan protokol kesehatan maka objek-objek wisata mulai diserbu oleh pengunjung wisata yang telah lama berdiam dirumah sebagai dampak kebijakan sebelumnya.

c. Pertanian

Urusan Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman, kontribusi sektor pertanian pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada sector pertaniandi tahun 2019 mencapai 4,26 persen terjadipenurunan -1,76 persen di tahun 2020.

Padi merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2020, rata-rata produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman 4,77 ton/ha. Luas panen pada tahun 2020 mencapai 59.331 ha dengan produksi 283.127,72 ton. Luas panen pada tahun 2020 terjadi



penurunan dari tahun sebelumnya, dengan tingkat produksi padi tahun 2020 juga menurun.

Tabel 2.56.

**Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERTANIAN					
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,23	5,26	4,51	4,75	5,15
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	10,06	9,74	11,07	11,07	11,07
Distribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB (%)	19,90	19,33	18,65	19,18	
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	3,23	3,20			3,54
Regulasi ketahanan pangan	1	1	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	0	0
Ketersediaan pangan utama (kg/1000 pddk)	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01	708.310,82
Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani (%)	30			N/A	70,00
Jumlah produksi beras (Kg)	155.904,59	174.550	152.562,14	159.334,11	150.134,40
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (ratio)				N/A	48,19
Nilai tukar petani (%)	96,45	96,97	95,16	95,99	97,50
Nilai PDRB sektor pertanian (Rp. Jutaan)	2.499.408,7	2.624.586,7	3.812.952,29	4.082.657,32	2.736.277,17

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Tabel 2.57.

**Luas Panen Produksi Padi dan Produktivitas Padi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (ton/ha)
2016	55.408	287.046	5,18
2017	61.134	321.376	5,26
2018	62.306,8	280.892,00	4,51
2019	61.708,1	293.360,31	4,75
2020	59.331,00	283.127,72	4,77

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2021

Selain pengembangan tanaman pangan untuk mendukung upaya ketahanan pangan, pertanian Kabupaten Padang Pariaman juga ditanami berbagai macam tanaman hortikultura, antara lain: jambu biji, pisang, manggis dan pepaya.

Tabel 2.58.

**Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020**

Tahun	Jambu Biji		Pepaya		Pisang		Manggis	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2016	74,24	540,43	194,49	16.501,51	1.288,72	19.616,19	691,59	4.839,53
2017	73,67	805,90	196,39	19.862,28	1.234,50	16.665,48	765,88	6.350,22
2018	52,25	815,85	168,20	23.249,11	616,56	17.152,59	321,74	6.414,14
2019	54,81	861,17	170,82	22.690,32	716,65	20.778,60	241,27	5.270,78
2020	56,02	893,64	134,83	18.285,30	632,61	19.029,31	154,31	3.611,62

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2021

Tabel 2.59.

Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Tahun	Karet	Kelapa	Kulit Manis	Cengkeh	Kopi	Pinang	Kakao
	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
2016	3.088,49	35.435,95	4.800,09	77,77	301,05	339,19	7.595,14
2017	3.079,33	35.612,85	4.483,24	73,86	298,43	359,27	5.434,54
2018	3.075,00	36.556,31	3.851,77	70,27	262,00	401,1	5.131,37
2019	3.384,96	37.420,46	3.785,57	67,02	295,27	435,28	5.019,13
2020	3.290,38	37.666,19	3.608,40	63,26	288,68	445,82	4.851,89

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2021

Walaupun Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang tidak mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai komoditi utama, Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan beraneka tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kulit manis, cengkeh, kopi, pinang, dan kakao. Tanaman perkebunan



yang memiliki produksi tanaman paling banyak adalah kelapa sebanyak 37.666,19 ton pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan daerah pesisir pantai mendominasi luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

d. Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan

Tabel 2.60.

**Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PETERNAKAN					
Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	185.619,2	190.297,6	199.738,38	199.654,40	204.332,80
Jumlah Produksi Daging (Ton)	2.814,69	2.814,69	2.978,29	2.339,14	3.151,69
Jumlah Hewan yang sehat	-	7.253.324	7.449.360	7.645.395	7.841.431
Jumlah Hewan yang dikelola	24,00	25,00	31,00	29	35,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2021

Tabel 2.61.

**Populasi dan Pemotongan Ternak Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2020**

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)		Jumlah Pemotongan (ekor)	
	2019	2020	2019	2020
Sapi	41.787	43.629	3.476	2.668
Kerbau	14.801	14.953	1.735	1.551
Kambing	34.090	35.005	5.241	2.224

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2021

Daging ternak merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk melengkapi nilai gizi masyarakat kota padang. Ternak yang dihasilkan oleh Kabupaten Padang Pariaman antara lain sapi, kerbau dan kambing. Jumlah pemotongan daging ternak dapat memenuhi jumlah konsumsi masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah populasi yang melebihi jumlah pemotongan. Jumlah populasi dan pemotongan terbesar adalah sapi potong, jika dibandingkan dengan ternak besar lainnya seperti kerbau.



Tabel 2.62.

**Populasi dan Pemotongan Unggas Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2020**

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)		Jumlah Pemotongan (ekor)	
	2019	2020	2019	2020
Ayam Buras	809.967	843.520	1.133.955	1.180.928
Ayam Ras Petelur	2.294.020	2.678.403	1.376.412	1.607.042
Ayam Ras Broiler	6.115.346	6.600.941	6.113.512	6.204.885
Itik	142.649	144.647	84.784	86.788

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam angka 2021

e. Perikanan

Urusan Perikanan merupakan salah satu sektor yang ikut menjadi penggerak perekonomian yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.63.

Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

No	Data Produksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	26.604,60	25.472,20	23.080,10	22.298,90	26.339,05
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	54.677,49	57.239,70	58.211,18	54.079,33	62.911,63
3	Jumlah produksi ikan olahan (Ton)	200,76	206,78	213,87	220,29	204,98
4	Tingkat konsumsi ikan (Kg / kapita / Tahun)	32	32,78	36,06	40,60	35,00

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2021

Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 22.298,90 ton. Angka ini mengalami peningkatan produksi tahun 2020 sebesar 18,12%. Penyebab meningkatnya produksi perikanan tangkap antara lain : 1) penangkapan menggunakan alat tangkap trowl oleh nelayan sudah memadai, 2) karena kondisi alam yang sangat mendukung, 3) aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan pada bulan-bulan meningkat.

Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 54.079,33 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 62.911,63 ton, juga mengalami peningkatan produksi sebesar 6,29%. Meningkatnya produksi budidaya perikanan disebabkan karena banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu perlu dipertahankan kegiatan yang ada serta menambah kegiatan sebagai penunjang produksi pada tahun 2020.

f. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Untuk indikator kinerja daerah urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.64 berikut ini.

Tabel 2.64.**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERDAGANGAN					
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,57	8,45	8,45	8,50	8,55
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	61.	67,05	60	60	67,25



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu	5,89	5,71	5,54	5,54	5,54

Sumber : Dinas Perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan ukm, Tahun 2021

Dari tabel 2.60 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak begitu signifikan pada tahun 2016 sebesar 8,57 % dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami kenaikan. Jika dilihat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,05%. Sementara cakupan bina kelompok pedagang/usaha normal cenderung fluktuatif dan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kembali kenaikan. Sedangkan rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu juga tidak mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,54

g. Perindustrian

Untuk terwujudnya tujuan industri kecil menengah yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing berbasiskan agroindustri diukur dengan indikator kinerja pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB untuk mencapai sasaran berkembangnya industri kecil menengah.

Tabel 2.65.

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERINDUSTRIAN					
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,74	10,20	9,63	9,34	11,9
Pertumbuhan Industri	3	0,1	3,9	1,1	1,92

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Tahun 2021

Dari tabel 2.65.diatas dapat terlihat bahwa Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuasi seperti pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan dari 11,11% menjadi 10,74%. Sedangkan pada tahun 2017 tetap mengalami penurunan dari 10,74% menjadi 10,20% pada tahun 2018 dari 10,20% menjadi 9,63% dan sedangkan untuk tahun 2019 masih mengalami penurunan yaitu dari 9,63% menjadi 9,34%. Sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020



Kontribusi sector industri terhadap PDRB yaitu 11,9%. Hal ini berbanding lurus dengan tren pertumbuhan industri yang mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,92 %. Hal ini dapat dilihat dari table 2.61 diatas.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah tangga sangat mempengaruhi dalam perhitungan PDRB. menurut lapangan usaha pada tahun 2013 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.62 berikut ini :

Tabel 2.66.
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita sebulan
Kabupaten Padang Pariaman Periode 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga					
- Makanan (juta)	534.177,14	545,281	579,382	-	619.089
- Non Makanan (juta)	325.122,10	386,292	463,562	-	465.216
Produk Domestik Regional Brutto (trilyun)	17,52	19,18	20,63	21,28	

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Sejak tahun 2013 Konsumsi non-makanan selalu mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2015 293.683 juta meningkat hingga 463.562 Juta

2.1.4.1.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.1.4.1.1.1 Luas Wilayah Terkena Banjir

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan air, tahun 2016 di Kabupaten Padang Pariaman masih terdapat 6 (enam) kecamatan yang belum teratasi masalah banjir. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan dan di musim hujan menimbulkan banjir. Total Luas lahan terkena banjir bervariasi dengan frekuensi/lama



genangan antara 6-18 hari pertahun. Topografi Kabupaten Padang Pariaman, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik.

2.1.4.1.1.2 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 terdapat 62 restoran dan rumah maknyang terdata dan tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

2.1.4.1.1.3 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 7(tujuh) hotel/penginapan/losmen/hostel tahun 2020 yang terdata dan tersebar di seluruh Kabupaten Padang Pariaman. keberadaan penginapan tersebut mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki.

2.1.4.1.1.4 Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, dari 127.746 rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 123.822 rumah tangga atau 96,93% telah menggunakan listrik PLN. Sementara sisanya sebanyak 3.924 rumah tangga atau 3,07% menggunakan listrik non-PLN ataupun tidak/bukan menggunakan listrik sama sekali untuk penerangan tempat tinggal mereka.

2.1.4.1.3.2.Lama Proses Perizinan

Proses perijinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman (DPMPTP).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor :161/KEP/BPP/2018 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, telah diatur standar waktu pelayanan perijinan yang dikelola oleh DPMPT yang ditentukan, dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut ini :



Tabel 2.67.

Standar Waktu Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
1.	Izin Operasional Sekolah	5 Hari	30 Hari
2.	Izin Pendirian Kursus	5 Hari	30 Hari
3.	Izin Taman Bacaan Masyarakat	5 Hari	30 Hari
4.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	5 Hari	30 Hari
5.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
6.	Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
7.	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah	5 Hari	14 Hari
8.	Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	3 Hari	14 Hari
9.	Izin Apotek / Apotek Rakyat	3 Hari	14 Hari
10.	Izin Toko Obat	3 Hari	14 Hari
11.	Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga	3 Hari	14 Hari
12.	Izin Fisioterapi	3 Hari	14 Hari
13.	Izin Balai Pengobatan / Rumah Bersalin / Klinik	3 Hari	14 Hari
14.	Izin Lingkungan	-	14 Hari
15.	Izin Lokasi	-	14 Hari
16.	Izin Instalasi Genset	3 Hari	14 Hari
17.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari	30 Hari
18.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 Hari	14 Hari
19.	Izin Usaha Produksi Benih	7 Hari	4 Hari
20.	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Pertokoan dalam 1 (Satu) Daerah	-	14 Hari
21.	Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	-	14 Hari
22.	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah	3 Hari	14 Hari
23.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	3 Hari	14 Hari
24.	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
25.	Tanda Daftar Usaha Jasa Trnsportasi Wisata	3 Hari	14 Hari
26.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 Hari	14 Hari
27.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	3 Hari	14 Hari
28.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	3 Hari	14 Hari
29.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 Hari	14 Hari
30.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalan Insentif, Konferensi dan Pameran	3 Hari	14 Hari
31.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 Hari	14 Hari
32.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
33.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	3 Hari	14 Hari
34.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	3 Hari	14 Hari
35.	Tanda Daftar Usaha Spa	3 Hari	14 Hari
36.	Izin Penyelenggaraan Pos	-	14 Hari
37.	Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen	-	14 Hari
38.	Izin Warung Internet (Warnet)	-	14 Hari
39.	Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	3 Hari	14 Hari



No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
40.	Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator	-	14 Hari
41.	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	-	14 Hari
42.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
43.	Izin Galian Kabel Telekomunikasi (Dalam Satu Kabupaten)	3 Hari	14 Hari
44.	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
45.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
46.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
47.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
48.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	14 Hari
49.	Izin Reklame	-	7 Hari
50.	Izin Gangguan *Ho) dan Non Ho (Situ)	3 Hari	14 Hari
51.	Izin Pangkalan Minyak Tanah/Gas Elpiji	5 Hari	14 Hari
52.	Izin Usaha Industri	3 Hari	10 Hari
53.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari	-
54.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	-
55.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK)	-	10 Hari
56.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	14 Hari
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	-	14 Hari
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	-	14 Hari
59.	Izin Penggunaan Racun Api	3 Hari	14 Hari
60.	Izin Prinsip	-	14 Hari
61.	Izin Mendirikan Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari
62.	Izin Operasional Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari

Hingga kini kinerja pelayanan, terutama terkait lama proses perizinan masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah keluhan yang menyebutkan bahwa pelayanan yang ada tidak tepat waktu. Tahun 2016, terdapat 19 keluhan mengenai ketidaktepatan waktu proses perizinan, namun demikian kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu senantiasa diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama yang terkait perijinan usaha.

2.1.4.1.3.3 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan (8) Pajak Air Bawah Tanah dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.824.536.856,00,- (setelah dilakukan audit oleh BPK-RI). Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel 2.68 di bawah ini.

Tabel 2.68.

**Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Anggaran 2018-2020**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	215.059.598,00	204.686.983,00	101.143.514,00
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	3.957.531.438,00	3.565.516.571,00	1.519.389.638,00
3	Pajak Hiburan	58.483.00,00	306.899.850,00	138.797.000,00
4	Pajak Reklame	507.995.750,00	813.594.680,00	984.380.375,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.756.001.963,00	17.745.000.000,00	16.710.615.735,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	4.065.069.713,00	2.874.340.172,00	3.784.863.927,95
7	Pajak Parkir	2.563.465.750,00	1.976.9021.400,00	998.928.700,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	399.462.486,00	373,380.163,00	391.000.058,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.520.984.649,00	8.983.275.604,00	8.829.891.991,00
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	4.368.199.550,00	11.458.048.854,00	8.365.525.917,50
	Jumlah	41.412.253.897,00	66.093.764.277,00	41.824.536.856,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021

Pajak dari penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman. BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Padang Pariaman untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (6) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (7) Retribusi Terminal; (8) Retribusi Rumah Potong Hewan; (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (11) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; (12) Retribusi Ijin Trayek. Pendapatan



Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.185.534.022,00,- (setelah dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2018 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2.69 berikut ini :

Tabel 2.69.

**Perincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018-2020**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020
		Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	747.958.00,00	927.946.500,00	1.121.540.500
2	Retribusi Jasa Usaha	263.055.936,00	358.694.340,00	285.323.780
3	Retribusi Perizinan tertentu	1.832.840.221,00	1.364.101.797,00	778.669.742
	Jumlah	2.843.854.157,00	2.650.742.637,00	2.185.534.022,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021

2.1.4.1.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.1.4.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 cukup berfluktuasi.

2.1.4.1.4.2 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatra Barat. Padang Saat ini IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,61 dan berada di rangking 11 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Oleh karena itu perlu kerja keras pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Berikut ini Tabel IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk lebih lengkapnya informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.70 dan 2.71 berikut ini :

Tabel 2.70.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera BaratTahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kep. Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
2.	Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
3.	Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
4.	Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
5.	Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
6.	Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
7.	Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
8.	Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
9.	Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
10.	Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
11.	Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
12.	Pasaman barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
13.	Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
14.	Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
15.	Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
16.	Padang Panjang	75,50	77,01	77,30	78,00	77,93
17.	Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
18.	Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
19.	Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90

Sumber :Padang pariaman dalam angka 2021

Tabel 2.71.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
1	Padang	82,82	1
2	Bukittinggi	80,58	2
3	Payakumbuh	78,90	3
4	Kota Solok	78,29	4
5	Kota Padang Panjang	77,93	5
No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
6	Kota Pariaman	76,90	6
7	Sawahlunto	72,64	7
8	Agam	72,46	8
9	Tanah Datar	72,33	9
10	Dharmasraya	71,51	10
11	Padang Pariaman	70,61	11



No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
12	Pesisir Selatan	69,90	12
13	Lima Puluh Kota	69,47	13
14	Kab Solok	69,08	14
15	Solok Selatan	69,04	15
16	Pasaman Barat	68,49	16
17	Sijunjung	67,74	17
18	Pasaman	66,64	18
19	Kepulauan Mentawai	61,09	19

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan yang dievaluasi adalah pelaksanaan program tahun anggaran 2021, berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dengan capaian realisasi anggaran dan kinerja per program. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2020 berdasarkan urusan dan perangkat daerah pelaksana dapat dilihat pada lampiran 1 dari Dokumen RKPD ini.

2.3 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2020

2.3.1 Bidang Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini.

Adapun hasil pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.72 berikut.

Tabel 2.72

Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapat layanan	Capaian kinerja %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga ne-gara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam	15.062	10.336	68,62 %



		Pendidikan PAUD			
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga ne-gara usia 7-15 tahun yang berpar-tisipasi dalam pen-didikan dasar	77.139	72.257	93,67 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga ne-gara usia 7-18 ta-hun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau mene-ngah yang berpar-tisipasi dalam pen-didikan kesetaraan	101.960	3.143	3.08%

Sumber :LPPD Kab.Padang pariaman Tahun 2021

2.3.2 Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jenis pelayanan dasar yang tertuang sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Adapun hasil capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73

Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Sasaran	Target (%)	ABS	Capaian kinerja %
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Hamil	8.702	100%	6.983	80,2
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin	8.307	100%	6.828	82,2
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7.911	100%	6.847	86,6
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai Standar	38.884	100%	28.553	73,4
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66.674	100%	15.451	22,8
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15- 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	234.378	100%	112.001	47,8
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75.857	100%	34.843	53,0
8.	Pelayanan Kesehatan	Persentase penderita	63.945	100%	25.509	39,9



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Sasaran	Target (%)	ABS	Capaian kinerja %
	Penderita Hipertensi	hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.939	100%	3.520	73,1
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	877	100%	867	98,9
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	15.610	100%	5.396	34,5
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	15.819	100%	8.886	56,2

Sumber :LPPD Kab.Padang pariaman Tahun 2021

2.3.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 5 angka 2 menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM Pekerjaan Umum yaitu :



- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.274 berikut

Tabel 2.74
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	97.754 RT	84.717 RT	86,66 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97.754 RT	97.544 RT	99,79 %

Sumber :LPPD Kab.Padang pariaman Tahun 2021

2.3.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi :

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			Tahun	Persentase (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	2020	0



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			Tahun	Persentase (%)
	rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	pada tahun n Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	2020	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	2020	0

Sumber :LPPD Kab.Padang pariaman Tahun 2021

2.3.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.76 dan 2.77 sebagai berikut.

Table 2.76
Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Persentase (%) Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	98,86
	b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Persentase (%) jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	94,92
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase (%) Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	99,39
	b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase (%) Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	92,25
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Persentase (%) Jumlah aparatur dan KK yang ikut pelatihan	0
	d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur yang ikut gladi	0
	e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah persentase (%) KK yang mendapatkan pelayanan Pusedalops-PB	98,19



No.	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Realisasi
	f.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Jumlah KK yang mendapat perlindungan	96,04
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	a.	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk status Kasus Luar Biasa (KLB)	82,87
	b.	Respon cepat darurat bencana	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 48 jam untuk status Darurat Bencana	99,98
	c.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase (%) jumlah petugas penanganan darurat bencana	0
	d.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong atau dievakuasi	0
	e.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase (%) jumlah kebutuhan korban bencana	0

Sumber :LPPD Kab.Padang pariaman Tahun 2021

Table 2.77

Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1.	Pelayanan ketertentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	22 Kasus	11	50 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95 Jiwa	92	96,84 %

Sumber : LPPD Kab. Padang Pariaman Tahun 2021

2.3.6 Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.78 sebagai berikut:

Table 2.78
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Hasil (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	13	43,33%
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	95	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang	50	250%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Hasil (%)
	terlantar diluar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0	0
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	282	261%

Sumber :LPPD Kab.Padang pariaman Tahun 2021

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Beberapa prioritas permasalahan pembangunan daerah kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis dimana Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan
2. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dimana IPM Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi Sumbar (Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata nasional dan Propinsi, Angka Harapan Hidup Masih dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi)
3. Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4. Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
5. Angka Sanitasi layak Kab. Padang Pariaman yang masih dibawah Propinsi Sumatera Barat
6. Angak air minum layak Kab. Padang Pariaman yang masih dibawah Propinsi Sumatera Barat
7. Upaya Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
8. Upaya Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;



9. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global, Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal
10. Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
11. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
12. Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan
13. Kemudahan berinvestasi di daerah
14. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
15. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial
16. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan

Fokus Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah :

1. Pembinaan dan Peningkatan terhadap Nilai Moral dan Agama di Kalangan Generasi Muda dan Masyarakat
2. Peningkatan capaian indikator makro daerah yang masih dibawah rata-rata capaian nasional dan Propinsi Sumbar (Peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, penurunan tingkat kemiskinan, Angka Sanitasi layak, Angka air minum layak)
3. Peningkatan capaian sasaran kinerja RPJMD 2016-2021 yang masih dibawah target yang telah ditetapkan
4. Pencapaian target sasaran kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 periode tahun Terakhir
5. Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan Perekonomian Masyarakat
6. Peningkatan Produktivitas di sektor Bidang Perekonomian (Pertanian, Peternakan, Pariwisata, dan Usaha Kecil Menengah)
7. Penurunan Jumlah Rumah tidak Layak Huni

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pada urusan pendidikan diantaranya meliputi :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang pendidikan yaitu persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran pada tahun 2019 mencapai 85%, artinya masih ada 15% yang tidak bisa baca Al-Quran di tahun 2019.



- b. Pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2015-2019 telah menempatkan Kabupaten Padang Pariaman masih di ranking ke-11. Di antara komponen IPM yang dinilai, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman diangka 7,86 tahun yang menunjukkan bahwa masih belum memenuhi wajib belajar 9 tahun.
- c. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 mencapai 86,50% dan di tingkat SMP/MTS baru mencapai 67,77%.
- d. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 mencapai 67,2% dan di tingkat SMP/MTS baru mencapai 52,05%. Namun persentase APM untuk SD/MI/Paket A menunjukkan angka cukup tinggi yaitu 95,70%. Hal ini menunjukkan anak-anak untuk rentang umur 7-12 tahun masih menempuh pendidikan dasar. Sementara masyarakat dalam rentang umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun masih belum banyak menempuh pendidikan sesuai tingkat pendidikannya dengan berbagai kendala yang ada.
- e. Masih kurangnya jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk tahun 2019 pada pendidikan dasar, satu orang guru mendidik 75 murid, sedangkan untuk pendidikan menengah, satu orang guru mengajar sebanyak 86 orang. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2, dijelaskan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTS tidak melebihi 36 orang. Hal ini membuktikan kita di Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan tambahan tenaga pendidik disamping masih belum adanya pemerataan guru ditiap daerah.
- f. Masih adanya angka putus sekolah untuk SMP sederajat. Angka putus sekolah SMP sederajat tahun 2019 sebesar 0,8%, angka ini sedikit lebih baik dari target nasional sebesar 1,01%. Selain itu, angka kelulusan SMP/MTS sebesar 98,20%, artinya masih ada 1,8% yang tidak lulus di tahun 2019.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya :



- a. Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2019 mencapai 68,58, namun angka ini masih di bawah AHH Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 69,31.
- b. Akses pelayanan kesehatan yang belum merata dan relatif rendahnya kesehatan masyarakat. Rasio puskesmas per 1.000 penduduk hanya sebesar 0,06 meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Rasio tenaga paramedis per 1.000 penduduk sebesar 1,23 di tahun 2019. Rasio dokter per 1.000 penduduk sebesar 0,122%. Adapun target indikator Indonesia sehat, adalah 40 dokter per 100.000 penduduk.
- c. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi serta gizi buruk. Kematian ibu dan bayi merupakan isu nasional dan menjadi target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kabupaten Padang Pariaman memiliki kasus kematian yang cukup tinggi tahun 2015 sampai dengan 2019, kasus kematian ibu cenderung mengalami peningkatan yaitu berturut-turut 14 orang, 2 orang, 13 orang, 26 orang dan tahun terakhir 78 orang. Periode tahun 2015-2019, angka kematian bayi berturut-turut adalah sebagai berikut: 4 orang, 8 orang, 19 orang, 5 orang dan 10 orang. Kasus gizi buruk pada tahun 2017 sebanyak 288 kasus menurun 191 kasus pada tahun 2018, dan meningkat sebesar 336 kasus pada tahun 2019.
- d. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2017 ditemukan kasus stunting sebanyak 4.512 kasus, tahun 2018 sebanyak 5.203 dan 5.893 kasus pada tahun 2019.
- e. Masih adanya kasus penyakit menular. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV AIDS meningkat. Periode 2015-2019 penyakit menular TB Paru mengalami peningkatan dari 729 kasus pada tahun 2015, 739 kasus pada tahun 2016, 791 kasus pada tahun 2017, 752 kasus pada tahun 2018 dan 870 kasus pada tahun 2019. Penyakit menular HIV/AIDS juga mengalami peningkatan selama periode 2015-2019, dari 6 kasus pada tahun 2015, 20 kasus pada tahun 2016, 28 kasus pada tahun 2017, 43 kasus pada tahun 2018, dan 60 kasus pada tahun 2019.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan upaya promotif dan preventif, seperti pelaksanaan posyandu, pelaksanaan Nagari Siaga aktif, pembinaan RT PHBS, penyuluhan kesehatan melalui media elektronik (radio/TV),



media cetak/spanduk/baliho, penyuluhan di masyarakat, sosialisasi germas, implementasi germas dan pemanfaatan tenaga SBH dalam penyuluhan kesehatan.

- g. Belum tercapainya *Open Defecation Free* (ODF) Buang Air Besar Sembarangan, pada tahun 2015 baru mencapai 59,7%, tahun 2016 mencapai 60,54%, tahun 2018 mencapai 60,2%, tahun 2018 mencapai 60% dan tahun 2019 mencapai 64%.
- h. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar akreditasi, dimana pada tahun 2018 < 50% dan tahun 2019 < 75%.
- i. Belum optimalnya penyebaran tenaga kesehatan.
- j. Belum tercapainya *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional, dimana pada tahun 2018 baru mencapai 59,65% dan pada tahun 2019 mencapai 72,11%.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

- a. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur pengendali daya rusak air, hal ini berpengaruh terhadap tingginya biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang harus dianggarkan. Persentase jalan mantap pada tahun 2019 baru mencapai 63,68%. Rasio jaringan irigasi pada tahun 2019 baru mencapai 55,26%. Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara panjang jaringan irigasi dengan luas area persawahan yang diirigasi, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sebesar 8,14%. Masih rendahnya peningkatan perkembangan jalan Kabupaten dalam kondisi baik dimana pada tahun 2018 mencapai 526,70 Km dan tahun 2019 mencapai 1.274,06 Km, naik sebesar 2,25% atau 220,31 Km.
- b. Masih rendahnya persentase rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2019 yang mencapai 63,26%. Artinya masih ada 36,74% rumah tangga yang belum bisa mengakses fasilitas sanitasi yang layak.
- c. Masih banyak ditemui kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan infrastruktur.
- d. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
- e. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase).



- f. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah.
- g. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan serta kawasan pemukiman.
- h. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang.
- i. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- a. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh sebesar 886,77 Ha pada tahun 2019 dan rasio rumah layak huni baru mencapai 65,5%.
- b. Belum optimalnya pelayanan air bersih. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah rumah tangga pengguna air bersih yang masih mencapai 71,86% di tahun 2019. Artinya masih ada 28,14% rumah tangga yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah.
- b. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum optimal.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pada urusan sosial di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah :

- a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, pada tahun 2016 adalah sebesar 8,91%, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 8,04% dan ditahun 2019 mencapai 7,1%. Akan tetapi angka ini masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 6,15%.
- b. Belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program. Hal ini dapat terlihat dari belum terintegrasinya data kesejahteraan sosial khususnya warga miskin penerima program bantuan, kemudian belum adanya sinkronisasi data warga miskin yang memperoleh bantuan serta validasi



dan verifikasi data warga miskin, rigidnya proses yang ditempuh untuk sampai tahap verifikasi dan validasi data serta kesulitan mengelola ketersediaan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu.

- c. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana pada tahun 2019 penanganan PMKS Kabupaten Padang Pariaman sebesar 37,089. Hal ini juga disebabkan belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data PMKS.
- d. Adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, seperti banjir, longsor, puting beliung, gempa dan abrasi Pantai. Daya rusak gempa umumnya semakin tinggi bila mengenai wilayah yang jenuh air (liquifaksi) dan pada jalur sesar (patahan) serta pertemuan antar sesar yang belum mengalami patahan (rekahan). Jalur sesar di Kabupaten Padang Pariaman melintasi bagian selatan-barat Kecamatan Batang Gasan dan Sungai Limau, bagian tengah kecamatan V Koto Dalam, V Koto Timur, Padang Sago, 2x11 Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam. Terdapat 3 patahan yang saling melintang utara-selatan dan barat-timur di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung serta memanjang disisi pantai di kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris. Sementara itu areal yang diperkirakan lebih rawan dari jalur sesar adalah area pertemuan antar sesar yang belum rekah. Areal ini terdapat di Sungai Limau, VII Koto Sungai Sariak, Nan Sabaris, Lubuk Alung dan Batang Anai. Jalur dan area patahan ini akan menjadi limitasi dalam pembangunan permukiman. Ancaman dan potensi bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, seperti maraknya kasus LGBT, kekerasan pada anak dan pornografi, merupakan hal yang perlu diwaspadai.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pada urusan tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah :

- a. Tingginya Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman, TPT laki-laki sebesar 5,33% dan TPT perempuan sebesar 6,99%. Pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas pencari kerja, (4) kesenjangan persediaan



tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah (6) Informasi bursa kerja yang masih terbatas (7) Keterbatasan sarana dan Prasarana Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja.

- b. Daya saing produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah yang didominasi dari tingkatan SLTA, jumlah pencari kerja lebih besar dari peluang kesempatan kerja. Kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kompetisi yang dibutuhkan pasar masih ada.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah :

- a. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, dimana belum optimalnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam masyarakat, ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yakni hanya sebesar 14,28% pada tahun 2019.
- b. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
- c. Belum maksimalnya peran P2TP2A Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan terpadu.
- e. Masihkurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
- f. Masih kurangnya fasilitas partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
- g. Belum maksimalnya gerakan menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak.

3) Urusan Pangan

Permasalahan pada urusan pangan, diantaranya adalah :

- a. Terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah yang disebabkan oleh Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntukan lainnya; Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan



- pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan
- b. Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, yaitu sekitar (107,68 Kg/kapita/tahun) perlu diseimbangkan minimal sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola penganekaragaman konsumsi pangan (skor pola pangan harapan).
 - c. Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh, antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan makanan (septFormalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor, (4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5) lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan.
 - d. Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/beras.
 - e. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

4) Urusan Pertanahan

Permasalahan yang selalu menjadi perhatian adalah penyelesaian kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana selalu terjadi ketidaksepakatan harga atas tanah atau ketidakjelasan kepemilikan tanah. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah :

- a. Rendahnya kegiatan pengurangan sampah, pengelolaan sampah saat ini hanya mengandalkan penanganan skala kota.
 - 1) Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008, dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan sampah saat ini hanya mengandalkan penanganan sampah skala kota dengan sistem tercampur;



- 2) Berdasarkan data hasil evaluasi Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 persentase capaian kegiatan penanganan sampah sebesar 5,17% dan capaian kegiatan pengurangan sampah sebesar 0,02%. Angka ini masih jauh dari target pengelolaan sampah nasional dan daerah;
 - 3) Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah rumah tangga hingga 30 persen dan melakukan penanganan sampah rumah tangga sebesar 70 persen sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Begitu juga di Kabupaten Padang Pariaman, daerah menargetkan melakukan pengurangan sampah rumah tangga hingga 30 persen dan melakukan penanganan sampah rumah tangga sebesar 70 persen pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Tingkat dan daerah pelayanan sampah terbatas.
- 1) Berdasarkan data hasil evaluasi Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, tingkat pelayanan sampah kabupaten padang pariaman sebesar 5,19%;
 - 2) Daerah pelayanan sampah Kabupaten Padang Pariaman terbatas bagi penghasil sampah yang sudah melakukan kerjasama pengangkutan sampah, terdata hingga Bulan September 2020 terdapat 23 kerjasama pengangkutan sampah yang terdiri dari 7 perusahaan, 4 sekolah, 2 puskesmas, 2 rumah sakit, 2 pesantren, 6 pasar dan 1 rumah makan;
 - 3) Sedangkan sampah yang bersumber dari daerah pemukiman/ domestik belum terlayani karena keterbatasan sarana dan prasarana.
- c. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman belum memadai
- 1) Kabupaten Padang Pariaman saat ini hanya memiliki 6 unit armada pengangkutan sampah yang terdiri dari 4 unit *dump truck* (pengadaan tahun 2013) dan 2 unit *armroll truck* (pengadaan tahun 2019) sebagai sarana pengangkutan;



- 2) Kabupaten Padang Pariaman sampai saat ini belum memiliki bangunan pengolahan sampah, baik itu berupa Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) ataupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - 3) Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini TPA Kabupaten Padang Pariaman hanya berupa pembuangan sampah pada lahan kosong tanpa ada pengolahan sampah (masih menggunakan sistem *open dumping*). Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menutup TPA yang menggunakan system *open dumping* paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah
- 1) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah masih sangat rendah. Rendahnya kegiatan pengurangan sampah di sumber karena kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang diakibatkan oleh besarnya volume sampah. Sedangkan rendahnya kegiatan penanganan sampah disebabkan karena keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan pemerintah, sehingga masyarakat pemukiman tidak dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah.
 - 2) Masih banyaknya Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) di Kabupaten Padang Pariaman yang belum memiliki izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 3) Berdasarkan data pelaku usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3 (kegiatan penyimpanan), FASYANKES di Kabupaten Padang Pariaman yang sudah memiliki izin penyimpanan Limbah B3 hingga September 2020 hanya ada 2 unit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Padang Pariaman dan Rumah Sakir Paru Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya FASYANKES seperti puskesmas, klinik ataupun rumah bidan yang belum memiliki izin lingkungan, sehingga tidak mengetahui kewajibannya sebagai penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan praturan yang berlaku. Selain itu biaya yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah B3 (kegiatan pengangkutan) juga cukup mahal karena jasa



pihak pengangkutan limbah B3 yang sudah memiliki izin rata-rata berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil terutama mencapai tujuan nasional penerapan kartu tanda penduduk yang berbasis nomor induk kependudukan dan kegiatan lain yang bertujuan untuk penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah :

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, bahkan menganggap bahwa pembangunan adalah tugas Pemerintah.
- b. Masih belum berfungsi BUMNag sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.
- c. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan Teknologi Tepat Guna sehingga belum mampu menunjang penguatan ekonomi masyarakat.
- d. Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Nagari yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti kecamatan, kabupaten sedangkan nagari dan kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara konvensional/tradisional.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya adalah :

- a. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9% (SDKI 2012).
- b. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (*drop out*) masih tinggi, yaitu 27,1%.
- c. Kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif



termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.

- d. Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
- e. Belum optimalnya pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB.
- f. Belum optimalnya Kelompok Kegiatan/Pokta, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA).

9) Urusan Perhubungan

Permasalahan pada urusan perhubungan antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi, belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi.
- b. Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun Konektifitas Wilayah. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi.
- c. Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika, diantaranya adalah:

- a. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b. Belum meratanya akses informasi di Kabupaten.
- c. Masih terbatasnya prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing khususnya akses pitaleb
- d. Belum terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Permasalahan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi :

- a. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
- b. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas).
- c. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.
- d. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah.
- e. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM.
- f. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud.
- g. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen.
- h. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis).
- i. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.
- j. Rendahnya kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

12) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan penanaman modal, diantaranya adalah:

- a. Terdapat ketidaksesuaian pola masyarakat dalam penerapan antara Perda Nomor 5 Tahun 2011 dengan kondisi lapangan (*eksisting*), sehingga menjadi kendala dalam proses penerbitan izin dan menghambat peluang potensi investasi.
- b. Pertumbuhan tambak tanpa izin karena tidak sesuai tata ruang.
- c. Tata ruang, iklim investasi kesesuaian penerapan RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) yang rigid membuat iklim investasi di Kabupaten Padang Pariaman tidak kondusif.
- d. Lahan pertanahan untuk lokasi usaha sulit di proses karena status hutan lindung dan tanah ulayat, dan belum terbentuknya RDTR Kecamatan.
- e. Penataan Perda penghambat penanaman modal saat diterapkannya reformasi perizinan.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga, diantaranya :

- a. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.



- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.
- c. Masih rendahnya keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan.
- d. Belum adanya sarana dan prasana yang representatif.
- e. Rendahnya kualitas atlit dan pelatih.
- f. Terbatasnya SDM olahraga pada sektor pendidikan.
- g. Intensitas kompetisi olahraga yang masih rendah.
- h. Rendahnya apresiasi terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi.
- i. Regenerasi atlit yang berjalan lamban.

14) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada urusan kebudayaan, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.
- b. Belum optimalnya promosi budaya.
- c. Minimnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya.
- d. Belum optimalnya pembinaan lembaga adat.
- e. Belum optimalnya pembinaan kesenian tradisonal.
- f. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya.
- g. Belum terinventarisasinya data budaya lokal termasuk lembaga, aset, SDM pelaku adat, seni dan budaya.

15) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan, diantaranya :

- a. Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.
- a. Keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik setiap harinya dan layanan pada hari libur (Sabtu dan Minggu).
- b. Belum semua Nagari memiliki Pustaka Nagari sebagai sumber informasi pembangunan dan sumber ilmu.

16) Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan, diantaranya adalah:

- a. Belum seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar.
- b. Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
- c. Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan.
- d. Belum tersedianya depo/tempat penyimpanan arsip yang memadai.



2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Perikanan

Permasalahan pada urusan perikanan, diantaranya adalah :

- a. Belum optimalnya produksi hasil perikanan dikarenakan masih rendahnya kualitas dan kuantitas benih dan induk.
- b. Masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap pengamanan kualitas ikan.
- c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (nelayan dan pembudidaya ikan) sehingga tingkat kesejahteraan sulit untuk ditingkatkan.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pembudidayaan ikan.
- e. Masih rendahnya kemampuan permodalan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
- f. Pengembangan budidaya udang vaname banyak yang melanggar regulasi.
- g. Masih rendahnya mutu dan pengolahan hasil produk perikanan.
- h. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran.
- i. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan sebagai akibat masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai gizi dan manfaat ikan untuk kesehatan dan kecerdasan.

2) Pariwisata

Permasalahan pada urusan pariwisata, diantaranya adalah :

- a. Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun potensi ini masih perlu pengelolaan lebih lanjut, agar jumlah kunjungan wisata terus meningkat, dari tahun 2015 yaitu sebanyak 4.396.731 orang (domestik) dan 4.851 orang (mancanegara), tahun 2016 sebanyak 4.118.724 orang (domestik) dan 4.507 orang (mancanegara), tahun 2017 sebanyak 4.201.094 orang (domestik) dan 4.597 orang (mancanegara), tahun 2018 sebanyak 4.345.107 orang (domestik) dan 4.370 orang (mancanegara), dan tahun 2019 sebanyak 395.904 orang (domestik) dan 886 orang (mancanegara). Pertumbuhan sektor pariwisata ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor lainnya, seperti perdagangan dan jasa.
- b. Belum adanya rest area di sepanjang jalur Padang-Bukittinggi.



- c. Belum adanya TIC (*Tourisme Information Center*) atau pusat informasi wisata Padang Pariaman dimana Padang Pariaman merupakan pintu gerbang masuk Sumatera Barat.
- d. Belum optimalnya sarana dan prasana di objek wisata unggulan.

3) Urusan Pertanian

Permasalahan pada urusan pertanian, diantaranya adalah :

- a. Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Pariaman (2019), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi kedua terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Namun meskipun peranannya tinggi, kontribusi sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB baru mencapai 19,18%
- b. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah.
- c. Belum optimalnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan (populasi ternak) dan perikanan.
- d. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana.
- f. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan.
- g. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum (90%)
- h. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
- i. Belum optimalnya pengembangan komoditi produk unggulan daerah (PUD) seperti kelapa dan kakao yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah.

4) Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan, diantaranya adalah :

- a. Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi sebesar 8,92% terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Namun selama kurun waktu tahun 2015-2019 tidak terlihat mengalami kenaikan yang signifikan.
- b. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi.



- c. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah.
- d. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan).
- f. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.

5) Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar nomor 3 (tiga) setelah sektor transportasi dan pergudangan serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2015-2019 lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan pola peranan yang menurun. Makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kabupaten Padang Pariaman terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kabupaten Padang Pariaman, terutama di sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil. Akar permasalahan pada urusan perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya sebagai berikut :

- a. Tingginya harga bahan baku produksi usaha industri.
- b. Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM).
- c. Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM).
- d. Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.

2.3.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1) Urusan Perencanaan

Permasalahan pada urusan perencanaan, antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.



- c. Keterbatasan ketersediaan daya dan belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
- d. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.
- e. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi.

2) Urusan Keuangan

Relatif kecilnya daya dukung PAD terhadap belanja daerah. Pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 20%, namun kontribusinya terhadap total pendapatan 6,7% dan masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya yang intensif.

3) Urusan Kepegawaian

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme.
- b. Alokasi dalam hal kuantitas dan distribusi PNS yang belum seimbang dan merata.
- c. Masih kurangnya intensitas kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas Pegawai.
- d. Masih rendahnya tingkat pendayagunaan aparatur setelah diklat teknis dan fungsional.
- e. Tingkat produktivitas PNS masih rendah.
- f. Tingkat kedisiplinan aparatur yang belum maksimal.
- g. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah.
- h. Penempatan Pegawai belum sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu.

4) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan pendidikan dan pelatihan, diantaranya meliputi :

- a. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata.
- c. Rendahnya waktu lama diklat yang diikuti aparatur.
- d. Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat.
- e. Belum adanya sistem informasi kediklatan.



5) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan, diantaranya adalah :

- a. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- b. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- c. Jaringan kelitbangan yang masih belum ada.
- d. Belum adanya kerjasama yang melibatkan pihak akademisi dalam suatu penelitian.
- e. Belum adanya forum kelitbangan.

6) Urusan Pengawasan

Permasalahan pada urusan pengawasan, diantaranya adalah :

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan.
- c. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- d. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

7) Fungsi Lainnya

a. Sekretariat DPRD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM.
2. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Peningkatan hubungan yang hamonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.

b. Kesra

Permasalahan pada urusan kesra, diantaranya adalah:



1. Lemahnya koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, agama, pendidikan, serta pemuda dan olahraga baik antar instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah.
2. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan masyarakat.
3. Kurang optimalnya pembinaan bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan masyarakat.

c. Organisasi

Permasalahan pada urusan organisasi, diantaranya adalah :

1. Tumpang tindih tupoksi antar OPD.
2. Belum semua OPD menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
3. Belum semua OPD dan UPTD Provinsi serta Kabupaten/Kota memahami dengan baik tentang anjab, ABK, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan.
4. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

d. Hukum

Permasalahan pada urusan hukum, diantaranya adalah :

1. Masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.
2. Masih perlunya kualitas aparatur dalam memberikan pendapat dan konsultasi hukum bagi pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya kualitas produk hukum daerah

2.3.3. Isu Strategis daerah Kabupaten Padang Pariaman

1. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah*. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi



dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falasah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu dalam pembangunan kualitas perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi



perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.

Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani pada tahun 2020 sedikit diatas 100, tepatnya 100,59. Namun antara 2016-2019 berada dibawah 100, yaitu dari 97,67 pada tahun 2016 hingga 95,99 pada tahun 2019. Nilai tukar petani yang rendah (< 100) terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan, nilai tukar petani yang tinggi (>100) terjadi pada peternakan dan perikanan, perkebunan rakyat berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumah tangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial. Fragmentasi atau ukuran lahan yang semakin menyempit karena semakin panjang waris tanah akan mempengaruhi skala keekonomian usaha tani. Untuk itu, strategi pembangunan pertanian dapat diarahkan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau non-pertanian bagi petani berlahan sempit guna mengoptimalkan curahan waktunya. Peningkatan produktivitas melalui transformasi pertanian dari tanaman pangan ke campuran bahkan pertanian komersial terspesialisasi membutuhkan kebijakan yang bertahap dan



terukur yang membutuhkan komitmen kuat dalam mengenalkan bibit unggul, pengolahan lahan secara produktif, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumahtangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi. Sentra-sentra produksi pertanian sangat bermanfaat sebagai *collective action* (tindakan bersama) untuk meningkatkan daya tawar petani dalam daya dukung transportasi, maupun keuntungan dalam biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan pasar. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Mitigasi bencana alam dan pengembangan lahan pertanian semakin membutuhkan pertimbangan terhadap kerawanan bencana alam, termasuk banjir maupun longsor.

Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

Sektor perikanan dihadapkan pada terbatas sarana dan prasarana perikanan tangkap. Pengolahan hasil perikanan yang telah berkembang masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor



perikanan budidaya, pengembangan cepat budidaya udang vaname sepanjang pesisir, maupun kesehatan hewan dan ternak dari penyakit mewabah.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing. Terlebih bila mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengembangkan aplikasi belanja daring lokal.

Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan dan UMKM masih menjadi prasyarat perlu. Namun akses permodalan saja tidak mencukupi bila belum didukung oleh peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi start up, wirausahawan milenial, women entrepreneur dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Kebutuhan pariwisata yang semakin meningkat berhadapan dengan pengelolaan objek destinasi wisata dengan penyediaan sarana prasarana dan utilitas serta atraksi.

Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung dan akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan inovasi



(kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

4. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi covid-19 yang mulai mereda masih tetap mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).

Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia. Perlindungan dan penanganan wabah penyakit tidak hanya dari penyakit tidak terduga seperti covid-19, flu burung, namun juga berbagai penyakit terkait pola hidup yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberculosis, juga HIV/AIDS. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Disamping itu, pada tahun 2020 masih ditemukan kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3988 orang, yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah pesertanya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam



rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten

Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif serta perkembangan terkini berkonsekuensi kebutuhan untuk melakukan transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik lebih terbuka, keterbukaan dan penyampaian informasi publik.

Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara elektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.



6. Optimalisasi Pelayanan Dasar

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

7. Peningkatan PAD dan Investasi Daerah

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar 15,61 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2020, 2021 proyeksi di tahun 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dengan lainnya, maka dari itu perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah ataupun sebaliknya.

Kondisi tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 serta proyeksi perekonomian di tahun 2022 digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang sekaligus merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut, akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasil guna.

Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah.

Menyikapi hal tersebut, disusunlah berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada sisi yang lain, perkiraan pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kerangka ekonomi makro nasional disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus



dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai. Kerangka ekonomi makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk proyeksi Indikator Ekonomi Makro Indonesia selama kurun waktu lima tahun sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2020-2024

Indikator	2020		2021	2022	2023	2024
	APBN	Outlook				
1	2	3	4	5	6	7
1 Pertumbuhan ekonomi (%. Yoy)	5,3	(0,4)-2,3	4,5 - 5,5	5,4 - 6,0	5,5 - 6,3	5,5 - 6,5
2 Inflasi (%. yoy)	3,1	2,0-4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
3 Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	4,5	0	0	0	0
Tingkat Suku Bunga SBN 10Y (%)	0	0	6,67 - 9,56	5,98 - 8,07	5,82 - 8,16	5,67 - 8,24
4 Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	14.900-15.500	14.900-15.300	13.900-14.850	13.900-14.850	13.900-15.000
5 Harga Minyak Mintah (US\$/Barel)	63	30 - 35	40 - 50	60 - 70	60 - 70	60 - 70
6 Lifting Minyak (ribu barel per hari)	755	705	677 - 737	636 - 735	570 - 735	534 - 722
7 Lifting Minyak (Ribu barel setara minyak per hari)	1.191	992	1.085 - 1.173	1.232 - 1.341	1.224 - 1.336	1.228 - 1.324

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024

Kebijakan ekonomi nasional yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut, menghadapi tantangan sangat besar dengan adanya ketidakpastian global terutama disebabkan oleh adanya Pandemi *Covid-19*, sehingga laju pertumbuhan ekonomi relatif stagnan, defisit transaksi berjalan yang meningkat, tekanan kuat dari revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

Namun, dalam kondisi apapun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian, *Gross National Income (GNI)* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan dapat.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun. Pencapaian



sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Pandemi *Covid-19*, telah menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan angka kematian. Berdasarkan pola penyebaran *Covid-19* saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif lebih besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan *surveilans*, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif *Covid-19* menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, *Covid-19* memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan pengalaman saat *SARS* dan *MERS* yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara, dampak *Covid-19* diperkirakan akan lebih besar dan lama.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia lainnya, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif *Covid-19*. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Hal inipun juga berdampak pada investasi sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan (NPL)* dan *volatilitas* di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Meski demikian, Bank Dunia mencatatkan ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022. Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada di angka 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta, seiring dengan longgarnya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan



konsumen meningkat. Di sisi lain, hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2022 yang diperkirakan menguat ke level 4,8 persen didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut Bank Dunia proyeksi acuan dasar ini akan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi terkait dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lainnya.

Bank Dunia juga mencatat adanya potensi bahwa pertumbuhan Indonesia merosot menjadi 3,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022. Lebih rendah dari skenario terburuk akibat pengetatan PSBB, pertumbuhan global yang lebih lemah dan harga komoditas. Oleh sebab itu, kinerja pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada penanggulangan potensi dampak negatif krisis terhadap investasi, produktivitas dan modal manusia.

Menurut *Asian Development Bank (ADB)*, pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis. Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Lalu, pemulihan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik. Hal ini juga seiring dengan prospek pemulihan yang akan terus terjadi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan meningkatnya harga komoditas internasional. Melangkah terus ke depan, permintaan domestik diperkirakan baru akan bisa pulih sepenuhnya di tahun 2022. Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi *Covid-19*.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadaai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.



Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

3.1.2.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Kondisi Ekonomi Makro Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.01	-1.60	6.20
Laju Inflasi (%)	1.66	2.11	5.00
Ketimpangan Wilayah	0.27	0.32	
Indeks Gini Rasio	0.30	0.31	0.33
Tingkat Kemiskinan (%)	6.42	6.28	8.91
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.38	6.88	4.95

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%.



- Pertumbuhan PDRB per kapita pun berkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta.
2. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh *Covid-19*.
 3. Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 10 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,006 poin ke angka 0,301 pada tahun 2020 yang lalu. Pandemi *Covid-19* justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi *Covid-19* memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,319.
 4. Untuk aspek kemiskinan kondisi pandemi *Covid-19* menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%.
 5. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan.

3.1.2.2. Proyeksi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian *Covid-19*. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2020, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2021. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2020, justru meningkat di awal tahun 2021. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2021 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,2%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2021 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 4,22%. Angka ini sendiri mengacu kepada Rancangan RKP Tahun 2021.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2020, perhitungan awal pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan mencapai angka 5,55%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari *outlook* Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih tinggi ini akan dapat dicapai dengan catatan, terjadi kenaikan pergerakan orang dan barang yang tertahan pada tahun 2020 dan proses vaksinasi berjalan sesuai dengan target nasional. Prasyarat ini penting mengingat lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang mengalami kontraksi terdalam di tahun 2020.



Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2022 diperkirakan berada pada angka 5,4 – 5,7 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Proyeksi Indikator Makro
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05%	-1,60%	5,20%	5,60%
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,67	30,64	32,06	32,92
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,29	43,75	46,22	48,28
4	TPT (%)	5,33%	6,88%	6,63%	6,31%
5	IPM	72,39	72,38	74,10	74,75
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,31	69,47	69,63	69,78
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,01	14,02	15,09	15,31
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,99	9,93	10,07
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.925	10.733	10.954	11.178
6	Kemiskinan (%)	6,40%	6,56%	6,36%	6,15%
7	Jumlah Penduduk Miskin	348,22	364,79	356,17	348,95
8	Gini Rasio	0,310	0,301	0,299	0,298
9	Indeks Williamson	0,274	0,315	0,286	0,286

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman

3.1.3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.
Kondisi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.4	-10.46	6.2
PDRB Atas Harga Berlaku (Rp Milyar)	21.29	17.94	18.49
Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	7.09	6.95	8.91
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.97	8.13	4.95
Indeks Pembangunan Manusia	70.59	70.61	71.07



Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.62	13.67	13.55
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.86	7.87	6.94
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.58	68.79	68.99
Indeks Gini Ratio	0.29	0.26	0.33

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator Ekonomi Makro daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 tercatat sebesar -10,46 persen, menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Penurunan tersebut tidak terlepas lesunya sektor transportasi udara sebagai penopang utama PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Akibat adanya kebijakan kenaikan harga tiket pesawat, penerbangan domestik yang datang dan berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan yang signifikan

2. Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku relatif setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar terjadi penurunan sebesar Rp 3.310.515,22 juta rupiah dari Rp. 21.252.415,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi Rp. 17.941.900,08 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini mencerminkan dampak yang ditimbulkan atas produktivitas ekonomi secara riil, karena penurunan ini masih mengandung unsur inflasi.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global.

Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2020 mengalami kinerja yang turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang juga sangat berdampak pada inflasi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2020, laju Inflasi kabupaten Padang Pariaman sebesar 2,12 sedangkan di tahun 2019 mencapai 1,72. Secara umum, penurunan daya beli pada sektor transportasi



sehingga jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Barat khususnya Kabupaten Padang Pariaman menurun sangat signifikan sehingga berdampak terhadap daya beli pada kelompok makanan jadi dan minuman.

3. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin berjumlah 6,95 persen sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan berjumlah 93,05 persen. Namun walaupun demikian, penduduk miskin masih rentan terhadap perubahan harga terutama kebutuhan pokok, biaya angkutan dan biaya kesehatan dan sebagian besar penduduk miskin tersebut berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, jika dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 7,09% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 6,95%, namun pada tahun 2021 diproyeksi mengalami kenaikan menjadi 8,91%.

4. Berbeda halnya dengan tingkat kemiskinan di kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 malah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terjadi anomali data capaian kinerja, karena tingkat kemiskinan yang sekiranya linear dengan tingkat pengangguran terbuka, namun terjadi pengecualian di tahun 2020 tersebut. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,97%, namun pada tahun 2020 mencapai 8,13% dengan kecenderungan adalah pengangguran berpendidikan dan didominasi dari kaum perempuan.
5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Kinerja dari indikator ini memang memang setiap tahun mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,61 dan berada di ranking 11 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa 3 indikator utama (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) masih sangat perlu kerja keras pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - a. Dari dimensi pendidikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai angka 13,67 tahun justru tidak diringi dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada di posisi 7,87 tahun pada tahun 2020.
 - b. Sementara itu dari dimensi kesehatan, capaian angka harapan hidup pada tahun 2020 sebesar 68,79 tahun dan lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang sudah sebesar 69,47 tahun. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup sehat.
 - c. Selanjutnya dari sisi ekonomi, salah satu ukuran dalam menilai ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien Gini atau Gini Ratio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran umum untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi pada suatu wilayah. Indeks Gini memiliki kisaran nilai antara 0 sampai 1. Nilai 0



menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman berada di kategori “rendah” dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 pada angka 0,29 menjadi 0,26 pada tahun 2020 yang lalu. Angka ini berada di bawah angka Gini Ratio Provinsi yang sebesar 0.301. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pemerataan pendapatan Kabupaten Padang Pariaman lebih baik dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

3.1.3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2022 diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang menjadi basis terhadap perekonomian masyarakat dengan daya dukung melalui sektor pertanian, hasil olahan dan sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan tantangan dan hambatan terutama dalam penanganan *Covid-19*. Adapun secara detail arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan pendapatan petani
- 2 Penguatan ketahanan pangan masyarakat
- 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
- 4 Mengoptimalkan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
- 5 Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
- 6 Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
- 7 Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
- 8 Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
- 9 Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
- 10 Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- 11 Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan katakteristik wilayah Padang Pariaman
- 12 Implementasi regulasi pengentasan kemiskinan
- 13 Peningkatan keahlian pelaku usaha perekonomian masyarakat
- 14 Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa
- 15 Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat
- 16 Penerapan protokol kesehatan dan mendorong percepatan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular bagi masyarakat
- 17 Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 18 Peningkatan promosi dan kemitraan investasi



19 Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

3.1.3.3 Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Pandemi *Covid-19* menyebabkan proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman menjadi lebih kompleks. Dengan berkurangnya pendapatan, tentu saja juga akan berdampak pada target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, di samping menopang ketahanan ekonomi nasional dan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, tentu dengan keoptimisan proyeksi Ekonomi Makro akan tetap dipertahankan dengan memperhatikan capaian-capaian pada tahun sebelumnya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional :

1. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro.
2. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip *sharing economy* akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.
3. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2020 mendatang.

Tabel berikut memperlihatkan beberapa indikator Ekonomi Makro yang telah dicapai selama ini dan target untuk tahun 2022 :

**Tabel 3.5.
Kondisi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022**

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi		Target	
	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,4	-10,46	-6,465	5,44
PDRB Atas Harga Berlaku (Rp Milyar)	21.287	17.941	18.046	17.532
Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	7,09	6,95	6,46	6,48
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,97	8,13	7,58	7,52
Indeks Pembangunan Manusia	70,59	70,61	71	70,97



Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi		Target	
	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,67	14	13,55
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	8	7,89
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,58	68,79	69	69,19
Indeks Gini Ratio	0,29	0,26	0,26	0,3

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah :



1. Taat pada peraturan perundang-undangan;
2. Efektif dan efisien;
3. Ekonomis;
4. Transparan;
5. Bertanggungjawab;
6. Berkeadilan;
7. Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, Kemampuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak terlalu jauh mengalami perubahan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Kemampuan Fiskal Daerah
Kabupaten padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai	Kategori
2019	0.756	Sedang
2020	0.581	Rendah
2021	0.581***	Rendah

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Maka dari itu, dalam misi ke-VII dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya untuk lebih detail terkait dengan pajak daerah. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan pajak daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggabungan 10 (sepuluh) Perda pajak daerah menjadi satu.
2. Penambahan 1 (satu) potensi pajak daerah dari pajak sarang burung walet.
3. Inovasi pelayanan pajak daerah berupa e-pbb dan ebphbtb yang terintegrasi dengan bank nagari dan bpn
4. Menjaln kerjasama berupa MoU dengan Kejaksaan Negri Pariaman, BPN dan PLN Pusat, PT. Pos, Pos Indonesia
5. Pemutakhiran data pajak daerah melalui penilaian SPT PBB oleh pihak ketiga
6. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah

Sedangkan arah kebijakan untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Penyusunan Perda tentang peningkatan retribusi serta revisi beberapa Perda Retribusi untuk penambahan retribusi yang baru;
2. Evaluasi dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Untuk Proyeksi Pendapatan pada tahun 2022, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi pendanaan dari 2016-2020. Kinerja pelaksanaan APBD berhubungan dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2019-2021. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai PP 12 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.7. berikut :



Tabel 3.7.
Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
Kabupaten Padang Pariaman

Akun	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-Rata Pro-porsi
		REALISASI PERIODE INI	PRO-PORSI	REALISASI PERIODE INI	PRO-PORSI	REALISASI PERIODE INI	PRO-PORSI	REALISASI PERIODE INI	PRO-PORSI	REALISASI PERIODE INI	PRO-PORSI	
4	PENDAPATAN	1,353,306,741,300.52		1,388,638,247,012		1,309,985,762,673		1,510,528,680,350		1.305.830.931.602,99		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72,859,394,000.52	5.4	141,310,805,691.52	10.2	84,502,722,191.02	6.5	101,607,521,617.01	6.7	106.004.115.199,99	8	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26,922,241,098.72	2.0	36,853,311,532.17	2.7	41,412,253,897	3.2	48,301,645,277	3.2	41.824.536.856,45	3	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,581,656,264	0.9	15,835,547,794	1.1	2,864,836,657	0.2	2,650,742,637	0.2	2.185.534.022,00	0	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,037,912,930	0.4	6,014,169,910	0.4	5,791,014,751	0.4	6,368,010,478	0.4	6.860.844.053,00	1	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28,317,583,707.80	2.1	82,607,776,455.35	5.9	34,434,616,886.02	2.6	44,287,123,225.01	2.9	55.133.200.268,54	4	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1,128,367,944,854	83.4	1,059,564,099,184	76.3	1,087,008,037,363	83.0	1,139,643,299,241	75.4	973.687.956.910,00	75	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12,442,895,886	0.9	12,500,475,382	0.9	10,495,713,562	0.8	9,269,389,185	0.6	8.760.357.169,00	1	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	783,592,205,000	57.9	769,827,010,000	55.4	769,827,010,000	58.8	792,616,064,000	52.5	716.079.920.000,00	55	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	332,332,843,968	24.6	277,236,613,802	20.0	306,685,313,801	23.4	337,757,846,056	22.4	248.847.679.741,00	19	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152,079,402,446	11.2	187,763,342,136	13.5	138,475,003,119	10.6	269,277,859,492	17.8	226.138.859.493,00	17	
4.3.1	Pendapatan Hibah	54,800,085,000	4.0	28,334,972,315	2.0	65,888,199,168	5.0	94,408,997,743	6.3	66.436.973.159,00	5	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45,000,488,946	3.3	49,176,302,821	3.5	49,161,188,951	3.8	56,935,922,749	3.8	49.711.167.563,00	4	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6,438,518,500	0.5	51,028,495,000	3.7	16,500,000,000	1.3	22,884,576,000	1.5	14.163.265.000,00	1	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45,324,545,000	3.3	58,865,722,000	4.2	6,700,000,000	0.5	95,038,398,000	6.3	20.970.000,00	0	
4.3.6	Pendapatan Lainnya	515,765,000	0.0	357,850,000	0.0	225,615,000	0.0	9,965,000	0.0	95.806.483.771,00	7	

Sumber : Data Olahan BPKD Kabupaten Padang Pariaman



Sesuai dengan aturan yang berlaku, komponen pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 5 tahun terakhir didasarkan kepada klasifikasi tersebut. Realisasi target pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut ini :

Tabel 3.8.
Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Pertumbuhan
1	2019	1,520,643,679,559.00	1,510,528,680,350.01	99.33	15,31
2	2020	1,348,174,651,961.00	1,305,720,742,442.99	96.85	-13,56
3	2021	1,423,856,132,812.00	1,373,404,163,839.36	96.42	5.18
	Rata-Rata	1,430,891,488,110.67	1,396,551,195,544.12	97.53	5.18

Sumber : LKPD Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021

Dari tabel 3.8. dapat kita lihat target pendapatan sangat jauh berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* dimana melalui PMK. No 35 Tahun 2020 pemerintah pusat memotong langsung Dana Alokasi Umum dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan Refocusing Anggaran pada setiap Belanja Organisasi Perangkat Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan, belanja tersebut direalokasi pada Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan *Covid-19*.

Pencapaian Perda APBD Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal, dimana hal ini salah satunya juga akibat dari pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perda, sedangkan efisiensi pengeluaran dapat dicapai dengan penghematan belanja dan pembiayaan.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah berjalan memasuki paruh tahun dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya. Sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dimana telah memberikan gambaran arah kebijakan umum terkait kondisi dan kebijakan anggaran.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain. Pertama penyesuaian target pendapatan, baik peningkatan maupun kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2020 pengurangan target pendapatan pada pos pos tertentu sebagai penyesuaian riil dari peningkatan kinerja ataupun penyesuaian dana perimbangan,



Pemerintah Pusat, serta hambatan dan kendala yang terjadi, berdasarkan evaluasi hasil pencapaian target pada triwulan pertama dan kedua. Kedua, perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama semester pertama yang dalam implementasinya ternyata perlu untuk dilakukan peninjauan ulang program dan Ketiga, adanya berbagai kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya dalam Perubahan Anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020, dinyatakan bahwa dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2020, namun Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020.

Selanjutnya bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 2,39 persen per tahun, dengan pertumbuhan pendapatan daerah terbesar bersumber dari PAD sebesar 15,61 persen per tahun, dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,41 persen per tahun. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,02 persen per tahun.

Tabel 3.9.
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)		
	2019	2020	2021
PAD	6.7	7.4	9.2
Dana Perimbangan	75.4	78.5	85.6
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.8	14.1	5.1
Total	100	100	100

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Pada Tabel 3.9. dapat dilihat persentase proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah, dimana proporsi pendapatan asli daerah naik dari 6,7 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2019 menjadi 7,4 persen dari pendapatan APBD pada tahun 2020. Kontribusi dana perimbangan mengalami peningkatan dari 75,4 persen dari total pendapatan APBD tahun 2019 menjadi 78,5 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2020. Sebaliknya proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2019 dari 17,8 persen dari total pendapatan APBD menjadi 14,1 persen dari total



pendapatan APBD pada tahun 2020 dan diproyeksikan turun menjadi 5,1 persen ditahun 2021.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 201-2021, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,61 persen per tahun. Komponen PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.10.
Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Bertambah/ Berkurang
2019	100,249,901,104.00	101,607,521,617.01	101.35	1,357,620,513,01
2020	112,189,712,837.00	106,004,115,199.99	94.49	-6,185,597,637.01
2021	131,417,232,000.00	117,999,532,612.80	89.79	-13,417,699,387.20
Rata-Rata	114,618,948,647.00	108,537,056,476.60	95.21	-9,801,648,512.11

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

PAD Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2019-2020 mengalami pertumbuhan berfluktuatif, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi. Selama periode pencapaian realisasi masih di bawah target yang ditetapkan, hanya tahun 2019 realisasi melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2019-2021, yaitu 15,61% per tahun.

Selanjutnya sumber utama pendapatan asli daerah lebih banyak berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Penerimaan Jasa Giro; (c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (d) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (e) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; (f) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (g) Dana Bos; (h) Pendapatan BLUD; dan (i) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, meliputi Sewa Rumah Dinas, Sewa Hall Pemda, Sewa Toko Pasar Pariaman, Setoran Laporan Hasil Pemeriksaan, Taspen, Setoran Jaminan Pekerjaan, Denda, Pokok Dana Bergulir, Setoran Ketimpangan Harga/Kekurangan volume dan Pendapatan Lainnya. Sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah pendapatan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pendapatan dari pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 11.58 persen selama periode 2019-2021. Realisasi pajak daerah selama periode tahun anggaran 2019-2021 mampu mengiringi dari target yang telah



ditentukan, dimana dari rata-rata target pajak daerah sebesar Rp47,650,000,000,- terealisasi sebesar Rp48,372,082,377.82, disajikan pada Tabel 3.11.

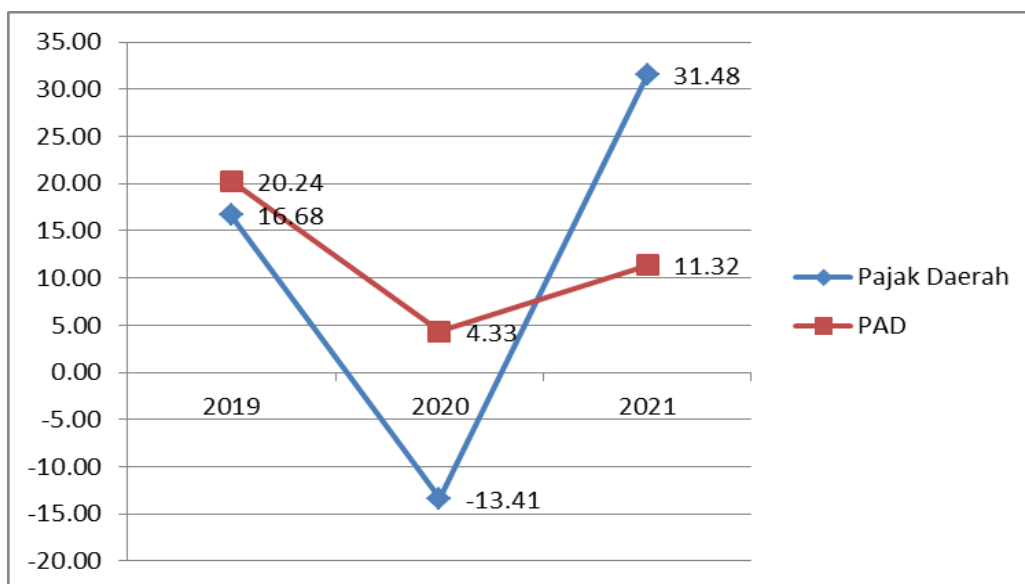
Tabel 3.11.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Bertambah/Berkurang
2019	46,900,000,000.00	48,301,645,277.00	102.99	1,401,645,277.00
2020	40,900,000,000.00	41,824,536,856.45	102.26	924,536,856.45
2021	55,150,000,000.00	54,990,065,000.00	99.71	-159,935,000.00
Rata-Rata	47,650,000,000.00	48,372,082,377.82	101.65	722,082,377.82

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Gambar 3.1.

Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode tahun anggaran, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp3,961,966,666.67,- dan realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp3,142,872,386.33,- disajikan pada Tabel 3.12.



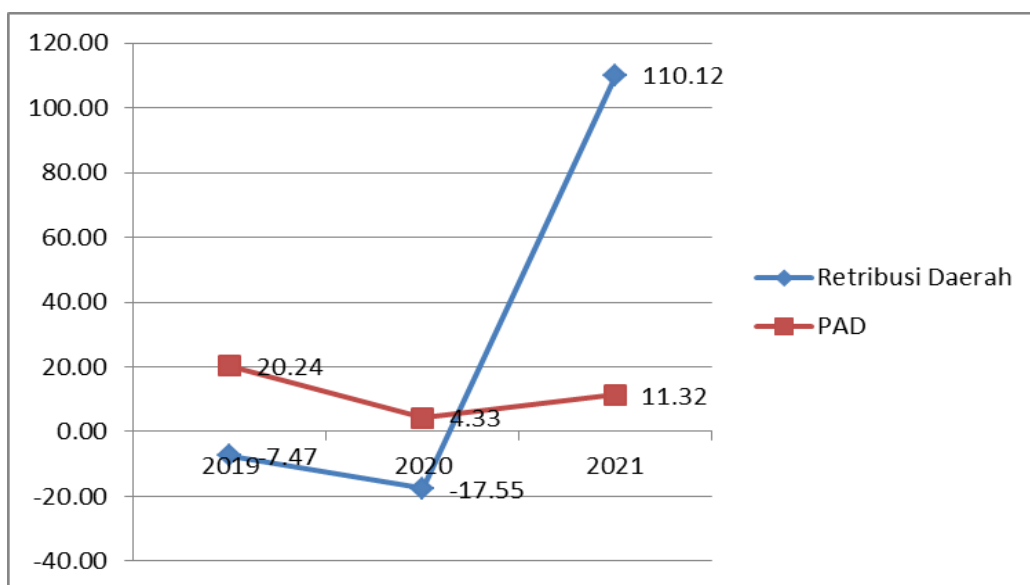
Tabel 3.12.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2019	3,645,000,000.00	2,650,742,637.00	72.72	-994,257,363.00
2020	2,725,900,000.00	2,185,534,022.00	80.18	-540,365,978.00
2021	5,515,000,000.00	4,592,340,500.00	83.27	-10,107,340,500.00
Rata-Rata	3,961,966,666.67	3,142,872,386.33	78.72	-3,880,654,613.67

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Pertumbuhan retribusi daerah cenderung sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dimana pertumbuhan PAD kecenderungannya menurun, demikian juga tren pertumbuhan retribusi daerah yang senantiasa juga mengalami penurunan. Realisasi retribusi daerah selama tahun 2019-2021 tumbuh positif dengan rata-rata sebesar minus 28,37 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.2.
Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. Selama periode tahun anggaran ,rata-rata target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6,366,666,666.67,- realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp6,548,008,177,- disajikan pada Tabel 3.13.

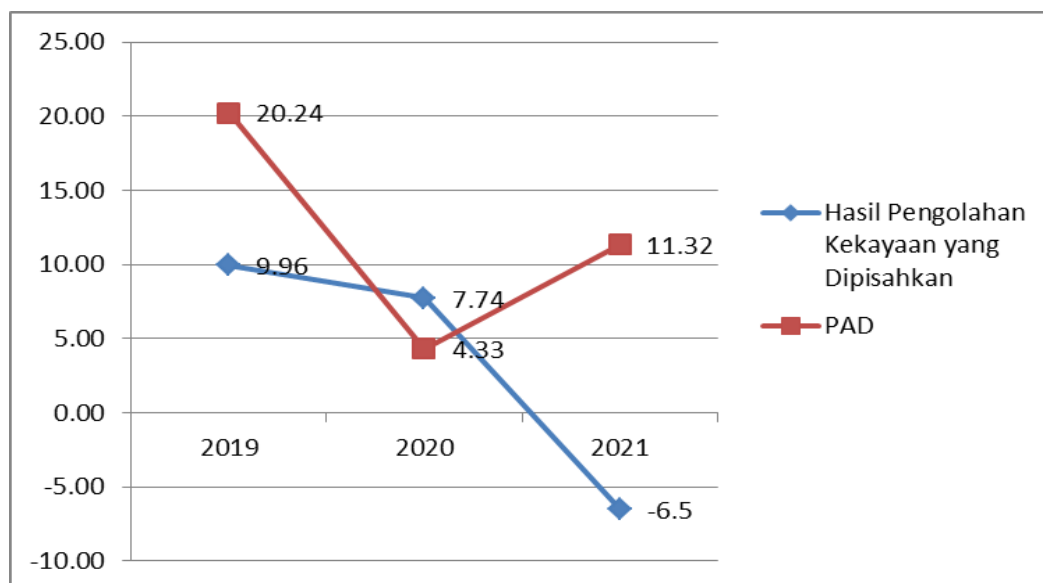
Tabel 3.13.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2019	6,500,000,000.00	6,368,010,478.00	97.97	-131,989,522.00
2020	6,150,000,000.00	6,860,844,053.00	111.56	710,844,053.00
2021	6,450,000,000.00	6,415,170,000.00	99.46	-34,830,000.00
Rata-Rata	6,366,666,666.67	6,548,008,177.00	103.00	181,341,510.33

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3.73 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.3.
Pertumbuhan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari:(a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Penerimaan Jasa Giro; (c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (d) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (e) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; (f) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (g) Dana Bos; (h) Pendapatan BLUD; dan (i) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, meliputi Sewa Rumah Dinas, Sewa Hall Pemda, Sewa Toko Pasar Pariaman, Setoran Laporan Hasil Pemeriksaan, Taspem, Setoran Jaminan Pekerjaan, Denda, Pokok Dana Bergulir, Setoran Ketimpangan Harga/Kekurangan volume dan Pendapatan Lainnya.



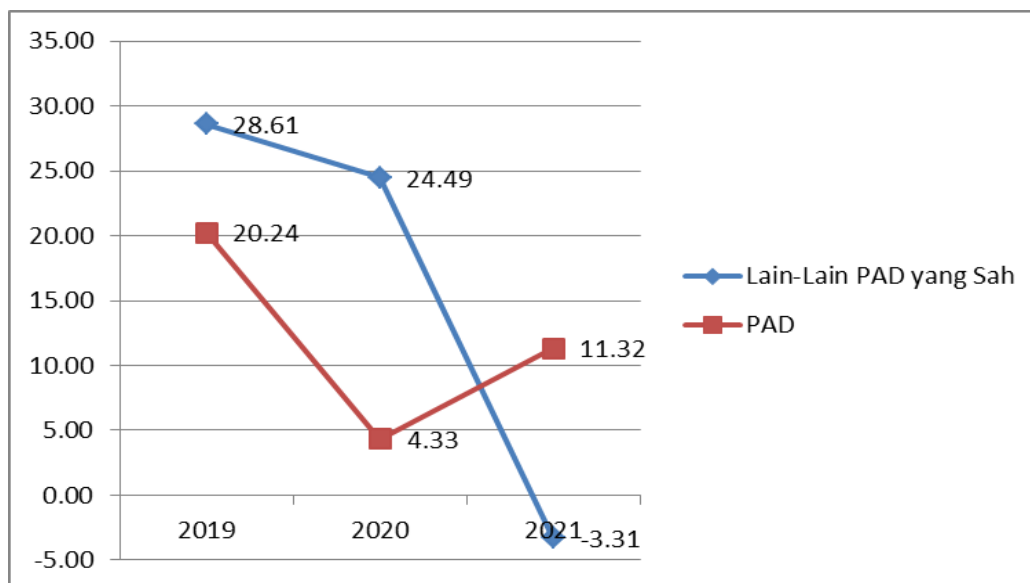
Selama periode tahun anggaran, rata-rata target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp56,640,315,313.67,- sedangkan realisasinya hanya tercapai sebesar Rp50,908,957,940.52,- disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	43,204,901,104.00	44,287,123,225.01	102.50	1,082,222,121.01
2020	62,413,812,837.00	55,133,200,268.54	88.33	-7,280,612,568.46
2021	64,302,232,000.00	53,306,550,328.00	82.90	-10,995,681,672.00
Rata-Rata	56,640,315,313.67	50,908,957,940.52	91.24	-5,731,357,373.15

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Gambar 3.4.
Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Lain-lain PAD yang sah selama tahun 2019 hingga tahun 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 16.60 persen per tahun, dengan rincian per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal dengan dibuktikan masih banyak penerimaan di bawah target yang ditetapkan terutama retribusi daerah, kondisi ini disebabkan oleh:



- a) Penetapan target yang tidak berdasarkan data kenyataan di lapangan karena belum melalui survei terhadap potensi.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- c) Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
- d) Belum lengkapnya data tentang pajak dan retribusi daerah.
- e) Relatif rendah dan kurang berkembangnya basis, struktur serta jenis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
- f) Perannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat.
- g) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
- h) Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- i) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.



2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan selama periode tahun 2019-2021, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4.37 persen per tahun. Komponen dana perimbangan terdiri atas: (1) dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; (2) dana alokasi umum; dan (3) dana alokasi khusus. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Secara keseluruhan, rata-rata target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp1,31,293,984,275.33,- dengan rata-rata Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp1,103,095,828,815.86,- disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	1,174,021,924,000.00	1,139,643,299,241.00	97.07	-34,378,624,759.00
2020	1,000,740,528,014.00	973,687,956,910.00	97.30	-27,052,571,104.00
2021	1,219,119,500,812.00	1,195,956,230,296.57	98.10	-23,163,270,515.43
Rata-Rata	1,131,293,984,275.33	1,103,095,828,815.86	97.49	-28,198,155,459.48

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp165.955.342.331,00 atau 14,56%. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pagu indikatif anggaran dari Pemerintah Pusat akibat Pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode tahun anggaran 2019-2021 adalah sebesar Rp9,786,755,671.33 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp7,401,533,784.67,- disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	11,647,558,000.00	9,269,389,185.00	79.58	-2,378,168,815.00
2020	12,197,709,014.00	8,760,357,169.00	71.82	-3,437,351,845.00

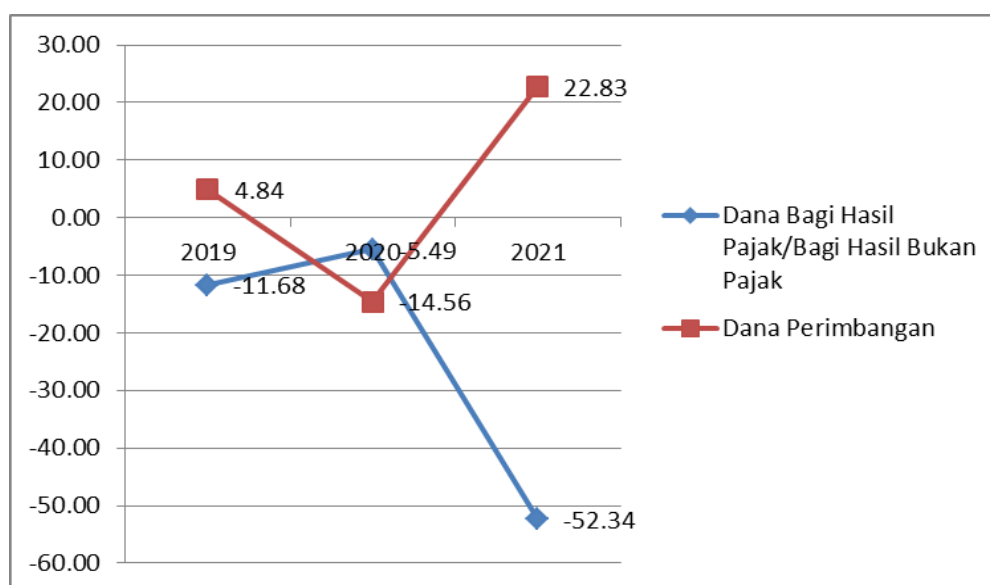


Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2021	5,515,000,000.00	4,174,855,000.00	75.70	-1,340,145,000.00
Rata-Rata	9,786,755,671.33	7,401,533,784.67	75.70	-2,385,221,886.67

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak selama tahun 2019 hingga tahun 2021 tumbuh negatif dengan rata-rata sebesar minus 23.17 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada gambar 3.5.

Gambar 3.5.
Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan realisasi dari DAU Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan mampu terealisasi 100%, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Rata-rata penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode tahun anggaran 2019-2021 adalah sebesar Rp739,858,207,333.33 total tersebut terealisasi 99.68 persen, disajikan pada Tabel 3.17. Adapun dasar penganggaran Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam rangka Penanganan Pandemi



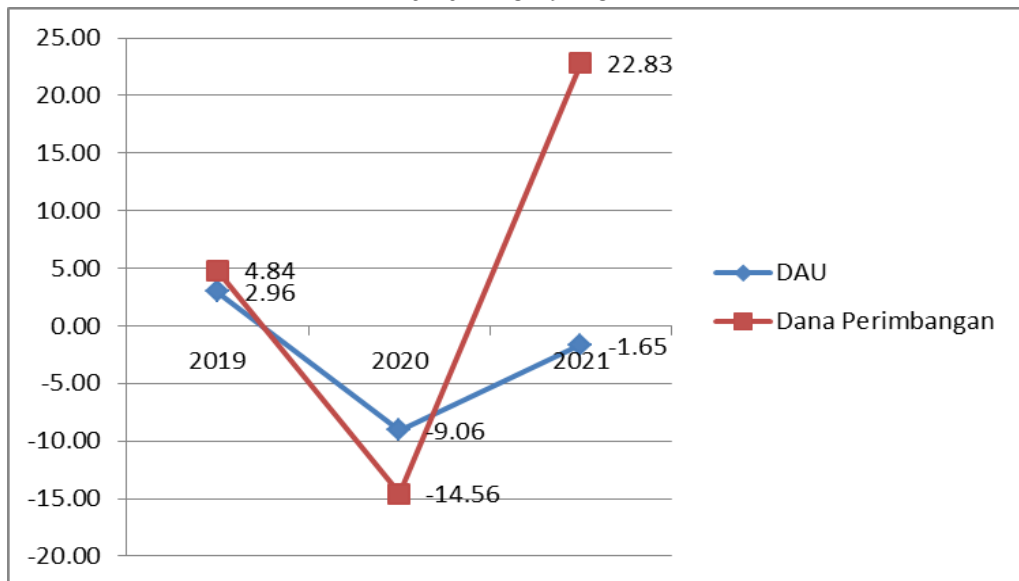
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Tabel 3.17.
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	790,451,964,000.00	792,616,064,000.00	100.27	2,164,100,000.00
2020	722,635,928,000.00	716,079,920,000.00	99.09	-6,556,008,000.00
2021	706,486,730,000.00	704,249,091,568.52	99.68	-2,237,638,431.48
Rata-Rata	739,858,207,333.33	737,648,358,522.84	99.68	-2,209,848,810.49

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Gambar 3.6.
Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dimulai pada tahun 2019 dengan rata-rata target dan realisasi penerimaan selama periode tahun anggaran 2019-2021 adalah sebesar Rp321,043,017,000,- dan Rp295,505,212,561.70,- disajikan pada Tabel 3.18.



Tabel 3.18.
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	371,922,402,000.00	337,757,846,056.00	90.81	-34,164,555,944.00
2020	265,906,891,000.00	248,847,679,741.00	93.58	-17,059,211,259.00
2021	325,299,758,000.00	299,910,111,888.10	92.20	-25,389,646,111.90
Rata-Rata	321,043,017,000.00	295,505,212,561.70	92.20	-25,537,804,438.30

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Adapun dasar penganggaran Dana Alokasi Khusus Peraturan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (e) Pendapatan Lainnya. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara akumulasi tidak terlampaui. Selama periode tahun anggaran 2019-2021, ditargetkan rata-rata sebesar Rp162,177,988,580,- dengan realisasi sebesar Rp166,529,599,857.33,- (Tabel 3.19).

Tabel 3.19.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	246,371,854,455.00	269,277,859,492.00	109.30	22,906,005,037.00
2020	166,842,711,285.00	162,264,426,930.00	97.26	-4,578,284,355.00
2021	73,319,400,000.00	68,046,513,150.00	92.81	-5,272,886,850.00
Rata-Rata	162,177,988,580.00	166,529,599,857.33	99.79	4,351,611,277.33

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Selama periode tahun anggaran 2019-2021, target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp53,454,231,761.67,- sedangkan realisasinya Rp58,729,323,634.00,- disajikan pada Tabel 3.20. Sumber pendapatan hibah tersebut berasal dari Pemerintah.



Tabel 3.20
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2019	75,319,400,000.00	94,408,997,743.00	125.34	19,089,597,743.00
2020	70,043,295,285.00	66,436,973,159.00	94.85	-3,526,322,126.00
2021	15,000,000,000.00	15,342,000,000.00	102.30	342,000,000.00
Rata-Rata	53,454,231,761.67	58,729,323,634.00	107.50	5,301,758,539.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Pendapatan hibah sebesar Rp66.436.973.159,00 merupakan pendapatan Hibah Dana BOS. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 poin (c) mengenai Lain-lain Pendapatan Yang Sah bahwa Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selama periode tahun anggaran, target lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp18,523,920,500.00,- sedangkan realisasinya sebesar Rp18,523,920,500.00,- disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	22,884,576,000.00	22,884,576,000.00	100	0
2020	14,163,265,000.00	14,163,265,000.00	100	0
2021	0	0	0	0
Rata-Rata	18,523,920,500.00	18,523,920,500.00	100	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Rata-rata periode tahun anggaran 2019-2021, dari target sebesar Rp54,723,408,534.00,- namun realisasinya hanya mencapai Rp52,844,495,722.28,- (Tabel 3.22.)



Tabel 3.22.
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	53,004,480,455.00	56,935,922,749.00	90.64	3,931,442,294.00
2020	54,238,434,812.00	49,711,167,563.00	91.65	-4,527,267,249.00
2021	56,927,310,335.00	51,886,397,004.84	91.15	-5,040,913,330.16
Rata-Rata	54,723,408,534.00	52,844,495,772.28	91.15	-1,878,912,761.72

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya rata-rata periode tahun anggaran, dari target Rp97,164,580,666.67,- sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp96,647,456,117.53,- (Tabel 3.23.).

Tabel 3.23.
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	95,038,398,000.00	95,038,398,000.00	100.00	0.00
2020	96,749,416,000.00	95,726,483,771.00	98.94	-1,022,932,229.00
2021	99,705,928,000.00	99,177,486,581.60	99.47	-528,441,418.40
Rata-Rata	97,164,580,666.67	96,647,456,117.53	99.47	-517,124,549.13

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan lainnya rata-rata selama periode tahun anggaran 2019-2021, sebesar Rp558,333,333.33,- sedangkan realisasinya mencapai Rp135,086,666.67,- (Tabel 3.24.).

Tabel 3.24.
Target dan Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2019	125,000,000.00	9,965,000.00	7.97	-115,035,000.00
2020	50,000,000.00	20,970,000.00	41.94	-29,030,000.00
2021	1,500,000,000.00	374,325,000.00	24.96	-1,125,675,000.00
Rata-Rata	558,333,333.33	135,086,666.67	24.96	-423,246,666.67

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut.



Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Padang Pariaman selama periode 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.25. Belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp1,444,556,894,034.70,- pada tahun 2019 menjadi Rp1,405,042,023,731.64,- pada tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2.15 persen pertahun. Pertumbuhan belanja ini lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan daerah pada periode yang sama sebesar 0,77 persen.

Pada struktur belanja daerah selama periode 2019-2021 masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Peranan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa mengalami penurunan dari 64.03 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2019 menjadi 63.78 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2020. Komponen terbesar untuk belanja tidak langsung ini adalah belanja pegawai, yaitu dari Rp668,850,357,422.70,- pada tahun 2019 menjadi Rp650.205.096.055 pada tahun 2020.

Begitu juga peranan belanja langsung mengalami penurunan dari 43.01 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2019 menjadi 35.76 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2020. Komponen terbesar pendapatan APBD pada tahun 2020. Komponen terbesar untuk belanja langsung ini adalah untuk belanja barang dan jasa namun mengalami penurunan dari Rp281,334,719,868,- pada tahun 2019 menjadi Rp273,254,198,698.02,- pada tahun 2020. Belanja barang dan jasa secara persentase juga memperlihatkan penurunan dari total belanja, yakni dari 20.94 persen pada tahun 2019 menjadi 19,61 persen pada tahun 2020.

Target dan realisasi belanja daerah mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran belanja daerah tahun anggaran 2019-2021, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selama periode tahun anggaran 2019-2021, dari rata-rata target belanja daerah sebesar Rp1,463,884,251,236.34 terealisasi sebesar Rp1,397,758,665.53 secara lebih rinci disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	1,505,064,407,195.85	1,444,556,894,034.70	95.98	-60,507,513,161.15
2020	1,396,263,067,205.16	1,343,677,078,853.00	96.23	-52,585,988,352.16
2021	1,490,325,279,308.00	1,405,042,023,731.64	93.51	-85,283,255,576.36
Rata-Rata	1,463,884,251,236.34	1,397,758,665,539.78	95.24	-66,125,585,696.56

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)



1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Hibah, (c) Belanja Bantuan Sosial, dan (d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, (e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, (f) Belanja Tidak Terduga. Rata-rata target belanja Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp865,481,594,057.32 dengan realisasi sebesar Rp845,902,950,912.41 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2021
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	889,494,965,017.45	866,613,021,214.70	97.43	-22,881,943,802.75
2020	880,289,037,841.52	863,117,585,822.00	98.05	-17,171,452,019.52
2021	821,431,728,313.00	807,978,245,700.53	98.36	-18,682,533,612.47
Rata-Rata	865,481,594,057.32	845,902,950,912.41	97.74	-19,578,643,144.91

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Target Belanja Pegawai Kabupaten Padang Pariaman selama periode Tahun anggaran 2019-2021 rata-rata sebesar Rp710,949,905,457.66,- dengan realisasi sebesar Rp694,256,013,257.63,- sebagaimana disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019-2021
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	686,214,841,878.45	668,850,357,422.70	97.47	-17,364,484,455.75
2020	664,583,175,866.52	650,205,096,055.00	97.84	-14,378,079,811.52
2021	782,051,698,628.00	763,712,586,295.17	97.66	-18,339,112,332.83
Rata-Rata	710,949,905,457.66	694,256,013,257.63	97.66	-16,693,892,200.03

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Rata-rata target Belanja Hibah selama periode tahun anggaran 2019-2021 adalah sebesar Rp49,636,777,131.67,- dengan realisasi sebesar Rp44,572,297,267.83,- (Tabel 3.28.).



Tabel 3.28.
Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019-2021
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	14,354,462,000.00	11,972,562,000.00	83.41	-2,381,900,000.00
2020	71,961,859,395.00	66,652,211,902.00	92.62	-5,309,647,493.00
2021	62,594,010,000.00	55,092,117,901.50	88.02	-7,501,892,098.50
Rata-Rata	49,636,777,131.67	44,572,297,267.83	88.02	-5,064,479,863.83

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Selama periode tahun anggaran 2019-2021, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp 2,171,688,247.73 dari target sebesar Rp2,220,250,228.33,-. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.29.

Tabel 3.29.
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	2,972,290,000.00	2,835,000,000.00	95.38	-137,290,000.00
2020	3,325,000,000.00	3,325,000,000.00	100.00	0.00
2021	363,460,685.00	355,064,743.18	97.69	-8,395,941.82
Rata-Rata	2,220,250,228.33	2,171,688,247.73	97.69	-48,561,980.61

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Target belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa selama periode tahun 2019-2021 sebesar Rp5,533,815,838.67,- dengan realisasi sebesar Rp5,035,667,926,- sebagaimana disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2021
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	6,723,857,516.00	5,718,984,047.00	85.06	-1,004,873,469.00
2020	4,362,590,000.00	4,315,046,981.00	98.91	-47,543,019.00
2021	5,515,000,000.00	5,072,972,750.00	91.99	
Rata-Rata	5,533,815,838.67	5,035,667,926.00	91.99	-526,208,244.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)



Target belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp173,972,175,877.67,- dengan realisasi sebesar Rp173,438,142,109.17,- sebagaimana disajikan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31.
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	176,124,593,833.00	176,090,104,245.00	99.98	-34,489,588.00
2020	170,088,873,000.00	169,065,940,771.00	99.40	-1,022,932,229.00
2021	175,703,060,800.00	175,158,381,311.52	99.69	-544,679,488.48
Rata-Rata	173,972,175,877.67	173,438,142,109.17	99.69	-534,033,768.49

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Target Belanja TidakTerduga (BTT) selama periode Tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp10,222,728,267.67,- dengan realisasi sebesar Rp8,281,202,938.33,-. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi dan diluar kendali pemerintah daerah. Belanjaini merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3.32.di bawah ini.

Tabel 3.32.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	3,104,919,790.00	1,146,013,500.00	36.91	-1,958,906,290.00
2020	25,063,265,013.00	22,132,345,315.00	88.31	-2,930,919,698.00
2021	2,500,000,000.00	1,565,250,000.00	62.61	-934,750,000.00
Rata-Rata	10,222,728,267.67	8,281,202,938.33	62.61	-1,941,525,329.33

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

2) Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode tahun anggaran 2019-2021, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara kumulatif tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp491,605,970,995.59,- dari target yang telah ditentukan sebesar Rp525,576,083,889.68,- (Tabel 3.33).

Tabel 3.33.
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	615,569,442,178.40	577,943,872,820.00	93.89	-37,625,569,358.40
2020	515,974,029,363.64	480,559,493,031.00	93.14	-35,414,536,332.64
2021	445,184,780,127.00	416,314,547,135.76	93.52	-28,870,232,991.24
Rata-Rata	525,576,083,889.68	491,605,970,995.59	93.52	-33,970,112,894.09

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Rata-rata target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp32,891,177,624.33,- dengan realisasi sebesar 29,832,552,547.36,- disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.
Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	36,483,481,335.00	33,427,105,415.00	91.62	-3,056,375,920.00
2020	38,612,610,538.00	34,681,040,300.00	89.82	-3,931,570,238.00
2021	23,577,441,000.00	21,389,511,927.08	89.82	-2,187,929,072.92
Rata-Rata	32,891,177,624.33	29,832,552,547.36	90.72	-3,058,625,076.97

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Rata-rata target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp285,587,138,770.10,- sedangkan realisasinya sebesar Rp272,710,516,554.34,- disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	295,964,208,093.65	281,334,719,868.00	95.06	-14,629,488,225.65
2020	273,976,384,559.64	263,542,631,097.00	96.93	-10,433,753,462.64
2021	286,820,823,657.00	273,254,198,698.02	95.27	-13,566,624,958.98
Rata-Rata	285,587,138,770.10	272,710,516,554.34	95.75	-12,876,622,215.76

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)



Rata-rata Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode tahun anggaran 2019-2021 terealisasi Rp206,302,973,131.43,- dari target sebesar Rp225,355,784,521.92,- disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.
Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	283,121,752,749.75	263,182,047,537.00	92.96	-19,939,705,212.75
2020	203,385,034,266.00	182,335,821,634.00	89.65	-21,049,212,632.00
2021	189,560,566,550.00	173,391,050,223.29	91.47	-16,169,516,326.72
Rata-Rata	225,355,784,521.92	206,302,973,131.43	91.36	-19,052,811,390.49

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

3.2.1.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), (b) penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, (c) penerimaan pinjaman BLUD, (d) penerimaan pinjaman dalam negeri sektor perbankan. Rata-rata target penerimaan Pembiayaan selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp47,974,412,305.67,- sedangkan realisasinya mencapai Rp65,015,709,948,- seperti disajikan dalam Tabel 3.37.berikut ini.

Tabel 3.37.
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	1,920,727,636.85	6,419,020,461.85	334.20	4,498,292,825.00
2020	55,533,362,784.16	59,763,140,359.16	107.62	4,229,777,575.00
2021	86,469,146,496.00	128,864,969,022.99	149.03	42,395,822,526.99
Rata-Rata	47,974,412,305.67	65,015,709,948.00	196.95	17,041,297,642.33

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Realisasi SiLPA selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp49,114,546,361.47,- disajikan pada Tabel 3.38.



Tabel 3.38.
Target dan Realisasi SiLPA
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2019	1,920,727,636.85	1,877,685,273.85	97.76	-43,042,363.00
2020	48,838,415,244.16	56,662,140,359.16	116.02	7,823,725,115.00
2021	86,469,146,496.00	88,803,813,451.39	102.70	2,334,666,955.39
Rata-Rata	45,742,763,125.67	49,114,546,361.47	105.49	3,371,783,235.80

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah antara lain berasal dari: (a) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, (b) pembayaran pokok pinjaman dalam negeri (sektor perbankan), dan (c) pembayaran pengembalian dana. Rata-rata target pengeluaran pembiayaan selama periode tahun anggaran 2019-2021 sebesar Rp14,981,649,180,- sedangkan realisasinya mencapai Rp12,463,457,323,89,- seperti disajikan dalam Tabel 3.39.berikut ini.

Tabel 3.39.
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019-2021
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2019	17,500,000,000.00	15,375,211,517.00	87.86	-2,124,788,483.00
2020	7,444,947,540.00	4,612,493,788.00	61.95	-2,832,453,752.00
2021	20,000,000,000.00	17,402,666,666.67	87.01	-2,597,333,333.33
Rata-Rata	14,981,649,180.00	12,463,457,323.89	78.94	-2,518,191,856.11

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Tabel 3.40.
Target dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Tahun 2019-2021 Kabupaten Padang Pariaman

Tahun anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2019	17,500,000,000.00	10,660,000,000.00	60.91	-6,840,000,000.00
2020	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00	0.00
2021	20,000,000,000.00	17,870,000,000.00	89.35	-2,130,000,000.00
Rata-Rata	12,750,000,000.00	9,760,000,000.00	83.42	-2,990,000,000.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 (Audited)

Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut.



3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 merupakan Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat.

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022
Kabupaten Padang Pariaman

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
PENDAPATAN DAERAH	1,423,856,132,812	1,550,235,304,660.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131,417,232,000	131,267,232,000
Pajak Daerah	55,150,000,000	55,000,000,000
Retribusi Daerah	5,515,000,000	5,515,000,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,450,000,000	6,450,000,000
Lain-lain PAD yang Sah	64,302,232,000	64,302,232,000
PENDAPATAN TRANSFER	1,219,119,500,812	1,345,648,672,660
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,164,881,066,000	1,290,867,853,500
Pendapatan Transfer Antar Daerah	54,238,434,812	54,780,819,160
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73,319,400,000	73,319,400,000
Pendapatan Hibah	15,000,000,000	15,000,000,000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58,319,400,000	58,319,400,000
Jumlah Pendapatan	1,423,856,132,812	1,550,235,304,660.00

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2020

Sedangkan untuk proyeksi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022
Kabupaten Padang Pariaman

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Belanja	1.490.325.279.308	1.545.235.304.660
BELANJA OPERASI	1.108.995.151.958	1.181.879.099.743
Belanja Pegawai	754.398.057.616	754.398.057.616
Belanja Barang dan Jasa	286.820.823.657	359.027.008.736
Belanja Hibah	67.412.810.000	68.086.938.100
Belanja Bantuan Sosial	363.460.685	367.095.291
BELANJA MODAL	189.560.566.550	169.668.948.509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.564.854.210	38.040.502.752



URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.649.191.850	50.245.683.768
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.995.276.490	81.028.005.549
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.244.000	354.756.440
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.100.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.100.000.000
BELANJA TRANSFER	181.769.560.800	183.587.256.408
Belanja Bagi Hasil	6.066.500.000	6.127.165.000
Belanja Bantuan Keuangan	175.703.060.800	177.460.091.408
Jumlah Belanja	1.490.325.279.308	1.545.235.304.660

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.43
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022
Kabupaten Padang Pariaman

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
PEMBIAYAAN	66.469.146.496	(5.000.000.000)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	86.469.146.496	10.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	15.000.000.000

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum arah kebijakan Keuangan Daerah untuk tahun 2022 mempedomani Peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 karena masih relevan dengan tahun 2022.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah akuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk tahun 2022 ini telah ditetapkan serangkaian arah kebijakan untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah :



- a. Ditujukan untuk memulihkan perekonomian masyarakat, memberdayakan umkm yg terdampak wabah *Covid-19*.
- b. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Optimalisasi penerimaan deviden dari BUMD
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan BLUD dan PAD yang sah lainnya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
 - f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah



- provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
 - i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan: (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; menghambat mobilitas penduduk; lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 - p) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian



objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- g) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i) pendapatan denda pajak daerah;
- j) Pendapatan denda retribusi daerah;
- k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l) pendapatan dari pengembalian;
- m) pendapatan dari BLUD; dan
- n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas objek:
 - a) Dana perimbangan, terdiri atas rincian objek:
 - (1) Dana Transfer Umum terdiri atas:
 - (a) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan .
 - Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, terdiri dari: DBH-Kehutanan; DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; DBH-Pertambangan Minyak Bumi; DBH-Pertambangan Gas Bumi; DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-Perikanan
 - (b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan: DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.



b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu yang penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas :

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

3.3.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:



1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Seluruh Rincian dana Dana tersebut di atas ditetapkan atau diinformasikan secara resmi, dan apabila belum terpublikasikan maka penganggaran didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan dimaksud dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan wajib, terdiri dari :
 - 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
 - 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan
- b. Urusan pemerintahan pilihan
urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, perindustrian, transmigrasi
- c. unsur pendukung, meliputi: sekretariat Daerah; dan sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung, pengelolaan perbatasan daerah,
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan kabupaten/kota administrasi dan kecamatan



- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
- h. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah akan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya stuktur belanja daerah sebagaimana yang telah dimulai sejak tahun 2021, maka sama dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44.
Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH	<u>Belanja Operasi</u> (pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek)	<p><u>Belanja Pegawai</u></p> <p>digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium</p>
		<p><u>Belanja Barang dan Jasa</u></p> <p>Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan</p>



		<p>diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek</p>
		<p><u>Belanja Bunga</u></p> <p>digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi</p>
		<p><u>Belanja Subsidi</u></p> <p>belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
		<p><u>Belanja Hibah</u></p> <p>Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
		<p><u>Belanja Bantuan Sosial</u></p> <p>berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial</p>
	<p><u>Belanja Modal</u></p> <p>digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya</p>	<p><u>Belanja Tanah</u></p> <p>digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai</p>
		<p><u>Belanja Peralatan dan Mesin</u></p> <p>digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai</p>
		<p><u>Belanja Bangunan dan Gedung</u></p>



		belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
		<u>Belanja Jalan , jaringan dan irigasi</u> belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
		<u>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</u> digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
		<u>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</u> Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
	<u>Belanja Tidak terduga</u> pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan	
	<u>Belanja Transfer</u> pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa	<u>Belanja Bagi Hasil</u> digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari : 1. pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pendapatan pajak daerah dan retribusi



		daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa
		<u>Belanja Bantuan Keuangan</u> Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber : Permendagri 64 Tahun 2020

3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Rancangan Peraturan Daerah



tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

5. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian Penerusan Pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
5. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dalamrangkamendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus)



dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

7. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku..
8. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit

c. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2022 diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Dalam penyusunan bab ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Substansi penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 berdasarkan dan memperhatikan:

1. Keselarasan arah kebijakan dan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2022 dan Rancangan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2022.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat, Provinsi dengan Kabupaten Padang Pariaman Sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2022.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

4.1 Visi, Misi, Tujuan Visi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 adalah:

“Padang Pariaman Berjaya”

visi diatas merupakan singkatan dan memiliki empat kata kunci yang akan diwujudkan melalui rpjmd kabupaten padang pariaman kedepan yaitu:



- unggul^{ber}kelanjutan memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- *religius* adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma -norma agama , berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- *sejahtera* merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi , pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- *berbudaya* merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang;
3. membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sertor pendidikan nonformal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi-Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 , dapat digambarkan pada tabel 4.1 dibawah ini :



Tabel 4.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi : Padang Pariaman BERJAYA		
Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	Terwujudnya infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat
		Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
		Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin
		Peningkatan daya beli masyarakat
		Kemandirian Desa
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan pengetahuan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
		Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan
		Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
		Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah



Visi : Padang Pariaman BERJAYA		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum
		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
		Penguatan layanan kebencanaan
		Pengurangan resiko kebakaran
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
Peningkatan penanganan masalah sosial		
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :



Tabel 4.2.
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban							
Prioritas 4 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah							
1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1.1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1.1.1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	1.1.1.1	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
				1.1.2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1.1.2.1	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture
						1.1.2.2	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
		1.1.2.3	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya				
		1.2	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.2.1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.2.1.1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				1.2.2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.2.2.1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
				1.2.3	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1.2.3.1	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
				1.2.4	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.2.4.1	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak
<p>Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang</p>							
<p>Prioritas 6 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang</p>							
2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat	2.1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	2.1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
				2.1.2	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	2.1.2.1	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
		2.2	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	2.2.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	2.2.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
				2.2.2	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	2.2.2.1	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air
		2.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	2.3.1	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	2.3.1.1	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				2.3.2	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	2.3.2.1	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
						2.3.2.2	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				2.3.3	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	2.3.3.1	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
						2.3.3.2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
				2.3.4	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	2.3.4.1	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
				2.3.5	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	2.3.5.1	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
						2.3.5.2	Peningkatan drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
				2.3.6	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman	2.3.6.1	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman
				2.3.7	Meningkatkan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan	2.3.7.1	Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
				2.4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	2.4.1	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				2.4.2	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	2.4.2.1	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
				2.4.3	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	2.4.3.1	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
				2.4.4	Meningkatkan fasilitas kepengurusan sertifikat tanah	2.4.4.1	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat							
Prioritas 1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah							
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	3.1.1	Meningkatkan pengembangan UMKM	3.1.1.1	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
				3.1.2	Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	3.1.2.1	Perwujudan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pusat perdagangan
				3.1.3	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	3.1.3.1	Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
				3.1.4	Mengembangkan potensi wilayah dengan klusterisasi industri	3.1.4.1	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3.2	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	3.2.1	Menurunkan angka kemiskinan	3.2.1.1	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
		3.3	Peningkatan daya beli masyarakat	3.3.1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	3.3.1.1	Peningkatan keahlian pelaku usaha perekonomian masyarakat
		3.4	Kemandirian Desa	3.4.1	Optimalisasi pemanfaatan potensi desa/nagari	3.4.1.1	Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa
Prioritas 2 : Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah							
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	3.1.5	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	3.1.5.1	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
				3.1.6	Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif menggunakan perkembangan teknologi informasi serta melalui utusan perantau-perantau Padang Pariaman.	3.1.6.1	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
				3.1.7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif	3.1.7.1	Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
				3.1.8	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif	3.1.8.1	Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan katakteristik wilayah Padang Pariaman
Prioritas 3 : Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan							



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	3.1.9	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	3.1.9.1	Peningkatan pendapatan petani
				3.1.10	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	3.1.10.1	Penguatan ketahanan pangan masyarakat
				3.1.11	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	3.1.11.1	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
				3.1.12	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	3.1.12.1	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
				3.1.13	Meningkatkan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan	3.1.13.1	Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sertor pendidikan nonformal							
Prioritas 5 : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing							
4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan ketrampilan	4.1	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	4.1.1	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	4.1.1.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
		4.2	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	4.2.1	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	4.2.1.1	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4.2.2 Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	4.2.2.1 Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	4.3 Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan	4.3.1 Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	4.3.1.1 Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
	4.4 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	4.4.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	4.4.1.1 Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
	4.5 Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	4.5.1 Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	4.5.1.1 Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
			4.5.1.2 Perluasan kesempatan kerja
	4.6 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	4.6.1 Menurunkan Total fertility rate (FTR)	4.6.1.1 Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
			4.6.1.2 Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga
	4.7 Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	4.7.1 Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan	4.7.1.1 Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
			4.7.2 meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				4.7.3	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	4.7.3.1	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan							
Prioritas 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional							
5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	5.1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	5.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5.1.1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
				5.1.2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	5.1.2.1	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
				5.1.3	Penguatan fungsi APIP	5.1.3.1	Peningkatan kapabilitas APIP
				5.1.4	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	5.1.4.1	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				5.1.5	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	5.1.5.1	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
				5.1.6	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.6.1	Peningkatan Kerjasama pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
						5.1.6.2	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Kab Padang Pariaman
5.1.7	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah	5.1.7.1	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5.1.7.2	Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief				



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		5.2	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	5.1.8	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	5.1.8.1	Peningkatan manajemen pengadaan barang dan jasa
				5.1.9	Sinergitas perencanaan pembangunan	5.9.1.1	Pemantapan penyelenggaraan pemerintah daerah
				5.2.1	Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah	5.2.1.1	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
						5.2.1.2	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
						5.2.1.3	Peningkatan Budaya kerja yang profesionalisme
				5.2.2	Meningkatkan sarana dan prasarana IT	5.2.2.1	Penguatan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi
		5.2.2.2	Peningkatan Pengamanan data daerah				
		5.2.3	Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	5.2.3.1	Peningkatan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing2 Perangkat Daerah		
		5.3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5.3.1	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	5.3.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik
				5.3.2	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	5.3.2.1	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
				5.3.3	Meningkatkan pemahaman Peta Proses Business	5.3.3.1	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit
		Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal					
Prioritas 8 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana							



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar	6.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	6.1.1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	6.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
				6.1.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.1.2.1	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar
				6.1.3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	6.1.3.1	Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
				6.1.4	Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	6.1.4.1	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		6.2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	6.2.1	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	6.2.1.1	Peningkatan infrstruktur dan teknologi penyediaan air minum
						6.2.1.2	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
		6.3	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	6.3.1	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	6.3.1.1	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
		6.4	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	6.4.1	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	6.4.1.1	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni
		6.5	Penguatan layanan kebencanaan	6.5.1	Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	6.5.1.1	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		6.6	Pengurangan resiko kebakaran	6.6.1	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	6.6.1.1	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
						6.6.1.2	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana
		6.7	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	6.7.1	Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	6.7.1.1	Peningkatan kesejahteraan sosial
		6.8	Peningkatan penanganan masalah sosial	6.8.1	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	6.8.1.1	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja							
Prioritas 2 : Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah							
7	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	7.1	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	7.1.1	Meningkatkan PAD berbasis IT yang terintegrasi	7.1.1.1	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	7.2	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	7.2.1	Meningkatkan promosi investasi di sektor primer dan jasa	7.2.1.1	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
				7.2.2	Memberikan kemudahan investasi dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal	7.2.2.1	Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Gambar 4.1.

Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan RPJMN 2020-2024



Tahun 2022 merupakan tahun Kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020- 2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

- a. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.** Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.** Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:



- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
 - 5) Meningkatkan budaya literasi.
- e. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.** Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.** Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- g. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.** Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2022 dititikberatkan kepada beberapa Major Project yang mendukung langsung Tema RKP 2022, diantaranya:

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau toba, Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat ,Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
2. 9 Kawasan Industri diluar Jawa dan 31 Smelter;
3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi ,Otomotif , Elektronik, Kimia dan Farmasi;
4. Pendidikandan PelatihanVokasiuntukIndustri 4.0;
5. JaringanPelabuhanUtama Terpadu.

4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluangsertakondisi sosialbudaya masyarakat SumateraBarat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022**

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi Sumatera Barat 2021-2026 : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah	Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan Meningkatnya Produktifitas Peternakan Meningkatnya Produktifitas Perikanan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan Meningkatnya Pelaku UMKM Yang Sejahtera



Misi	Tujuan	Sasaran
		Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	Sumatera Barat sebagai Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing Sumatera Barat sebagai Pusat Ekonomi Kreatif
Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatnya kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber :Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat” terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Mewujudkan Kesejahteraan Petani” terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatkan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.



Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat” terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, “Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata” terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

“Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Strategis Daerah”

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Beberapa pertimbangan yang mendasari antara lain yakni :

Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020).

Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri ada PDRB Sumatera Barat sebesar 24,5% namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor perdagangan dan sebesar -0,54% untuk sektor industri. (BPS, Tahun 2020).

Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestic, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,



- perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
 7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 disusun dengan:

1. Memperhatikan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022;
2. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
3. Mempedomani Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memperhatikan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
4. Memperhatikan capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan proyeksi/rencana target capaian Tahun 2021;
5. Mendorong pencapaian indikator kinerja makro pembangunan ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi tahun 2022 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah;
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal (Isu strategis Daerah) serta permasalahan pembangunan daerah.

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Untuk menetapkan isu strategis dan permasalahan pembangunan selain dilakukan sinkronisasi dengan Nasional dan Provinsi juga dilakukan pengggalian kondisi dan permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman

- A. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2022
- B. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Propinsi Sumbar Tahun 2022
- C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, maka Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.
Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Tema Pembangunan Padang Pariaman tahun 2022	Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.	1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah.
	2. Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah.
	3. Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
	4. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah.
	5. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing.
	6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang.
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional.
	8. Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana.

Berikut ini merupakan isu strategis dan permasalahan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022:

Tabel 4.5.
Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah.	Pemberdayaan UKM, Industri Kecil Menengah, Koperasi dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri
		Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan
		Pemerataan ekonomi
		Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal
		Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
		Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru
		Peningkatan kesempatan berusaha
		Peningkatan kegiatan ekonomi produktif
		Peningkatan jiwa kewirausahaan
2.	Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah.	Kemudahan berinvestasi di daerah
		Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah



No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen
		Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah
		Mengembangkan Destinasi Wisata yang layak
		Meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata
		Peningkatan pelaku ekonomi kreatif
3.	Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah
		Peningkatan produksi komoditi unggulan
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan
		Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah
		Daya saing produk pertanian relatif masih rendah
		Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian
		Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan
		Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas
		Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan
		Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan
		Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran
4.	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.	Upaya peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama
		Upaya peningkatan peran lembaga sosial keagamaan
		Peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah
		Peningkatan kerukunan Dalam Kelompok Masyarakat dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat
		Pengembangan dan pelestarian budaya daerah
		Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya
		Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama
		Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial
		Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas dan narkoba
5.	Meningkatkan Mutu Sumber	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing



No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
	Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing.	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Padang Pariaman
		Peningkatan Profesional dan kuantitas guru sebagai pendidik
		Belum tuntasnya peningk. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan profesional pengelola & kualitas manajemen pendidikan
		Belum optimalnya penduduk usia sekolah yg mendapatkan layanan pendidikan
		Ketimpangan distribusi guru di beberapa wilayah.
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarg sejahtera yang berwawasan kependudukan
6.	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang.	Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan
		Pengembangan daerah baru yang strategis
		Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi
		Peningkatan akses Universal
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
		Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis
Menigkatkan kualitas perencanaan ruang		
7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah
		Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah
		Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Pengembangan e-gov dan implementasi smart city Kabupaten Padang Pariaman
8.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
		Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan
		Permasalahan Penanggulangan HIV/AIDS
		Pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal
		Masih kurangnya sarana dan prasarana Rumah Sakit
		Tingginya status gizi buruk masyarakat dan prevalensi balita pendek belum dapat dikendalikan secara



No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		maksimal (Stunting)
		Pengelolaan abrasi pantai
		Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan
		Pengembangan Nagari Tangguh bencana
		Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat
		Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana
		Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan
		Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin
		penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

4.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tercantum pada dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Perubahan RPJMD tahun 2021-2026, maka prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2022 berdasarkan pencapaian misi, tujuan dan sasaran masa RPJMD tahun 2021-2026 serta berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021.

4.3.1 Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Selain itu, untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan untuk menjaga keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat maka perlu dilakukan penyesuaian sasaran untuk mendukung sasaran pembangunan nasional.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2022. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

4.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dan mempedomani target sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 maka Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	7,15%
			Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	12,60%
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	6,99
		Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	46,98 Juta
		Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1 Nagari
2.	Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	PAD Sektor Wisata	18.500 Juta
		Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Jumlah PAD	138.908.014.224
		Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	403.300.000 (Ribu)
3.	Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.796.247,14 Juta
			Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7,35%
4.	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan	Jumlah TPA/TPSA, TPQ/TPSQ, MDA/MDTA dan Pondok Al-quran/Tahfizh	854 Sekolah Agama
			Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36%
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persentase penegakkan perda	65%
			persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	100%
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,6



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2022
1	2	3	4	5
			Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	36%
5.	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,85
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	76,7
		Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,96%
		Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini 3-6 th	54,8
		Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,81%
		Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,33%
		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	165 Orang
			Jumlah atlet berprestasi	365 Orang
6.	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	67%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi (Nilai)	85
		Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58,72%
			Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten	7,43%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67
			Persentase areal kawasan kumuh	0,44%
			Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	854 Ha



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2022
1	2	3	4	5
			Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makan Pahlawan	100%
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	43%
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	68%
			Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	50%
			Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	8,90%
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP
			Tingkat Kapabilitas APIP	level 3
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3
			Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B
			Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	11%
			Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,700 (tinggi)
		Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks Profesionalitas ASN	80
			Indeks E-Government /SPBE	2,44
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,56		
8.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	68,99 Tahun
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%
		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85%
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,14
		Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	16 Nagari
		Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	15,8 Menit



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2022
1	2	3	4	5
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	25%
		Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	73%

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.1.1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	1.1.1.1	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
1.1.2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1.1.2.1	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture
		1.1.2.2	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
		1.1.2.3	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
1.2.1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.2.1.1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
1.2.2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.2.2.1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
1.2.3	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1.2.3.1	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
1.2.4	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.2.4.1	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	2.1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
2.1.2	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	2.1.2.1	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
2.2.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	2.2.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
2.2.2	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	2.2.2.1	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air
2.3.1	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	2.3.1.1	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
2.3.2	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	2.3.2.1	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
		2.3.2.2	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.3.3	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	2.3.3.1	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2.3.3.2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2.3.4	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	2.3.4.1	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
2.3.5	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	2.3.5.1	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
		2.3.5.2	Peningkatan drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
2.3.6	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi permukiman	2.3.6.1	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi permukiman
2.3.7	Meningkatkan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan	2.3.7.1	Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
2.4.1	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan	2.4.1.1	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
2.4.2	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	2.4.2.1	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
2.4.3	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	2.4.3.1	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.4.4	Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah	2.4.4.1	Pendaftaran kepemilikan lahan bersertifikat
3.1.1	Meningkatkan pengembangan UMKM	3.1.1.1	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
3.1.2	Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	3.1.2.1	Perwujudan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pusat perdagangan
3.1.3	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	3.1.3.1	Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
3.1.4	Mengembangkan potensi wilayah dengan klusterisasi industri	3.1.4.1	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
3.2.1	Menurunkan angka kemiskinan	3.2.1.1	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
3.3.1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	3.3.1.1	Peningkatan keahlian pelaku usaha perekonomian masyarakat
3.4.1	Optimalisasi pemanfaatan potensi desa/nagari	3.4.1.1	Peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa
3.1.5	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	3.1.5.1	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
3.1.6	Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif menggunakan perkembangan teknologi informasi serta melalui utusan perantau-perantau Padang Pariaman.	3.1.6.1	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
3.1.7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif	3.1.7.1	Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
3.1.8	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif	3.1.8.1	Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan katakteristik wilayah Padang Pariaman
3.1.9	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	3.1.9.1	Peningkatan pendapatan petani
3.1.10	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	3.1.10.1	Penguatan ketahanan pangan masyarakat



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3.1.11	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	3.1.11.1	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
3.1.12	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	3.1.12.1	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
3.1.13	Meningkatkan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan	3.1.13.1	Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
4.1.1	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	4.1.1.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
4.2.1	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	4.2.1.1	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
4.2.2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	4.2.2.1	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
4.3.1	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	4.3.1.1	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
4.4.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	4.4.1.1	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
4.5.1	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	4.5.1.1	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
		4.5.1.2	Perluasan kesempatan kerja
4.6.1	Menurunkan Total fertility rate (FTR)	4.6.1.1	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
		4.6.1.2	Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga
4.7.1	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan	4.7.1.1	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
4.7.2	meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	4.7.2.1	Peningkatan kualitas SDM pemuda
4.7.3	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	4.7.3.1	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;
5.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5.1.1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
5.1.2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	5.1.2.1	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
5.1.3	Penguatan fungsi APIP	5.1.3.1	Peningkatan kapabilitas APIP
5.1.4	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	5.1.4.1	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5.1.5	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	5.1.5.1	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
5.1.6	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.6.1	Peningkatan Kerjasama pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
		5.1.6.2	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Kab Padang Pariaman
5.1.7	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah	5.1.7.1	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.7.2	Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief
5.1.8	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	5.1.8.1	Peningkatan manajemen pengadaan barang dan jasa
5.1.9	Sinergitas perencanaan pembangunan	5.9.1.1	Pemantapan penyelenggaraan pemerintah daerah
5.2.1	Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah	5.2.1.1	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
		5.2.1.2	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
		5.2.1.3	Peningkatan Budaya kerja yang profesionalisme
5.2.2	Meningkatkan sarana dan prasarana IT	5.2.2.1	Penguatan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi
		5.2.2.2	Peningkatan Pengamanan data daerah
5.2.3	Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	5.2.3.1	Peningkatan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing2 Perangkat Daerah
5.3.1	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	5.3.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik
5.3.2	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	5.3.2.1	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
5.3.3	Meningkatkan pemahaman Peta Proses Business	5.3.3.1	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit
6.1.1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	6.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
6.1.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.1.2.1	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar
6.1.3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	6.1.3.1	Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
6.1.4	Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	6.1.4.1	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6.2.1	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	6.2.1.1	Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum
		6.2.1.2	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
6.3.1	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	6.3.1.1	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
6.4.1	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	6.4.1.1	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni
6.5.1	Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	6.5.1.1	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
6.6.1	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	6.6.1.1	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
		6.6.1.2	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana
6.7.1	Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	6.7.1.1	Peningkatan kesejahteraan sosial
6.8.1	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	6.8.1.1	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan
7.1.1	Meningkatkan PAD berbasis IT yang terintegrasi	7.1.1.1	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.2.1	Meningkatkan promosi investasi di sektor primer dan jasa	7.2.1.1	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
7.2.2	Memberikan kemudahan investasi dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal	7.2.2.1	Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

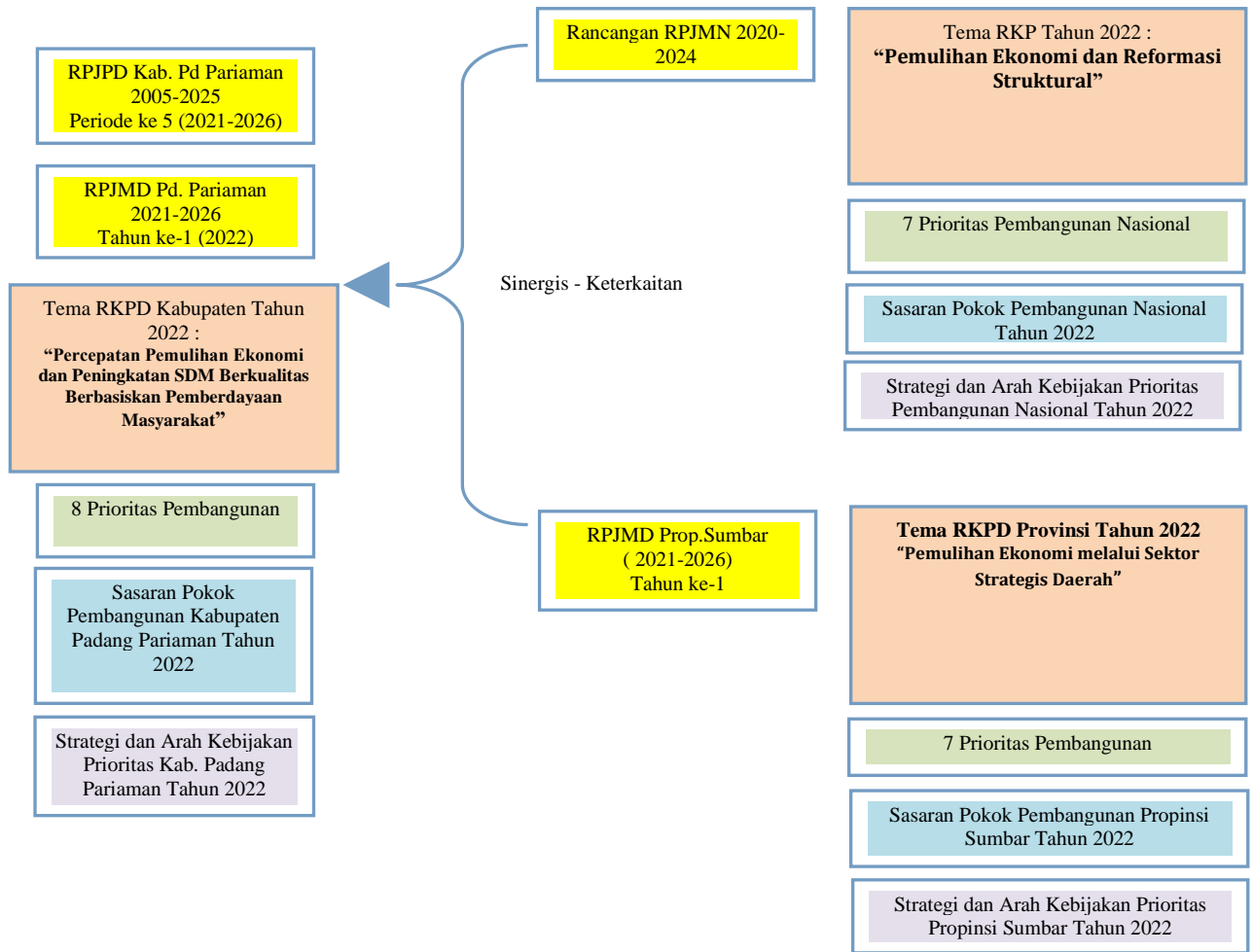
4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2022

4.5.1 Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema dan Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional

Untuk menjamin adanya sinergisitas antara prioritas pembangunan nasional dan daerah, pada gambar dan tabel berikut digambarkan persandingan tema

pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan tema pembangunan propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 4.2.
Keterkaitan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022



Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.8.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan RKP 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (Prioritas 3)	Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan (Prioritas 3)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital (Prioritas 4)	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah (Prioritas 1)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan (Prioritas 5)	Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah (Prioritas 2)
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (Prioritas 6)	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang (Prioritas 6)
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing (Prioritas 1)	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing (Prioritas 5)
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah (Prioritas 2)	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah (Prioritas 4)
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (Prioritas 6)	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang (Prioritas 6)
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (Prioritas 6)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana (Prioritas 8)
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas (Prioritas 7)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional (Prioritas 7)



4.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang telah ditetapkan maka ditetapkan program prioritas yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.



Tabel 4.9.
Prioritas, sasaran Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Pagu Indikatif Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	7,15%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	60%	156.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Kondusif	1 Pasar	688.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	42%	110.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	1 Pedagang	21.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur	1 Pasar	88.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya pasar BANA	1 Pasar	105.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	40%	46.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	persentase koperasi sehat	40%	39.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang berkualitas	57 Koperasi	32.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	40%	28.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,9 %	51.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berdaya saing	97,44 %	568.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
			Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	12,60%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	1 sentra	18.783.477.650	DPMPTP
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	6,99	PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan usaha yang diberikan	65%	340.000.000	DINSOS P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	46,98 Juta					
		Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1 Nagari	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase nagari yang tertata	100%	145.053.000	DPMD
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	100%	55.000.000	DPMD
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	100%	546.831.844	DPMD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	100%	995.000.000	DPMD
2.	Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	PAD Sektor Wisata	18.500 Juta	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	265.000 Orang	200.000.000	DISPARPORA
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	45 Orang		
						Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Orang		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata sesuai dengan standar	5Objek Wisata	1.210.000.000	DISPARPORA
		Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Jumlah PAD	138.908.014.224	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95%	1.149.848.000	BPKD
						Persentase Pencapaian Target PAD	100%		
		Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	403.300.000 (Ribu)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 dokumen	64.810.000	DPMPTP
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1 dokumen 5 Event	40.500.000	DPMPTP
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	89	110.375.000	DPMPTP
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	110 objek	354.242.000	DPMPTP
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	1 Aplikasi	23.040.000	DPMPTP



No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah	
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.796.247,14 juta	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	80%	3.900.653.700	DISTAN-KP	
						- Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	40%			
						- Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	1 Varietas			
							- Persentase peningkatan jumlah produksi daging	23,75%	5.131.926.828	DISNAKKESWAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	92,0%	4.873.809.000	DISTAN-KP
						- Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	5,0%			
	- Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	23,5%								



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	17,0%	100.000.000	DISNAKKESWAN
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	350 Ha	130.000.000	DISTAN-KP
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	100%	15.000.000	DISTAN-KP
						Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	100%	40.000.000	DISNAKKESWAN
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani	34 Poktan	301.750.000	DISTAN-KP
						Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	0,50%	150.000.000	DISNAKKESWAN
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun	1 Unit	-	DISTAN-KP
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Skor pola pangan harapan (PPH)	88,90	322.000.000	DISTAN-KP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	2400,00		
						- Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)	55,66		
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	1 nagari	20.000.000	DISTAN-KP
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	80%	41.700.000	DISTAN-KP
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	35%	355.000.000	DISNAKKESWAN
			Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7,35%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	18.810,73 ton/tahun	1.151.700.000	DISKAN
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	54.633,06 ton/tahun	1.955.300.000	DISKAN
						Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)	495.000.000		
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	70%	40.000.000	DISKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	100%		
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	43,54	200.000.000	DISKAN
						Produksi Ikan Olahan (ton)	7		
4.	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Jumlah TPA/TPSA, TPQ/TPSQ, MDA/MDTA dan Pondok Al-quran/Tahfizh	854 Sekolah Agama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100%	4.311.520.000	SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)
			Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	6	605.000.000	DISDIKBUD
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya.	6	315.000.000	DISDIKBUD
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	50	110.000.000	DISDIKBUD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	50	335.000.000	DISDIKBUD
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persentase penegakkan perda	65%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Peningkatan Kelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	65%	410.000.000	SATPOL-PP & DAMKAR
			persentase gangguan transtibum dan linmas yang dapat diselesaikan	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	85%	-	KESBANGPOL
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	100%	989.540.000	KESBANGPOL
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100%	16.437.500	KESBANGPOL
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	100%	-	KESBANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	489.166.900	KESBANGPOL
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,6	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Outcome : Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100%	220.000.000	DINSOS P3A
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome : Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35%	70.000.000	DINSOS P3A
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	35%	75.000.000	DINSOS P3A
			Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	36%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Outcome : Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100%	20.000.000	DINSOS P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Outcome : Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	40%	70.000.000	DINSOS P3A
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	35%	70.000.000	DINSOS P3A
5.	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,85	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan 2.Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk 3.Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat 4.Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk 5.Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1.90,25 2.2,95 3.0,45% 4.0,20 5.0,40%	245.000.000	DISKEARPUS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	20%	80.000.000	DISKEARPUS
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	76,7	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	57,21%	175.000.000	DISDIKBUD
		Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,96%		Rasio Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	54,80%		
		Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini 3-6 th	54,8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	70,96%	152.449.150.000	DISDIKBUD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Rasio Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	54,80%		
		Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,81%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran terbuka	6,90 %	16.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	70%	92.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	70,90 %	83.059.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51%	108.000.000	DISDAGNAKE RKOP & UKM
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,33%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2,34%	68.500.000	DPPKB
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	65,75%	5.389.370.000	DPPKB
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	12%	754.300.000	DPPKB
		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	165 Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	46,29%	550.000.000	DISPARPORA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Wirausaha Muda	22,47%		
			Jumlah atlet berprestasi	365 Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	365 Orang	1.800.000.000	DISPARPORA
6.	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	67%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	67%	57.140.000.000	DPUPR
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi (Nilai)	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	85%	12.503.615.800	DISHUB
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	18	15.000.000	DISHUB
		Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58,72%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58,72%	17.500.000.000	DPUPR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten	7,43%		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	7,43%		DPUPR
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60%	2.700.000.000	DPUPR
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	150.000.000	DLHPKPP
						Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	Ada		
						Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55,89	406.750.000	DLHPKPP
						Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	91,93		
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola	100%	355.000.000	DLHPKPP
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola		58.999.940	DLHPKPP
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau ke giatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	40%	115.000.000	DLHPKPP
						Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	2 Orang		
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN	Terfasilitasi Pendampingan		-	DLHPKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA			
						Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau penge tahuan tradisional			
						Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional			
						Penetapan hak MHA			
						Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan			
						Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana			
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	2 Kali	115.000.000	DLHPKPP
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	80.000.000	DLHPKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah	
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	70.000.000	DLHPKPP	
			Persentase areal kawasan kumuh	0,44%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	0,1	450.000.000	DLHPKPP	
						Cakupan ketersediaan rumah layak huni	64%			
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	20%	550.000.000	DLHPKPP
							Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,65%		
							Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1,23%		
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,75%			
						Persentase pemukiman yang tertata	20%	-	DLHPKPP	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	50%		
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	3,4%	-	DLHPKPP
						Persentase Pengembang Perumahan yang telah terregistrasi	100%		
			Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	854 Ha	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0,0224	655.999.940	DLHPKPP
						Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,417		
						Persentase cakupan area pelayanan	0,30%		
						Persentase jumlah sampah yang tertangani	3%		
			Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makan	100%	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Outcome : Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100%	15.000.000	DINSOS P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pahlawan						
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	43%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis	43%	400.000.000	DPUPR
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	68%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	30%	14.250.000.000	DPUPR
			Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan	50%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	50%	4.400.000.000	DPUPR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			peta digital						
			Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	8,90%	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian Izin Lokasi	1	20.000.000	DLHPKPP
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	150.000.000	DLHPKPP
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	65%	400.000.000	DLHPKPP
					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	-	DLHPKPP
					PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah	100%	-	DLHPKPP
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan milik Pemda yang Bersertifikat	8,90%	50.000.000	DLHPKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan pelayanan penetapan tanah ulayat	100%	-	DLHPKPP
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pelayanan pengelolaan tanah kosong	100%	-	DLHPKPP
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	75%	343.808.750	Sekretariat Daerah (Bag.Hukum)
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	8	17.880.400.000	SEKRETARIAT DEWAN
			Tingkat Kapabilitas APIP	level 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100%	768.397.800	Sekretariat Daerah
						Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	100%		
						Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	11%		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	100%		
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan	100%	944.242.027	BAPELITBAN GDA
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	92%	553.000.000	BAPELITBAN GDA
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbang Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	70%	360.000.000	BAPELITBAN GDA
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30-Nop-22	196.645.879.315	BPKD
						Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100%		
						Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100%		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100%	575.614.700	BPKD		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat	100%		
						Persentase BMD yang tertib	65%		
			Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang dilakukan	60%	921.500.000	INSPEKTORAT
			Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	11%	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	60%	412.500.000	INSPEKTORAT
			Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,700 (tinggi)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2,700 (tinggi)	302.500.000	Sekretariat Daerah (Bag.PUM)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	-	857.914.061.711	SELURUH OPD & SEKRETARIAT DAERAH
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	-		
						Persentase Temuan BPK yang	-		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ditindaklanjuti			
						Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB (KHUSUS SETDA)	-		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	41.570.000	KECAMATAN
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100%	340.279.100	KECAMATAN
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	61.830.000	KECAMATAN
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	135.980.000	KECAMATAN
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	125.780.000	KECAMATAN
		Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks Profesionalitas ASN	80	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Outcome: Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	93%	3.917.320.000	BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Outcome: Peningkatan terfasilitasnya pindah/purna tugas PNS	92%		
						Outcome: Parsentase peningkatan dokumen ASN yang tersiapkan	75%		
						Outcome: Peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	73%		
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	90%	2.488.000.000	BKPSDM
			Indeks E-Government /SPBE	2,44	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	59%	1.201.686.080	DISKOMINFO
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	60%	5.033.086.636	DISKOMINFO
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	71.148.000	DISKOMINFO



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	10%	60.645.375	DISKOMINFO
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1. Nilai Indeks Pengelola Kearsipan 2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	1.60,80 2.13,95%	145.000.000	DISKEARPUS
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan 2. Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	1.50% 2.40%	155.000.000	DISKEARPUS
					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	.Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan	5%	25.000.000	DISKEARPUS
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran	95%	15.500.000	DISDUKCAPIL



No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Penerbitan akta perkawinan	100%		
						Persentasi penerbitan akta perceraian	100%		
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	95%	50.150.000	DISDUKCAPIL
					PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase database kependudukan yang disusun	90%	4.000.000	DISDUKCAPIL
8.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	68,99 Tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	70%	54.908.909.806	DINKES
						Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	65%	56.536.501.274	RSUD
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	55%	533.043.408	DINKES



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPd Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100%	118.703.876	DINKES
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	70%	225.625.000	DINKES
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%	6.600.000.000	DPUPR
		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85%	4.000.000.000	DPUPR
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	0,14	-	DLHPKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	16 Nagari	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	25 Nagari	1.430.000.000	BPBD
						Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana	79%		
						Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	24.3%		
		Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	15,8 Menit	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	% Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	85%	390.000.000	SATPOL-PP & DAMKAR
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	25%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Outcome : Presentase Program Rehabilitasi Sosial yang Tertangani	100%	314.637.700	DINSOS P3A
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Outcome : PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	320.000.000	DINSOS P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2022	Sasaran Tahun 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2022		Indikator	Target 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	73%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Outcome : Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100%	200.000.000	DINSOS P3A
TOTAL PAGU INDIKATIF								1.545.235.304.660	



4.7 Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Selanjutnya pengalokasian pagu anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah terkait, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10.
Alokasi Pagu Anggaran
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU INDIKATIF 2021	PERSENTASE
1	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah	22,797,362,494.00	1.48
2	Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah	4,170,393,000.00	0.27
3	Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan	18,728,839,528.00	1.21
4	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	8,106,664,400.00	0.52
5	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing	161,810,379,000.00	10.47
6	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang	112,550,365,680.00	7.28
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional	1,091,493,879,494.00	70.64
8	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana	125,577,421,064.00	8.13
	JUMLAH	1,545,235,304,660.00	100



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

**BAB V****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Berdasarkan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskannya sebelumnya, maka disusun rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang berisi program, kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana kerja seluruh perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Rancangan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022
menurut Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	641.644.661.992
2	Dinas Kesehatan	174.981.453.373
3	RSUD Padang Pariaman	72.963.305.274
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.414.813.679
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.581.144.881
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.378.685.724
7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	10.557.163.334
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.940.952.519
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.871.572.535
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.844.685.125
11	Dinas Perhubungan	17.608.905.458
12	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.643.509.944
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	23.817.457.660
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.120.127.937
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.186.775.938
16	Dinas Perikanan	8.283.600.000



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.966.821.767
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.311.412.156
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.847.475.164
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.810.224.268
21	Badan Pengelola Keuangan Daerah	209.419.468.852
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.403.816.904
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.459.772.170
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.951.267.006
25	Sekretariat Daerah	40.602.084.962
26	Setwan	41.884.393.597
27	Inspektorat Daerah	8.488.741.931
	17 Kecamatan	
a	Kecamatan Nan Sabaris	798.024.639
b	Kecamatan VII Koto	670.010.807
c	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	692.030.597
d	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung	767.981.496
e	Kecamatan Enam Lingsung	692.872.322
f	Kecamatan Ulakan Tapakis	710.207.227
g	Kecamatan Lubuk Alung	762.609.631
h	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	701.181.378
i	Kecamatan Batang Anai	798.024.639
j	Kecamatan Patamuan	639.838.104
k	Kecamatan Padang Sago	638.287.927
l	Kecamatan Sungai Geringging	712.860.000
m	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	748.960.807
n	Kecamatan Batang Gasan	689.797.322
o	Kecamatan V Koto Timur	684.736.146
p	Kecamatan Sungai Limau	775.070.880
q	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	718.516.588
	TOTAL	1.545.235.304.660

Adapun rincian matrik rencana kerja setiap perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran II** dokumen RKPD ini.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama yang tergabung di Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Sasaran dan target capaian selama tahun 2022 menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

6.1 Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

Target capaian Indikator Kinerja Sasaran untuk Tahun 2022 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1.

Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2022
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban			
1.	Jumlah TPA/TPSA, TPQ/TPSQ, MDA/MDTA dan Pondok Al-quran/Tahfizh	Angka	854
2.	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	36
3.	Persentase penegakkan perda	%	65
4.	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat	%	100
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,6
6.	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	36
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang			
1.	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	67
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	85
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	58,72
4.	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten	%	7,43
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2022
7.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,4
8.	Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	854
9.	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	100
10.	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan perkotaan	%	43
11.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	68
12.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	50
13.	Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	%	8,90
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat			
1.	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Juta	2.796.247,14
2.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7,35
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,15
4.	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	12,6
5.	PAD Sektor Wisata	Juta	18.500
6.	Tingkat Kemiskinan	%	6,99
7.	PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp. Juta	46,98
8.	Indeks Desa Membangun	Indeks	1
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal			
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,85
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Angka	76,7
3.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan	%	2,96
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini 3-6 th	Angka	54,8
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,33
7.	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	Orang	165
8.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	365
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	indeks	Level 3
3.	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	indeks	Level 3
4.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2022
5.	Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	11
6.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Angka	2.700 (Tinggi)
7.	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	80
8.	Indeks E-Government /SPBE	Indeks	2,44
9.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik			
1.	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,99
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	90
3.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	85
4.	Rasio rumah layak huni	Indeks	0,14
5.	Nagari tangguh bencana	Nagari	16
6.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	15,8
7.	Persentase PPKS Mandiri	%	25
8.	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	73
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.			
1.	Jumlah PAD	Rp.	138.908.014.224
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	403.000.000 (Ribu)

6.2 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2022

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.



Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 :

Tabel 6.2
Target Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
INDIKATOR MAKRO DAERAH					
1	Pertumbuhan PDRB Menurut harga konstan				
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	-10,46	5,3	8,36
3	Laju inflasi				
4	PDRB				
4.1	Atas harga berlaku				
4.2	Atas harga konstan				
4.3	PDRB per kapita (Juta Rp)	Juta	41,66	44,63	46,98
4.4	Atas harga berlaku				
4.5	Atas harga konstan				
4.6	Pertumbuhan PDRB per Kapita				
5	Indeks Gini Ratio				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan				
6.1	Jumlah Penduduk Miskin				
6.2	Tingkat kemiskinan	%	7,26	7,11	6,99
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,61	7,15
8	Indek Pembangunan Manusia	Angka	70,61	71,07	71,53
8.1	Rata-rata Lama Sekolah				
8.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,79	68,89	68,99
8.3	Angka Harapan Lama Sekolah				
8.4	Pengeluaran perkapita				
9	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,92	93,3	93,6
10	Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Ribu	330.598.007,30	365.100.000	403.300.000
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
ASPEK PELAYANAN UMUM					
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
1.	URUSAN PENDIDIKAN				
1.1	Pendidikan Dasar				
1.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Angka	72,92	74,8	76,7
1.1.2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka	2,79	2,87	2,96
1.1.3	Rasio Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	%	50,28	52,50	54,80
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini 3-6 th	Angka	50,28	52,5	54,8
1.2.2	Rasio Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	%	50,28	52,50	54,80
1.3	Mutu Pendidikan				
1.3.1	Rasio Pengelolaan Pendidikan Dasar	%	53,47	55,61	70,96
1.3.2	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	53,22	55,61	57,21
2.	URUSAN KESEHATAN				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
2.1	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	70	7500	80
2.2	Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	%	58,80	62	65
2.3	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	55	60	65
2.4	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	100	100	100
2.5	Persentase Rumah Tangga yang BerPHBS	%	70	72	74
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	%	58,65	60,65	62,87
3.2	Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah Kawasan	9	9	9
3.3	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	64,28	65,30	67,00
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,98	54,82	58,72
3.5	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten	%	6,67	7,02	7,43
3.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,98	54,82	58,72
3.7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	6,67	7,02	7,43
3.8	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	20	55	60
3.9	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	%	N/A	10	20
3.10	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan perkotaan	%	22	35	43
3.11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	58	63	68



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
3.12	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	25,00	37,50	50,00
3.13	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	%	20	25	30
3.14	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A
3.15	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	71,86	88	90
3.16	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,03	81	85
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
4.1	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,66	0,55	0,44
4.2	Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	850	852	854
4.3	Rasio permukiman layak huni	Nilai	N/A	N/A	0,1
4.4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	63,00	63,50	64,00
4.5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	N/A	N/A	20
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,66	0,66	0,65
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	N/A	N/A	1,23
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	N/A	N/A	1,75
4.9	Persentase pemukiman yang tertata	%	N/A	N/A	20,00
4.10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	N/A	N/A	50
4.11	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	N/A	N/A	3,40
4.12	Persentase Pengembang Perumahan yang telah terregistrasi	%	N/A	N/A	100
4.13	Timbulan sampah yang	%	0,0227	0,0019	0,0224



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
	ditangani				
4.14	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,422	0,419	0,417
4.15	Persentase cakupan area pelayanan	%	0,28	0,28	0,30
4.16	Rasio rumah layak huni	%	0,129	0,13	0,14
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1	persentase penegakkan perda	%	50,00	62,50	65,00
5.2	persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	N/A	100	100
5.3	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	%	60,00	62,00	65,00
5.4	Nagari tangguh bencana	Nagari	14	15	16
5.5	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	Nagari	14 Nagari	20 Nagari	25 Nagari
5.6	Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana	%	75	75	79
5.7	Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	%	14,5	19,4	24,3
5.8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Nagari	20	17,8	15,8
5.9	Persentase Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	N/A	80	85
6	URUSAN SOSIAL				
6.1	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	N/A	100	100
6.2	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	65	65	80
6.3	Persentase PPKS Mandiri	%	21	23	25
6.4	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	100	100	100
6.5	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	%	7	7	10



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
6.6	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	72	75	73
6.7	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	%	100	100	100
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Dengan Pelayanan Dasar					
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
1	URUSAN TENAGA KERJA				
1.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	N/A	70	70
1.3	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	N/A	2.400	2.400
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	N/A	51	51
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.1	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	35	35	36
2.2	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100	100	100
2.3	Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	35	35	35
2.4	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100
2.5	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100	100	100
2.6	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	%	40	40	45
2.7	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tertangani	%	35	35	38
3	URUSAN PANGAN				
3.1	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun	Unit	N/A	0	1
3.2	Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	88,10	88,50	88,90
3.3	Ketersediaan energi	Kkal/kap/hari	2.431	2.400	2.400



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
3.4	Ketersediaan protein	Gram/kap/hari	54,04	54,85	55,66
3.5	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	Nagari	N/A	1	1
3.6	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	%	70	75	80
4	URUSAN PERTANAHAN				
4.1	Persentase luas lahan Pemda bersertifikat	%	8,70	8,80	8,90
4.2	Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	0	0	1
4.3	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100
4.4	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	50	60	65
4.5	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	0	5
4.6	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah	%	5	5	5
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,38	66,93	67
5.2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5.4	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	55,41	55,79	55,89
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	93,32	91,83	91,93
5.7	Persentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola	%	100	100	100
5.8	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	-	N/A	N/A	N/A



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
5.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	31	35	40
5.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	0	2	2
5.11	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	N/A	N/A	1
5.12	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A	N/A	1
5.13	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A	N/A	1
5.14	Penetapan hak MHA	Kelompok	N/A	N/A	1
5.15	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kelompok	N/A	N/A	1
5.16	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	Kelompok	N/A	N/A	1
5.17	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	2
5.18	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada	Ada	Ada
5.19	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
6.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,56	4,56
6.2	Persentase Penerbitan KTP EL	%	98,68	30	99
6.3	Persentase Penerbitan KK	%	99,31	100	100
6.4	Persentase Penerbitan KIA	%	20,06	30	35
6.5	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	91,73	93	95
6.6	Persentase Penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100
6.7	Persentasi penerbitan akta perceraian	%	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
6.8	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	N/A	100	100
6.9	Persentase database kependudukan yang disusun	%	N/A	90	90
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
7.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	4	4	1
7.2	Persentase Nagari yang tertata	%	60	100	100
7.3	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	%	55	100	100
7.4	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	60	100	100
7.5	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	65	100	100
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,16	0,35	0,33
8.2	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,38	2,34
8.3	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)	%	65,39	65,50	65,75
8.4	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	14	14	13
9	URUSAN PERHUBUNGAN				
9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi (Nilai)	Nilai	N/A	80	85
9.2	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	%	85	85	87
9.3	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Angka	21	21	18
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
10.1	Indeks E-Government /SPBE	Indeks	1,9	2,15	2,44
10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	41	59
10.3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	50	55	60
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
11.1	Persentase koperasi aktif	%	N/A	40	40
11.2	persentase koperasi sehat	%	N/A	40	40
11.3	koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	Koperasi	N/A	57 Koperasi	57 Koperasi
11.4	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	N/A	40	40
11.5	Persentase UMKM	%	N/A	97,44	97,44
11.6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	N/A	0,9	0,9
12	URUSAN PENANAMAN MODAL				
12.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	1	1	1
12.2	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dokumen / Event	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 5 Event
12.3	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	88	88	89
12.4	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	Objek	100	100	110
12.5	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
13.1	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	Orang	156	160	165
13.2	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	357	360	365
13.3	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	18,51	37,03	46,29
13.4	Persentase Wirausaha Muda	%	8,97	19,29	22,43
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	357	360	365
13.6	Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih	Orang	N/A	N/A	40
14	URUSAN STATISTIK				
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	Ada	Ada	Ada
15	URUSAN PERSANDIAN				
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	10
16	URUSAN KEBUDAYAAN				
16.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung	%	N/A	35	36



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
	pertunjukan seni				
16.2	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya	Rasio	5	6	6
16.3	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya	Rasio	5	6	6
16.4	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	Rasio	45	50	50
16.5	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Rasio	45	50	50
17	URUSAN PERPUSTAKAAN				
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,62	18,8	18,85
17.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Indeks	90,17	90,20	90,25
17.3	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	2,87	2,90	2,95
17.4	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	0,30	0,40	0,45
17.5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,14	0,15	0,20
17.6	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	0,33	0,35	0,40
17.7	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	%	0,00	10,00	20,00
18	URUSAN KEARSIPAN				
18.1	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan	Indeks	73,48	73,48	60,80
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	8,84	10,88	13,95
18.3	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan	%	N/A	5	10
18.4	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	40	45	50



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
18.5	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	20	30	40
LAYANAN URUSAN PILIHAN					
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	URUSAN PERIKANAN				
1.1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	%	7,20	7,35	7,50
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	18.080,30	18.441,90	18.810,73
1.3	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Ton/ Tahun	52.511,60	53.561,83	54.633,06
1.4	Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)	Ekor/ Tahun	687.828.985	480.000.000	495.000.000
1.5	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	%	N/A	60	70
1.6	Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	%	N/A	100	100
1.7	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	Kg/ Kapita / Tahun	42,04	43,04	43,54
1.8	Produksi Ikan Olahan (ton/ tahun)	Ton/ Tahun	176,30	179,82	183,41
2.	URUSAN PARIWISATA				
2.1	PAD Sektor Wisata (juta)	Rp./Juta	1.759	1.800	1.850
2.2	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Objek Wisata	4	4	5
2.3	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	41	41	45
2.4	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36	36	40
2.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	208.872	250.000	265.000
2.6	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Paket	2	2	3
3	URUSAN PERTANIAN				
3.1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Rp./Juta	2.668.793,67	2.731.777,20	2.796.247,14
3.2	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	%	70	75	80
3.3	Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	%	30	35	40
3.4	Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	Varietas	0	2	1



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
3.5	Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	%	90	91	92
3.6	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	%	0	5	5
3.7	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	%	N/A	11,40	23,50
3.8	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	Ha	250	300	350
3.9	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	%	N/A	0	100
3.10	Peningkatan kelas kelompok tani	Poktan	25	34	34
3.11	Jumlah Produksi Daging	Ton	2.305	2.340	2.375
3.12	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	%	6	12	17
3.13	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	%	N/A	100	100
3.14	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	0	1	1
3.15	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	25	30	35
4	URUSAN PERDAGANGAN				
4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	8,30	8,52	8,58
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	N/A	60	60
4.3	Jumlah Pasar yang Kondusif	Pasar	N/A	1	1
4.4	jumlah pasar yang diawasi	Kecamatan	N/A	17	17
4.5	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Pedagang	N/A	1	1
4.6	Pasar tertib ukur	Pasar	N/A	1	1
4.7	Terwujudnya pasar BANA	Pasar	N/A	1	1
5	URUSAN PERINDUSTRIAN				
5.1	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11,19	11,8	12,6
5.2	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Sentra	1	1	1



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
5.3	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi
5.4	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	Dokumen Ranperda	1	1	1
D. PENUNJANG URUSAN					
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1.5	Indeks kualitas perencanaan	%	N/A	100	100
1.6	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	N/A	90	92
2 KEUANGAN					
2.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
2.2	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
2.3	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100	100	100
2.4	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100	100	100
2.5	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100	100	100
2.6	Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat	%	100	100	100
2.7	Persentase BMD yang tertib	%	65	65	70
2.8	Jumlah PAD	Rp.	124.387.421.851	131.417.232.000	138.908.014.224
2.9	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	%	95	95	95
2.10	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100	100
2.11	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%	90,21%	89%	90%
3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	76	78	80
3.2	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%	93%	93%	93%
3.3	Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	%	92%	92%	92%
3.4	Persentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan	%	75%	75%	75%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
3.5	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	%	73%	73%	73%
3.6	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	%	90%	90%	90%
4	FUNGSI PENGAWASAN				
4.1	INSPEKTORAT				
4.1.1	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	level 3 dengan catatan	level 3	level 3
4.1.2	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Nilai	level 3	level 3	level 3
4.1.3	Persentase pengawasan yang dilakukan	%	N/A	60	60
4.1.4	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	%	N/A	60	60
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.1	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	60	65	70
6.1	SEKRETARIAT DEWAN				
6.1.1	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Perda	11	8	8
6.2	SEKRETARIAT DAERAH				
6.2.1	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	54	60	63
6.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,15	83,15	83,3
6.2.3	Jumlah TPA/TPSA, TPQ/TPSQ, MDA/MDTA dan Pondok Al-quran/Tahfizh yang dibina	Sekolah Agama	830	844	854
6.2.4	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	N/A	100%	100%
6.2.5	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	N/A	100%	100%
6.2.6	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	100%	100%	100%
6.2.7	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	%	N/A	10%	11%
6.2.8	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%	100%	100%	100%
6.2.9	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi	Nilai	B	B	B



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
	Kemenpan RB				
6.2.10	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	10	10	11
6.2.11	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,700 (tinggi)
6.2.12	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%	70	70	75
6.2.13	Perentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	N/A	100	100
6.2.14	Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	%	80	80	85
6.2.15	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	%	80	80	85
6.2.16	Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	%	80	80	85
6.2.17	Persentase kerjasama informasi dengan mass media	%	80	80	85
7	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)				
7.1	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100
7.2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100
7.3	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100
7.4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100
7.5	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)				
8.1	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	N/A	-	-
8.2	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	%	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
8.3	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	100	100	100
8.4	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	%	N/A	100	100
8.5	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	N/A	100	100



BAB VII

INOVASI DAERAH

BAB VII INOVASI DAERAH

VII.1 Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Menurut Peraturan bersama Menrsitek Ri Dan Mendagri No. 03 Tahun 2012 Dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Selanjutnya Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah).

Pada dasarnya Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (1) peningkatan Pelayanan Publik, (2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (3) peningkatan daya saing Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah dapat berbentuk : inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam era global terutama menghadapi revolusi industri 4.0, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (*innovation driven*). Hal tersebut senada dengan semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari entitas pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan berbasis inovasi tersebut (*innovation-driven development*) untuk menunjang konsep pembangunan berkelanjutan. Saat ini konsep pembangunan dengan pengembangan perekonomian dengan mengandalkan keunggulan komparatif saat ini sudah mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan pembangunan dengan mengandalkan keunggulan komparatif berdasarkan sumber daya alam suatu saat akan mengalami penurunan karena sifatnya yang terbatas dan menyebabkan eksternalitas negatif terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu pengembangan perekonomian berbasis inovasi suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan dalam pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pariaman memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan inovasi daerah di Kabupaten dimulai pada tahun 2009, dimana pada saat itu daerah ini baru saja dilanda gempa berkekuatan 8,9 skala richter yang menyebabkan kehancuran pada seluruh sendi - sendi kehidupan. Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, sektor yang paling terdampak adalah sektor perekonomian.

Untuk membangun kembali Kabupaten Padang Pariaman pasca gempa tersebut dibutuhkan upaya yang sungguh - sungguh dari segenap pemangku kepentingan beserta seluruh masyarakat. Pemerintah daerah mulai menata kembali sektor - sektor yang hancur tersebut dengan memunculkan cara - cara yang inovatif. Hal ini dibuktikan dengan salah satunya adalah cepatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan terutama pada sarana dan prasana baik perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu Padang Pariaman juga memperoleh penghargaan perekaman e-KTP tercepat dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011.



Gambar 7.1 Piagam Penghargaan *Innovative Government Award* Peringkat II Tahun 2018 dari Kemendagri RI

Pada masa - masa setelah itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman semakin bersemangat untuk melaksanakan pembangunan dengan membangun budaya inovatif di lingkungan kerja aparatur pemerintah daerah. Setiap tahun Pemerintah Daerah selalu menghasilkan inovasi - inovasi terutama terkait dengan pelayanan publik. Pada tahun 2018, Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten terinovatif ke - 2 (dua) di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA). Dan Kabupaten Padang Pariaman selalu menjadi daerah Kabupaten berkategori "sangat inovatif" dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IID) sampai saat ini. Selain itu, pada tahun 2018 tersebut, Kabupaten Padang Pariaman juga meraih penghargaan tingkat Sumatera Barat dibidang pelayanan publik untuk peringkat 1 pada Penilaian Pelayanan Administrasi pada Disdukcapil dan juara 1 untuk

Penilaian Pelaksanaan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP).



Gambar 7.2 Penghargaan peringkat 1 di bidang pelayanan publik pada Penilaian Pelayanan Administrasi tingkat Sumatera Barat pada Disdukcapil dan juara 1 untuk Penilaian Pelaksanaan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) pada bulan tahun 2018

Kemudian pada Tahun 2020, beberapa penghargaan terkait inovasi yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- 1) Kabupaten Sangat Inovatif tingkat Kabupaten dalam penganugerahan Innovative Government Award 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri bulan Desember 2020;
- 2) Piagam penghargaan atas partisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19;
- 3) Penghargaan pelayanan public dalam kategori pelayanan prima tingkat kabupaten;
- 4) Penghargaan atas keikutsertaan dalam pemetaan Indeks Daya Saing Daerah untuk Mendorong Kemandirian Dan Penguatan Daya Saing Daerah pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-25.



Gambar 7.3 Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 meraih Kategori Kabupaten Sangat Inovatif tingkat Kabupaten dalam penganugerahan Innovative Government Award 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri bulan Desember 2020



Gambar 7.4 Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mendapatkan piagam atas partisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19





Gambar 7.5 Pada Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman menerima penghargaan pelayanan public dalam kategori pelayanan prima tingkat kabupaten

Pada Tabel berikut disajikan beberapa inovasi yang telah dilaksanakan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020.

Tabel 7.1.
DAFTAR REKAPITULASI INOVASI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemampuan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
1	Inovasi Daerah Pencegahan Covid - 19 Pada Sektor Pariwisata	Tempat Wisata C-19	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Disparpora	pariwisata	0.00	Penerapan	11-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/8e910711a9dee3d6a2e0985a57d917102dda9101.mp4	https://drive.google.com/file/d/1IgXW2fsfsPBLwohBIDJMbneOWIPgYHk6/view?usp=sharing
2	Penginapan Sehat dan Nyaman Dalam Menghadapi New Normal Life Di Padang Pariaman	Hotel C-19	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Disparpora	pariwisata	0.00	Penerapan	12-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/3d6569b00052149869ecf45ce134d2e535d93566.mp4	https://drive.google.com/file/d/14r5_rRSHLVUngob8cyVXFjDGFH6y4WSz/view?usp=sharing
3	Transaksi aman di Pasar Modern dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Pasar Modern C-19	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Disdagkerkop&UKM	perdagangan	0.00	Penerapan	12-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/fcb81e7559091f7031057ab353089a2a817a39ad.mp4	https://drive.google.com/file/d/141rVSEGEMk_cDh6exdmCh1veVyIXRPGb/view?usp=sharing
4	Belanja Aman di Pasar Rakyat dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Pasar Tradisional C-19	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	Disdagkerkop&UKM	perdagangan	0.00	Penerapan	12-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/b982590f7c12876e83748e44ce4b8f9818d838e3.mp4	https://drive.google.com/file/d/1_VzT0F58bnIUaum2uFCWALRscWyxVtft/view?usp=sharing

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
5	Tetap ELOK (Efektif, Lancar, Optimal, dan Konsisten) Melayani dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	PTSP C-19	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	0.00	Penerapan	12-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/98f8aeaa0cfc03e46627363a6282fb5e2ffa27a3.mp4	https://drive.google.com/file/d/1vp9bF8s8p0AqPiHpto3k33sQbE8qLTN7/view?usp=sharing
6	Lapau Nasi Sehat dan Aman dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Restoran C-19	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	Dispora	pariwisata	0.00	Penerapan	12-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/3d74b1f7006ef5675cae5f9092a9a1da70858ecd.mp4	https://drive.google.com/file/d/1h0q9r443ocLiQIT4nafB29LxTJX8raA6/view?usp=sharing
7	Nyaman dan Aman di Transportasi Umum dalam Menghadapi New Normal Life di Padang Pariaman	Transportasi Umum C-19	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dishub	perhubungan	0.00	Penerapan	12-06-2020	Ya	http://api.indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/file/ce7504ce854b89a10d7c7da39690acbe662d59a9.mp4	https://drive.google.com/file/d/1IgXW2fsfsPBLwohBIDJMbneOWIPgYHk6/view?usp=sharing
8	Jumsepare	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	137.00	Penerapan	10-08-2020	Tidak	https://static.tuxedovation.com/dbb02238ef5ca9e372d4c56f3046ae9ae73bee08.mp4	https://www.youtube.com/watch?v=HmA4UUtuswE&feature=youtu.be
9	GELIGA (GERAKAN PEDULI KELUARGA)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	117.00	Penerapan	24-08-2020	Tidak	https://static.tuxedovation.com/00c5a2657ff6a1e9bcbd66c87eda334345b21523.mp4	https://drive.google.com/drive/folders/1_F-k7eMBbycgzmTveEa4u5ggELIk6F8?usp=sharing

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
10	GERNIS PAPA (GERAKAN NIKAH SEHAT PADANG PARIAMAN)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	107.00	Penerapan	24-08-2020	Tidak	https://static.tuxedovation.com/def36befb6cf610945e3a9e8129fdaf54e153db3a.mp4	https://drive.google.com/file/d/1vtM9Pd- uqeNAqOjgH41nSrUNymnf039T/view?usp=sharing
11	NAGARI BEBAS STUNTING	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	123.00	Penerapan	24-08-2020	Tidak	https://static.tuxedovation.com/a4f09038b110738e77fbfc13fc1ec90eb6427f1f.mp4	https://drive.google.com/file/d/1eh2Bn9OBa_ANKqRE74RXbO_8_knhLa3y/view?usp=sharing
12	PENSIL (PENDAMPING SETIA IBU HAMIL)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	106.00	Penerapan	24-08-2020	Tidak	https://static.tuxedovation.com/e10387657d73ab8ee9e3d9a76d932db78de43228.mp4	https://drive.google.com/file/d/1UHzW6SsEQ3vFADJ9-SkjhKFD_tFIzZW/view?usp=sharing
13	POS GIZI	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	104.00	Penerapan	24-08-2020	Tidak	https://static.tuxedovation.com/6a1fc00453837c35e00ba85715b9c2164db7cff2.mp4	https://drive.google.com/file/d/1oN2aqBTnw3B1KCxF0U4AawaW90wk2ovg/view?usp=sharing
14	Serentak Menggarab Kampung KB (SERGAB KAKAB)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPP KB	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	143.00	Penerapan	02-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/d65c8572cc8d4a2193fba27fda0c8aba3bd6904e.mp4	
15	Komprehensif Online Penyajian Inovasi Data Akurat (KOPI DARAT)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	DPP KB	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	151.00	Penerapan	03-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/67e3d825619f121d5b4ebefde539daf800cd284c.mp4	

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
16	PADI PUTIAH PAPANAI	-	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	Dist anK P	pertanian	33.00	Penerapan	03-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/f3806ffb8230cb720d811177d857b18405b29574.mp4	-
17	SIMUNA	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	BPB D	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	128.00	Penerapan	04-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/753635f834f74547a3aae063a9c16f4b36fd09ee.mp4	
18	PAPA SADAR BANA	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	Kepala Daerah	BPB D	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	120.00	Penerapan	04-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/93e2fe6db72a5c503ee94cd8141028cd5cbbe69c.mp4	-
19	PATAKA	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	BPB D	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	106.00	Uji Coba	04-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Pelepasan Veretas Durian Kunik dan Talantam	-	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	OPD	Dist anK P	pertanian	14.00	Inisiatif	04-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Padang Pariaman Jemput OSS (PAPA JOSS)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	201.00	Penerapan	07-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/15e5b0691bce47504ae620b891f24be79f443974.mp4	https://youtu.be/Z8w8py9D4YM
22	NAGITA (NAGARI DIGITAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan	201.00	Penerapan	07-09-2020	Tidak	- -	https://www.youtube.com/watch?v=ADRwkPY8cy

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
							sipil						c&t=3s
23	SIPAKEM (Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/b092fd0d5a9dec5fbecb2a2651ba84e392276ccc.mp4 https://res.tuxedovation.com/9633cea0af8e7dc5c9d8ed4f958798aa0a79541e.mp4	https://www.youtube.com/watch?v=bNqkHGRZU3s
24	ADIK (ANJUNGAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/7635ae01eb3896e174a94375366d0cc2234e05da.mp4	
25	PAK PERWIRA (PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DI GEREJA)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	187.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/f38c2571dd97182b83a8067dc0bae0c0032676a1.mp4	
26	POHON IMPIAN	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	203.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/0ca60c22dbc3d6884e14bd12f52616129ed4af5d.mp4	
27	SI-BIMO (Bisa Melayani On The Spot)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	-	https://web.facebook.com/kudugantiangbarat/vid eos/949752445509631?_rdc=1&_rdr

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
28	SI-PRETI (SISTEM PEREKAMAN DATA SEJAK DINI)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/e66f085eb159af740f88d80eaaab083e4ab583d9d.mp4	
29	SEMEN PADANG PAKYAN (SEKALI MENIKAH DAPAT SEGUDANG PAKET LAYANAN)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	08-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/bfd7b9c42042ee574485f7f9563ee80d19cb8fa7.mp4	
30	BERE- BERE	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	DPP KB	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	165.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/c94fbe1ceee42f122e075cdcc612225acbf7c7a5.mp4	youtube.com/watch?v=ij_kUnzEDfM
31	CAKAU	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPP KB	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	140.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/12db2045a35dcec3f838d16acb3ca470c783a87d.mp4	
32	ALPABETA (ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	199.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/9e8133aaca4c333e145055628ab1d6441ad8853f.mp4	
33	POSBINDU PTM BADONCEK	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kepala Daerah	Dinkes	kesehatan	138.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/38eccf8b14b7cfff0559f87ce36f1dae90887d9eb.mp4	
34	DUKCAPIL MENGGODA (Dukcapil Mengupdate Golongan Darah)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan	193.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/9a81ae8bc1b338930fa704a	

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
							sipil					85603df268b2e00cb.mp4	
35	PEDANG SABER (Petugas Datang Semua Administrasi Beres)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/d19a3ac2a95170522ac82db08533b73e7b26f219.mp4	https://www.youtube.com/watch?v=EtIr3mij8as
36	KADOKU KTP - EL	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	199.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/b5b984fddb12e46c73eeb2c65e9.mp4	https://www.youtube.com/watch?v=tL7w0rqDpWw
37	TAMASYA (Tampek Mangadu Masyarakat)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	199.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/1da9e09e9390c6393cc81d6ff67dc0be19af664d.mp4	https://www.youtube.com/watch?v=SPSL-xLzDu0&t=44s
38	Dukcapil Ceria Digital	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	-	https://www.youtube.com/watch?v=ADRwkPY8cyC
39	LAMAN CERIA (Layanan Mandiri Ceria)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	197.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/923b83ff3ee191ffde9eb8987f57d136f70ac2ff.mp4	
40	Alis Ketupat (Ayo Lihat Status KTP mu Setiap Saat)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	09-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/59dae26e7671bb06f135f5a5c4d6d4c2fdd3f177.mp4	

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
41	COKLAT PEMILU (Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	199.00	Penerapan	13-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/72cc33919042386f9276672aa05bed8f455970db.mp4	
42	Satria (Pesan Antrian Anda)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	195.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/570859871bf3661d548a8aba2dbe8fb3bfdbf9.mp4	
43	AJEK (Antar Jemput Dokumen Kependudukan)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/017949b7d9a57152499123c5b9cfa79401de0754.mp4	
44	BUPAPRI (Buku Panduan Perilaku)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	193.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/bfd79d011e227086106093c17d952ba799e6766a.mp4	
45	DUKCAPIL WEEKEND SERVICE	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	201.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/1fb5dbe51d697f8813c1f71dc51217fe87944b97.mp4	
46	LAYANAN KACAMATA BACA	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	181.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/b8882fd1f825d96321654619634690c8b8b6e6bb.mp4	
47	PRISMA DUKCAPIL (Pusat Riset Statistik Dan Manajemen Data Kependudukan Dan	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disdukcapil	administrasi kependudukan dan pencatatan	201.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/d795fa9489c87dbb3eb6d7ff	https://www.youtube.com/watch?v=KbATvaZHRdo

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
	Pencatatan Sipil)						sipil					06e7a857d96c1f01.mp4	
48	JEVALA (JEMPUT IVA KE LAPANGAN)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	144.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/e7a19b71bb6ed4e465d467fe5f482b8f8b21892c.mp4 https://res.tuxedovation.com/fc8b17617a901e571a14fd2270094543e8d946e3.mp4	
49	SIRUSA PAPA (SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PADANG PARIAMAN)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	RSU D	kesehatan	192.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/f20ba6758544ee69bae6c6b4eba0e096c034cd40.mp4	
50	POSYANDU TERINTEGRASI PIJAT BAYI	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Dinkes	kesehatan	139.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/2a00d5c6dd2d55b67b09524c50012b6138a7c434.mp4	
51	PAPA ANJAP (PADANG PARIAMAN ANTA JAPUIK PASIEN RAWAT INAP)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	RSU D	kesehatan	195.00	Penerapan	14-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/2f10b85cfda2193b8bdf09b66fcc6718a9c7c1bb.mp4	
52	CERIA TARUIH (CEGAH ANTRIAN DENGAN ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	RSU D	kesehatan	192.00	Penerapan	15-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/6900f3cbada136f56c5222d86e0bb24c4aec9b1.mp4	

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
53	KLINIK LKPM (KONSULTASI LAYANAN INVESTASI PENDAMPINGAN PROSES PELAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	195.00	Penerapan	15-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/9e258dd71f20af2c702bef33587064ab00bf0c05.mp4	https://youtu.be/b0uEV8n_iD0
54	AJEP PAPA (Antar Jemput Perizinan Padang Pariaman)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	201.00	Penerapan	15-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/06d27fdea2c7b52bec810caf7e3603489955a68d.mp4	
55	PEDANG AKSI	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disd agna kerk op& UKM	tenaga kerja	113.00	Penerapan	16-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
56	SEJATI (Sehari Jadi Gratis)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	174.00	Penerapan	16-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
57	SINARO (Aplikasi Perizinan Berbasis Android)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	201.00	Penerapan	16-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/f4cc03e6789b402e4e694975e43f2c3fddfe30c3.mp4	
58	BULAT SEDAP (IBU SELAMAT BAYI SEHAT AKTA DI DAPAT)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	RSU D	kesehatan	172.00	Penerapan	16-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/b6b286d1a3222de155aedc5e5216cbf754ae83a3.mp4	
59	SICENTIL (SIGAP CEPAT DAN TINDAKLANJUTI)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Disn akke swa n	pertanian	153.00	Uji Coba	17-09-2020	Tidak	-	

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
60	TERASI (TRACKING STATUS IZIN)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	201.00	Penerapan	17-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/02fe1028829f370c5a85dbb48d94a6e1521a9ab9.mp4	
61	TAMU KECE (KONSULTASI BISNIS PEMULA DAN WEEKEND SERVICE)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	186.00	Penerapan	17-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/051d0a43ff3bacb9893f06bf21369b85b66c3cef.mp4	
62	PANTER DARAT (PENGADUAN TERINTEGRASI DENGAN INSPEKTORAT)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	201.00	Penerapan	18-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/15515df6d8d138cf52db98f54c974b66cfc33583.mp4	
63	KAMPUNG LIMOUSIN	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	Disakke swan	pertanian	106.00	Penerapan	18-09-2020	Tidak	-	
64	BESAN POS (BEKERJA SAMA DENGAN PT. POS INDONESIA)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	168.00	Penerapan	18-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
65	PALANTA (PELAYANAN LANGSUNG TUNTAS)	-	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	DPM PTP	penanaman modal	201.00	Penerapan	18-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/c56985e5f5ed318078674b16ed481157281aa898.mp4	
66	SISTEM INFORMASI APLIKASI PERSURATAN KANTOR (SIAPKAN)	-	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Diskomin fo	komunikasi dan informatika	122.00	Penerapan	18-09-2020	Tidak	https://res.tuxedovation.com/8dc50965e76779c6aa372de1ccdba5b5043b82e5.mp4	-

No	Judul Inovasi	Klaster Covid-19	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiatif	OPD	Urusan Pemerintah	Kemungkinan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	C-19	Video	Youtube
67	SIJOLI (Sistim Informasi Sidik Jari Online)	-	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Diskominfo	komunikasi dan informatika	110.00	Penerapan	19-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
68	PADU PNS (Pelayanan Terpadu Pemantauan Network System)	-	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	OPD	Diskominfo	komunikasi dan informatika	100.00	Penerapan	19-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
69	LIPO ONLINE (Layanan Informasi Publik Online)	-	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	Diskominfo	komunikasi dan informatika	136.00	Penerapan	19-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
70	LASADA ONLINE (Layanan Satu Data Online)	-	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	OPD	Diskominfo	statistik	125.00	Penerapan	20-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
71	ACC PAPA (Anjung Command Center Padang Pariaman)	-	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	OPD	Diskominfo	komunikasi dan informatika	55.00	Penerapan	20-09-2020	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada

Pada Tabel berikut beberapa usulan inovasi yang akan dilaksanakan daerah pada tahun 2019 dan 2020 pada Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 7.2.
Daftar Usulan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2020

No.	Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Latar Belakang Inovasi dibuat	Hasil/ Dampak Pelaksanaan	Mulai Dilaksanakan
1.	BPKD	Pembayaran Pajak BPHTB On Line dengan BPN	Upaya memaksimalkan pendapatan pajak BPHTB	Meningkatnya pendapatan daerah	2020
		Tapping Box Pajak	Upaya monitoring transaksi usaha secara on line	Meningkatnya pendapatan daerah	2020
		Integrasi Simda Gaji dengan Simda Keuangan	Supaya data di simda gaji terkoneksi dengan simda Keuangan	Efisiensi dan ketepatan data	2020
		SP2D On Line	Memudahkan OPD dalam mengakses penerbitan SP2D	Terwujudnya pelayanan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	2020
		Kerjasama dengan Pihak Terkait tentang Pemakaian Aset Daerah	Pengelolaan pemakaian aset daerah secara optimal	Terwujudnya akuntabilitas dan tepat sasaran pengelolaan aset daerah	2020
2	Disdagnakerkop UKM	Gerakan Pengembangan UKM (GerbangKu)	Banyaknya permasalahan yang menghambat perkembangan UKM	UKM Maju dan berkembang	2019
		PAKAR KITO (pelayanan kartu pencari kerja kreatif, inovatif, terampil)	Belum tersedianya perangkat lunak pelayanan AK1 berbasis online/aplikasi	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan kartu AK1	2019
		Pelayanan Administrasi Kantor Hubungan Industrial tanpa Masalah (PAK HITAM)	Terbatasnya pelayanan terhadap Pekerja dan Pemberi Kerja terkait Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Mempercepat proses pelayanan di Bidang HI dan Syarat Kerja	2019
		SiKambie	Koperasi, kelembagaan, manajemen dan pengawasan koperasi	Meningkatnya peran koperasi dalam pembangunan daerah	2019
		Indah Berseri (Informasi Daftar Harga Beras dan Sembako Hari Ini)	Gejolak harga sembako akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat dan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Akses untuk mendapatkan informasi harga Dengan menggunkan data 	2019

No.	Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Latar Belakang Inovasi dibuat	Hasil/ Dampak Pelaksanaan	Mulai Dilaksanakan
			stabilitas darah, untuk itu perlu adanya sistem yang mampu mengperbarui informasi harga setiap hari	informasi harga yang terbaru pemerintah dapat mengambil langkah yang perlu untuk menstabilkan harga dan suplai bahan pokok	
		KOMPETEN Pendaftar Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Belum terlayani secara cepat dan tepat pendaftaran pelatihan PBK di BLK	Meningkatnya animo pencari kerja mengikuti pelatihan	2019
3	Disdikbud	PPDB ELEKTRONIK LANJUTAN	Seluruh sekolah dasar dan menengah menggunakan system PPDB Elekonik untuk menghilangkan istilah sekolah Favorit/sekolah unggul	Biaya transportasi siswa ke sekolah lebih hemat, sehingga bisa membantu meringankan beban orang tua dalam membiayai sekolah anaknya.	2019
		Program Terpadu Pemantauan Siswa berbasis Teknologi Informasi (Proteksi)	Kurangnya koordinasi antara orang Tua dan sekolah dalam hal pementauan aktifitas siswa dalam dan diluar jam belajar	Diharapkan lebih komperhensifnya pengawasan antara guru dengan orang tua murid agar tercapainya pendidikan karakter yang tepat sasaran sesuai kearifan lokal minangkabau	2020
		SIPANJI (siswa pandai mengaji)	Masih ada siswa SMP yang belum bisa baca tulis alquran	Agar masyarakat padang pariaman bebas buta huruf alquran	2019
4	Dinas Perikanan	Sabiduak Pari (Santun Bijak Edukatif Kooperatif dalam Pelayanan Perizinan Perikanan)	Belum tersosialisasinya jenis-jenis perizinan perikanan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan pelaku utama perikanan dan belum optimalnya pelayanan perizinan perikana kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	efisiensi dan ketepatan data	2019
		Sosis Gemarikan (Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	meningkatkan pengetahuan anak SD tentang ikan secara umum, cara menangkap ikan, cara mengolah ikan, serta	efisiensi dan ketepatan data	2019

No.	Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Latar Belakang Inovasi dibuat	Hasil/ Dampak Pelaksanaan	Mulai Dilaksanakan
			mengoptimalkan peran BBI sebagai tempat destinasi wisata perikanan		
		Si Budi Tampan (aplikasi pembudidaya ikan tangguh, mandiri dan pantang menyerah)	upaya untuk memudahkan OPD mengakses pelaku usaha dan pelaku utama bidang perikanan budidaya	efisiensi dan ketepatan data	2020
		Si Nela Manis (aplikasi nelayan Mandiri dan optimis)	upaya untuk memudahkan OPD mengakses pelaku usaha dan pelaku utama bidang penangkapan dan nelayan	efisiensi dan ketepatan data	2020
5	DPMD	Klinik Nagari			2020
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pertanian Modern			2020
		Kartu Tani			2020
		Posluhnag			2020
		Pendaftaran varietas durian dan varietas cabe merah			2020
		Peta Digital Kelompok Tani			2020
		Food Online Shop			2020
		Toko Tani Indonesia Center (TTIC)			2020
		Pelepasan varietas pinang wangi			2020
7	RSUD	Pelayanan Bus Keliling untuk Rawat Jalan			2019
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	BDT berbasis android(Basis Data Terpadu berbasis Android)			2020
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL GO DIGITAL			2019/2020

No.	Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Latar Belakang Inovasi dibuat	Hasil/ Dampak Pelaksanaan	Mulai Dilaksanakan
		SSS (Saya Sehat Sejahtera)			2019/2020
		AAM (Anjungan Absen Mandiri)			2019/2020
10	BPBD	"TANGKAS AMAN" (DATANG MENYELESAIKAN MASALAH DAMPAK BENCANA)			2019/2020



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan juga mengacu kepada RPJPD Tahun 2005-2025.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan nasional.

RKPD Tahun 2022 adalah penyempurnaan RKPD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Renja seluruh Perangkat Daerah dilingkup Kabupaten Padang Pariaman yang telah diverifikasi. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebagai berikut :

1. RKPD tahun 2022 merupakan bahan bagi OPD dalam menyusun Rancangan Renja OPD secara sinergis dan terintegrasi.
2. RKPD Tahun 2022 merupakan dasar bagi penyusunan RKPD setelah dilakukannya proses verifikasi Renja, Forum OPD dan Musrenbang RKPD.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR



LAMPIRAN 1

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju tahun 2023
Berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				641,644,661,992	DAU/DAK Fisik / Non Fisik		DAU/DAK Fisik / Non Fisik	593,649,561,992
	PENDIDIKAN DASAR				640,279,661,992				592,059,561,992
X	XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disdikbud	96.29%				97%	
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		BB	487,655,511,992			A	503,669,061,992
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		100.00%				100.00%	
		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti							
X	XX 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	80,500,000			100%	116,000,000
X	XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdikbud	15 Dok	12,500,000	DAU		15 Dok	13,000,000
X	XX 01 2.01 02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Disdikbud	15 Dok	9,500,000	DAU		15 Dok	9,500,000
X	XX 01 2.01 03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Disdikbud	15 Dok	9,500,000	DAU		15 Dok	9,500,000
X	XX 01 2.01 04	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Disdikbud	15 Dok	4,500,000	DAU		15 Dok	4,500,000
X	XX 01 2.01 05	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disdikbud	15 Dok	4,500,000	DAU		15 Dok	4,500,000
X	XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdikbud	15 Dok	40,000,000	DAU		15 Dok	75,000,000
X	XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Pertingkat Daerah		100%	485,526,811,992			100%	485,694,811,992
X	XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	484,768,811,992	DAU		1 Perangkat Daerah	484,768,811,992
X	XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdikbud	12 Bln	758,000,000	DAU		12 Bln	758,000,000
X	XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdikbud	0 Org	0	DAU		506 Org	168,000,000
X	XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		92%	110,000,000			94%	155,000,000
X	XX 01 2.05 03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Disdikbud	850 org/th	65,000,000	DAU		750 org/th	80,000,000
X	XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdikbud	5 org	45,000,000	DAU		10 org	75,000,000

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah		91%	247,000,000			93%	337,500,000
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor. Disediakan	Disdikbud	0 set Meja Eselon III & Lemari	0	DAU		3 Kursi , 2 Lemari	40,000,000
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah bahan bacaan surat kabar, Majalah dan Buku Perundang-undangan, disediakan	Disdikbud	Jumlah Bhn Bacaan	12,000,000	DAU		Jumlah Bahan Bacaan	12,500,000
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Rapat Luar daerah dan Dalam Daerah, dilaksanakan, disediakan	Padang Pariaman	Jumlah Kegiatan	100,000,000	DAU		Jumlah Kegiatan	150,000,000
X	XX	01	2.06	10	Panatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Operasional 1. DAPODIK, 2. Baca tulis Alqur'an 3. PPDB, disediakan	Disdikbud	470 SP	65,000,000	DAU		470 SP	65,000,000
							Disdikbud	0 SP	0	DAU		58 SP	0
							Disdikbud	1 Keg	70,000,000	DAU		1 Keg	70,000,000
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.		91%	388,500,000			92%	16,045,000,000
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan	Disdikbud	1 Unit	388,500,000			Unit	0
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan kerja 3 Laptop, 2PC, 2Printer, 1 infokus, disediakan	Disdikbud	0 Unit	0	DAU		3 Unit	45,000,000
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan Serta Perabotannya. Disediakan	Padang Pariaman	0 Paket	0	DAU		1 Paket	16,000,000,000
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100%	1,162,700,000			100%	1,185,750,000
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangkat, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan, disediakan.	Disdikbud	12 Bln	50,000,000	DAU		12 Bln	70,000,000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa Komunikasi, Listrik, Sumber Daya air, disediakan	Disdikbud	12 Bln	70,000,000	DAU		12 Bln	65,000,000
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Swakelola pengolah gaji, Pramusaji, Pramukantor, disediakan	Padang Pariaman	64 Org/Thn	1,042,700,000	DAU		64 Org/Thn	1,050,750,000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100%	140,000,000			100%	135,000,000
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan untuk Pemeliharaan Rutin Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan. Disediakan	Disdikbud	Jumlah Kendaraan	95,000,000	DAU		Jumlah Kendaraan	95,000,000
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Mesin, Komputer, AC dan Alat Kebersihan Kantor Lainnya. Disediakan	Disdikbud	Jumlah Peralatan Kantor	20,000,000	DAU		Jumlah Peratam Kantor	15,000,000
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin / Berkala Gedung Kantor, disediakan	Disdikbud	Jumlah Gedung Dipelihara (3)	25,000,000	DAU		Jumlah Gedung Dipelihara	25,000,000
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	SD/SMP	70.96%	152,449,150,000			56.31%	88,230,500,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar	SD	58.28%	91,128,233,000			58.27%	66,827,300,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SD. Disediakan	SD Pd. Prm	0 Paket	0	DAU	2 Paket	357,000,000
1	01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala/TU	Jumah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU. Disediakan	SD Pd. Prm	13 Paket	3,877,671,000	DAK Fisik	6 Paket	400,000,000
1	01 02 2.01 05	Pembanguan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Beserta Perabot Sekolah Dasar Dasar Dibangun. Disediakan	SD Pd. Prm	22 Paket	4,487,648,000	DAK Fisik	6 Paket	700,000,000
1	01 02 2.01 06	Pembangunan Srana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasaran dan Untilitas Sekolah Dasar disediakan	SD Pd. Prm	120 Paket	17,810,684,000	DAK Fisik	5 Paket	450,000,000
1	01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas (SD) yang Direhab Rusak Sedang / berat Beserta Perabotnya. disediakan	SD Pd. Prm	2 Paket	1,442,000,000	DAK Fisik	4 Paket	550,000,000
1	01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/dan Kepala Sekolah yang direhabilitasi Ringan/Sedang/Berat beserta Perabotnya. disediakan	SD Pd. Prm	4 Paket	350,150,000	DAK Fisik	12 Paket	485,000,000
1	01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perputakaan (SD) Direhabilitasi Sedang, Berat Disediakan	SD Pd. Prm	2 Paket	244,780,000	DAK Fisik	3 Paket	350,000,000
1	01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang Direhab. Disediakan	SD Pd. Prm	0 Paket	0	DAU	20 Paket	250,000,000
1	01 02 2.01 14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah Dasar (SD), Disediakan	SD Pd. Prm	1 Paket	100,000,000	DAU	2 Paket	175,000,000
1	01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah, Buku, TIK dan Media Pendidikan (SD) disediakan	SD Pd. Prm	2 Paket	1,745,000,000	DAK Fisik	15 Paket	1,650,000,000
1	01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran Disekolah Dasar Bantuan BOS, disediakan	SD Pd. Prm	49.225 siswa	47,193,300,000	DAK Non Fisik	49.225 Org/siswa	47,193,300,000
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran Disekolah Dasar Bantuan BOSDA . disediakan	SD Pd. Prm	3212 Siswa		DAU	3212 Siswa	
1	01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa, Seni Tradisional, Seni Budaya,PJOK dan IPS (SD) , disediakan	SD Pd. Prm	1 Paket	200,000,000	DAU	7 Paket	150,000,000
1	01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Ujian Akhir Sekolah (SD), disediakan	SD Pd. Prm	408 SP	75,000,000	DAU	408 SP	75,000,000
1	01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Kegiatan Kreatifitas, 1. KSN 2. KOSN 3. FIS2N SD Tingkat	SD Pd. Prm SD Pd. Prm SD Pd. Prm	Prestasi Siswa SD	175,000,000	DAU DAU DAU	Prestasi Siswa SD	175,000,000
1	01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Honorer 1. Tenaga Pendidik. 2. Operator. 3. Penjaga/Pesuruh. Insentif Untuk SD. Disediakan	SD Pd. Prm SD Pd. Prm SD Pd. Prm	1375 org 407 Org 315 org	8,250,000,000 2,442,000,000 1,890,000,000	DAU DAU DAU	1450 org 407 Org 315 org	8,700,000,000 2,442,000,000 1,890,000,000
			Jumlah Guru SD Diseleksi untuk Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah SD. Disediakan	SD Pd. Prm	85 org	685,000,000	DAU	75 org	675,000,000
1	01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	Jumlah Kepala Sekolah Dasar yang dibina dan Mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, disediakan	SD Pd. Prm	410 Org	75,000,000	DAU	410 SP	70,000,000
1	01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah Dasar (SD) yang dibina: 1.Manajemen Pengelolaan BOS, Disediakan 2.Manajemen Pengelolaan PIP disediakan	SD Pd. Prm SD Pd. Prm	410 Org 410 SP	65,000,000 20,000,000	DAU DAU	410 S P 410 SP	65,000,000 25,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMP	60.95%	41,011,517,000			62.56%	7,840,500,000
1	01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala/Tata Usaha	SMP Pd. Prm	21 Unit	7,346,446,000	DAK Fisik		1 0 Unit	2,750,000,000
1	01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	SMP Pd. Prm	3 Unit	1,657,264,000	DAK Fisik		4 Unit	650,000,000
1	01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorim	SMP Pd. Prm	11 Unit	6,836,027,000	DAK Fisik		5 Unit	1,500,000,000
1	01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1. Pembangunan Ruang Kelas, 2. Sarana Prasarana / Ruang Inklusif 3. Utilitas Lainnya 4. Labor Komputer. Disediakan	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		2 Paket	400,000,000
			SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		3 Paket	350,000,000
			SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		2 Paket	200,000,000
			SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		2 Paket	250,000,000
1	01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		16 Paket	250,000,000
1	01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		6 Paket	300,000,000
1	01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		4 Paket	250,000,000
1	01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		2 Paket	215,000,000
1	01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		5 Paket	275,000,000
1	01 02 2.02 25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		2 Paket	100,000,000
1	01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	SMP Pd. Prm	22 Paket	1,645,480,000	DAK Fisik		2 Paket	350,500,000
1	01 02 2.02 32	Penyediaan Baiaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	SMP Pd. Prm	17.028 siswa	18,725,300,000	DAK Non Fisik		17.028 siswa	18,725,300,000
			SMP Pd. Prm	110 Siswa	121,000,000	DAU		110 Siswa	121,000,000
1	01 02 2.02 33	Perlengkapan Dasar Buku Tek Peserta Didik	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		4 Paket	100,000,000
1	01 02 2.02 35	Pengdaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	SMP Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		7 Paket	250,000,000
1	01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	SMP Pd. Prm	89 SP	65,000,000	DAU		89 SP	65,000,000
1	01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lajut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMP Pd. Prm	61 Kepsek	50,000,000	DAU		61 Kepsek	60,000,000
	01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1. KSN	SMP Pd. Prm	1 Keg	940,000,000	DAU		1 Keg	940,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2. KOSN 3. FLS2N ,SMP dan 4. HARDIKNAS.	SMP Pd. Prm	1 Keg		DAU		1 Keg	
			SMP Pd. Prm	1 Keg		DAU		1 Keg	
			SMP Pd. Prm	1 Keg		DAU		1 Keg	
1	01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Insentif 1. Tenaga Pendidik. 2. Operator. 3. Penjaga/Pesuruh Sekolah. Untuk SMP Kab. Padang Pariaman.	SMP Pd. Prm	295 Org x 12 bl X 500.000	1,771,500,000	DAU	295 Org x 12 bl X 500.000	1,807,950,000
				SMP Pd. Prm	60 org x 12 x 500.000	361,500,000	DAU	60 org x 12 x 500.000	361,500,000
				SMP Pd. Prm	60 org x 12 bln x 500.000	361,500,000	DAU	60 org x 12 bln x 500.000	361,500,000
			Jumlah Guru diseleksi untuk Calon Kepala Sekolah SMP dan Pengawas Sekolah SMP.	SMP Pd. Prm	55 org	495,000,000	DAU	10 Org	90,000,000
1	01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti Kegiatan. 1. Olimpiadi Guru Nasional (OGN) SMP. 2. MGMP SMP.	SMP Pd. Prm	1 Keg	70,000,000	DAU	1 Keg	70,000,000
				SMP Pd. Prm	8 Kali Pertemuan	265,500,000	DAU	10 Kali Pertemuan	270,000,000
1	01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah SMP Satap Kebutuhan Operasionalnya.	SMP Pd. Prm	12 Satuan Pendd SATAP	300,000,000	DAU	12 Satuan Pendd SATAP	300,000,000
1	01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI	TK/PAUD	54.80%	16,501,440,000		52.20%	9,706,100,000
1	01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru TK/PAUD/MDA/Pesantren Dibangun. Desediakan.	TK/PAUD Pd. Prm	12 Paket	1,140,360,000	DAK Fisik	2 Paket	350,000,000
1	01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas TK/PAUD disediakan	TK/PAUD Pd. Prm	42 Paket	6,252,480,000	DAK Fisik	2 Paket	250,000,000
1	01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan / ruang kelas dan ruang guru PAUD direhabilitas. disediakan	TK/PAUD Pd. Prm	0 Unit	0	DAU	3 Unit	150,000,000
1	01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Untilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Jamban Beserta Sanitasinya dan Untilitas Sedang Berat. Disediakan	TK/PAUD Pd. Prm	0 Paket	0	DAU	5 Paket	250,000,000
1	01 02 2.03 07	Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Kebutuhan Mebeluer TK/PAUD, disediakan	TK/PAUD Pd. Prm	0 Paket	0	DAU	10 Paket	85,000,000
1	01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah TK/PAUD : 1. TK/PAUD Terpadu VII Koto. 2. TK/PAUD. Pembina Kabupaten. 3. TK/PAUD Pembina Kecamatan dan PAUD Swasta BOP. 4.	TK/PAUD VII Koto	62 Anak x 600.000/thn	4,773,600,000	DAK Non Fisik	62 Anak x 600.000/thn	4,773,600,000
				TK/PAUD Pembina Kab	68 Anak x 600.000/thn		DAK Non Fisik	68 Anak x 600.000/thn	
				TK/PAUD Pembina Kec.	45 Anak x 600.000/thn		DAK Non Fisik	45 Anak x 600.000/thn	
				TK/PAUT Swasta	7.781 Anak x 600.000/thn		DAK Non Fisik	7.781 Anak x 600.000 /thn	
1	01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Peraga Edukatif dan Buku Gambar Krayon.	TK/PAUD Pd. Prm	26 Paket	650,000,000	DAK Fisik	6 Paket	157,500,000
1	01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Kebutuhan Operasional 1. TK/PAUD Terpadu VII. 2. TK /PAUD Pembina Kabupaten. 3. TK/PAUD Pembina Kecamatan.	TK/PAUD VII Koto	12 bln	180,000,000	DAU	12 bln	180,000,000
				TK/PAUD Pembina Kab	12 bln		DAU	12 bln	
				TK/PAUD Pembina Kec.	12 bln		DAU	12 bln	

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Terhadap pelaksanaan TK/PAUD se Kab. Padang Pariaman.	TK/PAUD Pd. Prm	Jumlah PAUD Yang di Evaluasi	50,000,000	DAU		Jumlah Paud Dievaluasi	50,000,000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Insentif 1. Guru Honor. 2. Operator di Tingkat Satuan TK/PAUD. Jumlah Guru TK/PAUD Diseleksi mengikuti Cakap dan Penilik Disediakan	TK/PAUD Pd. Prm	300 Org x 12 x 500.000	3,090,000,000	DAU		300 Org x 12 x 500.000	3,090,000,000
							TK/PAUD Pd. Prm	200 org x 12 x 500.000		DAU	200 org x 12 x 500.000		
							TK/PAUD Pd. Prm	10 org		DAU	5 org		
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD	Jumlah PTK PAUD, 1. Berprestasi 2. Bintek/Workshop. Disediakan Jumlah Anak TK/PAUD Untuk mengikuti 1. Gebyar. 2. Jambore 3. HAI 4. HAN, disediakan	TK/PAUD Pd. Prm	35 org	325,000,000	DAU		30 org	325,000,000
							TK/PAUD Pd. Prm	345 org		DAU	325 org		
							TK/PAUD Non Formal/Keset	1 Keg		DAU	1 Keg		
							TK/PAUD Non Formal/Keset	1 Keg		DAU	1 Keg		
							TK/PAUD Non Formal/Keset	1 Keg		DAU	1 Keg		
							TK/PAUD Non Formal/Keset	1 Keg		DAU	1 Keg		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang dibina /Supervisi BOP PAUD Kab. Padang Pariaman.	TK/PAUD Pd. Prm	400 Satuan PAUD	40,000,000	DAU		400 Satuan PAUD	45,000,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan	Non Formal / Kesetaraan	54.80%	3,807,960,000			52.20%	3,856,600,000
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung Ruang/ Kelas /Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung, Ruang Kelas Sekolah, Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan disediakan	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		1 Paket	165,000,000
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Untilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Untilitas. Disediakan	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	2 Paket	954,360,000	DAK Fisik		2 Paket	350,000,000
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Untilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung Ruang Kelas/Guru Direhabilitasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Disediakan	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		5 Paket	325,000,000
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebeluer Pendd Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebeluer Ruang Kelas dan Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, disediakan	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		7 Paket	90,000,000
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendd Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Komputer/Laptop Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, disediakan	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	0 Paket	0	DAU		10 Paket	100,000,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa 1. Paket A 2. Paket B. 3. Paket C. dan, 4. PKBM dibantu Proses Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Non Formal / Kesetaraan SKB	25 org x 300.000.	7,500,000	DAK Non Fisik		25 org x 300.000.	7,500,000
							Non Formal / Kesetaraan	45 org x 500.000	22,500,000	DAK Non Fisik	45 org x 500.000.	22,500,000	
							Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	125 Org x 1.800.000.	225,000,000	DAK Non Fisik	125 Org x 1.800.00	225,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	1237 org x 1.800.000.	2,226,600,000	DAK Non Fisik		1237 org x 1.800.000	2,226,600,000
1	01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa Pendd Nonformal/Kesetaraan.	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	2 Paket	227,000,000	DAK Fisik	3 Paket	200,000,000
1	01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Operasional Sekolah Nonformal / Kesetaraan SKB Sungai Limau.	Non Formal / Kesetaraan	12 Bln	45,000,000	DAU	12 Bln	45,000,000
			Jumlah penyelenggaraan proses belajar Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C.	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm (PKBM)	24 Lembaga	50,000,000	DAU	24 Lembaga	50,000,000
1	01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Operasional.	Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	1171 org	50,000,000	DAU	1171 org	50,000,000
1	01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	SD/SMP	57.21%	175,000,000		58.89%	160,000,000
			Rasio Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	TK/PAUD/Non Formal / Kesetaraan Pd. Prm	54.80%			57.20%	
1	01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	SD/SMP	59.61%	130,000,000		60.57%	120,000,000
1	01 03 2.01 04	Pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendd Dasar (SD)	SD Pd. Prm	1 Keg	65,000,000	DAU	1 Keg	60,000,000
			Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendd Dasar (SMP)	SD Pd. Prm	1 Keg	65,000,000	DAU	1 Keg	60,000,000
1	01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Penyusunan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	TK/PAUD/Non Formal / Kesetaraan	54.80%	45,000,000		57.20%	40,000,000
1	01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk Penyusunan / Penetapan Silabus. Disediakan	TK/PAUD/Non Formal / Kesetaraan	1 Keg	45,000,000	DAU	1 Keg	40,000,000
		KEBUDAYAAN		Padang Pariaman		1,365,000,000			1,590,000,000
2	22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	Padang Pariaman	6	605,000,000		7	820,000,000
2	22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina	Padang Pariaman	6	550,000,000		7	500,000,000
2	22 02 2.02 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Ferstival (AleK Nagari) Dalam Rangka Pemajuan/Pemanfaatan Tradisi Budaya, disediakan	Padang Pariaman	5 Ferstival	400,000,000	DAU	5 Ferstival	350,000,000
2	22 02 2.02 03	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Tradisional.	Jumlah Sanggar Seni Tradisional Dibina, Dibantu disediakan	Padang Pariaman	18 Paket	150,000,000	DAU	10 sanggar	150,000,000
2	22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab./Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Yanmg Penganutnya Dalam Daerah Kab./Kota.	Padang Pariaman	6	55,000,000		7	320,000,000
	22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah 1. Terbangunya Sarana Prasarana Medan Nan	Padang Pariaman	0 Unit	0	DAU	2 Laga Laga	275,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Bapaneh (Laga-Laga) dan Balerong Adat 2. LKAAM dan Budo Kandung Dipasilitasi, Disediakan	Padang Pariaman	45 Org	55,000,000	DAU		45 Org	45,000,000
2	22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Padang Pariaman	6	315,000,000			7	290,000,000
2	22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab./Kota	Padang Pariaman	6	315,000,000			7	290,000,000
2	22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Padang Pariaman	3 Pasang	315,000,000	DAU		3 Pasang	290,000,000
		Jumlah : 1. Rang Mudo dan Puti Bungsu Sebagai Duta Budaya Yang Berprestasi. 2. Pemenang Gita Bahana Nusantara. Tingkat Kab. Paten. 3. Karang Taruna/Kelompok Pemuda Peduli Sejarah dan Tradisi. 4. BIMTEK/WORKSHOP Pelajar SMP/MTs Tentang	Padang Pariaman	3 org Pemenang		DAU		3 org Pemenang	
			Padang Pariaman	60 Org		DAU		60 Org	
			Padang Pariaman	70 org		DAU		70 org	
2	22 04	Program Pembinaan Sejarah	Padang Pariaman	50	110,000,000			50	110,000,000
2	22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kab. /Kota	Padang Pariaman	50	110,000,000			50	110,000,000
2	22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Padang Pariaman	1 Keg	110,000,000	DAU		1 Keg	110,000,000
		Jumlah Data Sejarah dan Cagar Budaya yang di bukukan. Disediakan	Padang Pariaman	500 Buku		DAU		500 Buku	
2	22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.	Padang Pariaman	50	335,000,000			50	370,000,000
2	22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota	Padang Pariaman	50	135,000,000			50	120,000,000
2	22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Padang Pariaman	100%	50,000,000	DAU		100%	45,000,000
2	22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya.	Padang Pariaman	1 Perda/Perbup	85,000,000	DAU		1 Perda/Perbup	75,000,000
2	22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Padang Pariaman	50	200,000,000			50	250,000,000
2	22 05 2.02 1	Perlindungan Cagar Budaya	Padang Pariaman	12 Cagar Budaya	200,000,000	DAU		14 Cagar Budaya	250,000,000

**MATRIKS RENJA TAHUN 2022
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			174,981,453,373				181,513,430,103	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terebutuhnya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	100%	119,195,171,283	DAU		100%	121,700,789,477
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Padang Pariaman	A	A					
					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Padang Pariaman	100%	100%					
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	771,776,563	DAU		94%	848,954,219
X	XX	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	2 dokumen	69,625,000	DAU		2 dokumen	76,587,500
X	XX	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang Pariaman	1 dokumen	200,020,000	DAU		1 dokumen	220,022,000
X	XX	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang Pariaman	1 dokumen	106,244,063	DAU		1 dokumen	116,868,469
X	XX	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang Pariaman	1 dokumen	93,750,000	DAU		1 dokumen	103,125,000
X	XX	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang Pariaman	1 dokumen	89,637,500	DAU		1 dokumen	98,601,250
X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Padang Pariaman	3 dokumen	106,250,000	DAU		3 dokumen	116,875,000
X	XX	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang Pariaman	4 laporan	106,250,000	DAU		4 laporan	116,875,000
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	96,936,328,199	DAU		100%	96,991,701,975
X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Pariaman	1 Tahun	95,833,590,449	DAU		1 Tahun	95,833,590,449

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah						Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Padang Pariaman	1 Tahun	549,000,000	DAU		1 Tahun	549,000,000
X	XX	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Laporan Rekon Belanja Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	336 Laporan	97,431,875	DAU		336 Laporan	107,175,063
X	XX	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Belanja BLUD Puskesmas	Padang Pariaman	300 Laporan	87,500,000	DAU		300 Laporan	96,250,000
X	XX	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	1 laporan	81,250,000	DAU		1 laporan	89,375,000
X	XX	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah jenis laporan tanggapan pemeriksaan Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	4 laporan	81,250,000	DAU		4 laporan	89,375,000
X	XX	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	4 laporan	93,750,000	DAU		4 laporan	103,125,000
X	XX	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	1 laporan	112,555,875	DAU		1 laporan	123,811,463
X	XX	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	162,510,000	DAU		94%	178,761,000
X	XX	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasaran untuk Peningkatan Disiplin	Padang Pariaman	100 Paket	-	DAU		100 Paket	-
X	XX	01	2	05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	80 Orang	-	DAU		85 Orang	-
X	XX	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Padang Pariaman	10 Dokumen	-	DAU		10 Dokumen	-
X	XX	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Padang Pariaman	24 Kali	-	DAU		24 Kali	-
X	XX	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Padang Pariaman	12 kali	-	DAU		12 Kali	-
X	XX	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Padang Pariaman	5 Orang	-	DAU		5 Orang	-
X	XX	01	2	05	07	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Padang Pariaman	1 Orang	-	DAU		1 Orang	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah						Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2	05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah SK Pemindahan Tugas ASN	Padang Pariaman	20 SK	-	DAU		20 SK	-
X	XX	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah ASN Dinas Kesehatan yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	Padang Pariaman	35 Orang	42,947,500	DAU		40 Orang	47,242,250
X	XX	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Padang Pariaman	65 Orang	29,687,500	DAU		70 Orang	32,656,250
X	XX	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan	Padang Pariaman	65 Orang	89,875,000	DAU		70 Orang	98,862,500
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	100%	705,032,188	DAU		100%	775,535,408
X	XX	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang Pariaman	200 Buah	35,625,000	DAU		200 Buah	39,187,500
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai anggaran	Padang Pariaman	25 Unit	187,275,625	DAU		25 Unit	206,003,188
X	XX	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia	Padang Pariaman	25 Buah	23,890,938	DAU		30 Buah	26,280,032
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor	Padang Pariaman	150 Logistik	148,437,500	DAU		150 Logistik	163,281,250
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai anggaran	Padang Pariaman	20 Barang	90,615,625	DAU		20 Barang	99,677,188
X	XX	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Padang Pariaman	5 Bahan Bacaan	10,000,000	DAU		5 Bahan Bacaan	11,000,000
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material	Padang Pariaman	50 Bahan	-	DAU		50 Bahan	-
X	XX	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Padang Pariaman	2500 porsi/kotak	118,750,000	DAU		2500 porsi/kotak	130,625,000
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bimtek, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Padang Pariaman	200 Orang/Hari	90,437,500	DAU		200 Orang/Hari	99,481,250
X	XX	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan Arsip Dinamis selama 1 tahun	Padang Pariaman	25 Arsip	-	DAU		25 Arsip	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah						Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selama 1 tahun	Padang Pariaman	4 SPBE	-	DAU		4 SPBE	-
X	XX	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	82%	412,371,250	DAU		84%	743,608,375
X	XX	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Padang Pariaman	1 Roda 4/ 1 Roda 2	-	DAU		1 Roda 4/ 1 Roda 2	-
X	XX	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	Padang Pariaman	1 Mobil	100,000,000	DAU		1 Mobil	400,000,000
X	XX	01	2	07	03	Pengadaan ALat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Padang Pariaman	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
X	XX	01	2	07	04	Pengadaan Alat ANgkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Padang Pariaman	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
X	XX	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubiler yang diadakan sesuai anggaran	Padang Pariaman	Meja kerja, kursi kerja, lemari,	187,387,500	DAU		Meja kerja, kursi kerja, lemari, kursi	206,126,250
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Padang Pariaman	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
X	XX	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Padang Pariaman	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
X	XX	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Padang Pariaman	2 Paket	-	DAU		2 Paket	-
X	XX	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
X	XX	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	jumlah Peralatan gedung yang tersedia	Padang Pariaman	10 Laptop/Komputer	124,983,750	DAU		Komputer, laptop, printer,	137,482,125
X	XX	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 Tempat Parkir R4	-	DAU		1 Pagar Dinas Kesehatan	-
X	XX	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	1,676,687,500	DAU		100%	1,844,356,250
X	XX	01	2	07	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diarsipkan	Padang Pariaman	2000 Surat	37,500,000	DAU		2000 Surat	41,250,000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
X	XX	01	2	07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Padang Pariaman	12 bulan	197,500,000	DAU		12 bulan	217,250,000
X	XX	01	2	07	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Padang Pariaman	12 bulan	131,250,000	DAU		12 bulan	144,375,000
X	XX	01	2	07	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga swakelola, Tenaga IT, Sopir dan kebersihan Kantor	Padang Pariaman	55 Orang	1,310,437,500	DAU		55 Orang	1,441,481,250
X	XX	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Padang Pariaman	100%	518,747,500	DAU		100%	570,622,250
X	XX	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	12 Bulan	100,000,000	DAU		12 Bulan	110,000,000
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 1 tahun	Padang Pariaman	12 Bulan	249,997,500	DAU		12 Bulan	274,997,250
X	XX	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Padang Pariaman	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
X	XX	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Padang Pariaman	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
X	XX	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Padang Pariaman	30 Paket	-	DAU		30 Paket	-
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Padang Pariaman	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
X	XX	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Padang Pariaman	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
X	XX	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Padang Pariaman	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
X	XX	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 Gedung/Tahun	-	DAU		1 Gedung/Tahun	-
X	XX	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 Gedung/Tahun	75,000,000	DAU		1 Gedung/Tahun	82,500,000
X	XX	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 tahun	Padang Pariaman	1 Gedung/Tahun	93,750,000	DAU		1 Gedung/Tahun	103,125,000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah						Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2	09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Padang Pariaman	1 Gedung/Tahun	-	DAU		1 Gedung/Tahun	-
X	XX	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan Retribusi	Padang Pariaman	100%	18,011,718,083	BLUD		100%	19,747,250,000
X	XX	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah anggaran BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Padang Pariaman	100%	18,011,718,083	BLUD		100%	19,747,250,000
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Padang Pariaman	70%	54,908,909,806	DAU, DAK		85%	58,847,531,113
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	17,644,242,148	DAU, DAK		100%	17,662,991,373
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	Jumlah pembangunn sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Padang Pariaman	1 RS	-			1 RS	-
1	02	02	2	01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas	Padang Pariaman	1 Puskesmas	-			1 Puskesmas	-
1	02	02	2	01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Padang Pariaman	1 Buah	2,769,431,038	DAK		1 buah	2,769,431,038
1	02	02	2	01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Padang Pariaman	1 Buah	0			1 buah	0
1	02	02	2	01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembanagn Rumah Sakit	Padang Pariaman	1 Buah	-			1 buah	-
1	02	02	2	01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah 'Pengembangan Puskesmas	Padang Pariaman	3 puskesmas	4,068,369,998	DAU,DAK		3 puskesmas	4,068,369,998
1	02	02	2	01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	1 Pustu	-			1 Pustu	-
1	02	02	2	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Padang Pariaman	1 Paket	-			1 Paket	-
1	02	02	2	01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Padang Pariaman	5 Paket	-			5 Paket	-
1	02	02	2	01	10	Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	2 Paket	-			2 Paket	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2	01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Padang Pariaman	5 Paket	-		5 Paket	-
1	02	02	2	01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	2 Paket	-		2 Paket	-
1	02	02	2	01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	3 Paket	2,890,000,000	DAK	5 Paket	2,890,000,000
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Persentase alat kesehatan yang tersedia di puskesmas sesuai standar	Padang Pariaman	65%	1,615,000,000	DAK	70%	1,615,000,000
1	02	02	2	01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase alat kesehatan yang dikalibrasi	Padang Pariaman	100%	93,750,000	DAU	100%	103,125,000
1	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Padang Pariaman	100%	2,499,850,562	DAU, DAK	100%	2,499,850,562
						Persentase puskesmas ketersediaan vaksin IDR	Padang Pariaman	100%	100%				
						Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Padang Pariaman	50%	60%				
						Jumlah Puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pelayanan kefarmasian	Padang Pariaman	25 puskesmas	25 puskesmas				
						Jumlah Penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan	Padang Pariaman	Ada	Ada				
						Jumlah Puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Padang Pariaman	25 puskesmas	25 puskesmas				
1	02	02	2	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang tersedia	Padang Pariaman	100%	3,614,098,300	DAK	100%	3,614,098,300
1	02	02	2	01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Kesehatan	Padang Pariaman	2 Faskes	-		2 Faskes	-
1	02	02	2	01	19	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	2 Faskes	-		2 Faskes	-
1	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Jumlah pengawasan alat kesehatan di puskesmas	Padang Pariaman	25 puskesmas	93,742,250	DAU	25 puskesmas	103,116,475

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pertemuan dan pengelolaan alat kesehatan yang baik	Padang Pariaman	5 kegiatan			5 kegiatan	
							Jumlah rumah sakit dan puskesmas yang diawaSI dalam manajemen aplikasi ASPAK	Padang Pariaman	25 puskesmas dan 1			25 puskesmas dan 1 Rumah Sakit	
							Jumlah pertemuan tentang penggunaan dan pengoperasian aplikasi ASPAK	Padang Pariaman	5 kegiatan			5 kegiatan	
1	02	02	2	01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	25 Puskeamas	-	DAU	25 Puskeamas	-
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	80%	36,681,478,908		85%	40,556,531,865
1	02	02	2	02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Padang Pariaman	100%	41,076,250	DAU	100%	45,183,875
							Penurunan angka kematian ibu	Padang Pariaman	7 Orang			6 Orang	
							Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil	Padang Pariaman	100%			25 Puskesmas	
							Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi P4K	Padang Pariaman	100%			25 Puskesmas	
							Persentase Puskesmas yang melaporkan dan melaksanakan AMP Kejadian Kematian	Padang Pariaman	100%			25 Puskesmas	
1	02	02	2	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	100%	34,243,750	DAU	89,8%	37,668,125
							Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Padang Pariaman	100%			89.80%	
							Persentase Bumil, Bulin, Bufas yang mendapat penanganan komplikasi	Padang Pariaman	100%			100%	
							Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate / ASFR)	Padang Pariaman	53 Orang			50%	
							Total Fertility Rate (TFR)	Padang Pariaman	2.35			2.35	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10		
					Persentase Puskesmas memberikan pelayanan KB Pasca Salin	Padang Pariaman	100%			100%			
					Persentase Faskes yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	Padang Pariaman	100%			100%			
					Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif (CPR)	Padang Pariaman	64,3%			64,3%			
1	02	02	2	02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Padang Pariaman	100%	34,840,000	DAU	100%	38,324,000
							Penurunan angka kematian bayi	Padang Pariaman	47 Orang			46 Orang	
							Persentase neonatal komplikasi yang ditangani	Padang Pariaman	100%			100%	
							Persentase kunjungan neonatal lengkap	Padang Pariaman	100%			100%	
1	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Penurunan angka kematian balita	Padang Pariaman	4 Orang	41,158,750	DAU	3 Orang	45,274,625
							Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Padang Pariaman	100%			100%	
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Balita	Padang Pariaman	85%			90%	
							Persentase Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS pada Kunjungan Balita	Padang Pariaman	100%			100%	
							Persentase Puskesmas melaksanakan intervensi (SDIDTK) pada rujukan balita gangguan perkembangan	Padang Pariaman	100%			100%	
1	02	02	2	02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	100%	30,803,750	DAU	70.00%	33,844,125
							Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan penjangkaran (PE berkala)	Padang Pariaman	100%			25 Puskesmas	
							Persentase puskesmas membina sekolah/ madrasah (SD/MI, SMP/MIS, SMA/SMK, melalui kegiatan UKS/M	Padang Pariaman	100%			25 Puskesmas	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Padang Pariaman	100%				25 Puskesmas	
1	02	02	2	02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia 15-59 tahun sesuai standar	Padang Pariaman	100%	45,196,250	DAU	100%	49,715,875
						Persentase Korong yang melaksanakan Posbindu PTM	Padang Pariaman	60%				60%%	
						Persentase Puskesmas Melaksanakan PANDU PTM	Padang Pariaman	80%				80%	
						Persentase Puskesmas Melaksanakan UBM	Padang Pariaman	10 hc (40%)				40%	
						Persentase sekolah melaksanakan kebijakan KTR	Padang Pariaman	50%				50%	
						Deteksi dini Gangguan Indera Fungsional	Padang Pariaman	40%				40%	
						Persentase Obesitas pada usia > 18 tahun	Padang Pariaman	21%				22%	
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30-59 tahun	Padang Pariaman	80%				80%	
						Persentase merokok pada usia 10-18 tahun	Padang Pariaman	8,9%				8,8%	
						Persentase Merokok Pada Penduduk Usia >15 Tahun	Padang Pariaman	8,9%				8,8%	
1	02	02	2	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	100%	41,156,250	DAU	80.00%	45,271,875
						Persentase Puskesmas melaksanakan Posyandu Lansia	Padang Pariaman	100%				100.00%	
						Persentase Puskesmas menyelenggarakan Puskesmas Santun Lansia	Padang Pariaman	65%				70.00%	
1	02	02	2	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	100%	58,562,500	DAU	100.00%	64,418,750

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Padang Pariaman	35.00%				30.00%	
1	02	02	2	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Padang Pariaman	100%	46,925,000	DAU		100.00%	51,617,500
1	02	02	2	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Padang Pariaman	100%	51,750,000	DAU		100.00%	56,925,000
						Persentase penderita GME pada penduduk >15 tahun yang mendapatkan layanan	Padang Pariaman	30.00%				40.00%	
1	02	02	2	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Padang Pariaman	90%	71,250,000	DAU		90.00%	78,375,000
						Persentase angka keberhasilan pengobatan TB	Padang Pariaman	80%				80.00%	
						Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Padang Pariaman	100%				100%	
						Persentase penemuan kasus TB resistan obat	Padang Pariaman	95%				95%	
						Cakupan pengobatan TB RO	Padang Pariaman	70%				75.00%	
						Angka keberhasilan pengobatan kasus TB Resistan obat	Padang Pariaman	80%				80.00%	
						Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk'	Padang Pariaman	331				328	
						Persentase kasus TB yang mengetahui status HIV	Padang Pariaman	70%				75%	
						Cakupan penemuan kasus TB Anak	Padang Pariaman	90%				90%	
1	02	02	2	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Padang Pariaman	0.20/1000 penduduk	68,750,000	DAU		0.19/1000 penduduk	75,625,000
						Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Padang Pariaman	100%					

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Padang Pariaman	85%				90%	
						Jumlah deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko	Padang Pariaman	95%				100%	
						Persentase Kecamatan Yang Melakukan deteksi dini untuk Infeksi Hepatitis B	Padang Pariaman	100%				100%	
						Peningkatan deteksi dini pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada Ibu Hamil	Padang Pariaman	100%				100.00%	
1	02	02	2	02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Padang Pariaman	100.00%	62,496,875	DAU	100.00%	687,465,643
1	02	02	2	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan	Padang Pariaman	100.00%	35,625,000	DAU	100.00%	39,187,500
							Pembentukan TIM dalam Upaya penanggulangan Krisis Kesehatan terdampak bencana	Padang Pariaman	25 Puskesmas			25 Puskesmas	
1	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pervalensi Balita Stunting	Padang Pariaman	18,4%	3,527,241,000	DAU. DAK	16.00%	3,527,241,000
							Persentase kasus Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	Padang Pariaman	100.00%			100.00%	
							% Ibu Hamil Anemia	Padang Pariaman	39%			36.00%	
							% Ibu Hamil Kurang Energi Protein (KEK)	Padang Pariaman	14,5%			13.00%	
							Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Padang Pariaman	80%			80.00%	
							Cakupan Ibu hamil yg mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet, selama masa kehamilan.	Padang Pariaman	82%			83.00%	
							Cakupan Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A.	Padang Pariaman	76%			79.00%	
							% Prevalensi Balita <i>Underweigh</i> (Berat badan kurang dan sangat kurang)	Padang Pariaman	14%			13.00%	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% Balita <i>Wasting</i> (balita kurus dan kurus sekali)	Padang Pariaman	7,5%				7.30%	
		% Bayi dengan berat badan lahir rendah (BB <2500 gram)	Padang Pariaman	3.80%				3.00%	
		% Bayi yang baru lahir mendapatkan IMD	Padang Pariaman	62%				66.00%	
		% Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Padang Pariaman	50%				55.00%	
		% Bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Padang Pariaman	45%				50.00%	
		% Cakupan Balita kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Padang Pariaman	85%				85.00%	
		% Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S)	Padang Pariaman	75%				80.00%	
		% Cakupan Balita Yang mempunyai buku KIA/KMS (K/S)	Padang Pariaman	75%				80.00%	
		% Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)	Padang Pariaman	84%				86.00%	
		% Balita 6- 59 bulan mendapatkan kapsul Vitamin A	Padang Pariaman	88%				89.00%	
		% kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Padang Pariaman	100%				85.00%	
		% Remaja putri yang mendapatkan TTD	Padang Pariaman	54%				56.00%	
		% Rumah Tangga mengkonsumsi Garam Beryodium	Padang Pariaman	86%				88.00%	
		% Puskesmas mampu Tata Laksana gizi buruk	Padang Pariaman	30%				45.00%	
		% Puskesmas melaksanakan Surveillance Gizi	Padang Pariaman	90%				100.00%	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja.	Padang Pariaman	5 Puskesmas	33,843,750	DAU	16 Puskesmas	37,228,125
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga	Padang Pariaman	25 Puskesmas			25 Puskesmas		
1	02	02	2	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pesentase korong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	Padang Pariaman	40%	25,805,938	DAU	50.00%	28,386,532
						Jumlah Kecamatan Sehat	Padang Pariaman	13 Kecamatan	14.00%				
						Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Padang Pariaman	70%	75.00%				
						Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	Padang Pariaman	25 Fasyankes	100.00%				
						Presentase Tempat Pengelolan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Padang Pariaman	70%	75.00%				
						Presentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Padang Pariaman	65%	70.00%				
1	02	02	2	02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup srehat (GERMAS)	Padang Pariaman	40%	42,737,500	DAU	45.00%	47,011,250
						Cakupan desa siaga aktif	Padang Pariaman	50%	55.00%				
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif	Padang Pariaman	60%	65.00%				
						Persentase Rumah Tangga PHBS	Padang Pariaman	74%	76.00%				
1	02	02	2	02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	Padang Pariaman	100.00%	22,687,500	DAU	100.00%	24,956,250
1	02	02	2	02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan desa/kecamatan UCI	Padang Pariaman	83.00%	98,591,000	DAU	87.90%	108,450,100
						Cakupan Desa KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam'	Padang Pariaman	100.00%	100.00%				

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Padang Pariaman	83%				86.00%	
						Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak Rubella	Padang Pariaman	81%				85.60%	
						Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	Padang Pariaman	4%				4	
						Persentase merespon peringatan dini KLB (alert systems) merespon sinyal kewaspadaan dalam SKDR	Padang Pariaman	100%				100%	
						Persentase ketepatan laporan SKDR	Padang Pariaman	87%				89.00%	
						Persentase kelengkapan laporan SKDR	Padang Pariaman	92%				92.50%	
						Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat)	Padang Pariaman	100%				100%	
						Persentase Puskesmas yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	Padang Pariaman	100%				25 Puskesmas	
1	02	02	2	02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Padang Pariaman	30%	30,763,750	DAU		40.00%	33,840,125
1	02	02	2	02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Padang Pariaman	100%	37,500,000	DAU		100.00%	41,250,000
						Konsumsi ALkohol (Liter/Kapita) oleh Penduduk umur >15 Tahun dalam satu tahun terakhir	Padang Pariaman	16%				17.00%	
1	02	02	2	02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Padang Pariaman	85%	2,031,956,250	DAK		95.00%	3,031,956,250
						Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Jampersal	Padang Pariaman	90%				100%	
						Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Upaya Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	100%				100%	
1	02	02	2	02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan	Padang Pariaman	100%%	-			100%%	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	02 02	2 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka usia harapan hidup	Padang Pariaman	68,99	31,250,000	DAU		69.29%	34,375,000
				Angka penemuan penderita Kusta Baru (CDR)	Padang Pariaman	< 5 per 100.000 pddk				< 5 per 100.000 pddk	
				Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar	Padang Pariaman	55%				57.00%	
				Cakupan penemuan pneumonia balita	Padang Pariaman	100.00%				100.00%	
				Penemuan kasus malaria	Padang Pariaman	<1 per 1000 pddk				<1 per 1000 pddk	
				Jumlah Kecamatan Yang Mencapai Eliminasi Malaria	Padang Pariaman	17 Kecamatan				17 Kecamatan	
				Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate)	Padang Pariaman	<44 per 100.000 pddk				<43 per 100.000 pddk	
				Eliminasi Rabies	Padang Pariaman	100%				100%	
				Penanggulangan penyakit filariasis dan kecacingan	Padang Pariaman	100%				100%	
				Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Padang Pariaman	18 Orang				17 Orang	
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Rabies	Padang Pariaman	1 Kabupaten				1 Kabupaten	
				Penurunan mikrofilaria rate <1%	Padang Pariaman	89%				90%	
				Angka Cacat Tingkat 2	Padang Pariaman	<5/100.000 pddk				<5/100.000 pddk	
				Prevalensi kusta	Padang Pariaman	< 1 per 10.000 pddk				< 1 per 10.000 pddk	
				Jumlah Kecamatan dengan Eliminasi Kusta	Padang Pariaman	< 5%				17 Kecamatan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Proporsi anak yg mendapatkan penyakit kusta	Padang Pariaman	17 Kecamatan				< 5%	
						Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Padang Pariaman	7%				6%	
						Peningkatan penatalaksanaan kasus pneumonia	Padang Pariaman	100% (25 Puskesmas)				100 % (25 Pusk)	
						Persentase tatalaksana Pneumonia sesuai standar	Padang Pariaman	55%				57%	
						Puskesmas yg melaksanakan LROA	Padang Pariaman	60%				70%	
						Cakupan Penemuan kasus diare semua umur	Padang Pariaman	100%				100.00%	
						Cakupan penemuan kasus diare pada balita	Padang Pariaman	100%				100.00%	
1	02	02	2	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	77.00%	6,343,805,400	DAU		78%	6,343,805,400
1	02	02	2	02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan	Padang Pariaman	70%	23,837,500	DAU		75%	26,221,250
1	02	02	2	02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	Padang Pariaman	100.00%	68,748,750	DAU		100.00%	75,623,625
1	02	02	2	02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Padang Pariaman	100.00%	70,823,435	DAU		100.00%	77,905,779
1	02	02	2	02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	100%	-			100.00%	-
1	02	02	2	02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Padang Pariaman	100%	-			100.00%	-
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Padang Pariaman	100%	-			100.00%	-
1	02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Padang Pariaman	100%	2,325,000,000	DAU		100.00%	2,325,000,000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase dana untuk untuk petugas jaga Puskesmas Rawatan	Padang Pariaman	100%	374,968,750	DAU		100.00%	412,465,625
						Persentase Dana BOK Puskesmas	Padang Pariaman	100%	17,890,490,510	DAK		100.00%	19,890,490,510
1	02	02	2	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Padang Pariaman	100%	948,062,500	DAU		100.00%	1,042,868,750
1	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	1,999,247,000	DAK		100.00%	1,999,247,000
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama yang memnuhi Persyaratan Survei akreditasi	Padang Pariaman	100.00%				100.00%	
1	02	02	2	02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	Padang Pariaman	100%	43,705,875	DAU		100.00%	48,076,463
1	02	02	2	02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Padang Pariaman	100%	46,578,125	DAU		100.00%	51,235,938
1	02	02	2	02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Padang Pariaman	1 Sistem	-			100.00%	-
1	02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Padang Pariaman	100%	186,938,750	DAU		100%	205,632,625
1	02	02	2	03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Padang Pariaman	1 Profil Kesehatan	99,438,750	DAU		1 Profil Kesehatan	109,382,625
1	02	02	2	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Padang Pariaman	25 puskesmas	87,500,000	DAU		25 puskesmas	96,250,000
1	02	02	2	03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	Padang Pariaman	25 Paket	-	DAU		25 Paket	-
1	02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Padang Pariaman	75%	396,250,000	DAU		75%	422,375,250
1	02	02	2	04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Padang Pariaman	70%	-			70%	-
1	02	02	2	04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan	Padang Pariaman	70%	-			70%	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10			
1	02	02	2	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% Intervensi Keluarga Sehat	Padang Pariaman	25 Puskesmas	148,437,500	DAU		25 Puskesmas	163,281,500
						Indeks Keluarga Sehat	Padang Pariaman	0,09					0,1	
						Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	25 puskesmas					25 puskesmas	
						Jumlah Puskesmas Yang menerapkan pelayanan Keperawatan kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	25 puskesmas					25 puskesmas	
						Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	Padang Pariaman	60%					70%	
						Hibah PMI	Padang Pariaman	100%	135,000,000				100%	135,000,000
						Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Padang Pariaman	13%					12%	
						Persentase Pembinaan Praktik Mandiri Dokter dan dokter gigi sesuai standar	Padang Pariaman	50%					60%	
1	02	02	2	04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan rujukan	Padang Pariaman	70%	112,812,500	DAU		80%	124,093,750
						Persentase rumah sakit milik pemerintah dan fasilitas kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	70%					80%	
						Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai Standar	Padang Pariaman	70%					80%	
						Persentase FKTP dengan Rasio Rujukan Non Spesialistik ≤ 2%	Padang Pariaman	50%					80%	
						Menerapkan sistem rujukan terintegrasi (SISRUITE) 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit	Padang Pariaman	34%					50%	
						Jumlah Puskesmas yang menimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	Padang Pariaman	25 Puskesmas					25 Puskesmas	
						Persentase RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratannya dengan PSC 119	Padang Pariaman	70%					85%	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	02	03	2	01	01	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang Pariaman	65%	533,043,408	DAU	70%	586,347,749
1	02	03	2	01	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan	Padang Pariaman	65%	131,250,000	DAU	70%	144,375,000
1	02	03	2	01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di fasyankes yang mempunyai SIP	Padang Pariaman	850 Nakes	68,750,000	DAU	850	75,625,000
1	02	03	2	01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan praktek mandiri swasta yang diawasi	Padang Pariaman	63 Praktek Mandiri	62,500,000	DAU	75	68,750,000
					Jumlah Klinik dan RS Swasta yang di awasi		Padang Pariaman	10 Klinik dan RS Swasta	12				
					Jumlah Sarana Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin		Padang Pariaman	75 Sarana	75				
					Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengawasan tenaga kesehatan dan sarana Kesehatan		Padang Pariaman	1 Perbup	-				
1	02	03	2	02	02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Padang Pariaman	65%	189,168,408	DAU	70%	208,085,249
1	02	03	2	02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Padang Pariaman	47%	68,750,000	DAU	59%	75,625,000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Padang Pariaman	1 Dokumen	1 Dokumen				
					Jumlah tenaga Kesehatan secara Teknis		Padang Pariaman	47 Tenaga	59 tenaga				
1	02	03	2	02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	Padang Pariaman	20%	72,418,408	DAU	20%	79,660,249
					Persentase Puskesmas Tanpa Dokter		Padang Pariaman	0%	0%				
					Jumlah Dokter yang merencanakan Internship		Padang Pariaman	5 Orang	10 Orang				
1	02	03	2	02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Padang Pariaman	47%	48,000,000	DAU	59%	52,800,000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	02	03	2	03	01	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2	03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan di dinas kesehatan	Padang Pariaman	65%	212,625,000	DAU	70%	233,887,500
1	02	03	2	03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Padang Pariaman	21 Rekomendasi	212,625,000	DAU	21 Rekomendasi	233,887,500
							Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang upaya kesehatan masyarakat	Padang Pariaman	26 Hasil Penelitian			30 hasil penelitian	
							Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	Padang Pariaman	19 Rekomendasi			19 Rekomendasi	
							Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	Padang Pariaman	15 Hasil Penelitian			18 Hasil Penelitian	
							Jumlah tenaga SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar dan izin belajar SDM Kesehatan	Padang Pariaman	30 izin Belajar dan Tugas			35 Izin Belajar Dan Tugas Belajar	
							Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan dan manajemen kesehatan	Padang Pariaman	35 Sertifikat Pelatihan			35 Sertifikat Pelatihan	
							Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah disusun	Padang Pariaman	10 NSPK			15 NSPK	
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Padang Pariaman	100%	118,703,876	DAU	100%	130,574,264
1	02	04	2	01	01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	Jumlah Izin APotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan	Padang Pariaman	50%	89,936,688	DAU	60%	98,930,357
1	02	04	2	01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang diawasi	Padang Pariaman	31 Sarana	65,312,938	DAU	31 Sarana	71,844,232
							Jumlah Toko alat kesehatan yang diawasi	Padang Pariaman	1 Lokasi			2 lokasi	
							Jumlah PKRT yang diawasi	Padang Pariaman	1 Lokasi			2 Lokasi	
							Jumlah izin Produksi PKRT yang diawasi	Padang Pariaman	2 buah			3 buah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase PKRT yang memenuhi standar	Padang Pariaman	100%				100%	
						Persentase PIRT yang menerapkan CPPB	Padang Pariaman	15%				20%	
						Jumlah IRT-P yang diawasi	Padang Pariaman	135 Buah				140 Buah	
						Jumlah IRT-P yang mendapatkan sertifikat Penyuluhan	Padang Pariaman	80 Buah				85 Buah	
						Jumlah IRT-P yang mendapatkan sertifikat Produksi Rumah tangga pangan	Padang Pariaman	40 Rekomendasi				45 Rekomendasi	
1	02	04	2	01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak	Padang Pariaman	80%	24,623,750	DAU		85%	27,086,125
1	02	04	2	01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Padang Pariaman	80%	-			85%	-
1	02	04	2	02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produk Alat Kesehatan	Padang Pariaman	2 Lokasi	-			3 Lokasi	-
1	02	04	2	02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut	Padang Pariaman	2 Lokasi	-			3 Lokasi	-
1	02	04	2	02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Padang Pariaman	2 Lokasi	-			3 Lokasi	-
1	02	04	2	03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor Izin Produksi, untuj Produk Makanan	Padang Pariaman	2 Lokasi	-			70%	-
1	02	04	2	03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Padang Pariaman	2 Lokasi	-			3 Lokasi	-
1	02	04	2	04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Padang Pariaman	65%	28,767,188	DAU		70%	31,643,907
1	02	04	2	04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Padang Pariaman	15 TPM	28,767,188	DAU		20 TPM	31,643,907
						Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Padang Pariaman	10 Pasar				10 Pasar	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah	Jumlah Kantin Sekolah yang diawasi	Padang Pariaman	15 Kantin Sekolah			20 Kantin Sekolah	
1	02	04	2	05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan yang diterbitkan	Padang Pariaman	15 Stiker	-		70%	-
1	02	04	2	05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Stiker yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Pengendalian dan Pengawasan	Padang Pariaman	15 Stiker	-		20 Stiker	-
1	02	04	2	06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri	Padang Pariaman	15 Post Market	-		70%	-
1	02	04	2	06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman	Jumlah Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	Padang Pariaman	15 Post Market	-		20 Post Market	-
1	02	04	2	06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan	Jumlah data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Padang Pariaman	15 Post Market	-		20 Post Market	-
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	Padang Pariaman	74%	225,625,000	DAU	76%	248,187,500
1	02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	Padang Pariaman	55%	59,375,000	DAU	60%	65,312,500
1	02	05	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Persentase puskesmas yang melaksanakan posyandu aktif	Padang Pariaman	60%	59,375,000	DAU	60%	65,312,500
1	02	05	2	02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase Cakupan PHBS	Padang Pariaman	72%	124,687,500	DAU	74%	137,156,250
1	02	05	2	02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga PHBS	Padang Pariaman	74%	124,687,500	DAU	74%	137,156,250
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Tradisional	Padang Pariaman	100%			100%	
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Padang Pariaman	100%	41,562,500	DAU	100%	45,718,750
1	02	05	2	03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah puskesmas yang melakukan upaya kesehatan bersumber masyarakat	Padang Pariaman	25 puskesmas	41,562,500	DAU	25 puskesmas	45,718,750

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD PADANG PARIAMAN

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				72,963,305,274	DAU/DAK Fisik / Non Fisik			138,546,905,340
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				72,963,305,274				138,546,905,340
	TOTAL BELANJA				72,963,305,274				138,546,905,340
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	RSUD PADANG PARIAMAN	100%	16,426,804,000			100%	26,098,877,120
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				BB	
		Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Sekolah Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Serta sara Prasarana Sekolah	RSUD PADANG PARIAMAN	100%	16,076,804,000			100%	19,228,477,120
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	RSUD PADANG PARIAMAN	1 Tahun	15,800,000,000	DAU		1 Tahun	18,923,992,720
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran hoorarium pengelola keuangan	RSUD PADANG PARIAMAN	1 Tahun	276,804,000	DAU		1 Tahun	304,484,400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	RSUD PADANG PARIAMAN	100%	350,000,000			100%	6,870,400,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga dokter kontrak, tenaga fungsional kesehatan kontrak, tenaga kebersihan kantor (Cleaning Service), tenaga kerja penunjang pelayanan	RSUD PADANG PARIAMAN	185 org	350,000,000	DAU		190 orang	6,870,400,000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	RSUD PADANG PARIAMAN	65%	56,536,501,274			68%	112,448,028,220
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	RSUD PADANG PARIAMAN	65%	15,621,021,074			68%	66,341,000,000
1 02 02 2.01 01	Pengembangan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun (Rawat inap paru dan rawat inap jiwa), ICCU, ICU, Instalasi Farmasi, gedung operasi, gedung hemodialisa, lanjutan pembangunan kantor, lanjutan pembangunan rawatan kebidanan, lanjutan pembangunan UTDRS, lanjutan pembangunan CSSD	RSUD PADANG PARIAMAN	1 gedung /Th	500,000,000	DAU		1 gedung/Th	24,200,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang di rehabilitasi dan dipelihara	RSUD PADANG PARIAMAN	2 gedung/Th	500,000,000			2 gedung/Th	2,420,000,000
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (instalasi pengolahan limbah, air bersih, listrik, SIMRS, ambulance, salasar penghubung, Penahan Tebing, pengaspalan jalan dan halaman rumah sakit, saluran pembuangan air lingkung rumah sakit, bangunan bengkel/gudang IPRS, gerbang masuk dan keluar Rumah Sakit)	RSUD PADANG PARIAMAN	1 paket	1,900,000,000	DAK		1 Paket	18,425,000,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang diadakan (rawat jalan, rawat inap, ruang operasi, UTDRS, HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU)	RSUD PADANG PARIAMAN	1 paket	12,721,021,074	DAK		1 paket	21,296,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan operasional BLUD Rumah Sakit	RSUD PADANG PARIAMAN	100%	40,915,480,200			100%	46,107,028,220
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah belanja pegawai BLUD Rumah Sakit, belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit dan belanja modal BLUD Rumah Sakit	RSUD PADANG PARIAMAN	100%	40,915,480,200	DAU		100%	46,107,028,220

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				129,414,813,679				
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman	1	22,424,813,679			1	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A				A	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		1				1	
1 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	92%	525,000,000	DAU			
1 03 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	2 Dok	50,000,000	DAU		2 Dok	55,000,000
1 03 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	40,000,000	DAU		1 Dok	44,000,000
1 03 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Tersusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	35,000,000	DAU		1 Dok	38,500,000
1 03 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Tersusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	40,000,000	DAU		1 Dok	44,000,000
1 03 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Tersusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	35,000,000	DAU		1 Dok	38,500,000
1 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang tersusun, Jumlah Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD)	Kab. Padang Pariaman	2 Dok	75,000,000	DAU		2 Dok	82,500,000
1 03 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	1 Laporan	250,000,000	DAU		1 Laporan	275,000,000
1 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	100%	11,044,742,946				12,149,217,241
1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN DPUPR Kab. Padang Pariaman Jumlah TPP ASN DPUPR Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman	12 Bulan	10,362,992,946	DAU		12 Bulan	11,399,292,241
1 03 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	Kab. Padang Pariaman	33 OB	651,750,000	DAU		33 OB	716,925,000
1 03 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	1 Laporan	30,000,000	DAU		1 Laporan	33,000,000
1 03 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	100%	27,500,000	DAU			30,250,000
1 03 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat	Kab. Padang Pariaman	4 Dok	27,500,000	DAU		4 Dok	30,250,000
1 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	75%	282,500,000	DAU			310,750,000
1 03 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Padang Pariaman	20 Orang	82,500,000	DAU		20 Orang	90,750,000
1 03 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Kab. Padang Pariaman	100 Orang	200,000,000	DAU		100 Orang	220,000,000
1 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	100%	745,000,000	DAU			819,500,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Kab. Padang Pariaman	67%	57,140,000,000			69%	62,854,000,000
1	03	10	2	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	Kab. Padang Pariaman	80%	57,140,000,000				62,854,000,000
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	4 Dok	140,000,000		4 Dok	154,000,000
1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	15 Km	30,000,000,000	DAU, DAK	15 Km	33,000,000,000
1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan terehabilitasi/ditingkatkan	Kab. Padang Pariaman	30 Km	10,000,000,000	DAU, DAK	30 Km	11,000,000,000
1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kondisi baik dan sedang yang terpelihara	Kab. Padang Pariaman	40 Km	2,000,000,000	DAU	40 Km	2,200,000,000
1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kondisi rusak ringan yang terpelihara	Kab. Padang Pariaman	2 Km	2,000,000,000	DAU	2 Km	2,200,000,000
1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	50 m	7,500,000,000	DAU, DAK	50 m	8,250,000,000
1	03	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang terehabilitasi	Kab. Padang Pariaman	100 m	2,000,000,000	DAU, DAK	100 m	2,200,000,000
1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah alat berat yang dioperasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan bencana/tanggap darurat	Kab. Padang Pariaman	12 Unit	2,000,000,000	DAU	12 Unit	2,200,000,000
1	03	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan/jembatan	Kab. Padang Pariaman	2 Dok	1,500,000,000	DAU, DAK	2 Dok	1,650,000,000
												-	
												-	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Kab. Padang Pariaman	90%	6,600,000,000			92%	7,260,000,000
1	03	03	2	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Padang Pariaman	90%	6,600,000,000				7,260,000,000
1	03	03	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	2Dok	200,000,000	DAU	2Dok	220,000,000
1	03	03	2	01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	300 SR	1,000,000,000	DAU, DAK	300 SR	1,100,000,000
1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	800 SR	3,500,000,000	DAU, DAK	800 SR	3,850,000,000
1	03	03	2	01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	100 SR	300,000,000	DAU, DAK	100 SR	330,000,000
1	03	03	2	01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	Kab. Padang Pariaman	100 SR	1,000,000,000	DAU, DAK	100 SR	1,100,000,000
1	03	03	2	01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	Kab. Padang Pariaman	100 SR	300,000,000	DAU, DAK	100 SR	330,000,000
1	03	03	2	01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Padang Pariaman	100 SR	300,000,000	DAU, DAK	100 SR	330,000,000
												-	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kab. Padang Pariaman	85%	4,000,000,000			87%	4,400,000,000
1	03	05	2	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Padang Pariaman	85%	4,000,000,000				4,400,000,000
1	03	05	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	4 Dok	200,000,000	DAU	4 Dok	220,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				1	2	3		4	5
1 03 05 2 01 03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala kota yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	200 RT	400,000,000	DAU, DAK		200 RT	440,000,000
1 03 05 2 01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala permukiman yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	400 RT	2,000,000,000	DAU, DAK		400 RT	2,200,000,000
1 03 05 2 01 04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala kota yang direhabilitasi/ditingkatkan	Kab. Padang Pariaman	200 RT	400,000,000	DAU, DAK		200 RT	440,000,000
1 03 05 2 01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala permukiman yang direhabilitasi/ditingkatkan	Kab. Padang Pariaman	400 RT	500,000,000	DAU, DAK		400 RT	550,000,000
1 03 05 2 01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang dibangun	Kab. Padang Pariaman	200 RT	500,000,000	DAU, DAK		200 RT	550,000,000
									-
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kab. Padang Pariaman	60%	2,700,000,000			70%	2,970,000,000
1 03 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Kab. Padang Pariaman	60%	2,700,000,000			70%	2,970,000,000
1 03 06 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	4 Dok	200,000,000	DAU		4 Dok	220,000,000
1 03 06 2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang dibangun	Kab. Padang Pariaman	200 m	400,000,000	DAU		200 m	440,000,000
1 03 06 2 01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman	200 m	200,000,000	DAU		200 m	220,000,000
1 03 06 2 01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Kab. Padang Pariaman	2 Dok	200,000,000	DAU		2 Dok	220,000,000
1 03 06 2 01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang dibangun	Kab. Padang Pariaman	200 m	1,500,000,000	DAU		200 m	1,650,000,000
1 03 06 2 01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang ditingkatkan	Kab. Padang Pariaman	200 m	200,000,000	DAU		200 m	220,000,000
									-
									-
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Padang Pariaman	58,72%	17,500,000,000			62,72%	19,250,000,000
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten		7.43%				7.95%	
1 03 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Kab. Padang Pariaman	7,43%	2,750,000,000			7,95%	3,025,000,000
1 03 02 2 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Padang Pariaman	4 Dok	250,000,000	DAU		4 Dok	275,000,000
1 03 02 2 01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/restorasi	Kab. Padang Pariaman	500 m	500,000,000	DAU		500 m	550,000,000
1 03 02 2 01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Kab. Padang Pariaman	2 Unit	2,000,000,000	DAU		2 Unit	2,200,000,000
1 03 02 2 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Kab. Padang Pariaman	58,72%	14,750,000,000			62,72%	16,225,000,000
1 03 02 2 02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Yang disusun	Kab. Padang Pariaman	4 Dok	250,000,000	DAU, DAK		4 Dok	275,000,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas irigasi yang terbangun	Kab. Padang Pariaman	200 Ha	4,000,000,000	DAU, DAK		200 Ha	4,400,000,000
1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas irigasi yang direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman	200 Ha	9,000,000,000	DAU, DAK		200 Ha	9,900,000,000
1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	Kab. Padang Pariaman	4500 Ha	1,500,000,000	DAU		4500 Ha	1,650,000,000
														-
1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis	Kab. Padang Pariaman	43%	400,000,000			52%	440,000,000
1	03	07	2	01		<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase terpenuhinya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah</i>	Kab. Padang Pariaman	43%	400,000,000			52%	440,000,000
1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten yang dibangun dan dikembangkan	Kab. Padang Pariaman	1 Unit	200,000,000	DAU		1 Unit	220,000,000
1	03	07	2	01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten yang dimanfaatkan dan dipelihara	Kab. Padang Pariaman	2 Unit	200,000,000	DAU		2 Unit	220,000,000
														-
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	Kab. Padang Pariaman	30%	14,250,000,000			40%	15,675,000,000
1	03	08	2	01		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	Kab. Padang Pariaman	30%	14,250,000,000			40%	15,675,000,000
1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah koordinasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	12 Bulan	250,000,000	DAU		12 Bulan	275,000,000
1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Kab. Padang Pariaman	20 Unit	9,000,000,000	DAU		4 Dok	9,900,000,000
1	03	08	2	01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	-	DAU		1 Dok	-
1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang direhabilitasi, direnovasi dan Ubahsui untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten	Kab. Padang Pariaman	15 Unit	5,000,000,000	DAU		15 Unit	5,500,000,000
1	03	08	2	01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang diselenggarakan sebagai Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten	Kab. Padang Pariaman	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
														-
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Kab. Padang Pariaman	50%	4,400,000,000			62.50%	4,840,000,000
1	03	12	2	01		<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten</i>	Kab. Padang Pariaman	43%	2,200,000,000			50%	2,420,000,000
1	03	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang mendapat persetujuan substansi	Kab. Padang Pariaman	2 Dok	1,500,000,000	DAU		2 Dok	1,650,000,000
1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang yang disusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	300,000,000	DAU		1 Dok	330,000,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Padang Pariaman	3 Kali	400,000,000	DAU		3 Kali	440,000,000
1	03	12	2	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman	90%	800,000,000			95%	880,000,000
1	03	12	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang tersusun	Kab. Padang Pariaman	2 Dok	800,000,000	DAU		2 Dok	880,000,000
1	03	12	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman	90%	800,000,000			95%	880,000,000
1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	Kab. Padang Pariaman	100 Dok	300,000,000	DAU		100 Dok	330,000,000
1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dibuat/dioperasikan	Kab. Padang Pariaman	1 Unit	500,000,000	DAU		1 Unit	550,000,000
1	03	12	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Padang Pariaman	90%	600,000,000			95%	660,000,000
1	03	12	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	300,000,000	DAU		1 Dok	330,000,000
1	03	12	2	04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS Penataan Ruang yang tersedia	Kab. Padang Pariaman	2 Orang	-	DAU		2 Orang	-
1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Forum Koordinasi penataan ruang daerah	Kab. Padang Pariaman	1 Dok	300,000,000	DAU		1 Dok	330,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	100%	16,781,144,881	DAU		100%	14,570,741,558
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				BB	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
5 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	90,000,000	DAU		94%	99,000,000
5 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Padang Pariaman	6 dokumen	60,000,000	DAU		6 dokumen	66,000,000
5 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, LKPJ	Padang Pariaman	3 dokumen	30,000,000	DAU		3 dokumen	33,000,000
5 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	4,928,280,189	DAU		100%	5,478,204,208
5 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	4,828,440,189	DAU		1 Perangkat Daerah	5,311,284,208
5 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Padang Pariaman	12 Bulan	99,840,000	DAU		12 Bulan	166,920,000
5 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Padang Pariaman	2 dokumen	-	DAU		2 dokumen	-
5 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	245,000,000	DAU		100%	255,000,000
5 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	200 Stel	195,000,000	DAU		200 Stel	195,000,000
5 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Pol PP Damkar yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	Padang Pariaman	4 Orang	40,000,000	DAU		4 Orang	40,000,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Padang Pariaman	10 orang	10,000,000	DAU		10 orang	20,000,000	
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	322,000,000	DAU		100%	354,200,000	
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang_x0002_undangan yang disediakan	Padang Pariaman	1800 Exemplar	-	DAU		1800 Exemplar	-	
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Padang Pariaman	12 Bulan	22,000,000	DAU		12 Bulan	24,200,000	
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Padang Pariaman	110 kali	300,000,000	DAU		120 kali	330,000,000	
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	5,100,000,000	DAU		100%	2,115,000,000	
5	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas R6/R4/RZ	Padang Pariaman	1 unit Mobkar 5000L, 1 Unit Mobkar 3000L, 1 Unit Mob Patroli	5,000,000,000	DAU		1 Unit R6 1 Unit R4	2,005,000,000	
5	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	11 unit	100,000,000	DAU		12 unit	110,000,000	
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	5,872,864,692	DAU		100%	5,965,037,350	
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan Jumlah kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan	Padang Pariaman	1200 surat	41,000,000	DAU		1200 surat	45,100,000	
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik,air,spedy	Padang Pariaman	12 Bulan	33,000,000	DAU		12 Bulan	36,300,000	
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Banpol,Damkar, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Padang Pariaman	234 Orang	5,798,864,692	DAU		234 Orang	5,883,637,350	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan					Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Padang Pariaman	100%	223,000,000	DAU		100%	304,300,000
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	4 unit	150,000,000	DAU		4 unit	165,000,000
5	01	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Pariaman	7 unit	13,000,000	DAU		8 unit	14,300,000
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan jasa servis	Padang Pariaman	12 Bulan	20,000,000	DAU		12 Bulan	37,000,000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	penyediaan Rehap gedung kantor	Padang Pariaman	12 Bulan	40,000,000	DAU		12 Bulan	88,000,000
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Padang Pariaman	65%	410,000,000	DAU		67.5%	1,798,500,000
1	05	02				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindak lanjuti	Padang Pariaman	62.50%	285,000,000	DAU		65%	1,028,500,000
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	% pencegahan pelanggaran trantibum yang tindaklanjuti(patroli wilayah)	Padang Pariaman	62.50%	25,000,000	DAU		65%	27,500,000
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	% kegiatan pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan	Padang Pariaman	62.50%	110,000,000	DAU		65%	121,000,000
1	05	02	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di kabupaten	Padang Pariaman	120 Poskamling yang terbentuk / terbina	15,000,000	DAU		120 Poskamling yang terbentuk / terbina	300,000,000
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah linmas yang dibina	Padang Pariaman	Linmas 103 Nagari	85,000,000	DAU		Linmas 103 Nagari	250,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 02 2 01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Rakor Satlinmas Nagari	Padang Pariaman	326 orang peserta Rakor Satlinmas nagari		DAU		326 orang peserta Rakor Satlinmas nagari	275,000,000
1 05 02 2 01 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	Padang Pariaman	7	50,000,000	DAU		8	55,000,000
1 05 02 2 02	Penegakan Peraturan Daerah	% Penegakan Perda	Padang Pariaman	62.50%	105,000,000	DAU		65%	520,000,000
1 05 02 2 02 02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran perda dan Perkada yang diungkap	Padang Pariaman	62.50%	35,000,000	DAU		65%	40,000,000
1 05 02 2 02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	% Penegakan Perda	Padang Pariaman	62.50%	70,000,000	DAU		65%	480,000,000
1 05 02 2 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah pembinaan PPNS	Padang Pariaman	10	20,000,000	DAU		10	250,000,000
1 05 02 2 03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Padang Pariaman	10	20,000,000	DAU		10	250,000,000
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	% Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Padang Pariaman	85%	390,000,000	DAU		85%	6,908,600,000
1 05 04 2 01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	% Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan bahaya kebakaran	Padang Pariaman	85	370,000,000	DAU		85	5,123,600,000
1 05 04 2 01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran yang dilakukan pada kegiatan yang beresiko menimbulkan kebakaran	Padang Pariaman	62 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran yang dilakukan pada kegiatan yang beresiko menimbulkan kebakaran		DAU		72 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran yang dilakukan pada kegiatan yang beresiko menimbulkan kebakaran	57,600,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 04 2 01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kebakaran yang dapat dikendalikan	Padang Pariaman	100 % Kebakaran yang dilaporkan dapat dikendalikan	140,000,000	DAU		100 % Kebakaran yang dilaporkan dapat dikendalikan	500,000,000
1 05 04 2 01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase jumlah Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang berhasil dilakukan	Padang Pariaman	100 % Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Berhasil dilakukan		DAU		100 % Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Berhasil dilakukan	60,000,000
1 05 04 2 01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran berhasil dilakukan	Padang Pariaman	100 % Penanganan Bahan BerBahaya dan Beracun Kebakaran berhasil dilakukan		DAU		100 % Penanganan Bahan BerBahaya dan Beracun Kebakaran berhasil dilakukan	60,000,000
1 05 04 2 01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri yang sesuai standar	Padang Pariaman	6 Unit Mobil Damkar sesuai standar pemadam Kebakaran	230,000,000	DAU		7 Unit Mobil Damkar sesuai standar pemadam Kebakaran	420,000,000
1 05 04 2 01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Padang Pariaman	Pengadaan 1 unit Mobil Damkar 3000 L, Pengadaan 1 Bangunan Pos Sektor Damkar		DAU		Pengadaan 1 unit Mobil Damkar 3000 L, Pengadaan 1 Bangunan Pos Sektor Damkar	3,600,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 04 2 01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan DAMKAR serta Jumlah pelatihan dan simulasi pengendalian kebakaran yang dilakukan	Padang Pariaman	15 orang mengikuti Pendidikan DAMKAR, 3 Pelatihan/simulasi dilakukan		DAU		15 orang mengikuti Pendidikan DAMKAR, 3 Pelatihan/simulasi dilakukan	390,000,000
1 05 04 2 01 08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah unit komunikasi yang dikelola	Padang Pariaman	2 Unit Telepon dan internet		DAU		2 Unit Telepon dan internet	15,000,000
1 05 04 2 01 09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah MOU yang dilakukan dengan Kabupaten Kota lain dan Lembaga Lainnya.	Padang Pariaman	6 Dokumen MOU		DAU		7 Dokumen MOU	21,000,000
1 05 04 2 02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen Sarana dan Prasarana	Padang Pariaman		-	DAU			160,000,000
1 05 04 2 02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Data Sarana Prasaran Proteksi Kebakaran di Nagari	Padang Pariaman	75 Dokumen		DAU		90 Dokumen	90,000,000
1 05 04 2 02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Kegiatan Penilaian Sarana Proteksi Kebakaran yang dilakukan	Padang Pariaman	60 Kegiatan		DAU		70 Kegiatan	70,000,000
1 05 04 2 03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi kejadian Kebakaran	Padang Pariaman	0 Kejadian	-	DAU		0 Kejadian	
1 05 04 2 03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian Kebakaran yang diuji dan diteliti	Padang Pariaman	0 Kejadian		DAU		0 Kejadian	
1 05 04 2 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	% Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Padang Pariaman	100 % Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	DAU		100 % Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	520,000,000
1 05 04 2 04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang dilakukan pada kegiatan masyarakat.	Padang Pariaman	60 Kegiatan		DAU		70 Kegiatan	70,000,000
1 05 04 2 04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang dilatih	Padang Pariaman	110 Relawan dilatih		DAU		220 Relawan	440,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 04 2 04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah nagari yang mempunyai sarana pemadamn sendiri (minimal Bunker Air pemadam dan Pompa Pemadam Potabel)	Padang Pariaman	2 Nagari		DAU		4 Nagari	10,000,000
1 05 04 2 05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelamatan yang dilakukan sesuai standar.	Padang Pariaman	77%	20,000,000	DAU		79%	1,105,000,000
1 05 04 2 05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Kegiatan penyelamatan yang dilakukan, per jumlah laporan.	Padang Pariaman	82%	20,000,000	DAU		84%	240,000,000
1 05 04 2 05 02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang terstandarisasi	Padang Pariaman					1 Unit Mobil Rescue sesuai standar. 1 Paket Alat rescue Hutan sesuai standar	200,000,000
1 05 04 2 05 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri yang diadakan	Padang Pariaman	Pengadaan 1 unit Mobil Rescue, Pengadaan 1 Paket alat rescue hutan		DAU		Pengadaan 1 Paket alat rescue air	500,000,000
1 05 04 2 05 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan Rescue, Jumlah simulasi rescue yang diadakan, Jumlah Pengadaan Sarana-prasarana Pelatihan	Padang Pariaman	10 orang pendidikan rescue, 1 kali simulasi rescue		DAU		10 orang pendidikan rescue, 1 kali simulasi rescue	165,000,000
					17,581,144,881				

**MATRIKS RENJA DINSOSP3A TAHUN 2022
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
					TOTAL BELANJA						-	9,759,495,526	
5	01	01	201		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,714,048,024	-	-	100%	6,283,495,526
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A	A					A	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%	100%					100%	
5	01	01	201		Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Output : Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan	Padang Pariaman	90%	90,000,000	-	-	90%	120,000,000
5	01	01	201	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA awal, RKA & DPA Perubahan) yang disusun	Padang Pariaman	8 Dokumen	50,000,000	DAU		8 Dokumen	60,000,000
5	01	01	201	02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	Padang Pariaman	4 Laporan	40,000,000	DAU		4 Laporan	60,000,000
5	01	01	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Output : Kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi	Padang Pariaman	100%	3,815,905,024	-	-	100%	4,267,495,526
5	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	3,706,465,024	DAU		1 Perangkat Daerah	4,077,111,526
5	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	Padang Pariaman	12 Bulan	109,440,000	DAU		12 Bulan	120,384,000
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Rekon Belanja Dinas Kesehatan	Padang Pariaman	336 Laporan		DAU		336 Laporan	50,000,000
5	01	01	202	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang Pariaman	2 Laporan		DAU		2 Laporan	20,000,000
5	01	01	205		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Padang Pariaman	90%	-	-	-	90%	280,000,000
5	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	35 orang		DAU		35 orang	20,000,000
5	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN DINSOSP3A yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	Padang Pariaman	2 orang		DAU		2 orang	40,000,000
5	01	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Padang Pariaman	2 orang		DAU		2 orang	40,000,000
5	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM	Padang Pariaman	2 Orang		DAU		2 Orang	180,000,000
						jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, TOT, seminar dan kursus singkat lainnya	Padang Pariaman	8 Orang		DAU		8 Orang	
5	01	01	206		Administrasi Umum Perangat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	12 Bulan	149,800,000	-	-	12 Bulan	310,000,000
5	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Padang Pariaman	12 PAKET	20,000,000	DAU		12 PAKET	30,000,000
5	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	6 unit		DAU		6 unit	70,000,000
5	01	01	206	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang Pariaman	12 PAKET	20,000,000	DAU		12 PAKET	20,000,000
5	01	01	206	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Padang Pariaman	3 eksemplar	4,800,000	DAU		3 eksemplar	10,000,000

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Perkiraan Maju Rencana 2023		
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
5	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Padang Pariaman	30 Kali	25,000,000	DAU		30 Kali	30,000,000
5	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Padang Pariaman	100 Kali	80,000,000	DAU		100 Kali	150,000,000
5	01	01	207		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	-	-	-	100%	500,000,000
6	01	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Padang Pariaman	4 Unit R2		DAU		4 Unit R2	120,000,000
7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Padang Pariaman	6 Paket		DAU		6 Paket	30,000,000
8	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	2 Laptop		DAU		2 Laptop	50,000,000
9	01	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 paket Pagar Kantor		DAU		1 paket Pagar Kantor	200,000,000
10	01	01	207	15	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Padang Pariaman	12 bulan		DAU		12 bulan	100,000,000
5	01	01	208		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	566,400,000	-	-	100%	616,000,000
5	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang dikelola	Padang Pariaman	2.500 Surat	20,000,000	DAU		2.500 Surat	50,000,000
5	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan dan jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	Padang Pariaman	12 paket	79,800,000	DAU		12 paket	85,000,000
5	01	01	208	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Padang Pariaman	75%	25,000,000	DAU		75%	80,000,000
5	01	01	208	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Honor tenaga Swakelola yang dibayarkan	Padang Pariaman	19 Swakelola	441,600,000	DAU		19 Swakelola	401,000,000
5	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	91,943,000	-	-	100%	190,000,000
5	01	01	209		Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorang /dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	19 unit	15,900,000	DAU		19 unit	25,000,000
5	01	01	209		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Padang Pariaman	1 Gedung		DAU		1 Gedung	
5	01	01	209	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yg dibayarkan	Padang Pariaman	10 Unit	76,043,000	DAU		10 Unit	135,000,000
					Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yg dilaksanakan	Padang Pariaman	2 Gedung		DAU		2 Gedung	30,000,000
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Padang Pariaman		1,189,637,700		-		2,101,000,000
1	06	02			PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan usaha yang diberikan	Padang Pariaman	65%	340,000,000	DAU		65%	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Output : Potensi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) terlaksana	Padang Pariaman	100%		DAU			
1	06	02	201	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Peningkatan sumber pembangkit listrik di wilayah terpencil yang terlaksana	Padang Pariaman	5 KK		DAU		5 kk	45,000,000
						Peningkatan subsidi bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik dari PLN dan non PLN yg terlaksana		5 KK				5 KK	30,000,000
1	06	02	201	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Padang Pariaman			DAU			

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	06	02	2		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Output : Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	Padang Pariaman	65%	340,000,000	-	-	65%	1,150,000,000
1	06	02	2	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang diberdayakan	Padang Pariaman	103/orang	20,000,000	DAU		103	370,000,000
1	06	02	2	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	Padang Pariaman	17 Orang	86,000,000	DAU		17 Orang	120,000,000
1	06	02	2	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUBE yang diberi bantuan	Padang Pariaman	2 Kube	54,000,000	DAU		2 Kube	200,000,000
						Jumlah peserta Bimtek calon penerima bantuan KUBE	Padang Pariaman	100 Orang		DAU		100 Orang	40,000,000
						Tersalurkannya Bantuan Sosial Pangan (Sembako)	Padang Pariaman	1 Kali	50,000,000	DAU		1 Kali	50,000,000
						Bantu kegiatan penyediaan tenda dan kursi untuk kegiatan sosial masyarakat	Padang Pariaman	1 Paket	25,000,000	DAU			
						Workshop Sosial Budaya pemuda Ulakan Tapakis	Padang Pariaman	1 Kali	25,000,000	DAU			
1	06	02	2	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan Pengurus Karang Taruna yang dilaksanakan	Padang Pariaman	2 Kali	30,000,000	DAU		2 Kali	70,000,000
						Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali		DAU		1 Kali	80,000,000
						Jumlah bimtek LKKS yang dilaksanakan	Padang Pariaman	1Kali		DAU		1Kali	30,000,000
						Pakaian Seragam Pengurus LKKS	Padang Pariaman	1 Paket		DAU		1 Paket	20,000,000
						Rapat Pengurus LKKS yang dilaksanakan	Padang Pariaman	4 Kali		DAU		4 Kali	25,000,000
						Rapat Koordinasi dengan Jejaring Kerja dan Mitra Kerja LKKS dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali	30,000,000	DAU		1 Kali	35,000,000
1	06	02	2	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sosialisasi LK3 yng dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali		DAU		1 Kali	20,000,000
						Rapat LK3 yang dilaksanakan	Padang Pariaman	2 Kali		DAU		2 Kali	30,000,000
						Jumlah Kasus permasalahan rumah tangga yang tertangani melalui LK3	Padang Pariaman	20 Orang	20,000,000	DAU		20 Orang	30,000,000
						Monev LK3 yng dilakukan	Padang Pariaman	2 kali		DAU		2 kali	30,000,000
1	06	04	01		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Outcome : Presentase Program Rehabilitasi Sosial yang Tertangani	Padang Pariaman	100%	314,637,700	-	-	100%	842,000,000
1	06	04	2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Output : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	Padang Pariaman	100%	250,000,000	-	-	100%	632,000,000
1	06	04	2	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (permakanan)	Padang Pariaman	30 Orang	80,000,000	DAU		30 Orang	80,000,000
1	06	04	2	02	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (pakaian)	Padang Pariaman	30 Orang	50,000,000	DAU		30 Orang	80,000,000
06	04	2.01	03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan ke Penyandang Disabilitas(Tongkat, Kursi Roda dan lainnya)	Padang Pariaman	10 orang		DAU		10 orang	20,000,000
06	04	2.01	04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan Reunifikasi/pemulangan kembali ke keluarga	Padang Pariaman	12 bulan		DAU		12 bulan	20,000,000

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Perkiraan Maju Rencana 2023		
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
06	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah para penyandang cacat yang dididik dan dilatih	Padang Pariaman	10 orng	25,000,000	DAU		20 orang	52,000,000
						Pengembangan sarana prasarana public yang ramah disabilitas yang dilakukan		12 bulan				12 bulan	35,000,000
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimtek yang dilakukan	Padang Pariaman	2x (1 tahun)		DAU		2x (1 tahun)	25,000,000
1	06	04	2	06		Jumlah Lansia Terlantar yang diberi bantuan	Padang Pariaman	25 Orang	70,000,000	DAU		25 Orang	80,000,000
06	04	2.01	07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Padang Pariaman	15 orang		DAU			30,000,000
06	04	2.01	08		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	biaya transpor anak terlantar,lansia, Penyandang Disabilitas	Padang Pariaman	20 orang		DAU			20,000,000
1	06	04	2	09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Padang Pariaman	100%	25,000,000	DAU		100%	50,000,000
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Pendampingan kepada lansia berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan	Padang Pariaman	12 bulan		DAU		12 bulan	30,000,000
06	04	2.01	10			Bantuan sosial bagi lansia,anak terlantar dan Penyandang Disabilitas lainnya berupa paket sembako, uang sembako dan kebutuhan lainnya.	Padang Pariaman	12 bulan		DAU		12 bulan	40,000,000
06	04	2.01	11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan penelusuran keluarga	Padang Pariaman	12 bulan		DAU		12 bulan	35,000,000
06	04	2.01	12		Pemberian Layanan Rujukan	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	Padang Pariaman	12 bulan		DAU		12 bulan	35,000,000
1	06	04	2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	Output : Tertanganinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	Padang Pariaman	100%	64,637,700	-	-	100%	210,000,000
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Layanan Kedaruratan		Padang Pariaman			DAU			
					Penyediaan Permakanan		Padang Pariaman			DAU			
					Penyediaan Sandang		Padang Pariaman			DAU			
					Penyediaan Alat Bantu		Padang Pariaman			DAU			
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Padang Pariaman			DAU			

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Perkiraan Maju Rencana 2023		
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Padang Pariaman			DAU			
					Pemberian Layanan Rujukan		Padang Pariaman			DAU			
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
1	06	04	2	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks PSK, anak yg berhadapan dgn hukum, orang gila yang dididik dan dilatih dan diberi bantuan usaha	Padang Pariaman	10 Orang		DAU	20 Orang	60,000,000	
1	06	04	2	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali	30,000,000	DAU	1 Kali	50,000,000	
						Upacara Ziarah Hari Pahlawan yang dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali		DAU	1 Kali	20,000,000	
						Bantuan Pakaian Kerja Veteran	Padang Pariaman	1 Paket		DAU	1 Paket	30,000,000	
						Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Anggota Veteran	Padang Pariaman	2 Kali	34,637,700	DAU	2 Kali	50,000,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Outcome : PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Padang Pariaman	100%	320,000,000	-	-	100%	775,000,000
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang tertangani		50%	-		50%	60,000,000	
					Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak terlantar yang tertangani		2 Kali			2 Kali	30,000,000	
					Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan		2 Kali			2 Kali	30,000,000	
					Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar								
1	06	05	2		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Output : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Padang Pariaman	100%	320,000,000	-	-	100%	775,000,000
06	05	2.01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Padang Pariaman			DAU			
06	05	2.01	01		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak terlantar yang tertangani	Padang Pariaman	2 kali		DAU	2 kali	30,000,000	
06	05	2.01	02		Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	Padang Pariaman	4 kali		DAU	4 kali	30,000,000	
06	05	2.01	03		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Padang Pariaman			DAU			
1	06	05	2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan	Padang Pariaman	2 Kali	100,000,000	DAU	2 Kali	200,000,000	
						Bimbingan teknis bagi petugas kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Padang Pariaman	2 Kali		DAU	2 Kali	50,000,000	
1	06	05	2	02	Pengolahan data fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Buku DTKS Tahun 2021	Padang Pariaman	1 Dok	20,000,000	DAU	1 Dok	25,000,000	
06	05	2.02	03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM PKH yang terfasilitasi	Padang Pariaman	67 orang	200,000,000	DAU	67 orang	400,000,000	

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
06	05	2.02	04		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar.	Padang Pariaman			DAU			40,000,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Outcome : Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	Padang Pariaman	100%	200,000,000		-	100%	384,000,000
1	06	06	2		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Output : Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	200,000,000	-	-	100%	354,000,000
1	06	06	2	01	Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan logistik (Makanan) bagi korban bencana yang diberikan	Padang Pariaman	100 Paket	75,000,000	DAU		100 Paket	100,000,000
1	06	06	2	02	Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan logistik (Sandang) bagi korban bencana yang diberikan	Padang Pariaman	100 Paket	75,000,000	DAU		100 Paket	100,000,000
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Padang Pariaman			DAU			
1	06	06	2	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Survey Rumah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang dilakukan	Padang Pariaman	15 Kali	20,000,000	DAU		15 Kali	50,000,000
						Jumlah bantuan sosial dan rehabilitasi rumah korban bencana yang dilakukan	Padang Pariaman	2 Unit	30,000,000	DAU		2 Unit	80,000,000
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Menyediakan Konselor untuk mendampingi korban bencana	Padang Pariaman	1 orang		DAU		1 orang	24,000,000
1	06	06	2		Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota	Output : Presentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota yang terlaksana	Padang Pariaman	100%	-	-	-	100%	30,000,000
06	06	2.02	02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Padang Pariaman			DAU			
1	06	06	2	02	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota TAGANA yang Mengikuti Pelatihan	Padang Pariaman	20 Orang		DAU		20 Orang	30,000,000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Outcome : Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	Padang Pariaman	100%	15,000,000	-	-	100%	100,000,000
1	06	07	2		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Output : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	15,000,000	-	-	100%	100,000,000
1	06	07	2	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuangan lainnya yang terpelihara	Padang Pariaman	3 Buah	15,000,000	DAU		3 Buah	100,000,000
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Padang Pariaman			DAU			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Padang Pariaman		525,000,000		-		1,375,000,000
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Outcome : Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Padang Pariaman	100%	220,000,000		-	100%	675,000,000
2	08	02	2		Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Padang Pariaman	100%	70,000,000	-	-	100%	240,000,000
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Padang Pariaman			DAU			

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	08	02	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	2 Kali	20,000,000	DAU		2 Kali	80,000,000
2	08	02	2	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Presentase Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Padang Pariaman	2 Kali	30,000,000	DAU		2 Kali	120,000,000
						Bimtek PPRG bagi perangkat nagari	Padang Pariaman	1 Kali	20,000,000	DAU		1 Kali	20,000,000
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek PUG dan PPRG bagi bagi lembaga pemerintah yang terlaksana	Padang Pariaman			DAU			20,000,000
2	08	02	2		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Padang Pariaman	15%	30,000,000	-	-	15%	90,000,000
2	08	02	2	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan partai peserta pemilu yang mengikuti Bimtek	Padang Pariaman	1 Kali		DAU		1 Kali	20,000,000
						Penyuluhan dan pembinaan hak-hak perempuan yang dilaksanakan	Padang Pariaman	2 Kali	30,000,000	DAU		2 Kali	35,000,000
						Peningkatan pemberdayaan perempuan pada organisasi wanita	Padang Pariaman	1 Kali		DAU		1 Kali	35,000,000
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Padang Pariaman			DAU			
2	08	02	2		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Padang Pariaman	100%	120,000,000	100%	-		345,000,000
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	02	2	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha	Padang Pariaman	30 Orang	35,000,000	DAU		30 Orang	80,000,000
						Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan	Padang Pariaman	100%	25,000,000	DAU		100%	30,000,000
						Terlaksananya Sekolah Perempuan di Nagari	Padang Pariaman	30 Nagari		DAU		30 Nagari	120,000,000
						Jejaring Antar Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang dilaksanakan	Padang Pariaman	2 kali		DAU		2 kali	30,000,000
						Peningkatan Hari Ibu Kartini dan Perempuan Inspiratif yang dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali	40,000,000	DAU		1 Kali	60,000,000
2	08	02	2	03	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Padang Pariaman	1 kali	20,000,000	DAU		1 kali	25,000,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome : Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Padang Pariaman	35%	70,000,000		-	35%	160,000,000
2	08	03	2		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Output : Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Padang Pariaman	100%	20,000,000	-	-	100%	60,000,000
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	08	03	2	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan nagari yang teradvokasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari yang dilakukan	Padang Pariaman	4 Kecamatan dan 26 Nagari	20,000,000	DAU		4 Kecamatan dan 26 Nagari	60,000,000
2	08	03	2		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	30,000,000	-	-	100%	50,000,000
2	08	03	2	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani dan dilakukan Penjangkauan	Padang Pariaman	10 Orang	30,000,000	DAU		10 Orang	50,000,000
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	03	2		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	20,000,000	-	-	100%	50,000,000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	03	2	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Layanan P2TTP2A dan PUSPAGA	Padang Pariaman	2 Kali	20,000,000	DAU		2 Kali	50,000,000
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Padang Pariaman	35%	75,000,000		-	35%	260,000,000
2	08	04	2		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Padang Pariaman	100%	30,000,000	-	-	100%	170,000,000
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Advokasi kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Perguruan tinggi dan dunia Usaha	Padang Pariaman			DAU			40,000,000
2	08	04	2	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Padang Pariaman	2 Kali	30,000,000	DAU		2 Kali	50,000,000

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Melakukan Bimtek bagi kelompok PEKKA(Perempuan Kepala Keluarga)	Padang Pariaman			DAU			80,000,000
2	08	04	2		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output : Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	45,000,000	-	-	100%	90,000,000
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	04	2	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek bagi Lembaga Layanan di Tingkat Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Padang Pariaman	5 Kecamatan dan 15 Nagari	25,000,000	DAU		5 Kecamatan dan 15 Nagari	50,000,000
2	08	04	2		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Lembaga Layanan dan Gugus Tugas PPA yang dilakukan	Padang Pariaman	2 Kali	20,000,000	DAU		2 Kali	40,000,000
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Outcome : Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Padang Pariaman	100%	20,000,000		-	100%	60,000,000
2	08	05	2.01		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Output : Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Padang Pariaman	100%	20,000,000	-	-	100%	60,000,000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disusun	Padang Pariaman	1 Dok	20,000,000	DAU		1 Dok	60,000,000
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Outcome : Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	Padang Pariaman	40%	70,000,000		-	40%	110,000,000
2	08	06	2		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	40%	50,000,000	-	-	45%	90,000,000

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	08	06	2	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan kabupaten layak anak yang diperoleh pemerintah daerah	Padang Pariaman	Prediket Madya KLA	50,000,000	DAU		Prediket Madya KLA	90,000,000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	06	2		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Output : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	20,000,000	-	-	100%	20,000,000
2	08	06	2		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Berfungsinya Organisasi Forum Anak	Padang Pariaman	1 Forum Anak Kabupaten	20,000,000	DAU		1 Forum Anak Kabupaten	20,000,000
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Padang Pariaman	35%	70,000,000		-	35%	110,000,000
2	08	07	2		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Output : Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	35%	40,000,000	-	-	35%	60,000,000
2	08	07	2	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyuluhan GN AKSA yang dilaksanakan	Padang Pariaman	15 Sekolah Dasar	40,000,000	DAU		15 Sekolah Dasar	60,000,000
						Pembentukan Sanggar Belajar dan Peralatan untuk Bina Anak dan Remaja	Padang Pariaman	3 Nagari		DAU		3 Nagari	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU			
2	08	07	2		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Padang Pariaman	100%	30,000,000	-	-	100%	50,000,000
2	08	07	2.01	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang didampingi	Padang Pariaman	30 anak	30,000,000	DAU		30 anak	50,000,000

					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Perkiraan Maju Rencana 2023	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.02		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman			DAU		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR (LINGKUNGAN HIDUP)
 WAJIB PELAYANAN DASAR (PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)
 WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR (PERTANAHAN)

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					10,557,163,334				46,317,024,940
					6,930,413,454	APBD			8,078,735,454
X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	6,930,413,454	APBD		100%	8,078,735,454
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB				BB	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				100%	
X	XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	49,000,000	APBD		100%	51,000,000
X	XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	17,000,000
X	XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	12,000,000	APBD		2 Dokumen	17,000,000
X	XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Evaluasi kinerja	12 Bulan	10,000,000	APBD		12 Bulan	5,000,000
			Jumlah laporan evaluasi yang disusun	4 Laporan		APBD		4 Laporan	
X	XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	100%	4,727,713,454	APBD		100%	4,744,713,454
X	XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Perangkat Daerah	4,617,713,454	APBD		1 Perangkat Daerah	4,617,713,454
X	XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	12 Bulan	110,000,000	APBD		12 Bulan	115,000,000
X	XX 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	3,000,000
X	XX 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	3,000,000
X	XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	3,000,000
X	XX 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	3,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Jumlah laporan keuangan triwulanan yang disusun		4 Laporan		APBD		4 Laporan					
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun		2 Laporan		APBD		2 Laporan					
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun		1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	3,000,000
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	2,400,000	APBD		100%	7,500,000
X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang disusun		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan dilaksanakannya pengamanan BMD		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
X	XX	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun		15 Kali	2,400,000	APBD		15 Kali	2,500,000
						Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi yang disusun		1 laporan		APBD		1 laporan	
X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	2,000,000
X	XX	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
X	XX	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	-	APBD		100%	26,000,000
X	XX	01	2.04	01	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersedia		1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
X	XX	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disusun		1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
X	XX	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan		1 Kali	-	APBD		1 Kali	15,000,000
X	XX	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		1 Bulan	-	APBD		1 Bulan	5,000,000
X	XX	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	1,500,000
X	XX	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	1,500,000
X	XX	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan yang disusun		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	40,000,000	APBD		100%	126,600,000
X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana disiplin pegawai				APBD			
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 Paket	-	APBD		1 Paket	33,600,000
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	5,000,000
X XX 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah bulan terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	5,000,000
X XX 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang dipulangkan				APBD			
X XX 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang dipulangkan				APBD			
X XX 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang dipindah tugaskan				APBD			
X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti pelatihan		2 Orang	20,000,000	APBD		2 Orang	40,000,000
X XX 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali	-	APBD		1 Kali	5,000,000
X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti bimtek		2 Orang	20,000,000	APBD		2 Orang	40,000,000
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	190,000,000	APBD		100%	212,000,000
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik		1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	7,000,000
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	15,000,000
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga		1 Paket	-	APBD		1 Paket	6,000,000
X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor		1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	8,000,000
X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan		1 Paket	15,000,000	APBD		1 Paket	10,000,000
		Jumlah penggandaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun		100.000 LEMBAR		APBD		100.000 LEMBAR	
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku yang disediakan		30 Buku	5,000,000	APBD		30 Buku	10,000,000
X XX 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	8,000,000
X XX 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi		300 Orang	10,000,000	APBD		300 Orang	15,000,000
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi keikutsertaan ASN dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	120,000,000	APBD		12 Bulan	120,000,000
		Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan rapat di dalam kantor		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	3,000,000
X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	10,000,000
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	52,500,000	APBD		100%	1,105,000,000
X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas yang diadakan		1 Unit	-	APBD		1 Unit	300,000,000
		Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang diadakan		1 Unit		APBD		1 Unit	
X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan		1 Unit	-	APBD		1 Unit	750,000,000
		Jumlah unit kendaraan lapangan yang diadakan		1 Unit		APBD		1 Unit	
X XX 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang diadakan				APBD			

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan				APBD			
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel yang dilaksanakan		1 Paket	20,000,000	APBD		1 Paket	25,000,000
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan		1 Paket	32,500,000	APBD		1 Paket	30,000,000
X	XX	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya yang dilaksanakan				APBD			
X	XX	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket pengadaan aset tetap tidak berwujud yang dilaksanakan				APBD			
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun				APBD			
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan				APBD			
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dilaksanakan				APBD			
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,753,800,000	APBD		100%	1,720,922,000
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola dalam 1 tahun		1500 Surat	15,000,000	APBD		1500 Surat	4,922,000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terlaksananya pembayaran sumber daya air		12 Bulan	90,000,000	APBD		12 Bulan	67,200,000
						Jumlah bulan terlaksananya pembayaran listrik		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan	1,648,800,000	APBD		12 Bulan	1,648,800,000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	115,000,000	APBD		100%	85,000,000
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas yang dipelihara		3 Unit	70,000,000	APBD		3 Unit	40,000,000
						Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		3 Unit		APBD		3 Unit	
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajak		3 Unit		APBD		3 Unit	
						Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajak		3 Unit		APBD		3 Unit	
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara		6 Unit	20,000,000	APBD		6 Unit	20,000,000
						Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang dibayarkan pajak		6 Unit		APBD		6 Unit	
X	XX	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang dipelihara				APBD			
						Jumlah unit alat besar yang dibayarkan perizinannya				APBD			
X	XX	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara				APBD			
						Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang dibayarkan perizinannya				APBD			
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket mebel yang dipelihara		1 Paket	5,000,000	APBD		1 Paket	5,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara		1 Paket	20,000,000	APBD		1 Paket	20,000,000
X XX 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang dipelihara				APBD			
X XX 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang dipelihara				APBD			
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan				APBD			
X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				APBD			
X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara				APBD			
X XX 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah paket pemeliharaan tanah yang dilaksanakan				APBD			
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1,000,000,000	APBD			32,210,750,000
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni		0.14	-	APBD		0.15	11,125,250,000
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	-	APBD		100%	175,000,000
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana		100	-	APBD		100	60,000,000
		Jumlah rumah yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota		100		APBD		100	
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Luas lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan			-	APBD		1 Lokasi	25,000,000
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani		-	-	APBD			-
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah rumah berdasarkan tingkat kerusakan akibat bencana		100	-	APBD		100	30,000,000
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penerima rumah bagi korban bencana		50	-	APBD		50	30,000,000
		Jumlah penerima rumah yang terkena relokasi program kabupaten/Kota		50		APBD		50	
1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa milik masyarakat			-	APBD		50	30,000,000
		Jumlah rumah susun				APBD			
		Jumlah rumah khusus						50	
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	-	APBD		100%	140,250,000
1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/	Jumlah pelaksanaan sosialisasi		3 kali	-	APBD		3 kali	21,000,000
		Jumlah peserta sosialisasi		50		APBD		50	
1 04 02 2.02 02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi		3 kali	-	APBD		3 kali	21,000,000
		Jumlah peserta sosialisasi		50		APBD		50	
1 04 02 2.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah pelaksanaan sosialisasi		1 Kali	-	APBD		1 Kali	7,500,000
		Jumlah peserta sosialisasi		50		APBD		50	
1 04 02 2.02 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang dibentuk		5	-	APBD		5	52,500,000
		Jumlah tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang mengikuti pelatihan		5		APBD		5	

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pelaksanaan rebug warga Jumlah peserta rebug warga	3 Kali 50	- APBD	APBD	3 Kali 50	20,250,000
1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	6 Bulan	-	APBD	6 Bulan	18,000,000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	-	APBD	100%	10,680,000,000
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	50 Unit	-	APBD	50 Unit	100,000,000
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana yang disusun	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	30,000,000
						Jumlah dokumen site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi korban Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		APBD	1 Dokumen	
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas tanah untuk pembangunan rumah bagi korban bencana yang tersedia	1 Ha	-	APBD	1 Ha	500,000,000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun	50	-	APBD	50	2,000,000,000
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus berserta PSU bagi korban bencana yang dibangun	100	-	APBD	50	8,000,000,000
						Jumlah rumah khusus berserta PSU bagi korban relokasi program kabupaten/kota yang dibangun	100		APBD	50	
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	50,000,000
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	-	APBD	100%	30,000,000
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	15,000,000
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	15,000,000
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			APBD		20,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	10,000,000
1	04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	10,000,000
1	04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100%	-	APBD		100%	80,000,000
1	04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	20,000,000
1	04 02 2.06 02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	20,000,000
1	04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	20,000,000
1	04 02 2.06 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	20,000,000
1	04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			-	APBD			-
1	04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
1	04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		0.1	450,000,000	APBD		0.11	10,453,000,000
				64%		APBD		64.50%	
1	04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	-	APBD		100%	80,000,000
1	04 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	5,000,000
1	04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	35,000,000
				1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
				1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	

KODE REKENING					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	40,000,000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100%	450,000,000	APBD		100%	4,323,000,000
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas lokasi perumahan dan permukiman kumuh		177 Ha	-	APBD		177 Ha	98,000,000
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun		1 Dok	450,000,000	APBD		1 Dok	75,000,000
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang dibentuk		5	-	APBD		5	60,000,000
						Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang dibina		5		APBD		5	
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah bulan terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	30,000,000
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	30,000,000
1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah yang dibagikan kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh				APBD		50	4,000,000,000
1	04	03	2.02	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	30,000,000
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang disusun		1 dok	-	APBD			-
						Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang direview		1 dok		APBD			
						Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang legalisasi		1 dok		APBD			
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	-	APBD		100%	6,050,000,000

KODE REKENING					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun		1 dok	-	APBD		1 dok	75,000,000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki		200	-	APBD		250	5,000,000,000
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah bulan terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	250,000,000
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	50,000,000
1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		25	-	APBD		25	125,000,000
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		25	-	APBD		25	500,000,000
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh yang didata		22	-	APBD		22	50,000,000
						Jumlah penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh yang diverifikasi		22		APBD		22	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		20%	550,000,000	APBD		21%	9,437,500,000
						Persentase lingkungan pemukiman kumuh		0.65%		APBD		0.64%	
						Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		1.23%		APBD		3.11%	
						Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		1.75%		APBD		1.72%	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		100%	550,000,000	APBD		100%	9,437,500,000
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki		250	-	APBD		300	6,000,000,000
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni beserta PSU yang diperbaiki		100	550,000,000	APBD		125	3,250,000,000
1	04	04	2.01	03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		25	-	APBD		25	187,500,000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase permukiman yang tertata		20%		APBD		20.10%	1,160,000,000
						Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		50%		APBD		55%	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%		APBD		100%	1,160,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun		1 dok	-	APBD		1 dok	90,000,000
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilaksanakan		3 Paket	-	APBD		3 Paket	900,000,000
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	60,000,000
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah PSU Permukiman dari Pengembang yang diverifikasi		10	-	APBD		10	35,000,000
		Jumlah PSU Permukiman yang diserahkan oleh Pengembang		10		APBD		10	
1 04 05 2.01 05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU yang dilaksanakan		3	-	APBD		3	75,000,000
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi		3.4%	-	APBD		6.80%	35,000,000
		Persentase Pengembang Perumahan yang telah terregistrasi		100%		APBD		100%	
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		100%	-	APBD		100%	35,000,000
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah pengembang perumahan yang diterbitkan sertifikasinya		2	-	APBD		2	35,000,000
		Jumlah pengembang perumahan yang teregistrasi		2		APBD		2	
2 10 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				620,000,000	APBD			675,000,000
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian Izin Lokasi		1	20,000,000	APBD		1	50,000,000
2 10 02 2.01	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		100%	20,000,000	APBD		100%	50,000,000
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan		1	20,000,000	APBD		1	50,000,000
		Jumlah Permohonan izin lokasi yang terdaftar		1				1	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara		100%	150,000,000	APBD		100%	175,000,000
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	150,000,000			100%	175,000,000
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terdaftar		2	75,000,000	APBD		3	100,000,000
2 10 04 2.01 02	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang dimediasi		2	75,000,000	APBD		3	75,000,000
		Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diselesaikan		2		APBD		3	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		65%	400,000,000			70%	300,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	400,000,000	APBD		100%	300,000,000
2	10	05	2.01	01	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar masyarakat penerima santunan tanah yang ditetapkan		30	300,000,000	APBD		20	200,000,000
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan sinklorinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinklorinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	100,000,000
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100%	-	APBD			-
2	10	06	2.01		Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	APBD			-
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah				APBD			
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah	Jumlah objek redistribusi tanah yang diinventarisasi dan direkomendasi				APBD			
2	10	06	2.01	03	Koordinasi dan penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				APBD			
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah Bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/Kota		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	APBD			-
2	10	06	2.02	01	Inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas tanah kelebihan maksimum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang diinventarisasi				APBD			
						Luas tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang diinventarisasi				APBD			
2	10	06	2.02	02	Koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan				12 Bulan	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan pelayanan penetapan tanah ulayat		100%	-	APBD			-
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/Kota			-	APBD			-

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat		12 Bulan		APBD		12 Bulan		
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat		12 Bulan		APBD		12 Bulan		
2	10	07	2.01	03	Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah bulan terlaksananya Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku		12 Bulan				12 Bulan		
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pelayanan pengelolaan tanah kosong		100%		-	APBD		-	
2	10	08	2.01		Penyelesaian masalah tanah kosong	Persentase terlaksananya Penyelesaian masalah tanah kosong				-	APBD		-	
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong		12 Bulan		APBD		12 Bulan		
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		100%		-	APBD		-	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	Luas tanah kosong yang diinventarisasi					APBD			
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan tanah kosong	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan					APBD			
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah		100%		-	APBD		-	
2	10	09	2.01		Penerbitan izin membuka tanah	Persentase terlaksananya Penerbitan izin membuka tanah		100%		-	APBD		-	
2	10	09	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah		12 Bulan		APBD		12 Bulan		
2	10	09	2.02	02	Pengendalian pemanfaatan tanah negara	jumlah bulan terlaksananya pengendalian pemanfaatan tanah negara		12 Bulan		APBD		12 Bulan		
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan milik Pemda yang Bersertifikat		8.90%		50,000,000	APBD		9%	150,000,000
2	10	10	2.01		Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/Kota		100%		50,000,000	APBD		100%	150,000,000
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah		12 Bulan		50,000,000	APBD		12 Bulan	150,000,000
2	10	10	2.01	02	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota		12 Bulan			APBD		12 Bulan	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota		12 Bulan			APBD		12 Bulan	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					2,006,749,880				5,352,539,486
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Ada		150,000,000	APBD		Ada	350,000,000
						Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota		Ada			APBD		Ada	
						Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		Ada			APBD		Ada	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya RPPLH Kabupaten/Kota		100%		150,000,000	APBD		100%	100,000,000

KODE REKENING					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan		1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 dokumen	100,000,000
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota		100%	-	APBD		100%	250,000,000
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang dibuat dan dilaksanakan		1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	250,000,000
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang dibuat dan dilaksanakan				APBD			
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang dibuat dan dilaksanakan				APBD			
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		55.89	406,750,000	APBD		55.99	1,541,800,000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		91.93		APBD		92.06	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100	356,750,000	APBD		100	191,800,000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		12 Bulan	256,750,000	APBD		12 Bulan	61,800,000
						Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas air		5 Sungai (10 Titik Pantau, dua Tahap)		APBD		5 Sungai (12 Titik Pantau, dua tahap)	
						Jumlah mata air yang dilakukan pemantauan kualitas air		3 Sumber Mata air (3 titik Pantau)		APBD		3 Sumber Mata air (3 titik pantau)	
						Jumlah perusahaan dipantau emisi udara tidak bergerak		10 Perusahaan		APBD		10 Perusahaan	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan pelaksanaan izin IPLC		5 Perusahaan		APBD		6 Perusahaan	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim)		5 Kampung Iklim	50,000,000	APBD		5 Kampung Iklim	60,000,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		12 Bulan	50,000,000	APBD		12 Bulan	70,000,000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	50,000,000	APBD		100%	1,350,000,000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah bulan terlaksananya pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat yang diberikan		12 Bulan	50,000,000	APBD		12 Bulan	1,350,000,000
						Jumlah DIKPLHD yang disusun		Dokumen		APBD		1 Dokumen	

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah bulan pelaksanaan operasional dan perawatan alat pemantauan kualitas air secara otomatis dan online		12 Bulan					
		Jumlah lokasi pemasangan alat pemantauan kualitas air secara otomatis dan online yang diadakan melalui DAK		6 Lokasi					
2	11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-	APBD			-
2	11 03 2.03 01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 03 2.03 02	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 03 2.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 03 2.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		100%	355,000,000	APBD		100%	454,500,000
2	11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100%	355,000,000	APBD		100%	454,500,000
2	11 04 2.01 01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati		2 Buah	-	APBD		2 Buah	6,500,000
		Jumlah dokumen penetapan pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun		1 Buah		APBD		1 Buah	360,000,000
2	11 04 2.01 02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan		3 Ha	40,000,000	APBD		10 Ha	55,000,000
2	11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya		-	-	APBD		-	-
2	11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		10 Km	300,000,000	APBD		10 Km	330,000,000
2	11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati lainnya		12 Bulan	15,000,000	APBD		12 Bulan	18,000,000
2	11 04 2.01 06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati		5 kali	-	APBD		5 kali	13,000,000
2	11 04 2.01 07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati		2 Buah	-	APBD		2 Buah	32,000,000
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			58,999,940	APBD			70,799,928
2	11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3		100%	58,999,940	APBD		100%	70,799,928
		Persentase terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3							

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11 05 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		12 Bulan	50,000,000	APBD		12 Bulan	60,000,000
2	11 05 2.01 02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3		2 Usaha/Kegiatan	8,999,940	APBD			10,799,928
				12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		100%	-				-
2	11 05 2.02 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 05 2.02 02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		40%	115,000,000	APBD		45%	149,000,000
				2 Orang		APBD		3 Orang	
2	11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	115,000,000	APBD		100%	149,000,000
2	11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
						APBD			
2	11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		2 Orang	-	APBD		2 Orang	24,000,000
						APBD			
2	11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		35 Usaha/kegiatan	85,000,000	APBD		35 Usaha/kegiatan	85,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11 06 2.01 04	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana RPPLH		12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	40,000,000
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		-	APBD			-
			Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau penge tahuan tradisional			APBD			
			Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional			APBD			
			Penetapan hak MHA			APBD			
			Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan			APBD			
			Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana			APBD			
2	11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		-	APBD			-
2	11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui			APBD			
			Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi			APBD			
			Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi			APBD			
			Jumlah penetapan hak MHA			APBD			
2	11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH			APBD			
2	11 07 2.02 01	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang difasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan			APBD			
			Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana			APBD			
			Jumlah bulan terlaksananya Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		2 Kali	115,000,000	APBD	2 Kali	180,000,000
2	11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota		100%	115,000,000	APBD	100%	180,000,000
2	11 08 2.01 01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan	2		40,000,000	APBD	2	50,000,000
2	11 08 2.01 02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah bulan terlaksananya Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	12 Bulan		25,000,000	APBD	12 Bulan	60,000,000
2	11 08 2.01 03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	2		50,000,000	APBD	2	70,000,000

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kampanye yang dilaksanakan	1		APBD		1	
			Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	80,000,000	APBD		Ada	80,000,000
2	11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	80,000,000	APBD		100%	80,000,000
2	11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat yang mengikuti penilaian Kalpataru	1	80,000,000	APBD		0	80,000,000
			Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti penilaian Proklim	5 Kelompok Proklim		APBD		5 Kelompok Proklim	
			Jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian Proper	1 perusahaan		APBD		1 perusahaan	
			Jumlah sekolah yang mengikuti penilaian adiwiyata	10 sekolah		APBD		10 sekolah	
2	11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	70,000,000	APBD		100%	90,000,000
2	11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	70,000,000	APBD		100%	90,000,000
2	11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	8	40,000,000	APBD		10	40,000,000
			Jumlah pengaduan masyarakat yang terdaftar	8		APBD			
2	11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui pengadilan	12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	50,000,000
2	11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0.0224	655,999,940	APBD		0.0223	2,436,439,558
			Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0.417		APBD		0.414	
			Persentase cakupan area pelayanan	0.30%		APBD		0.32%	
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	3%		APBD		3%	
2	11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah	100%	655,999,940	APBD		100%	2,436,439,558
2	11 11 2.01 01	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun			APBD			
2	11 11 2.01 02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	0.417	50,000,000	APBD		0.414	52,000,000
2	11 11 2.01 03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	0.0224	600,000,000	APBD		0.0223	372,239,630

KODE REKENING	Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi/ Kelompok	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		3 Kegiatan	5,999,940	APBD		4 Kegiatan	7,199,928
						Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi		30 Orang		APBD		35 Orang	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	5,000,000
2	11	11	2.01	06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun		27 Perusahaan		APBD		29 Perusahaan	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang tersedia		1 Paket	-	APBD		1 Paket	2,000,000,000
2	11	11	2.02		Penerbitan izin pendaurulangan sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta	Persentase terlaksananya Penerbitan izin pendaurulangan sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta			-	APBD			-
2	11	11	2.02	01	Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11	11	2.03		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta			-				-
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah bulan terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah		12 Bulan		APBD		12 Bulan	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	100%	5,871,302,519	DAU		100%	6,236,330,458
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		AA		AA					
					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%		100%					
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	268,050,000	DAU		94%	105,000,000
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja RKA N+1 RKA Perubahan DPA N+1 DPA Perubahan	Padang Pariaman	5 Dokumen	42,000,000	DAU / DAK		5 Dokumen	43,630,600
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin	Padang Pariaman	3 Dokumen	24,450,000	DAU / DAK		3 Dokumen	30,000,000
2	12	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kegiatan	Padang Pariaman	4 Dokumen	201,600,000	DAK			201,600,000
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Dae	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	3,150,551,819			100%	4,346,730,458
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	3,056,231,819	DAU		1 Perangkat Daerah	3,056,231,819
2	12	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Padang Pariaman	12 Bulan	94,320,000	DAU		12 Bulan	94,320,000
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	69,800,000			94%	277,500,000
2	12	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	64 Orang	9,000,000	DAU		35 Orang	19,800,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (administrator) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Padang Pariaman	3 ASN	8,400,000	DAU		60 Orang	49,500,000
2	12	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang kependudukan dan pencatatan sipil dan pembangunan daerah	Padang Pariaman	4 ASN	52,400,000	DAU / DAK		60 Orang	64,537,000
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	1,107,550,000			100%	317,100,000
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Padang Pariaman	120 Buah	10,000,000	DAU		200 Buah	13,200,000
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	6 Unit	707,000,000	DAK		6 Unit	722,000,000
2	12	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan Peralatan kebersihan kantor	Padang Pariaman	200 Buah	10,000,000	DAU		200 Buah	12,000,000
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Padang Pariaman	1800 Exampilar	7,200,000	DAU		1800 Exampilar	7,200,000
2	12	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Padang Pariaman	1000 Porsi/Kotak	49,000,000	DAU / DAK		1000 Porsi/Kotak	56,000,000
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Padang Pariaman	1.050 Orang Hari	324,350,000	DAU / DAK		1.050 Orang Hari	379,500,000
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Padang Pariaman	82%	8,000,000			84%	470,000,000
2	12	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 Unit AC	8,000,000	DAU		2 Unit TV LED 64'	80,000,000
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	1,083,238,400			100%	555,000,000
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan	Padang Pariaman	500 Arsip surat	116,538,400	DAU / DAK		500 Arsip surat	235,477,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Padang Pariaman	12 Bulan	145,200,000	DAU		12 Bulan	150,000,000
2	12	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	12 Bulan	23,500,000	DAU		12 Bulan	30,000,000
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Padang Pariaman	34 Orang	798,000,000	DAU / DAK		35 Orang	800,000,000
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Padang Pariaman	100%	114,462,300			100%	165,000,000
2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	12 Bulan	79,400,000	DAU		12 Bulan	110,000,000
2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Padang Pariaman	2 Gedung/Tahun	12,000,000	DAU		1Gedung/ Tahun	90,000,000
2	12	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Padang Pariaman	1 Tahun	23,062,300	DAU		1 Tahun	60,000,000
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran	Padang Pariaman	95%	15,500,000			95%	171,800,000
						Persentase Penerbitan akta perkawinan	100%		100%					
						Persentasi penerbitan akta perceraian	100%		100%					
2	12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyekenggaraan Pencatatan Sipil	Padang Pariaman	-	15,500,000			-	-
5	01	02	2	02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan langsung yang dilakukan	Padang Pariaman	103 Nagari	15,500,000	DAU		27 Perangkat Daerah, 17 kec	75,000,000
2	12	4				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Padang Pariaman	95%	50,150,000			93%	1,439,900,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	4	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan yang disusun	Padang Pariaman	100%	4,800,000			100%	544,500,000
2	12	4	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan yang disusun	Padang Pariaman	8 Perangkat Daerah	4,800,000	DAU		8 Perangkat Daerah	121,000,000
2	12	4	2	3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Padang Pariaman	100%	31,350,000			100%	459,800,000
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Padang Pariaman	26 OPD/17 KUA/23 Puskesmas	5,100,000	DAU		6 Perangkat Daerah	121,000,000
5	01	03	2	03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan terkait PIAK	Padang Pariaman	36 Orang	13,000,000	DAU		6 Dokumen Renja	36,300,000
5	01	03	2	03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi terkait PIAK yang dilaksanakan	Padang Pariaman	1 Kali	13,250,000	DAU		6 Perangkat Daerah	36,300,000
2	12	4	2	04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan PIAK	Padang Pariaman	100%	14,000,000			100%	435,600,000
2	12	4	2	04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Pariaman	103 Nagari	6,000,000	DAU		5 Perangkat Daerah	121,000,000
2	12	4	2	04	02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah pengawasan yang dilakukan dan Terintegrasinya data Akta Nikah di kemenag dengan Data Dukcapil	Padang Pariaman	3.000 Dokumen	8,000,000	DAU		5 Dokumen Renja	36,300,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	12	5				PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase database kependudukan yang disusun	Padang Pariaman	90%	4,000,000			90%	2,110,000,000
2	12	5	2	01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Profil kependudukan Kab. Padang Pariaman yang disusun	Padang Pariaman	100%	4,000,000			100%	450,000,000
2	12	5	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Profil kependudukan Kab. Padang Pariaman yang disusun	Padang Pariaman	1 Dokumen	4,000,000	DAU		0	0
						TOTAL PAGU				5,940,952,519				

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
(Kepmendagri 050-3708)							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TOTAL BELANJA			11,871,572,535				13,112,538,535
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kab. Padang Pariaman	100%	5,659,402,535	DAU		100%	6,031,952,535	
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100%	62,500,000	DAU		100%	83,000,000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	12,000,000	DAU		1 Dokumen	7,500,000
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	8,500,000	DAU		1 Dokumen	12,250,000
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	6,500,000	DAU		1 Dokumen	11,500,000
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	8,000,000	DAU		1 Dokumen	13,500,000
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	7,500,000	DAU		1 Dokumen	13,250,000
2	14	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD dan Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan yang disusun	Kab. Padang Pariaman	4 Laporan	20,000,000	DAU		4 Laporan	25,000,000
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100%	5,056,752,535	DAU		100%	5,170,252,535	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	5,013,852,535	DAU		1 tahun	5,013,852,535
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	25 orang	42,900,000	DAU		25 orang	156,400,000
2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100%	2,500,000	DAU		100%	11,200,000	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Padang Pariaman	3 orang	2,500,000	DAU		7 orang	11,200,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
(Kepmendagri 050-3708)				Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	92%	107,150,000	DAU		94%	200,500,000
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	15,500,000	DAU		1 tahun	75,000,000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan Kantor	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	7,500,000	DAU		1 tahun	14,500,000
2	14	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	4,500,000	DAU		1 tahun	8,000,000
2	14	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	1,500,000	DAU		1 tahun	5,000,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapatk Koordinasi Luar daerah dan dalam Daerah yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	70,650,000	DAU		1 tahun	90,000,000
						Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	7,500,000	DAU		1 tahun	8,000,000
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100%	342,750,000	DAU		100%	427,000,000
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	8,750,000	DAU		1 tahun	15,000,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	45,500,000	DAU		1 tahun	50,000,000
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	6,500,000	DAU		1 tahun	8,000,000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Honoror yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	12 Orang	282,000,000	DAU		1 tahun	354,000,000
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100%	87,750,000	DAU		100%	140,000,000
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	30,250,000	DAU		1 tahun	75,000,000
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	49,000,000	DAU		1 tahun	55,000,000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat	Kab. Padang Pariaman	1 Paket	8,500,000	DAU		1 Paket	10,000,000

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
(Kepmendagri 050-3708)					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Padang Pariaman	2,34%	68,500,000	DAU		2,31%	541,550,000
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan	Persentase dokumen kebijakan yang disusun	Kab. Padang Pariaman	60%	44,000,000	DAU		65%	456,500,000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah orang mengikuti Sosialisasi Bonus Demografi Kependudukan	Kab. Padang Pariaman	15 Orang	5,000,000	DAU	1 dokumen	250,000,000
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pendirian pelayanan informasi konseling yg belum ada Tumbuh, Tegak dan tegar	Kab. Padang Pariaman	1 Kelompok PIK-R di Sekolah	9,500,000	DAU	7 Kelompok PIK-R di Sekolah	66,500,000
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok PIK-R yang melayani informasi konseling remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	Kab. Padang Pariaman	1 Kelompok PIK R Luar Sekolah	9,000,000	DAU	7 Kelompok PIK R Luar Sekolah	66,500,000
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Padang Pariaman	1 Kali	10,000,000	DAU	1 Kali	28,250,000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta mengikuti Rakorda DPPKB	Kab. Padang Pariaman	35 Orang	10,500,000	DAU	50 Orang	45,250,000
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun	Kab. Padang Pariaman	50%	24,500,000	DAU	60%	85,050,000
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Padang Pariaman	35 Orang	12,000,000	DAU	50 Orang	45,250,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data kependudukan,KB, dan Pembangunan Keluarga yang dievaluasi tiap bulan yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	12 kali Evaluasi	12,500,000	DAU	12 kali Evaluasi	39,800,000
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Kab. Padang Pariaman	65,75%	5,389,370,000	DAU + DAK NON FISIK		66,00%	5,687,236,000
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Padang Pariaman	100%	1,539,006,000	DAU + DAK NON FISIK	100%	1,652,006,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	1 Kali	9,500,000	DAU	2 Kali	28,500,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
(Kepmendagri 050-3708)							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana media KIE yang di adakan	Kab. Padang Pariaman	100%	102,544,000	DAK NON FISIK		100%	102,544,000
						Jumlah Laporan BOKB yang disusun	Kab. Padang Pariaman	4 Laporan	101,890,000	DAK NON FISIK		4 Laporan	101,890,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpenuhinya biaya Operasional	Kab. Padang Pariaman	17 buah	68,000,000	DAU		17 buah	136,000,000
						Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	68 Kali	615,876,000	DAK NON FISIK		68 Kali	615,876,000
						Jumlah Orang Kader di biyai Dalam Pengumpulan Data di lapangan	Kab. Padang Pariaman	408 Orang	348,228,000	DAK NON FISIK		408 Orang	348,228,000
						Jumlah Pertemuan dalam pembinaan Kader KB	Kab. Padang Pariaman	68 Kali	80,784,000	DAK NON FISIK		68 Kali	80,784,000
						Jumlah Pertemuan Orientasi Tenaga Lini Lapangan Yang Dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	6 Kali	80,784,000	DAK NON FISIK		6 Kali	80,784,000
						Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang disediakan jasa Listrik dan Air	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan	122,400,000	DAK NON FISIK		17 Balai Penyuluhan	122,400,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional	Kab. Padang Pariaman	40 Orang	9,000,000	DAU		45 Orang	35,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Padang Pariaman	100%	514,900,000	DAU + DAK NON FISIK		100%	582,416,000
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah orang petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) yang dibina	Kab. Padang Pariaman	34 orang	10,000,000	DAU		1029 orang	61,000,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah orang Temu Kader IMP KB Tk. Kab, Tk. Propinsi dan Tk. Nasional	Kab. Padang Pariaman	20 Orang	10,500,000	DAU		1 Kali	27,016,000
						Jumlah Orang Kader Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data di lapangan	Kab. Padang Pariaman	204 Orang	185,400,000	DAK NON FISIK		204 Orang	185,400,000
						Jumlah Kader mengunjungi Masyarakat dalam pembinaan Program KKBPK	Kab. Padang Pariaman	6180 Kali	309,000,000	DAK NON FISIK		6180 Kali	309,000,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB	Kab. Padang Pariaman	100%	2,415,996,000	DAU + DAK NON FISIK		100%	2,494,096,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
(Kepmendagri 050-3708)							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik KB yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi KB	Kab. Padang Pariaman	44 Klinik	79,332,000	DAK NON FISIK		44 Klinik	79,332,000
						Jumlah Faskes yang divisitasi	Kab. Padang Pariaman	44 Klinik	6,600,000	DAK NON FISIK		44 Klinik	6,600,000
						Jumlah Faskes yang diregistari	Kab. Padang Pariaman	44 Klinik	17,600,000	DAK NON FISIK		44 Klinik	17,600,000
2	14	03	2.03	02	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelayanan IUD /Implant	Kab. Padang Pariaman	2380	718,488,000	DAK NON FISIK		2380	718,488,000
						Jumlah Pelayanan MOW	Kab. Padang Pariaman	91	173,624,000	DAK NON FISIK		91	173,624,000
						Jumlah Pelayanan MOP	Kab. Padang Pariaman	12	9,650,000	DAK NON FISIK		12	9,650,000
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase PUS Kelurga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat kontrasepsi KB	Kab. Padang Pariaman	65%	14,500,000	DAU		65%	25,500,000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB	Kab. Padang Pariaman	8 Balai Penyuluhan	1,348,202,000	DAK FISIK		5 Balai Penyuluhan	1,356,202,000
						Jumlah Operasional Pendamping DAK Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 Tahun	8,000,000	DAU		1 Tahun	8,000,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapat pembinaan	Kab. Padang Pariaman	47 klinik	10,000,000	DAU		47 klinik	20,250,000
2	14	03	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Calon Akseptor MKJP yang mendapat Konseling KB	Kab. Padang Pariaman	75 Orang	8,500,000	DAU		75 Orang	34,500,000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB MKJP Non Kontak bagi PUS (safari KB di Kecamatan)	Kab. Padang Pariaman	211 Orang	11,500,000	DAU		211 Orang	25,500,000
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan MOP dan MOW serta menanggulangi komplikasi	Kab. Padang Pariaman	MOW 4 org, MOP 10 org	10,000,000	DAU		MOW 4 org, MOP 10 org	18,850,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
(Kepmendagri 050-3708)						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Padang Pariaman	13%	919,468,000	DAU + DAK NON FISIK		15%	958,718,000
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan gerakan IBI KB KES, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	4 Kali	26,500,000	DAU	4 Kali	46,500,000
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Orang Pertemuan Lintas Sektoral di Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	1 Kali	12,500,000	DAU	1 Kali	20,000,000
2	14	03	2.04	3	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Sergab Kakab dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	3 kali	18,500,000	DAU	3 kali	30,250,000
2	14	03	2.04	04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Wilayah Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	68 Kali	239,088,000	DAK NON FISIK	68 Kali	239,088,000
						Jumlah Pertemuan mekanisme operasional Tenaga Lini Lapangan Yang Dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	51 Kali	238,680,000	DAK NON FISIK	51 Kali	238,680,000
						Jumlah pertemuan kelompok berbasis tribina keluarga yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	68 kali	384,200,000	DAK NON FISIK	68 kali	384,200,000
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Kab. Padang Pariaman	12%	754,300,000	DAU + DAK NON FISIK		11%	851,800,000
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase kelompok Keluarga yang dibina	Kab. Padang Pariaman	72%	754,300,000	DAU + DAK NON FISIK		74%	851,800,000
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	1 kali	7,500,000	Dau	1 kali	25,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
(Kepmendagri 050-3708)							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga	Kab. Padang Pariaman	1 kali	8,200,000	DAU		1 kali	8,200,000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orang tenaga kader yang dilatih	Kab. Padang Pariaman	35 orang	8,200,000	DAU		45 orang	20,500,000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader mengunjungi Masyarakat dalam pembinaan Program KKBPK	Kab. Padang Pariaman	35 orang	8,500,000	Dau		45 orang	20,000,000
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pertemuan Ekegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Padang Pariaman	1 kali	8,500,000	DAU		1 kali	35,500,000
						Jumlah Pertemuan Pemahaman Kespro dan Stanting Bagi Calon Pengantin	Kab. Padang Pariaman	130 kali	276,400,000	DAK NON FISIK		130 kali	276,400,000
						Jumlah Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga	Kab. Padang Pariaman	60 kali	331,000,000	DAK NON FISIK		60 kali	331,000,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK--R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kegiatan Perlombaan Program KKBPK yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	17 Lomba	8,500,000	DAU		17 Lomba	35,000,000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah orang Duta Remaja Mahasiswa yang terpilih bidang KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional	Kab. Padang Pariaman	42 orang	22,500,000	DAU		42 orang	100,200,000
						Jumlah pertemuan kegiatan Pokir	Kab. Padang Pariaman	4 Kali	75,000,000	DAU		1 Paket	75,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening				Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU
1				2		3	4	5		6	7		
xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		100%	5,478,119,034			100%	21,361,078,552
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				A		
					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%		
xx	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		97%	95,750,000			98%	106,037,500
xx	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun.		6 Dokumen	68,250,000			6 Dokumen	71,662,500
xx	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah tersusunnya Laporan Capkin dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		4 Laporan	27,500,000			4 Laporan	34,375,000
xx	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,156,943,384			100%	3,798,180,712
xx	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	3,000,127,384			1 Tahun	3,625,683,112
xx	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu pembayaran Adm Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	156,816,000			12 Bulan	172,497,600
xx	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100%	83,600,000			100%	91,960,000
xx	xx	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya		25 ASN	50,600,000			30 ASN	55,660,000
xx	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan ASN yang difasilitasi		2 ASN	33,000,000			2 ASN	36,300,000
xx	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	266,664,500			100%	305,990,950
xx	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor		5 Item alat kelistrikan	1,650,000			5 Item alat kelistrikan	1,815,000
xx	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan Alat-alat pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga perkantoran		12 Bulan	15,750,000			12 Bulan	17,325,000
xx	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu kebutuhan cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran		12 Bulan	12,750,000			12 Bulan	14,025,000
xx	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1320 eksemplar	12,660,000			2640 eksemplar	26,586,000
xx	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu		100 Porsi	4,731,100			100 Porsi	5,204,210
xx	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan konsultasi/ koordinasi dan penyediaan logistik makan/minum rapat Dinas KOMINFO		428 Orang Hari	145,623,400			471 Orang Hari	160,185,740
xx	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sapras Arsip Dinamis OPD		10 item	52,500,000			10 item	57,750,000
xx	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Akses berbayar pada Sistem IT OPD		10 Lisensi	21,000,000			10 Lisensi	23,100,000

Kode Rekening				Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
xx	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100%	750,735,000			100%	15,813,436,625
xx	xx	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	461,250,000			N/A	-
xx	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		2 Unit	66,625,000			2 Unit	68,290,625
xx	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor		5 Item	82,500,000			5 Item	90,750,000
xx	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		5 Item	140,360,000			5 Item	154,396,000
xx	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor		N/A	-			1 Unit	15,000,000,000
xx	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Saprns Pendukung Gedung Kantor		N/A	-			5 Item	500,000,000
xx	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	804,296,250			100%	884,725,875
xx	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan Alat tulis kantor, perangkko, materai dan benda pos lainnya		12 Bulan	26,696,250			12 Bulan	29,365,875
xx	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor		24 Orang	777,600,000			26 Orang	855,360,000
xx	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	320,129,900			100%	360,746,890
xx	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kantor		3 Mobnas	86,040,000			3 Mobnas	103,248,000
xx	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan berkala peralatan kantor		12 Bulan	12,329,900			12 Bulan	13,562,890
xx	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 Bulan	221,760,000			12 Bulan	243,936,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		59%	1,201,686,080			88%	1,685,054,688
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Infomasi Publik		90%	1,201,686,080			95%	1,685,054,688
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sarana informasi pembangunan daerah yang dikelola		6 Media Komunikasi Publik	83,198,280			6 Media Komunikasi Publik	91,518,108
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi		61 PPID	125,419,800			81 PPID	137,961,780
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi Masyarakat		10 KIM	85,068,000			15 KIM	93,574,800

Kode Rekening	Misi/Tujuan/Sasaran/ Indikator Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah		43 Kerjasama dengan Media	908,000,000			45 Kerjasama dengan Media	1,362,000,000
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi		60%	5,033,086,636			62%	5,325,714,677
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi		70%	2,866,491,507			70%	2,931,738,335
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwith/Internet Daerah		500 Mbps	2,866,491,507			600 Mbps	2,931,738,335
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)		80%	2,166,595,129			80%	2,393,976,342
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis egovernment		34%	43,498,875			57%	47,848,763
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server		4 Rak Server	288,618,979			4 Rak Server	317,480,877
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengelolaan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem		1 Pusdatin Pemda	71,478,000			1 Pusdatin Pemda	89,347,500
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kabupaten Padang Pariaman yang terwujud		34%	131,905,200			57%	145,095,720
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Kematangan Smart City		73%	1,500,000,000			84%	1,650,000,000
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan retribusi menara telekomunikasi, Sistem mapping menara telekomunikasi dan identifikasi menara telekomunikasi		183 Menara	131,094,075			190 Menara	144,203,483
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	71,148,000			Ada	78,262,800
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data Sektoral		90%	71,148,000			100%	78,262,800
2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah buku/laporan data statistik sektoral		2 Buku Data Sekotral	71,148,000			2 Buku Data Sekotral	78,262,800
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		10%	60,645,375			15%	66,709,913
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi		2	60,645,375			2	66,709,913
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ooperasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi		44 OPD	60,645,375			44 OPD	66,709,913
TOTAL						11,844,685,125			28,516,820,629

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN2023		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		Target Capaian	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
X	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	DISHUB	100%	5,090,289,658	APBD		100%	5,041,839,658
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				BB	
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
5	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	DISHUB	N/A	135,000,000	APBD		94%	139,000,000	
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen , Renja, Renja P, RKA, RKA P, DPA dan DPA P.	DISHUB	5 Dokumen	65,000,000	APBD		5 Dokumen	105,000,000
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	DISHUB	3 Dokumen	70,000,000	APBD		3 Dokumen	34,000,000
5	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	DISHUB	100%	3,231,789,658	APBD		100%	3,231,789,658	
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUB	1 Tahun	3,076,789,658	APBD		1 Tahun	3,078,789,658
5	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	DISHUB	12 Bulan	110,000,000	APBD		12 Bulan	120,000,000
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Keuangan yang diverifikasi	DISHUB	N/A	25,000,000	APBD		2 Laporan	11,000,000
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	DISHUB	N/A	10,000,000	APBD		2 Laporan	11,000,000
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest	DISHUB	N/A	10,000,000	APBD		2 Laporan	11,000,000
5	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	DISHUB	3467%	65,000,000	APBD		94%	56,500,000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN2023		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		Target Capaian	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISHUB	68 orang	55,000,000	APBD		85	42,500,000
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	DISHUB	10 orang	10,000,000	APBD		14org	14,000,000
5	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	DISHUB	N/A	75,000,000	APBD		100%	67,000,000
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISHUB	60 buah	5,000,000	APBD		140 Buah	7,000,000
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISHUB	600 exemplar	10,000,000	APBD		800 exemplar	4,000,000
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu disediakan	DISHUB	143 Porsi	10,000,000	APBD		171 Porsi	6,000,000
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISHUB	1000 org/tahun	50,000,000	APBD		1000 org/tahun	50,000,000
5	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	DISHUB	N/A	25,000,000	APBD		84%	42,050,000
5	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	1 Paket	15,000,000	APBD		1 Paket	20,500,000
5	01	01	2	07	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	4 Paket	10,000,000	APBD		4 Paket	21,550,000
5	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISHUB	100%	1,513,500,000	APBD		100%	1,460,000,000
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip Surat yang diarsipkan	DISHUB	300Arsip	15,000,000	APBD		300Arsip	15,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN2023	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		Target Capaian	KEBUTUHAN DANA/PAGU
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DISHUB	12 Tagihan/ Tahun	158,000,000	APBD		12 Tagihan/ Tahun	100,000,000
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISHUB	30 Unit/pertahun	5,000,000	APBD		30 Unit/pertahun	5,000,000
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	DISHUB	65 org/thn	1,335,500,000	APBD		65 org/thn	1,340,000,000
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DISHUB		45,000,000			100%	45,500,000
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	9 unit/tahun	25,000,000	APBD		9 unit/tahun	25,000,000
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUB	3 Gedung/tahun	10,000,000	APBD		3 Gedung/tahun	15,000,000
5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Rehabilitas Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUB	15 unit/tahun	10,000,000	APBD		15 unit/tahun	5,500,000
5	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	DISHUB	85%	12,503,615,800			90%	16,066,000,000
5	02	02	01	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	DISHUB	100%	25,000,000	APBD		100%	65,000,000
5	02	02	01	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan Rencana induk Jaringan LLAJ	DISHUB	1 Dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	65,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN2023		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		Target Capaian	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
5	02	02	02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DISHUB	100 %	12,313,615,800	APBD		100 %	12,800,000,000
5	02	02	02	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Prasarana jalan di jalan kabupaten yang terbangun	DISHUB	300 unit	170,000,000	APBD		300 unit	150,000,000
5	02	02	02	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Tagihan Pembayaran Rekening Lampu jalan kabupaten	DISHUB	12 Tagihan/ Tahun	12,118,615,800	APBD		12 Tagihan/ Tahun	12,600,000,000
5	02	02	02	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan kabupaten yang direhabilitasi	DISHUB	100 Paket/tahun	25,000,000	APBD		100 Paket/tahun	50,000,000
5	02	02	02	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DISHUB	75%	75,000,000	APBD		85%	3,103,500,000
5	02	02	02	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana berkala kendaraan Bermotor	DISHUB	5 Unit	25,000,000	APBD		5 Unit	3,000,000,000
5	02	02	02	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	DISHUB	6000 Kartu Keu/tahun	50,000,000	APBD		6000 Kartu Keur/tahun	103,500,000
5	02	02	02	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DISHUB	75%	40,000,000	APBD		85%	45,000,000
5	02	02	02	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Serta Rekayasa lalu lintas	DISHUB	60 Paket	30,000,000	APBD		60 Paket	30,000,000
5	02	02	02	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu lintas dan Angkutan jalan	DISHUB	2 Forum	10,000,000	APBD		2 Forum	15,000,000
5	02	02	02	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	DISHUB	75%	15,000,000	APBD		85%	15,000,000
5	02	02	02	07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Keterikatan tata kerja antar instansi terkait	DISHUB	1 t	10,000,000	APBD		1 t	10,000,000
5	02	02	02	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Fungsi sesuai dengan keterikatan kerja	DISHUB	1 t	5,000,000	APBD		1 t	5,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN2023		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		Target Capaian	KEBUTUHAN DANA/PAGU	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
5	02	02	02	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	DISHUB	75%	25,000,000	APBD		85%	25,000,000
5	02	02	02	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Petugas yang melaksanakan Pengawasan terhadap turun naiknya angkutan orang dan barang	DISHUB	100 org/tahun	25,000,000	APBD		100 org/tahun	25,000,000
5	02	02	02	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB	1 Thn	10,000,000	APBD		1 Thn	12,500,000
5	02	02	02	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas yang melaksanakan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum dan jasa angkutan orang dan Barang yang lancar	DISHUB	100 org/tahun	10,000,000	APBD		100 org/tahun	12,500,000
5	02	02	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	DISHUB	18	15,000,000	APBD		16	173,000,000
5	02	02	05			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	DISHUB	21	10,000,000	APBD		16	153,000,000
5	02	02	05	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah aturan untuk mendorong kelancaran rancangan kerja di bidang Perkeretaapian	DISHUB	1 Aturan daerah	10,000,000	APBD		1 Aturan daerah	153,000,000
5	02	05	02	03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	DISHUB	N/A	5,000,000	APBD		1 Tahun	20,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		Target Capaian	KEBUTUHAN DANA/PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02 05 02 03 02	socialisasi dan uji Coba Pelaksanaan Kebijakan penetapan jaringan jalur Kereta Api yang Jaringananya kewenangan Kabupaten/kota	DISHUB	3 socialisasi/tahun	5,000,000	APBD		3 socialisasi/tahun	20,000,000
JUMLAH									21,280,839,658

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman

Nama Perangkat Perangkat daerah : DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					8,643,509,944				3,167,380,000		
x	'xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		6,412,450,944			107,000,000		
x	'xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Padang Pariaman	57,000,000		107,000,000		
x	'xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra,RKA,DPA	Padang Pariaman	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	57,000,000
x	'xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan LPPD,LAKIP,LKPJ.	Padang Pariaman	3 dokumen	27,000,000	12 Bulan	50,000,000
x	'xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,581,755,444		7,013,941,000
x	'xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	5,452,267,444	12 Bulan	6,825,120,000
x	'xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan	Padang Pariaman	12 Bulan	121,488,000	12 Bulan	152,821,000
x	'xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan Aset dan Keuangan	Padang Pariaman	2 laporan	8,000,000	2 laporan	36,000,000
x	'xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Padang Pariaman		-		-
x	'xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Padang Pariaman		-		
x	'xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang Pariaman		-		
x	'xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Pariaman		51,000,000		83,000,000
x	'xx	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	100 Persen	-	100 Persen	36,000,000
x	'xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang Pariaman	10 Orang	25,000,000	10 Orang	-
x	'xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase ASN yang melakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Pariaman	42 persen	26,000,000	42 persen	47,000,000
x	'xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			92,000,000		189,000,000
x	'xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAGNAKER KOP		-	12 Bulan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x 'xx 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	DAGNAKER KOP	0 Unit	-			12 Bulan	-
x 'xx 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	DAGNAKER KOP	0 Unit	-			12 Bulan	-
x 'xx 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAGNAKER KOP	12 Bulan	3,000,000			12 Bulan	11,000,000
x 'xx 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan dan minum tamu	DAGNAKER KOP	12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	29,000,000
x 'xx 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAGNAKER KOP	12 Bulan	82,000,000			12 Bulan	149,000,000
x 'xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah			15,000,000				117,000,000
x 'xx 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		DAGNAKER KOP		-			1 Unit	35,000,000
x 'xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	DAGNAKER KOP		-			1 Unit	-
x 'xx 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		DAGNAKER KOP		-				
x 'xx 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		DAGNAKER KOP		-				-
x 'xx 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAGNAKER KOP	12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	82,000,000
x 'xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			490,695,500				517,500,000
x 'xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan ATK Kantor	DAGNAKER KOP	12 Orang	20,000,000			12 Orang	31,000,000
x 'xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAGNAKER KOP	12 Bulan	85,500,000			12 Bulan	88,500,000
x 'xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor, swakelola sopil dan kebersihan	DAGNAKER KOP	12 Bulan	385,195,500			12 Bulan	398,000,000
x 'xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			125,000,000				251,000,000
x 'xx 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas, BBM, Service Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAGNAKER KOP	12 Bulan	84,000,000			12 Bulan	126,000,000
x 'xx 02 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas, BBM, Service Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAGNAKER KOP		-				
x 'xx 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Service	DAGNAKER KOP	12 Bulan	16,000,000			12 Bulan	37,000,000
x 'xx 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	penyediaan rehap gedung kantor	DAGNAKER KOP	12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	88,000,000
x 'xx 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		DAGNAKER KOP						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
			1	2	3	4		5	6	7	8
3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		60%	156,000,000			62%	320,000,000
3	30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase rekomendasi perizinan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan		10 Izin	32,000,000			10 Izin	80,000,000
3	30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah izin rekomendasi pusat perbelanjaan yang diterbitkan		10 Izin	32,000,000			10 Izin	80,000,000
3	30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase penerbitan TDG		100%	25,000,000			100%	30,000,000
3	30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah permohonan penerbitan TDG		5 Izin Rekomendasi	25,000,000			5 Izin Rekomendasi	30,000,000
3	30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba		Persentase penerbitan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri							
3	30 02 2.03 01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri							
3	30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Persentase penerbitan STPW Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri							
3	30 02 2.04 02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Jumlah penerbitan STPW Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		2 izin					
3	30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B				100%	30,000,000			100%	80,000,000
3	30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah izin rekomendasi penerbitan surat izin usaha minol		10 rekomendasi	30,000,000			11 rekomendasi	80,000,000
3	30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan		persentase distributor barang berbahaya dan pedagang minol yang diawasi		50%	69,000,000			50%	160,000,000
3	30 02 2.06 01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya		Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya		5 gudang	35,000,000			6 gudang	80,000,000
3	30 02 2.06 02										
3	30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah distributor barang berbahaya dan pedagang minol yang diawasi		17 Kecamatan	34,000,000			17 Kecamatan	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023												
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Padang Pariaman													
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	Padang Pariaman													
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Kondusif		1 Pasar	688,000,000							1 Pasar	365,000,000			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Padang Pariaman	100%	665,000,000							100%	300,000,000			
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan pasar nagari yang representatif	Padang Pariaman	1 pasar	640,000,000	Ket : Dana Awal sbarsar 40 jt. dan ditambah dengan dana musrempang dan pokir sebesar 600 jt total 640 jt.					1 pasar	270,000,000				
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang difasilitasi	Padang Pariaman	1 pasar	25,000,000						1 pasar	30,000,000				
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Padang Pariaman	3 Kecamatan	23,000,000						3 Kecamatan	65,000,000				
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pedagang kaki lima yang dilakukan penataan	Padang Pariaman	17 Kecamatan	23,000,000						11 angkatan	65,000,000				
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Padang Pariaman													
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		42%	110,000,000						42%	181,000,000				
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	Padang Pariaman	42%	59,000,000						42%	130,000,000				
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar yang dipantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Padang Pariaman	3 pasar	30,000,000						4 pasar	80,000,000				
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	terlaksananya operasi pasar murah bahan kebutuhan pokok	Padang Pariaman	17 Kecamatan	29,000,000						4 Kali	50,000,000				
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	17 Kecamatan	51,000,000						17 Kecamatan	51,000,000				
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah kelengkapan legalitas dokumen perizinan yang diperiksa	Padang Pariaman	17 Kecamatan	26,000,000						17 Kecamatan	26,000,000				
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan-kecamatan sesuai aturan yang berlaku	Padang Pariaman	7 distributor, 215 kios/pengecer	25,000,000						7 distributor, 215 kios/pengecer	25,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh		1 Pedagang	21,000,000			2 Pedagang	100,000,000
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya temu usaha pedagang/produsen lokal dengan pedagang besar, pabrik dan pedagang berorientasi ekspor		1 Pedagang	21,000,000			2 Pedagang	100,000,000
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	koordinasi dengan instansi terkait tentang pengembangan ekspor daerah	Padang Pariaman	1 Pedagang	21,000,000			3 Pedagang	40,000,000
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Terlaksananya pameran dagang berskala nasional	Padang Pariaman	0 kali	-			0 kali	-
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Terlaksananya pameran dagang lokal	Padang Pariaman	1 kali	-			1 kali	30,000,000
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Padang Pariaman		-				
3 30 05 2.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	Padang Pariaman	1 Pedagang	-			1 Pedagang	30,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur		1 Pasar	88,000,000			1 Pasar	239,000,000
3 30 06	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku		9.98 %	88,000,000				239,000,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTTP dan perlengkapannya yang ditera dan ditera ulang	Padang Pariaman	1100 UTTP	31,000,000			12.98%	90,000,000
		Operasional Metrologi Legal	Padang Pariaman	12 Bulan	29,000,000				80,000,000
3 30 06 2.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah BDKT yang Diawasi	Padang Pariaman	2000	28,000,000			2000	69,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya pasar BANA		1 Pasar	105,000,000			1 Pasar	255,000,000
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah		50%	105,000,000			50%	255,000,000
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	Padang Pariaman	4 Kali	73,000,000			5 Kali	200,000,000
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	terlaksana dan tersedianya informasi harga sembako dan kebutuhan lainnya	Padang Pariaman	12 Bulan	32,000,000			12 Bulan	55,000,000
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif		40%	46,000,000			40%	65,000,000
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi		40 %	46,000,000			40%	65,000,000
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang diperiksa laporan keuangannya		20	25,000,000			22	32,000,000
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUMKM pengguna dana pemerintah dan non pemerintah yang diawasi		40 Koperasi	21,000,000			22 Koperasi	33,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	persentase koperasi sehat		40%	39,000,000			40%	50,000,000
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam, klasifikasi jumlah koperasi sehat		30 Koperasi	39,000,000			40 Koperasi	50,000,000
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatan		30 Koperasi	19,000,000			41 Koperasi	19,000,000
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan penghargaan		10	20,000,000			10	31,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang berkualitas		57 Koperasi	32,000,000			57 Koperasi	422,763,000
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi		40%	32,000,000			40%	422,763,000
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus koperasi dan LKM		30 koperasi	32,000,000			30 koperasi	422,763,000
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melaksanakan RAT		40%	28,000,000			40%	38,000,000
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		40%	28,000,000			40%	38,000,000
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi dan melaksanakan RAT		30 Koperasi	28,000,000			41 Koperasi	38,000,000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		0.9 %	51,000,000			0.9 %	135,000,000
2 17 07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		20.00%	51,000,000			21%	135,000,000
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah data UKM Di Kabupaten Padang Pariaman		2300 UMKM	17,000,000			2300 UMKM	55,000,000
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha		250 UMKM	19,000,000			250 UMKM	45,000,000
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan		10 Izin	15,000,000			10	35,000,000
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				-				
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan dengan Para Pemangku Kepentingan							
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berdaya saing		97,44 %	568,000,000			97,44 %	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi			568,000,000				40,000,000
2	17 08 2.01 01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		40 Unit	568,000,000	dana awal 18 jt. dan ditambahkan dengan dana pokir dan musrebang sebesar 550 jt jadi total. 568 Jt		40 Unit	40,000,000
2	07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Tingkat pengangguran terbuka	6,90 %	16,000,000		6,90 %	16,000,000
2	07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen RTK Padang Pariaman	1 Dokumen	16,000,000		1 Dokumen	16,000,000
2	07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Terlaksananya pemuthakiran data base tenaga kerja daerah	1 Dokumen	16,000,000		1 Dokumen	35,000,000
2	07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			1 Dokumen			1 Dokumen	36,000,000
2	07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tingkat produktivitas tenaga kerja	70%	92,000,000		70%	382,456,000
2	07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	16 Orang	51,000,000		16 Orang	175,456,000
2	07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	16 Orang	26,000,000		12 Bulan	35,456,000
				Operasional UPTD Latihan Kerja	12 Bulan	25,000,000		12 Bulan	30,000,000
2	07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Instruktur Lembaga yang Kompetensi	8 Orang	-		10 Orang	60,000,000
2	07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit			1 Unit	50,000,000
2	07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase lembaga pelatihan Kerja Swasta	37%	16,000,000		37,25 %	80,000,000
2	07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang di Bina	12	16,000,000		14	80,000,000
2	07 03 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	37%	-		37,25 %	50,000,000
2	07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	34 Perusahaan			35 Perusahaan	50,000,000
2	07 03 2.05	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	37,81 %	25,000,000		38,01 %	77,000,000
2	07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Kompetensi dan Produktivitas	120 Orang	25,000,000		121 Orang	77,000,000
2	07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	70,90 %	83,059,000		70,95 %	296,161,000
2	07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	70,90 %	36,059,000		70,95 %	199,000,000
2	07 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		jumlah tenaga kerja yang difasilitasi penempatannya	2400 orang	24,059,000		2430 orang	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan		2400 orang				2430 orang	70,000,000
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		16 orang	-			16 orang	37,000,000
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Pencari Kerja Penyandang Disabilitas mendapat Layanan		16 orang	12,000,000			16 orang	27,000,000
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	rasio penduduk yang bekerja		60%	-			61%	25,000,000
2 07 04 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	Persentase LPTKS yang Memiliki Izin		1000%	-			10%	20,000,000
2 07 04 2.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diawasi		0 LPTKS	-			2 LPTKS	20,000,000
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		10%	47,000,000			11%	97,161,000
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		2408 orang	11,000,000			12 Bulan	38,000,000
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota							
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang dilayani dan memiliki kartu tanda pencari kerja online		2407 orang	15,000,000			3639	50,661,000
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota							
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Mengikuti Job Fair		2409 orang	21,000,000			12 Bulan	46,500,000
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)							
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)							
2 07 04 2.05	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan sosialisasi							
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		51%	108,000,000			52%	155,000,000
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi	Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan		57,77 %	38,000,000			57,90 %	80,000,000
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3		75 Perusahaan	15,000,000			75 Perusahaan	15,000,000
		Jumlah PKWT dan PKWTT yang dicatat		850 orang				850 orang	15,000,000
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pengusaha peserta sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan		2414 orang				230	50,000,000
		jumlah pekerja/buruh yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		9500 orang	23,000,000			9550 orang	
2 07 05	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		58%	70,000,000			58%	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05							
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan dan SP/SB yang dibina/disosialisasikan	2418 orang	20,000,000			15	20,000,000
2	07	05							
		Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan/ditindaklanjuti	10 Perusahaan	20,000,000			10 Perusahaan	20,000,000
2	07	05							
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit kabupaten yang disosialisasi, dibentuk/diberdayakan	1 LKS	30,000,000			1 LKS	35,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode Rekening						Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	9	10	
										Rp 23,817,457,660			Rp 1,955,120,000	
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	100%	Rp 4,441,013,010	DAU		100%	Rp 82,000,000
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A		A					
					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%		100%					
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	78,865,000			94%	82,000,000
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan	Padang Pariaman	5 Dokumen	39,700,000	DAU		5 Dokumen	42,000,000
2	18	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (Lppd, Lakiip)	Padang Pariaman	3 dokumen	39,165,000	DAU		3 dokumen	40,000,000
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	3,639,258,360			100%	4,570,791,799
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	3,499,378,360	DAU		1 Perangkat Daerah	4,356,861,799
2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Padang Pariaman	12 Bulan	134,880,000	DAU		12 Bulan	206,930,000
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang Pariaman	12 Dokumen	5,000,000	DAU		12 Dokumen	7,000,000
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	10,000,000			94%	20,000,000
2	18	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	Padang Pariaman	6 orang	10,000,000	DAU		6 orang	20,000,000

Kode Rekening					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	195,815,850		100%	265,000,000
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK	Padang Pariaman	6 Unit	17,761,700	DAU	6 Unit	35,000,000
2	18	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang Pariaman	180 buah	7,283,400	DAU	180 buah	9,000,000
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Pariaman	5.000 lembar	13,135,750	DAU	5.000 lembar	16,000,000
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Padang Pariaman	1800 Exampiar	5,000,000	DAU	1800 Exampiar	10,000,000
2	18	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Padang Pariaman	600 porsi/kotak	9,450,000	DAU	600 porsi/kotak	15,000,000
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Padang Pariaman	1.025 Orang/ Hari	143,185,000	DAU	1.025 Orang/ Hari	180,000,000
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	410,745,800		100%	537,065,800
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Padang Pariaman	500 Arsip Surat	43,680,000	DAU	500 Arsip Surat	60,000,000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Padang Pariaman	12 Bulan	62,557,000	DAU	12 Bulan	72,557,000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Padang Pariaman	14 Orang	304,508,800	DAU	16 Orang	404,508,800
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Padang Pariaman	100%	106,328,000		100%	145,000,000
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	12 Bulan	82,200,000	DAU	12 Bulan	95,000,000
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Padang Pariaman	1 Gedung/Tahun	24,128,000	DAU	1 Gedung/Tahun	50,000,000
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Padang Pariaman	1 dokumen	64,810,000		1 dokumen	25,000,000
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	2 dokumen	19,810,000		2 dokumen	25,000,000

Kode Rekening						Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Padang Pariaman	2 dokumen	19,810,000	DAU		2 dokumen	25,000,000
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah Kegiatan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	45,000,000			100%	65,000,000
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Padang Pariaman	1 dokumen	45,000,000	DAU		1 dokumen	65,000,000
					Jumlah Kegiatan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Padang Pariaman	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Padang Pariaman	1 dokumen 5 Event	40,500,000			1 dokumen 5 Event	75,000,000
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	1 Dokumen/ Even	40,500,000			1 Dokumen/ Even	75,000,000
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Investasi	Padang Pariaman	4 Event	40,500,000	DAU		4 Event	75,000,000
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Padang Pariaman	89	110,375,000			90	187,500,000
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Pariaman	4 Kegiatan	110,375,000			4 Kegiatan	187,500,000
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Padang Pariaman	1700 dokumen	67,495,000	DAU		2000 dokumen	125,000,000
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Padang Pariaman	800 Juta	15,500,000	DAU		800 Juta	17,500,000
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Padang Pariaman	2 Kegiatan	27,380,000	DAU		2 Kegiatan	45,000,000
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	Padang Pariaman	110 objek	354,242,000			110 objek	245,620,000
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	354,242,000			100%	245,620,000

Kode Rekening						Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan	Padang Pariaman	15 Perusahaan	48,300,000	DAK		15 Perusahaan	45,000,000
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	Padang Pariaman	17 Kecamatan	181,222,000	DAK		17 Kecamatan	100,620,000
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	Padang Pariaman	17 Kecamatan	96,600,000	DAK		17 Kecamatan	100,000,000
									28,120,000	DAU		40,800,000		
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Padang Pariaman	1 Aplikasi	23,040,000			1 Aplikasi	40,000,000
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	12 data/ kegiatan	23,040,000			12 data/ kegiatan	40,000,000
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Padang Pariaman	12 data/ kegiatan	23,040,000	DAU		12 data/ kegiatan	40,000,000
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Padang Pariaman	1 sentra	18,783,477,650			1 sentra	1,300,000,000
3	31	02	2	01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	100%	18,783,477,650			100%	1,300,000,000
3	31	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda	Padang Pariaman	1 Dokumen Perda	50,000,000	DAU		1 Dokumen Perda Revisi	100,000,000
3	31	02	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang disertifikasi	Padang Pariaman	1 Dokumen	52,600,000	DAU		1 Dokumen	200,000,000
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	Padang Pariaman	1 sentra	54,425,000	DAU		2 sentra	1,000,000,000
									18,626,452,650	DAK		21,000,000,000		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH

: DISPARPORA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	
			LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3		URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (DISPARPORA)			9,120,127,937					7,965,051,951			
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			6,770,127,937					6,415,051,951			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Disparpora	100%	4,342,549,937	DAU	Disparpora	100%	4,787,473,951	DAU	
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun	Disparpora	11 Dokumen	100,000,000	DAU	Disparpora	11 Dokumen	117,357,200	DAU
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disparpora	6 Dokumen	65,000,000	DAU	Disparpora	6 Dokumen	57,195,000	DAU
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disparpora	5 Dokumen	35,000,000	DAU	Disparpora	5 Dokumen	60,162,200	DAU
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disparpora	100%	3,372,515,415	DAU	Disparpora	100%	3,645,759,301	DAU
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disparpora	1 Perangka t Daerah	3,264,155,415	DAU	Disparpora	1 Perangkat Daerah	3,345,759,301	DAU
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disparpora	12 Bulan	108,360,000	DAU	Disparpora	12 Bln	300,000,000	DAU
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Disparpora	100%	40,950,000	DAU	Disparpora	100%	58,000,000	DAU
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disparpora	30 Orang	15,950,000	DAU	Disparpora	30 org	20,000,000	DAU
3	26	01	2.05	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Disparpora	13 Orang	25,000,000	DAU	Disparpora	15 Org	38,000,000	DAU

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting
						LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Disparpora	100%	142,319,272	DAU		Disparpora	100%	157,132,200	DAU	
3	26	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan penunjang kebersihan kantor	Disparpora	12 Bulan	9,367,200	DAU		Disparpora	12 Bulan	9,367,200	DAU	
3	26	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Disparpora	0000 lemb	7,500,072	DAU		Disparpora	40000 Lembar	20,000,000	DAU	
3	26	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Disparpora	8 eksempla	5,000,000	DAU		Disparpora	48 eksemplar	5,000,000	DAU	
3	26	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Disparpora	12 Bulan	4,995,000	DAU		Disparpora	12 Bulan	4,995,000	DAU	
3	26	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi luar dan dalam daerah yang dilaksanakan	Disparpora	12 Bulan	107,957,000	DAU		Disparpora	12 Bulan	15,000,000	DAU	
					Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Disparpora	12 Bulan	7,500,000	DAU		Disparpora	12 Bulan	102,770,000	DAU	
3	26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Disparpora	100%	67,800,000	DAU		Disparpora	100%	135,000,000	DAU	
3	26	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dipenuhi	Disparpora	4 Unit	5,700,000	DAU		Disparpora	7 unit	35,000,000	DAU	
3	26	01	2.07	# Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dipenuhi	Disparpora	7 Unit	59,900,000	DAU		Disparpora	10 Unit	70,000,000	DAU	
3	26	01	2.07	# Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapgedung kantor yang dipenuhi	Disparpora	1 Unit	2,200,000	DAU		Disparpora	10 Unit	30,000,000	DAU	
3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disparpora	100%	469,225,250	DAU		Disparpora	100%	474,225,250	DAU	
3	26	01	2.08	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor,perangko/materai,benda pos lainnya yang disediakan	Disparpora	40 Arsip	30,000,000	DAU		Disparpora	40 Arsip	35,000,000	DAU	
3	26	01	2.08	02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan alat listrik, belanja telepon, air, listrik kantor yang disediakan	Disparpora	12 Bulan	48,025,250	DAU		Disparpora	12 Bulan	48,025,250	DAU	
3	26	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga jasa kebersihan kantor	Disparpora	2 OH/12 Bulan	43,200,000	DAU		Disparpora	2 OH/12 Bulan	43,200,000	DAU	
					Jumlah jasa tenaga sopir Kepala Dinas	Disparpora	1 OH//12 Bulan	25,200,000	DAU		Disparpora	1 OH//12 Bulan	25,200,000	DAU	
					Jumlah jasa tenaga kerja harian lepas	Disparpora	14 OH/ 12 Bulan	322,800,000	DAU		Disparpora	14 OH/ 12 Bulan	322,800,000	DAU	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Disparpora	100%	149,740,000	DAU		Disparpora	100%	200,000,000	DAU	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang dilaksanakan	Disparpora	6 Unit	120,000,000	DAU		Disparpora	6 Unit	140,000,000	DAU	
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Disparpora	1 Unit	10,000,000	DAU		Disparpora	1 Unit	10,000,000	DAU	
3 26 01 2.09 #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	Disparpora	10 Unit	9,980,000	DAU		Disparpora	20 Unit	25,000,000	DAU	
3 26 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	Disparpora	10 Unit	9,760,000	DAU		Disparpora	20 Unit	25,000,000	DAU	
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Padang Pariaman	265.000 Orang	200,000,000	DAU		Padang Pariaman	265.000 Orang	200,000,000	DAU	
3 26 0 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama dan Promosi Pariwisata	pd.Pariaman	2 Kegiatan	200,000,000	DAU		Pd.Pariaman	2 Kegiatan	200,000,000	DAU	
3 26 0 3 2.01 0 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama promosi pariwisata dengan pihak ketiga	pd.Pariaman	1 Kerjasama	25,000,000	DAU		Pd.Pariaman	1 Kerjasama	25,000,000	DAU	
3 26 0 3 2.01 0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	pd.Pariaman	1 Kegiatan	75,000,000	DAU		Pd.Pariaman	1 Kegiatan	75,000,000	DAU	
3 26 0 3 2.01 0 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi dan database disektor pariwisata yang dibuat	pd.Pariaman	1 Dok	100,000,000	DAU		Pd.Pariaman	1 Dok	100,000,000	DAU	
3 26 0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	pd.Pariaman	45 Orang	1,017,578,000	DAU		Pd.Pariaman	45 Orang	1,017,578,000	DAU	
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	pd.Pariaman	40 Orang		DAU		Pd.Pariaman	40 Orang		DAU	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting				
						LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA					
1				2		3		4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan standar kompetensi	d.Pariama	100 Orang	917,578,000	DAU		Pd.Pariama	100 Orang	917,578,000	DAU					
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (DAK Non Fisik)	Pd.Pariama	250 Orang	862,578,000	DAK		Pd.Pariama	250 Orang	862,578,000	DAK				
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah pemandu wisata reguler yang terlatih dan tersertifikasi	Pd.Pariama	10 Orang	25,000,000	DAU		Pd.Pariama	10 Orang	25,000,000	DAU				
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pd.Pariama	100%	30,000,000	DAU		Pd.Pariama	100%	30,000,000	DAU				
3	26	05	2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih	d.Pariama	40 Orang	100,000,000	DAU		Pd.Pariama	40 Orang	100,000,000	DAU				
3	26	05	2	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih	Pd.Pariama	40 Orang	100,000,000	DAU		Pd.Pariama	40 Orang	100,000,000	DAU				
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata sesuai dengan standar	d.Pariama	5Objek Wisata	1,210,000,000	DAU		Pd.Pariama	5Objek Wisata	410,000,000	DAU				
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata sesuai dengan standar	d.Pariama	5Objek Wisata	105,000,000	DAU		Pd.Pariama	5Objek Wisata	120,000,000	DAU				
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Pembangunan Toilet LA Rafting	Pd.Pariama	1 DTW	45,000,000	DAU		Pd.Pariama	1 DTW	45,000,000	DAU				
						Pembangunan Gazebo LA Rafting	Pd.Pariama	1 DTW	45,000,000	DAU		Pd.Pariama	1 DTW	45,000,000	DAU				
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya TarikPariwisata Pariwisata Kab/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik pariwisata Kab/Kota	Dalam dan Luar Daerah	100%	15,000,000	DAU		Dalam dan Luar Daerah	100%	30,000,000	DAU				
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata sesuai dengan standar	d.Pariama	5 Objek Wisata	265,000,000	DAU		Pd.Pariama	5 Objek Wisata	250,000,000	DAU				
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Revisi Dokumen Perencanaan RIPPDA	Pd.Pariama	1 Dok Perencanaan	50,000,000	DAU		Pd.Pariama	1 Dok Perencanaan	50,000,000	DAU				
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Makan Syech Burhanuddin	Pd.Pariama	1 Paket	200,000,000	DAU	BKK	Pd.Pariama	1 Paket	200,000,000	DAU				
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota	Dalam dan Luar Daerah	100%	15,000,000	DAU		Dalam dan Luar Daerah	100%	30,000,000	DAU				

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting
						LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1				2				3				4			
3	26	0 2	2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Padang Pariaman	5 Objek Wisata	800,000,000	DAU		Padang Pariaman	5 Objek Wisata	800,000,000	DAU	
3	26	0 2	2 0 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana di Destinasi Wisata	Padang Pariaman	5 Objek Wisata	800,000,000	DAU		Padang Pariaman	5 Objek Wisata	800,000,000	DAU	
3	26	0 2	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang diterbitkan	d.Pariama	2 TDUP	40,000,000	DAU		Pd.Pariama	2 TDUP	40,000,000	DAU	
3	26	0 2	2.04	03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Forum Investasi	Pd.Pariama	1 Kegiatan	20,000,000	DAU		Pd.Pariama	1 Kegiatan	20,000,000	DAU	
3	26	0 2	2.04	05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang bersertifikasi Halal	Pd.Pariama	2 Kegiatan	20,000,000	DAU		Pd.Pariama	2 Kegiatan	20,000,000	DAU	
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2,350,000,000					1,550,000,000		
2	19	0 2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	d.Pariama	46,29%	550,000,000	DAU		d.Pariama	46,29%	550,000,000	DAU	
				Persentase Wirausaha Muda	d.Pariama	22,47%				d.Pariama	22,47%				
2	19	0 2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Jumlah Pemuda yang berwirausaha	d.Pariama	156 Orang	400,000,000	DAU		d.Pariama	156 Orang	400,000,000	DAU	
				Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	d.Pariama	10 Organisa si				d.Pariama	10 Organisasi				
2	19	2 2	2.01	0 2 Kordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha pemula yang di latih	Pd.Pariama	20 Orang	25,000,000	DAU		Pd.Pariama	20 Orang	25,000,000	DAU	
2	19	0 2	2.01	0 8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor	Pd.Pariama	60 Orang	25,000,000	DAU		Pd.Pariama	60 Orang	25,000,000	DAU	
2	19	2 2	2.01	0 9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa/siswi terpilih untuk Paskibraka Kabupaten dan Provinsi	Pd.Pariama	32 Orang	350,000,000	DAU		Pd.Pariama	32 Orang	350,000,000	DAU	
2	19	0 3	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	d.Pariama	1 Organisa si	150,000,000	DAU		Pd.Pariama	1 Organisasi	150,000,000	DAU	
2	19	3 2	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Hibah KNPI)	Jumlah Organisasi Pemuda yang di bina	Pd.Pariama	1 Organisas i	150,000,000	HIBAH		Padang Pariaman	1 Organisasi	150,000,000	DAU	

KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting
						LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	d.Pariama	365 Orang	1,800,000,000	DAU		Padang Pariaman	365 Orang	1,000,000,000	DAU	
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat dan paham manajemen organisasi olahraga	d.Pariama	100 Orang	950,000,000	DAU		Padang Pariaman	100 Orang	150,000,000	DAU	
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pelatih, wasit/juri/instruktur yang bersertifikat	d.Pariama	100 Orang (2 Cabang)	100,000,000	DAU	Padang Pariaman	100 Orang (2 Cabang)	100,000,000	DAU	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi kelompok/organisasi keolahragaan masyarakat	d.Pariama	15 Kelompok	850,000,000	DAU	Padang Pariaman	15 Kelompok	50,000,000	DAU	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	Provinsi	9 Cabor	55,000,000	DAU	Provinsi	9 Cabor	55,000,000	DAU	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single event tingkat kabupaten/kota	Jumlah event yang dilaksanakan	Padang Pariaman	5 Cabor	20,000,000	DAU	Padang Pariaman	5 Cabor	20,000,000	DAU	
2	19	03	2.02	03	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah event pekan olahraga yang dilaksanakan yang dilaksanakan	Provinsi	4 Cabor	35,000,000	DAU	Provinsi	4 Cabor	35,000,000	DAU	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus	Provinsi	4 Cabor	40,000,000	DAU	Provinsi	4 Cabor	40,000,000	DAU	
2	19	03	2.03	04	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan cabor bagi atlet kebutuhan khusus	Provinsi	4 Cabor	40,000,000	DAU	Provinsi	4 Cabor	40,000,000	DAU	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi	Padang Pariaman	37 Cabor	700,000,000	DAU	Padang Pariaman	37 Cabor	700,000,000	DAU	
2	19	03	2.03	05	Pengembangan Organisasi Olahraga (Hibah KONI)	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Padang Pariaman	1 Organisasi	700,000,000	HIBAH	Padang Pariaman	1 Organisasi	700,000,000	DAU	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat	Padang Pariaman	2 Kegiatan	55,000,000	DAU	Padang Pariaman	2 Kegiatan	55,000,000	DAU	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting
							LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi ASN	Padang Pariaman	30 Pertemua n	20,000,000	DAU		Padang Pariaman	30 Pertemuan	20,000,000	DAU	
2	19	03	2.05	06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Event Pacu Kuda	Padang Pariaman	500 Orang	35,000,000	DAU		Padang Pariaman	500 Orang	35,000,000	DAU	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator		Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun				
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	SUMBER		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X	XX	01		1. Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat 3.Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		1.100% 2.A 3.100%	3,536,775,938		1.100% 2.A 3.100%	3,700,025,938		
X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	75,000,000		100%	75,000,000		
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	Dis Arsip & Perpustakaan	2 dokumen	25,000,000		2 dokumen	25,000,000
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja SKPD (RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, LPPD, PK, Tapkin, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Perbulan	Dis Arsip & Perpustakaan	10 dokumen	50,000,000		10 dokumen	50,000,000
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2,725,226,388		100%	2,700,226,388
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dis Arsip & Perpustakaan	1 PD	2,600,226,388		14 bulan	2,600,226,388
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK, dan Bendahara yang disediakan	Dis Arsip & Perpustakaan	1 tahun	100,000,000		1 tahun	75,000,000
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Dis Arsip & Perpustakaan	1 dokumen	25,000,000		1 dokumen	25,000,000
X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100%	30,000,000		100%	30,000,000
X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan	Dis Arsip & Perpustakaan	8 orang	30,000,000		8 orang	30,000,000
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	261,734,000		100%	382,284,000
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia (Meja dan Kursi Kerja 8 Set)	Dis Arsip & Perpustakaan	1 tahun	20,000,000		1 tahun	50,000,000
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Dis Arsip & Perpustakaan	1 tahun	-		1 tahun	30,000,000
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
							Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	SUMBER		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X	XX	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang yang dicetak dan penggandaan yang disediakan	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	15,500,000			1 tahun	15,800,000
X	XX	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	7,500,000			1 tahun	7,750,000
X	XX	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material		Dis Arsip & Perpus						
X	XX	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	5,010,000			1 tahun	5,010,000
X	XX	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	163,724,000			1 tahun	188,724,000
X	XX	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	20,000,000			1 tahun	35,000,000
X	XX	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	30,000,000			1 tahun	50,000,000
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		50%	-			60%	60,000,000
X	XX	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
X	XX	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
X	XX	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	-			1 tahun	30,000,000
X	XX	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	-			1 tahun	30,000,000
X	XX	01	2.07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
X	XX	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud								
X	XX	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
X	XX	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
X	XX	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	275,815,550			100%	277,315,550
X	XX	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan ATK, surat menyurat, peranko, materai, benda pos lainnya	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	25,500,000			1 tahun	26,000,000
X	XX	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, kebutuhan alat-alat listrik, internet, telepon, dan air kantor yang disediakan	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	44,000,000			1 tahun	45,000,000
X	XX	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
X	XX	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Dis Arsip & Perpus	9 orang/1 tahun	206,315,550			9 orang/1 tahun	206,315,550
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	169,000,000			100%	175,200,000
X	XX	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibayarkan	Dis Arsip & Perpus	3 unit	100,000,000			3 unit	122,000,000
X	XX	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional perpustakaan/perpustakaan keliling yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibayarkan	Dis Arsip & Perpus	2 unit	38,000,000			2 unit	18,200,000
X	XX	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel								
X	XX	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	10,000,000			1 tahun	10,000,000
X	XX	01	2.09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
X	XX	01	2.09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
X	XX	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Dis Arsip & Perpus	1 tahun	21,000,000			1 tahun	25,000,000

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
							Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	SUMBER		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X	XX	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
X	XX	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
X	XX	01	2.09	12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah								
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1. Nilai Indeks Pengelola Kearsipan 2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik		1.60,80 2.13,95%	145,000,000			1.63,95 2.16,27%	155,000,000
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku 2. Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi		1.85% 2.50% 3.50%	85,000,000			1.85% 2.50% 3.50%	92,500,000
2	24	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Dis Arsip & Perpustakaan	40 OPD	30,000,000			40 OPD	32,500,000
2	24	02	2.01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD (Penciptaan arsip)/sosialisasi tata kelola kearsipan	Dis Arsip & Perpustakaan	40 peserta	25,000,000			40 peserta	27,500,000
2	24	02	2.01	03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diawasi dan diaudit dalam pengelolaan kearsipan dinamis	Dis Arsip & Perpustakaan	25 OPD	30,000,000			25 OPD	32,500,000
2	24	02	2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi		10%	30,000,000			10%	30,000,000
2	24	02	2.02	01		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepala ANRI								
2	24	02	2.02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pengolahan arsip dan preservasi arsip statis di depo arsip	Dis Arsip & Perpustakaan	1 tahun	30,000,000			1 tahun	30,000,000
2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN		10%	30,000,000			10%	32,500,000
2	24	02	2.03	01		Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Dis Arsip & Perpustakaan	20 Arsip	30,000,000			20 Arsip	32,500,000
2	24	02	2.03	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1. Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan 2. Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan		1.50% 2.40%	155,000,000			1.55% 2.45%	165,000,000
2	24	03	2.01			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan 2. Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK		1.5Perbup 2.7%	50,000,000			1.5Perbup 2.8%	55,000,000
2	24	03	2.01	01		Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah JRA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati	Dis Arsip & Perpustakaan	10 JRA	30,000,000			10 JRA	32,500,000
2	24	03	2.01	02		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Dis Arsip & Perpustakaan	10 berkas	20,000,000			15 berkas	22,500,000
2	24	03	2.02			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK		5%	20,000,000			6%	22,500,000
2	24	03	2.02	01		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang terkumpul dan teridentifikasi	Dis Arsip & Perpustakaan	10 berkas	20,000,000			15 berkas	22,500,000
2	24	03	2.02	02		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana								
2	24	03	2.03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan		25 nagari	30,000,000			25 nagari	30,000,000

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
							Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	SUMBER		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	24	03	2.03	01		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	03	2.03	02		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	03	2.03	03		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan								
2	24	03	2.03	04		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya	Dis Arsip & Perpustakaan	25 nagari	30,000,000			25 nagari	30,000,000
2	24	03	2.04			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		350 Berkas Arsip	55,000,000			400 Berkas Arsip	57,500,000
2	24	03	2.04	01		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah keberadaan dan keutuhan arsip yang sesuai NSPK	Dis Arsip & Perpustakaan	50 Berkas Arsip	25,000,000			50 Berkas Arsip	25,000,000
2	24	03	2.04	02		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dialih mediakan	Dis Arsip & Perpustakaan	300 berkas	30,000,000			350 berkas	32,500,000
2	24	03	2.05			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				-				
2	24	03	2.05	01		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang								
2	24	03	2.05	02		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang								
2	24	03	2.05	03		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)								
2	24	04				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	.Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan		5%	25,000,000			10%	25,000,000
2	24	04	2.01			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di	Persentase Penyusunan SOP Kearsipan		5%	25,000,000			10%	25,000,000
2	24	04	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun		15 SOP	25,000,000			15 SOP	25,000,000
2	24	04	2.01	02		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan 2.Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk 3.Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat 4.Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk 5.Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		1.90,25 2.2,95 3.0,45% 4.0,20 5.0,40%	245,000,000			1.90,30 2.3,00 3.0,50% 4.0,20 5.0,40%	247,500,000
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT 2.Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka 3.persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan 4.Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar 5.Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan		1.30% 2.6% 3.25% 4.6Perpustakaan 5.1200 Pemustaka	160,000,000			1.30% 2.8% 3.25% 4.8Perpustakaan 5.1500 Pemustaka	162,500,000
2	23	02	2.01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan umum/sekolah yang berbasis IT (Otomasi Perpustakaan)	Dis Arsip & Perpustakaan	40 pustaka	30,000,000			40 pustaka	30,000,000
2	23	02	2.01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang mendapat layanan mobil perpustakaan keliling	Dis Arsip & Perpustakaan	50 lokasi	30,000,000			50 lokasi	30,000,000
2	23	02	2.01	03		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	23	02	2.01	04		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai	Dis Arsip & Perpustakaan	10 perpustakaan nagari/17 perpustakaan sekolah	30,000,000			10 perpustakaan nagari/17 perpustakaan sekolah	32,500,000

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
							Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	SUMBER		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	23	02	2.01	05		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									
2	23	02	2.01	06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	02	2.01	07		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
2	23	02	2.01	08		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan Bahan Pustaka/Koleksi	Dis Arsip & Perpus	3 SUBJEK	30,000,000			3 SUBJEK	30,000,000	
2	23	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Buku yang terpelihara	Dis Arsip & Perpus	500 EKS	20,000,000			500 EKS	20,000,000	
2	23	02	2.01	10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Nagari dan sekolah yang terkumpul	Dis Arsip & Perpus	600 PUSTAKA	20,000,000			600 PUSTAKA	20,000,000	
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi 2.persentase Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan			1.10% 2.25%	85,000,000			1.15% 2.25%	85,000,000
2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah SDM pemustaka yang diberikan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Dis Arsip & Perpus	50 peserta	30,000,000			50 peserta	30,000,000	
2	23	02	2.02	02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	02	2.02	03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba bercerita tingkat SD/MI	Dis Arsip & Perpus	34 peserta/6 orang	25,000,000			34 peserta/6 orang	25,000,000	
2	23	02	2.02	04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah SDM pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan inklusi sosial	Dis Arsip & Perpus	50 peserta	30,000,000			50 peserta	30,000,000	
2	23	02	2.02	05		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar			20%	80,000,000			30%	80,000,000
2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar			5%	40,000,000			5%	40,000,000
2	23	03	2.01	01		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peserta sosialisasi tata cara penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Dis Arsip & Perpus	20 peserta	20,000,000			20 peserta	20,000,000	
2	23	03	2.01	02		Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang terkumpul,diolah dan dialih mediakan	Dis Arsip & Perpus	20 NASKAH KUNO	20,000,000			20 NASKAH KUNO	20,000,000	
2	23	03	2.02			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan dan atau Terdaftar			5%	40,000,000			5%	40,000,000
2	23	03	2.02	01		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia	Dis Arsip & Perpus	25 BUDAYA ETNIS NUSANTARA	20,000,000			25 BUDAYA ETNIS NUSANTARA	20,000,000	
2	23	03	2.02	02		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara diolah dan dialih mediakan	Dis Arsip & Perpus	25 BUDAYA ETNIS NUSANTARA	20,000,000			25 BUDAYA ETNIS NUSANTARA	20,000,000	
							JUMLAH				4,186,775,938				4,372,525,938

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana// Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERIKANAN				8.283,600,000			14.269,400,000
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		100%	4,936,600,000		100%	9,462,400,000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A			A	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%			100%	
5 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100%	67,000,000		100%	90,000,000
5 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renstra, Renja)	Dinas Perikanan	2 dokumen	15,000,000		1 Dokumen	20,000,000
5 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun	Dinas Perikanan	1 dokumen	8,000,000		1 dokumen	12,500,000
5 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	Dinas Perikanan	1 dokumen	8,000,000		1 dokumen	12,500,000
5 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	Dinas Perikanan	1 dokumen	8,000,000		1 dokumen	12,500,000
5 01 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Disusun	Dinas Perikanan	1 dokumen	8,000,000		1 dokumen	12,500,000
5 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun (LAKIP, LPPD)	Dinas Perikanan	2 dokumen	15,000,000		2 dokumen	15,000,000
5 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dinas Perikanan	1 dokumen	5,000,000		1 dokumen	5,000,000
5 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	3,375,000,000			3,423,900,000
5 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Dinas Perikanan	27 ASN	3,253,000,000		28 ASN	3,300,000,000
5 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Honorariumnya	Dinas Perikanan	25 Orang	110,000,000		25 Orang	110,000,000
5 01 01 2 02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	Dinas Perikanan	1 dokumen	4,000,000		1 dokumen	4,400,000
5 01 01 2 02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang Disusun	Dinas Perikanan	3 laporan	8,000,000		1 Laporan	9,500,000
5 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		92%	7,500,000		94%	7,500,000
5 01 01 2 02 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun	Dinas Perikanan	6 dokumen	2,500,000		1 Dokumen	2,500,000
5 01 01 2 02 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang Disusun	Dinas Perikanan	3 Berkas	2,500,000		3 Berkas	2,500,000
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		1 Laporan			1 Laporan	
5 01 01 2 02 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Disusun	Dinas Perikanan	1 Laporan	2,500,000		1 Dokumen	2,500,000
5 01 01 2 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		100%	15,000,000		100%	5,000,000
5 01 1 2 04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Disusun/ Ditetapkan	Dinas Perikanan	1 Dokumen	5,000,000		0	5,000,000
6 02 1 2 04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan	Dinas Perikanan	1 Kali	10,000,000		0	-
5 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	40,000,000		93%	30,000,000
5 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan	27 Stel	15,000,000		28 Stel	15,000,000
5 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan diklat	Dinas Perikanan	10 orang	25,000,000		10 orang	15,000,000
5 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	221,500,000		100%	191,000,000
5 01 1 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Perikanan, UPTD BBI dan UPTD TPI	20 Unit	1,000,000		20 Unit	1,000,000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana// Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5 01 1 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Perikanan	-	-		3 Unit Filing Cabinet Besi	6,000,000
5 01 1 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perikanan	-	-		2 Unit AC Split, 1 Unit Kamera, 1 Unit Kamera Video	45,000,000
5 01 1 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Perikanan	4 Paket	7,000,000		4 Paket	8,000,000
5 01 1 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perikanan	684 eksemplar	6,000,000		684 eksemplar	6,000,000
5 01 1 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Dinas Perikanan	75 porsi	7,500,000		75 porsi	5,000,000
5 01 1 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dinas Perikanan	140 Laporan	200,000,000		140 Laporan	120,000,000
5 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan		12 Kali				
5 01 01 2 07	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur		100%	450,000,000	1		100,000,000
5 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru yang Disediakan	Dinas Perikanan	1 Unit Kendaraan Roda 4	350,000,000		0	-
5 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perikanan	10 Unit (5 Unit Laptop, 5 Unit Printer)	100,000,000		5 Unit PC	100,000,000
5 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	1	100%	515,600,000		100%	523,000,000
5 01 1 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat kantor yang ditindaklanjuti	Dinas Perikanan	1250 surat	10,000,000		1250 surat	8,000,000
5 01 1 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayar	Dinas Perikanan	3 Rekening listrik	60,000,000		3 Rekening listrik	60,000,000
5 01 1 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perikanan	43 Unit PC/Laptop dan 10 unit printer	10,000,000		43 Unit PC/Laptop dan 10 unit printer	5,000,000
5 01 1 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non PNS yang Pendukung Administrasi Perkantoran yang Dibayarkan jasanya	Dinas Perikanan	18 Orang	435,600,000		18 Orang	450,000,000
5 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik		100%	245,000,000		100%	285,000,000
5 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang Dipelihara	Dinas Perikanan	29 Unit	120,000,000		30 Unit	140,000,000
5 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab	Dinas Perikanan	1 Unit	120,000,000		1 Unit	140,000,000
5 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Dinas Perikanan	9 Unit AC	5,000,000		9 Unit	5,000,000
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		18.810,73 ton/tahun	1,151,700,000		19.186,93 ton/tahun	1,075,000,000
3 25 3 2 01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Disediakan		50 Paket	1,071,700,000			920,000,000
3 25 3 2 1 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang disediakan	Kabupaten Padang Pariaman	2 Paket Buku	20,000,000		2 Paket Buku	20,000,000
3 25 3 2 1 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Aplikasi Sumber Daya Ikan yang dihasilkan		1 aplikasi			0	
	Pengadaan Mesin Tempel Penangkap Ikan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Disediakan	6 Kecamatan Pesisir Padang Pariaman	50 Paket	1,051,700,000		50 Paket	900,000,000
			Kelompok Nelayan Korong Pasir Baru Nagari Pilubang	1 Paket				
	Pengadaan Mesin Tempel 15 Pk Merek Yamaha		Nagari Gasan Gadang Kec. Batang Gasan	10 Unit				
	Pengadaan Perahu Nelayan		Nagari Gasan Gadang Kec. Batang Gasan	10 Unit				

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana// Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
	Bantuan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Terpadu Kantarok Kelompok Nelayan Citra Bahari 2		Korong kantarok malali v suku	2 Kelompok								
	Bantuan Kelompok Perikanan Mesin Kapal 15 PK, Kapal dan alat Tangkap		Pesisir Pantai Kec. Ulakan Tapakis	7 Paket								
	Bantuan Alat Tangkap Nelayan		Kec. Batang Gasan, Kec. Sungai Limau	1 Paket								
	Pengadaan Bantuan Perahu Fiber dan Alat Tangkap Nelayan Kelompok Nelayan Elang Sakti, Kalampayan Pasir		Korong Kalampayan, Nagari Koto Tinggi Kuranjihilir Koto Tinggi Kuranjihilir.	1 paket								
3	25	3	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan bina kelompok nelayan	10 Kelompok	40,000,000	10 Kelompok	110,000,000	
3	25	3	2	02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi untuk pengurusan akutanotaris Jumlah nelayan yang terdaftar di aplikasi kartu KUSUKA Jumlah nelayan yang terfasilitasi mengikuti asuransi	6 Kecamatan Pesisir Padang Pariaman	5 kelompok 100 Nelayan 200 Nelayan	20,000,000	5 kelompok 100 Nelayan 200 Nelayan	85,000,000
3	25	3	2	02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Sertifikat tanah untuk nelayan sebagai akses perbankan	6 Kecamatan Pesisir Padang Pariaman	100 Persil	20,000,000	100 Persil	25,000,000
3	25	3	2	03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Operasional	100	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	35,000,000
3	25	3	2	03	01	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Operasional	UPTD TPI Ulakan Tapakis	1 Unit	30,000,000	1 Unit	35,000,000
3	25	3	2	04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan		30%	10,000,000	30%	10,000,000
3	25	3	2	04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT(SOP)	1	1 SOP	10,000,000	1	10,000,000
3	25	4				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		54.633,06 ton/tahun	1,955,300,000	55,725.72	3,592,000,000
							Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)		495,000,000		510,000,000	
3	25	04	2	2		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha		1 SOP	10,000,000	5 Izin Usaha	347,000,000
3	25	04	2	2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SOP)	-	1 SOP	10,000,000	1 SOP	10,000,000
3	25	4	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan (%)		50%	450,000,000	50%	337,000,000
3	25	4	2	02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Lomba Pokdakan tingkat kabupaten yang dilaksanakan (kegiatan) Jumlah Studi Tiru yang Dilaksanakan (kali) Jumlah Pokdakan/ UPR yang Mengikuti Bimtek CPIB/ CBIB	Padang Pariaman	2 Kegiatan 1 Kali 15 Kelompok	50,000,000	2 Kegiatan 1 Kali	80,000,000
3	25	4	2	02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kawasan pengembangan wirausaha perikanan Jumlah Kelompok Perikanan Baru yang terbentuk (Pokdakan/UPR) Jumlah Kelompok Perikanan yang Dikembangkan (Pokdakan/UPR)	Padang Pariaman	4 Kawasan 5 Pokdakan/ UPR 5 Pokdakan/ UPR	370,000,000	4 Kawasan 5 Pokdakan/ UPR	32,000,000
3	25	4	2	02	3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu	Jumlah Bimtek CPIB/ CBIB yang dilakukan	Padang	1 Kali	30,000,000	1 Kali	225,000,000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana// Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
	Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah benih dan pakan yang disediakan	Pariaman	60.000 ekor gurami, 4500 kg pakan			60.000 ekor gurami, 4500 kg pakan						
		Jumlah Temu Lapang yang Dilaksanakan untuk penerima bantuan		2 Kali			2 Kali						
3	25	4	2	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sertifikasi CPIB/ CBIB	2 Sertifikat	1,495,300,000	2 Sertifikat	1,725,000,000			
3	25	4	2	04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Perikanan Budidaya yang Disusun	Padang Pariaman	2 Paket Buku	20,000,000		2 Paket Buku	20,000,000
							Jumlah Aplikasi Pembudidayaan Ikan yang Dibuat		1 Aplikasi			0	
							Jumlah Buku Saku Perikanan Budidaya yang Disediakan		0			100	
3	25	4	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Disediakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Pariaman	1 Kegiatan	210,500,000		1 Unit	300,000,000
							Jumlah Rumah Promosi Ikan Hias yang Disediakan (Unit)		0			1 Unit	
3	25	4	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) yang Operasional (unit)	Padang Pariaman	1 UPTD	1,214,800,000		1 UPTD	1,330,000,000
							Jumlah induk unggul yang disediakan (kg)		300 kg			300 kg	
							Jumlah Benih Ikan yang Ditebar (Ekor)		300.000 ekor			300.000 ekor	
							Jumlah Pakan yang Disediakan (kg)		12.000 kg			12.000 kg	
							Jumlah Kolam Terpal yang Disediakan (unit)		50 Unit			50 Unit	
							Jumlah sarana pengembangan pakan alami yang disediakan (unit)		0			5 Unit	
							Jumlah sarana produksi ikan hias yang diadakan		0			5 Unit	
									45.000 ekor bibit lele, 5,4 ton pakan			45.000 ekor bibit lele, 5,4 ton pakan	
									60.000 ekor bibit lele, 8 ton pakan			60.000 ekor bibit lele, 8 ton pakan	
									45.000 ekor bibit lele, 5,4 ton pakan			45.000 ekor bibit lele, 5,4 ton pakan	
									1 Paket			1 Paket	
									1 Paket			1 Paket	
									1 Paket			1 Paket	
									1 Paket			1 Paket	
									12.000 kg			12.000 kg	
									50 Unit			50 Unit	
									0			5 Unit	
									0			5 Unit	
3	25	4	2	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengendalian hama penyakit yang dilaksanakan (orang)	Padang Pariaman	25 orang	50,000,000		25 orang	75,000,000
							Jumlah vitamin serta obat ikan yang tersedia (paket)		1			1 Paket	
							Jumlah sampel yang diperiksa (sampel)		36			18 Sampel	
3	25	5				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)		70%	40,000,000		0.80	30,000,000
							Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)		100%			100%	
3	25	5	2	1		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)		70%	40,000,000		80%	30,000,000
3	25	5	2	1	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang Dibina (Kelompok)	Padang Pariaman	15 Kelompok	20,000,000		15 Kelompok	20,000,000
							Jumlah Lokasi perikanan tangkap yang Diawasi oleh Pokmaswas (lokasi)		35			40	
							Jumlah Benih Ikan yang Ditebar di Perairan Umum (Ekor)		60,000			60,000	
							Jumlah sertifikat CBIB Pokmaswas perairan umum yang diterbitkan		1			1	
							Jumlah kelompok yang difasilitasi dan dikukuhkan		5			5	
3	25	5	2	1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diawasi (usaha)	Padang Pariaman	6 Usaha	20,000,000		7 Usaha	10,000,000
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)		43.54	200,000,000		44.04	110,000,000

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana// Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Produksi Ikan Olahan (ton)		7			7	
3	25	06	2	01			Persentase UPI yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)			30,000,000			30,000,000
3	25	06	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi Lahsar yang Dihasilkan Jumlah jenis buku Pengolahan Hasil Perikanan yang Disusun	Padang Pariaman	1 Aplikasi 2 paket buku	30,000,000		-	30,000,000
3	25	06	2	02			Persentase UPI yang telah mempunyai SKP		61%	35,000,000	1		45,000,000
3	25	06	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pengujian formalin terhadap sampel ikan segar dan ikan kering (sampel) Monitoring dan Pembinaan mutu pada poklhasar (kegiatan) Monitoring, Pembinaan Pelaku Usaha Tambak Udang Vaname (kegiatan) Pembinaan SKP pada Poklhasar Hasil Perikanan (kegiatan) Kegiatan Temu Teknis Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan (kegiatan) Temu Usaha Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Pelayanan Perizinan usaha perikanan yang diberikan (izin)	Padang Pariaman	40 10 8 10 4 1 10	35,000,000	50 10 10 10 5 1 10		45,000,000
3	25	06	2	03			Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Disediakan		1 Paket	135,000,000			35,000,000
3	25	06	2	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi gemarikan ke sekolah Jumlah lomba masak serba ikan yang diikuti (kali) Jumlah lomba masak serba ikan yang dilaksanakan (kali) Pelatihan penguatan kelembagaan Poklhasar	Padang Pariaman	4 kali 1 kali 1 kali 2 kali	35,000,000			35,000,000
3	25	06	2	03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibangun Jumlah Sarana Pengolahan yang Disediakan Jumlah Sarana Pemasaran yang Disediakan	Padang Pariaman	1 Unit 0 Paket 0 Paket	100,000,000			-

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. PADANG PARIAMAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA				22,966,821,767				26,980,028,067
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		100%	13,361,909,067			100%	13,423,144,067
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A				A	
		- Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
X XX 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	92%	74,500,000			94%	74,500,000
X XX 01	2.01 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun (Renja/RKT, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RUP, e-Proposal Kementan RI)	DistanKP	7 Dokumen	40,000,000	DAU	7 Dokumen	40,000,000
X XX 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan evaluasi yang disusun (LPPD, LAKIP, Laporan realisasi prog/keg per bulan dan triwulan serta Perjanjian Kinerja (PK)) dan Laporan Statistik Pertanian	DistanKP	5 Dokumen	34,500,000	DAU	5 Dokumen	34,500,000
X XX 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,397,159,067			100%	12,456,394,067
X XX 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		1 Perangkat Daerah	12,264,039,067		1 Perangkat Daerah	12,323,274,067
X XX 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah pengelolaan keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) DistanKP yang dibayarkan honorinya selama 1 tahun	DistanKP	12 Bulan	123,120,000	DAU	12 Bulan	123,120,000
X XX 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan laporan keuangan akhir tahun yang disusun	DistanKP	19 Dokumen	10,000,000	DAU	19 Dokumen	10,000,000
X XX 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	92%	92,250,000			94%	92,250,000
X XX 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	DistanKP	135 orang	47,250,000	DAU	135 orang	47,250,000
X XX 01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat/studi komparatif berdasarkan tugas dan fungsi	DistanKP	2 Orang	23,000,000	DAU	2 Orang	23,000,000
X XX 01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur DistanKP yang mengikuti bimtek/workshop	DistanKP	10 orang	22,000,000	DAU	10 orang	22,000,000
X XX 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	271,000,000			100%	271,000,000
X XX 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DistanKP	1 Paket	7,000,000	DAU	1 Paket	7,000,000
X XX 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	DistanKP	1 Paket	25,000,000	DAU	1 Paket	25,000,000
X XX 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang diadakan	DistanKP	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	20,000,000
X XX 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang diadakan	DistanKP	1800 exemplar	12,000,000	DAU	1800 exemplar	12,000,000
X XX 01	2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian dan makan minum tamu yang disediakan	DistanKP	1 Paket	12,000,000	DAU	1 Paket	12,000,000
X XX 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	DistanKP	175 Kali	195,000,000	DAU	175 Kali	195,000,000
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		15 paket			15 paket	
X XX 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	82%	60,000,000			84%	60,000,000
X XX 01	2.07 05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	DistanKP	1 paket	20,000,000	DAU	1 paket	20,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	DistanKP	1 paket	20,000,000	DAU		1 paket	20,000,000
X XX 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	DistanKP	1 Paket	20,000,000	DAU		1 Paket	20,000,000
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	317,000,000			100%	319,000,000
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, percetakan, penggandaan, materai yang diadakan	DistanKP	1 paket	25,000,000	DAU		1 paket	25,000,000
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang diadakan	DistanKP	12 kali	42,000,000	DAU		12 kali	42,000,000
X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	DistanKP	1 paket	22,000,000	DAU		1 paket	22,000,000
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga swakelola yang dibayarkan honorariumnya	DistanKP	9 Orang	228,000,000	DAU		9 Orang	230,000,000
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	150,000,000			100%	150,000,000
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	DistanKP	1 Paket	150,000,000	DAU		1 Paket	150,000,000
3 27 02 2.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan		80%	3,900,653,700			85%	5,655,000,000
		- Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun		40%				45%	
		- Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat		1 Varietas				0 Varietas	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan		80%	2,845,653,700			85%	5,110,000,000
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah saprodi tanaman pangan yang diadakan (benih padi, jagung)	DistanKP	50 Ha	921,307,400	DAU		50 Ha	2,545,000,000
		- Jumlah keltan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil		1 Poktan				1 Poktan	
		- Jumlah keltan pertanian organik yang dibina		10 Ha				30 Ha	
		- Jumlah monitoring kegiatan peningkatan produksi pertanian		80 kali				200 kali	
		- Jumlah lahan terlantar yang dimanfaatkan		50 Ha				50 Ha	
		- Jumlah keltan penangkar benih tanaman pangan yang dibina		3 Poktan				8 Poktan	
		- Jumlah saprodi tanaman hortikultura yang diadakan		2 Ha				7 Ha	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah alsintan yang diadakan	DistanKP	20 unit	1,924,346,300	DAU		40 unit	2,565,000,000
		- Jumlah pengawasan penyaluran bantuan alsintan dana APBN dan APBD		30 kali				30 kali	
		- Jumlah alsintan yang diperbaiki		5 unit				5 unit	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan		80%	1,055,000,000			85%	545,000,000
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	- Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan kakao yang dipelihara	DistanKP	1 unit	205,000,000	DAU		1 unit	55,000,000
		- Pelepasan varietas pinang wangi		1 varietas					
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah areal perkebunan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi	DistanKP	14 Ha	50,000,000	DAU		14 Ha	50,000,000
		- Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan yang diterapkan		1 Teknologi				1 Teknologi	
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan (kelapa, pinang wangi)	DistanKP	30 Ha	800,000,000	DAU		40 Ha	440,000,000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana		92.0%	4,823,809,000			93.0%	6,061,434,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun		5.0%				5.0%	
		- Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif		23.5%				35.2%	
3 27 03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan				85%	151,000,000
3 27 03	2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	pengendalian perda LP2B	DistanKP	1 Paket	40,000,000	DAU	1 Paket	66,000,000
3 27 03	2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	- Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	DistanKP	34 kali	85,000,000	DAU	34 kali	85,000,000
			- Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian		1 Kegiatan			1 Kegiatan	
3 27 03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian		65%	4,698,809,000		70%	5,910,434,000
3 27 03	2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/rehabilitasi	DistanKP	1 Unit	200,000,000	DAU	2 Unit	270,000,000
3 27 03	2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/direhabilitasi	DistanKP	2 Km	628,000,000	DAK	6 Km	2,025,822,500
3 27 03	2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun/direhabilitasi	DistanKP	6 Unit	755,000,000	DAK	6 Unit	748,802,500
3 27 03	2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya	DistanKP	17 BPP	2,615,809,000	DAK	17 BPP	2,615,809,000
3 27 03	2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pertanian lainnya yang dibangun/rehabilitasi	DistanKP	0 paket	500,000,000	DAU	1 paket	250,000,000
			Jumlah dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) Food Estate	DistanKP	1 dokumen				
3 27 05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan		350 Ha	130,000,000		400 Ha	300,000,000
3 27 05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan		350 Ha	130,000,000		400 Ha	300,000,000
3 27 05	2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah hama tanaman perkebunan (tupa) yang dikendalikan	DistanKP	2000 ekor	130,000,000	DAU	5000 ekor	300,000,000
			- Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan yang diadakan		1 paket			1 paket	
			- Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AUTP		500 Ha			1.000 Ha	
3 27 06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses		100%	15,000,000		100%	25,000,000
3 27 06	2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses		100%	15,000,000		100%	25,000,000
3 27 06	2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi teknis		5 dokumen	15,000,000		5 dokumen	25,000,000
3 27 07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani		34 Poktan	301,750,000		34 Poktan	461,750,000
3 27 07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani		34 Poktan	301,750,000		34 Poktan	461,750,000
3 27 07	2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih	DistanKP	60 Orang	77,500,000	DAU	60 Orang	150,000,000
			- Jumlah program penyuluhan yang tersusun		104 dokumen			104 dokumen	
			- Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan		4 kategori			4 kategori	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan		5 Posluhnag				10 Posluhnag	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah petani yang dilatih - Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya - Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani	DistanKP	50 petani 25 Poktan 3 kategori	50,000,000	DAU		100 petani 25 Poktan 3 kategori	137,500,000
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstراتani (DAK Non Fisik)	DistanKP	204 dokumen	174,250,000	DAK		204 dokumen	174,250,000
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun		1 Unit	-			1 Unit	100,000,000
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penumbuhan infrastruktur lumbung pangan		10%	-			15%	100,000,000
2 09 02 2.01 01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan yang disediakan		0 unit	-			1 unit	75,000,000
2 09 02 2.01 02	Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang diadakan		0 unit	-			1 unit	25,000,000
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Skor pola pangan harapan (PPH) - Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) - Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)		88.90 2400.00 55.66	372,000,000			89.30 2400.00 56.47	862,000,000
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok		≤ 10%	70,000,000			≤ 10%	70,000,000
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan neraca bahan makanan	DistanKP	1 dokumen	10,000,000	DAU		1 dokumen	10,000,000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis	DistanKP	7 pasar kecamatan	35,000,000	DAU		7 pasar kecamatan	35,000,000
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	- Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dibina/didampingi - Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina/didampingi	DistanKP	8 Poktan 6 Poktan	25,000,000	DAU		8 Poktan 6 Poktan	25,000,000
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan rasio cadangan pangan		10%	100,000,000			20%	250,000,000
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) yang diadakan	DistanKP	8 Ton	100,000,000	DAU		20 Ton	250,000,000
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor pola pangan harapan (PPH) yang ideal		88.90	202,000,000			89.30	542,000,000
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH)	DistanKP	1 dokumen	12,000,000	DAU		1 dokumen	12,000,000
2 09 03 2.04 03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah luas demplot pada KWT pelaksana P2L - Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan - Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L - Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L (DAK Non Fisik)	DistanKP	0 M2 0 kali 1 KWT 2 Poktan	190,000,000	DAU/DAK		150 M2 1 kali 1 KWT 2 Poktan	530,000,000
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan		1 nagari	20,000,000			1 nagari	25,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun		100%	20,000,000			100%	25,000,000
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	DistanKP	1 dokumen	20,000,000	DAU		1 dokumen	25,000,000
		- Laporan database ketahanan pangan		1 dokumen				1 dokumen	
		- Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)		1 dokumen				1 dokumen	
		- Jumlah kelompok tani yang dilakukan sosialisasi budidaya tanaman buah		4 Poktan				4 Poktan	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi		80%	41,700,000			85%	66,700,000
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan		100%	41,700,000			100%	66,700,000
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah	DistanKP	4 SD	11,700,000	DAU		4 SD	11,700,000
		- Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan		4 dokumen				4 dokumen	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan	DistanKP	15 sampel	30,000,000	DAU		25 sampel	55,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		100%				100%	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Padang Pariaman	B	5,534,485,328	DAU		BB	5,728,685,328.00
	01					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan laporan kinerja	Padang Pariaman		80,000,000				80,000,000.00
	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra,RKA,DPA		1 Tahun	40,000,000			1 Tahun	40,000,000.00
	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan LPPD,LAKIP,LKPJ.		3 Dokumen	40,000,000			3 Dokumen	40,000,000.00
	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Laporan Keuangan			4,610,485,328				4,602,885,328.00
	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN		1 Tahun	4,590,485,328			1 Tahun	4,582,885,328.00
	01	2.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan Aset dan Keuangan		2 Dokumen	20,000,000			2 Dokumen	20,000,000.00
	01	2.04'			Adm Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah	Jumlah PAD Pemotongan Ternak			20,000,000				20,000,000.00
	01	2	01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Pemotongan Ternak		80 Jt	20,000,000			80 Jt	20,000,000.00
	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		30	69,600,000				71,200,000.00
	01	2.1	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya		49 Orang	19,600,000			53 Orang	21,200,000.00
	01	2.1	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti diklat fungsional		2 Orang	20,000,000			2 Orang	20,000,000.00
	01	2.1	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek		10 Orang	30,000,000			10 Orang	30,000,000.00
	01	2.1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah			260,000,000				260,000,000.00

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	01	2.1	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		100 Buah	20,000,000			100 Buah	20,000,000.00
	01	2.1	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		3 Unit	70,000,000			3 Unit	70,000,000.00
	01	2.1	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian peralatan kebersihan kantor		1 Tahun	20,000,000			1 Tahun	20,000,000.00
	01	2.1	05			Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan cetak, penggandaan		1 Tahun	30,000,000			1 Tahun	30,000,000.00
	01	2.1	06			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan		1 Tahun	10,000,000			1 Tahun	10,000,000.00
	01	2.1	08			Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makam minum tamu		1 Tahun	10,000,000			1 Tahun	10,000,000.00
	01	2.1	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah		1 Tahun	100,000,000			1 Tahun	100,000,000.00
	01	2.1				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja Aparatur perangkat daerah		100%	80,000,000			100%	80,000,000.00
	01	2.1	05			Pengadaan Mebel	Jumlah Meja kursi ASN, Lemari, dll		6 unit	50,000,000			3 unit	50,000,000.00
	01	2.1	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelengkapan Puskesmas		1	30,000,000			1	30,000,000.00
	01	2.1				Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan daerah			319,400,000				319,600,000.00
	01	2.1	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan ATK kantor		1 Tahun	40,000,000			1 Tahun	40,000,000.00
	01	2.1	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, air, spedy		1 Tahun	55,000,000			1 Tahun	55,000,000.00
	01	2.1	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa servis		1 Tahun	12,000,000			1 Tahun	12,000,000.00
	01	2.1	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor swakelola 6 orang, 2 Cs, 1 Sopir		1 Tahun	212,400,000			1 Tahun	212,600,000.00
	01	2.1				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik negara			95,000,000				95,000,000.00
	01	2.1	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak Kendaraan Dinas, BBM, Servis Kendaraan, suku cadang		1 Tahun	95,000,000			1 Tahun	95,000,000.00
3.27.02						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah produksi daging		2,375	5,131,926,828			2,410	3,995,000,000

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.01						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan		6.37	200,000,000			8.37	200,000,000.00
2.01	02					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok yang difasilitasi sarana peternakan		2	200,000,000			2	200,000,000.00
2.02						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/	Jumlah Bantuan Bibit Ternak		32 kelompok	4,716,926,828			34 kelompok	3,585,000,000.00
2.02	01					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bantuan ternak sapi,kambing		22	4,400,000,000			22	3,200,000,000.00
2.02	02					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelahiran Sapi		10400	80,000,000			10600	85,000,000.00
2.02	03					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bantuan ternak unggas		10	236,926,828			12	300,000,000.00
2.03						Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Persentase pengawasan peredaran pakan ternak		5.70	70,000,000			7.70	70,000,000.00
2.03	01					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah bahan pakan/pakan yang diperiksa/diuji		2	40,000,000			2	40,000,000.00
2.03	02					Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bahan pakan/pakan bermutu yang beredar		2	30,000,000			2	30,000,000.00
2.05						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT		100%	85,000,000			100%	90,000,000.00
2.05	01					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah bahan pakan/pakan HPT yang diawasi		2	40,000,000			2	40,000,000.00
2.05	04					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan								
2.05	05					Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	jumlah kelompok penyedia benih HPT yang dikendalikan		2	45,000,000			3	50,000,000.00
2.06						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Luas HPT yang tersedia		7	60,000,000				
2.06	02					Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)		10,000	60,000,000			10,000	60,000,000.00
3.27.03						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan		17.00%	100,000,000			23.00%	1,100,000,000
2.02						Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangun Puskesmas dan pemeliharaan prasarana Puskesmas		1	0 DAK			1	1,000,000,000.00
2.02	09					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Puskesmas		1				0	1,000,000,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	2.03					Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase penambahan jumlah populasi rusa		1.39	100,000,000			1.61	100,000,000.00
	2.03	01				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	jumlah rusa yang dipelihara		43	100,000,000			50	100,000,000.00
3.27.04						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)		35%	355,000,000			40%	420,000,000
	2.01					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Jumlah Ternak/Hewan yang sehat		2.5450	165,000,000			2.7925	195,000,000.00
	2.01	01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kejadian penyakit jembrana ,SE,AI,rabies		200	25,000,000			150	30,000,000.00
							Jumlah hewan yang divaksinasi		550				600	
	2.01	02				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR)		200	65,000,000			250	85,000,000.00
							Jumlah Kasus Gigitan		290				280	
	2.01	3				Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah ternak/hewan yang dilakukan pelayanan di puskesmas		200	75,000,000			300	80,000,000.00
	2.02					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH		805.56	90,000,000			888.89	112,000,000.00
	2.02	01				Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah ante/pasmortem(lebaran)		250	80,000,000			300	100,000,000.00
							jumlah pengawasan pemotongan ternak betina produktif							
	2.02	02				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah SKKH yang diterbitkan		475	10,000,000			500	12,000,000.00
	2.03					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan kesehatan hewan		500	67,000,000			540	70,000,000.00
	2.03	01				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah analisis hasil Pengujian Sampel Penyakit Hewan		45	30,000,000			40	25,000,000.00
	2.03	02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak besar yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan		450	37,000,000			500	45,000,000.00
	2.04					Penerapan dan Pengawasan	Jumlah penerbitan Pra NKV		1	33,000,000			1	43,000,000.00
	2.04	01				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan		5 Produk	15,000,000			5 Produk	23,000,000.00
	2.04	04				Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis hasil pengujian sampel produk asal hewan		120	18,000,000			125	20,000,000.00

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.27.06						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan		100%	40,000,000			100%	40,000,000
	2.02					Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	Jumlah rekomendasi perizinan Usaha/AUTS yang ditindaklanjuti/diproses		100%	40,000,000			100%	40,000,000.00
	2.02	03				Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan		5	40,000,000			5	40,000,000.00
							Jumlah ternak yang di Asuransikan		100				100	
							Jumlah debitur peternak sektor peternakan (KUR, KKPE)							
3.27.07						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		0.50%	150,000,000			0.50%	150,000,000
	2.01					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembinaan Kelompok Tani		59 Kelompok	150,000,000			79 Kelompok	150,000,000.00
	2.01	02				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi		100	100,000,000			100	100,000,000.00
							Jumlah Kelompok Ternak yang Terdaftar SIMLUHTAN		95				95	
							Jumlah kelompok yang dikembangkan skala usaha		20				20	
	2.01	03				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah metode informasi Peternakan		4	50,000,000			4	50,000,000.00
							Database peternakan		1				1	
						Total				11,311,412,156				11,183,685,328.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NON URUSAN								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5,105,590,320				6,663,561,728
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	DPMD	100%		DAU		100%	6,537,612,780
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	DPMD	B		DAU		B	59,823,948
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	DPMD	100%		DAU		100%	66,125,000
x x	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	100%	65,000,000	DAU		100%	72,500,000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	3 Dok	35,000,000	DAU		3 Dok	40,000,000
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	4 Dok	30,000,000	DAU		4 Dok	32,500,000
x x	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	100%	4,326,775,320	DAU		100%	5,721,630,520
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	1 Perangkat Daerah	4,231,375,320	DAU		1 Perangkat Daerah	5,595,464,020
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD	20 Orang	95,400,000	DAU		20 Orang	126,166,500
x x	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	100%	25,000,000	DAU		100%	27,500,000
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	5 Orang	25,000,000	DAU		5 Orang	27,500,000
x x	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	100%	192,500,000	DAU		100%	218,958,298
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD	2 Paket	10,000,000	DAU		2 Paket	12,500,000
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	10.000 Lbr	10,000,000	DAU		10.000 Lbr	11,500,000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	2 Paket	7,500,000	DAU		2 Paket	8,500,000
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	12 bulan	15,000,000	DAU		12 bulan	16,524,638
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	12 bulan	100,000,000	DAU		12 bulan	112,433,660
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	1 Paket	50,000,000	DAU		1 Paket	57,500,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	100%	50,000,000	DAU		100%	55,250,000
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	2 PC dan 2 Printer	50,000,000	DAU		2 Laptop dan 2 Printer	55,250,000
x x	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	100%	354,865,000	DAU		100%	459,456,338

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
	X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	DPMD	12 bulan	20,000,000	DAU		12 bulan	26,450,000
	X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	DPMD	12 bulan	40,000,000	DAU		12 bulan	46,221,375
	X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	1 Paket	15,265,000	DAU		1 Paket	20,187,963
	X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	DPMD	12 bulan	279,600,000	DAU		12 bulan	366,597,000
x x	X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DPMD	100%	91,450,000	DAU		100%	120,942,625
	X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di perbaiki	DPMD	3 Unit	91,450,000	DAU		3 Unit	120,942,625
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
5 03 2 13 02		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase nagari yang tertata	DPMD	100%	145,053,000	DAU		100%	171,195,093
5 03 2 13 02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari	DPMD	100%	145,053,000	DAU		100%	171,195,093
5 03 2 13 02	2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Terlaksananya pemekaran Nagari, Penyusunan Kewenangan Nagari dan Pilwana	DPMD	5 Nagari	75,000,000	DAU		5 Nagari	80,000,000
5 03 2 13 02	2.01 02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Nagari yang ditetapkan batas wilayahnya	DPMD	5 Nagari	25,000,000	DAU		5 Nagari	33,062,500
5 03 2 13 02	2.01 04	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Nagari yang memiliki Kode Nagari	DPMD	5 Nagari	20,000,000	DAU		5 Nagari	25,000,000
5 03 2 13 02	2.01 06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Nagari yang memiliki Sarana dan Prasarana yang layak	DPMD	5 Nagari	25,053,000	DAU		10 Nagari	33,132,593
5 03 2 13 03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	DPMD	100%	55,000,000	DAU		100%	61,000,000
5 03 2 13 03	2.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Persentase Nagari yang menjalin kerjasama antar Nagari	DPMD	100%	55,000,000	DAU		100%	61,000,000
5 03 2 13 03	2.01 01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Nagari	DPMD	4 Nagari	30,000,000	DAU		6 Nagari	35,000,000
5 03 2 13 03	2.01 02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari yang menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga	DPMD	4 Nagari	25,000,000	DAU		6 Nagari	26,000,000
5 03 2 13 04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	DPMD	100%	546,831,844	DAU		100%	693,368,755
	2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	DPMD	100%	546,831,844	DAU		100%	693,368,755
	2 13 04 2.01 02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum desa yang telah disahkan	DPMD	5 Dok	35,000,000	DAU		5 Dok	44,634,375
5 03 2 13 04	2.01 03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Petencanaan	DPMD	2 dok	40,000,000	DAU		2 dok	52,222,880
5 03 2 13 04	2.01 04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan ditingkat Nagari	DPMD	4 dok	125,000,000	DAU		4 dok	129,340,500
5 03 2 13 04	2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Nagari yang diawasi Regulasi Nagarinya	DPMD	40 Nagari	41,000,000	DAU		60 Nagari	54,222,500
5 03 2 13 04	2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Nagari yang memiliki BUM Nag	DPMD	77 Nagari	25,000,000	DAU		77 Nagari	28,830,500
5 03 2 13 04	2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pilwana yang diselenggarakan	DPMD	30 Nagari	50,000,000	DAU		35 Nagari	75,250,000
5 03 2 13 04	2.01 10	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Nagarnya	DPMD	103 Nagari	20,000,000	DAU		103 Nagari	22,150,000
5 03 2 13 04	2.01 11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Profil Desa	DPMD	15 Nagari	25,000,000	DAU		15 Nagari	33,062,500

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
5	03	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang memiliki pengelolaan Aset kategori Baik	DPMD	45 Nagari	20,000,000	DAU		55 Nagari	26,450,000
5	03	2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Nagari yang telah dibina Anggota BPDnya	DPMD	75 Nagari	145,831,844	DAU		75 Nagari	204,061,750
5	03	2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	20 Nagari	20,000,000	DAU		25 Nagari	23,143,750
5	03	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	DPMD	100%	995,000,000	DAU		100%	1,296,600,782
5	03	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	DPMD	103 Nagari	995,000,000	DAU		103 Nagari	1,296,600,782
		2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah hukum adat Nagari yang dibina	DPMD	25 KAN	20,000,000	DAU		30 KAN	26,448,678
5	03					02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Nagari dengan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	20 Nagari	20,000,000	DAU		25 Nagari	25,126,178
5	03	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Nagari yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	DPMD	55 Nagari	45,000,000	DAU		65 Nagari	59,442,144
5	03					04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Nagari yang memiliki sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang layak	DPMD	15 Nagari	50,000,000	DAU		20 Nagari	64,802,368
		2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Nagari yang dengan UEM aktif	DPMD	25 Nagari	50,000,000	DAU		25 Nagari	66,124,868
		2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Nagari yang telah memanfaatkan TTG	DPMD	10 Nagari	30,000,000	DAU		15 Nagari	32,575,000
5	03					07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah BBGRM yang diadakan	DPMD	20 Nagari	30,000,000	DAU		25 Nagari	31,250,000
		2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan TP-PKK yang difasilitasi	DPMD	12 bulan	750,000,000	DAU		12 bulan	990,831,548
Jumlah														8,885,726,357	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BAPELITBANGDA			6,810,224,268				11,193,230,458		
X	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Pariaman	100%	4,952,982,241	DAU		100%	6,236,330,458
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A				A	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
5	01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	90,000,000	DAU		94%	105,000,000
5	01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	6 Dokumen	50,000,000	DAU		6 Dokumen	55,000,000
5	01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Pariaman	4 Dokumen	40,000,000	DAU		4 Dokumen	50,000,000
5	01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	3,538,165,668			100%	4,346,730,458
5	01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Padang Pariaman	14 Bulan	3,393,165,668	DAU		14 Bulan	4,105,730,458
5	01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang Pariaman	12 Bulan	135,000,000	DAU		12 Bulan	230,000,000
5	01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang Pariaman	2 Laporan	10,000,000	DAU		2 Laporan	11,000,000
5	01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	117,500,000			94%	277,500,000
5	01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	35 Stel	17,500,000	DAU		35 Orang	17,500,000
5	01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang Pariaman	2 Orang	20,000,000	DAU		4 Orang	40,000,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	Padang Pariaman	60 Orang	80,000,000	DAU		60 Orang	180,000,000
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	288,000,000			100%	317,100,000
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Padang Pariaman	200 Buah	10,000,000	DAU		200 Buah	10,000,000
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	6 Unit	70,000,000	DAU		6 Unit	70,000,000
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan Peralatan kebersihan kantor	Padang Pariaman	200 Buah	12,000,000	DAU		200 Buah	12,000,000
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Padang Pariaman	1800 Exemplar	11,000,000	DAU		1800 Exemplar	12,100,000
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Padang Pariaman	600 porsi/Kotak	30,000,000	DAU		700 porsi/Kotak	25,000,000
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Padang Pariaman	1.050 Orang Hari	155,000,000	DAU		1.050 Orang Hari	188,000,000
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Padang Pariaman	82%	240,000,000			84%	470,000,000
5	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Padang Pariaman	2 Unit R2	60,000,000	DAU		1 Unit R4	350,000,000
5	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Padang Pariaman	6 Paket	30,000,000	DAU		2 Paket	40,000,000
5	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Pariaman	1 Unit Genset	150,000,000	DAU		2 Unit TV LED 64'	30,000,000
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	498,200,000			100%	555,000,000
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan	Padang Pariaman	500 Arsip surat	25,000,000	DAU		500 Arsip surat	25,000,000
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Padang Pariaman	12 Tagihan/ Tahun	130,000,000	DAU		12 Tagihan / Tahun	150,000,000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	80 Unit	30,000,000	DAU		80 Unit	30,000,000
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Padang Pariaman	14 Orang	313,200,000	DAU		14 Orang	350,000,000
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Padang Pariaman	100%	181,116,573			100%	165,000,000
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	10 Unit	91,116,573	DAU		12 Unit	90,000,000
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Padang Pariaman	1 Gedung/Tahun	50,000,000	DAU		1Gedung/Tahun	40,000,000
5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Padang Pariaman	45 Unit/Tahun	40,000,000	DAU		45 Unit/Tahun	35,000,000
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan	Padang Pariaman	100%	944,242,027			100%	1,407,000,000
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu	Padang Pariaman	100%	780,000,000			100%	1,090,000,000
5	01	02	2	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pendampingan Kegiatan DAK N+1	Padang Pariaman	1 Laporan	50,000,000	DAU		1 Laporan	50,000,000
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Forum Konsultasi Publik	Padang Pariaman	1 Forum	60,000,000	DAU		1 Forum	60,000,000
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Padang Pariaman	1 Laporan	80,000,000	DAU		1 Laporan	80,000,000
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kec dan Kab	Padang Pariaman	1 Laporan	80,000,000	DAU		1 Laporan	80,000,000
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJPD, Dok Ranc Teknokratik RPJMD) Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen RRPD Perubahan	Padang Pariaman	2 Dokumen (RKPD, RRPD Perubahan)	510,000,000	DAU		3 Dokumen (Ranc Teknokratik RPJMD, RKPD, RRPD Perubahan)	800,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	02	2	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan database yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan	Padang Pariaman	85%	94,242,027			90%	171,800,000
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data-informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Padang Pariaman	1 Dok Thn 2022	44,242,027	DAU	1 Dok Thn 2023	48,400,000
5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Perangkat daerah dan kec yang mempergunakan Aplikasi SIPD	Padang Pariaman	27 Perangkat Daerah, 17 kec	50,000,000	DAU	27 Perangkat Daerah, 17 kec	75,000,000
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	persentase pencapaian target sasaran program pada dokumen perencanaan	Padang Pariaman	85%	70,000,000		90%	145,200,000
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi RPJMD, Dokumen Evaluasi RKPD	Padang Pariaman	2 Dokumen	70,000,000	DAU	2 Dokumen	145,200,000
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Padang Pariaman	92%	553,000,000		93%	1,439,900,000
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Padang Pariaman	100%	252,000,000		100%	544,500,000
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Padang Pariaman	8 Perangkat Daerah	50,000,000	DAU	8 Perangkat Daerah	121,000,000
5	01	03	2	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan dokumen pendukung Bidang Pemerintahan	Padang Pariaman	8 Dokumen Renja	20,000,000	DAU	8 Dokumen Renja	36,300,000
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Padang Pariaman	8 Perangkat Daerah	30,000,000	DAU	8 Perangkat Daerah	60,500,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5	01	03	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Padang Pariaman	8 Perangkat Daerah	22,000,000	DAU		8 Perangkat Daerah	24,200,000
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembagunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Padang Pariaman	9 Perangkat Daerah	50,000,000	DAU		9 Perangkat Daerah	121,000,000
5	01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Pendukung Bidang Pembangunan Manusia	Padang Pariaman	9 Dokumen Renja	20,000,000	DAU		9 Dokumen Renja	96,800,000
5	01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Padang Pariaman	9 Perangkat Daerah	30,000,000	DAU		9 Perangkat Daerah	36,300,000
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Padang Pariaman	9 Perangkat Daerah	30,000,000	DAU		9 Perangkat Daerah	48,400,000
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Padang Pariaman	100%	130,000,000			100%	459,800,000
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembagunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Padang Pariaman	6 Perangkat Daerah	50,000,000	DAU		6 Perangkat Daerah	121,000,000
5	01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Pendukung Bidang Perekonomian dan SDA	Padang Pariaman	6 Dokumen Renja	20,000,000	DAU		6 Dokumen Renja	36,300,000
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Padang Pariaman	6 Perangkat Daerah	30,000,000	DAU		6 Perangkat Daerah	36,300,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5	01	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Padang Pariaman	6 Perangkat Daerah	30,000,000	DAU		6 Perangkat Daerah	36,300,000
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Padang Pariaman	100%	171,000,000			100%	435,600,000
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembagunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Padang Pariaman	5 Perangkat Daerah, 17 Kecamatan	75,000,000	DAU		5 Perangkat Daerah	121,000,000
5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Pendukung Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Padang Pariaman	5 Dokumen Renja 17 Dok Renja Kec	33,000,000	DAU		5 Dokumen Renja	36,300,000
5	01	03	2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Padang Pariaman	5 Perangkat Daerah 17 Kecamatan	30,000,000	DAU		5 Perangkat Daerah	60,500,000
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Padang Pariaman	5 Perangkat Daerah 17 Kecamatan	33,000,000	DAU		5 Perangkat Daerah	36,300,000
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Padang Pariaman	70%	360,000,000			75%	2,110,000,000
5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk pembangunan daerah	Padang Pariaman	100%	105,000,000			100%	450,000,000
5	05	02	2	01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Padang Pariaman	1 Dokumen	75,000,000	DAU		0	0
5	05	02	2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah yang Disusun	Padang Pariaman	1 Dokumen	30,000,000	DAU		1 Dokumen	50,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5	05	02	2	02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah	Padang Pariaman	100%	50,000,000					
5	05	02	2	02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Padang Pariaman	1 Dokumen	50,000,000	DAU		0	0
5	05	02	2	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Ekonomi dan pembangunan daerah	Padang Pariaman	100%	75,000,000			100%	200,000,000	
5	05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Padang Pariaman	1 Dokumen	75,000,000	DAU		0	0
5	05	02	2	04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Padang Pariaman	100%	130,000,000			100%	660,000,000	
5	05	02	2	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Pembinaan Inovasi Daerah	Padang Pariaman	100 Inovasi	80,000,000	DAU		120 Inovasi	150,000,000
5	05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Inovasi yang dilaksanakan Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Padang Pariaman	1 Kali	50,000,000	DAU		1 Kali	160,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN			209,419,468,852				222,343,690,628.85			
5	02	KEUANGAN										
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	BPKD	100%	11,048,126,837	DAU	100%	11,600,533,178.85		
						A			A			
						100%			100%			
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	BPKD	100%	205,548,750	DAU	100%	215,826,187.50	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra	BPKD	1 dokumen	38,748,750	DAU	1 dokumen	40,686,187.50
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	BPKD	1 dokumen	30,000,000	DAU	1 dokumen	31,500,000.00
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	BPKD	1 dokumen	30,000,000	DAU	1 dokumen	31,500,000.00
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA	BPKD	1 dokumen	30,000,000	DAU	1 dokumen	31,500,000.00
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	BPKD	1 dokumen	30,000,000	DAU	1 dokumen	31,500,000.00
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	BPKD	30 dokumen	46,800,000	DAU	30 dokumen	49,140,000.00
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKD	100%	8,607,124,567	DAU	100%	9,037,480,795.35	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	BPKD	1 Perangkat Daerah	8,255,964,567	DAU	1 Perangkat Daerah	8,668,762,795
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	BPKD	12 bulan	351,160,000	DAU	12 bulan	368,718,000
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	BPKD	100%	46,350,000	DAU	100%	48,667,500.00	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	80 Orang	30,000,000	DAU	80 Orang	31,500,000.00
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	BPKD	80 Orang	16,350,000	DAU	80 Orang	17,167,500.00
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BPKD	100%	257,151,200	DAU	100%	270,008,760.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKD	1 tahun	9,082,000	DAU		1 tahun	9,536,100.00
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	BPKD	1 tahun	14,793,200	DAU		1 tahun	15,532,860.00
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKD	10 eksemplar	14,000,000	DAU		10 eksemplar	14,700,000.00
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	BPKD	1 tahun	14,760,000	DAU		1 tahun	15,498,000.00
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	BPKD	1 tahun	204,516,000	DAU		1 tahun	214,741,800.00
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	BPKD	100%	19,755,000	DAU		100%	20,742,750.00
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD	20 unit	19,755,000	DAU		20 unit	20,742,750.00
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	100%	1,688,845,600	DAU		100%	1,773,287,880.00
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	BPKD	1 tahun	188,845,600	DAU		1 tahun	198,287,880
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	BPKD	1 tahun	175,800,000	DAU		1 tahun	184,590,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	BPKD	1 tahun	1,324,200,000	DAU		1 tahun	1,390,410,000
		Jumlah kendaraan operasional yang disewa		8 Kendaraan				8 kendaraan	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPKD	100%	223,351,720	DAU		100%	234,519,306.00
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	16 kendaraan	127,463,000	DAU		16 kendaraan	133,836,150.00
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	BPKD	1 tahun	55,998,720	DAU		1 tahun	58,798,656.00
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	BPKD	1 tahun	39,890,000	DAU		1 tahun	41,884,500.00
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	BPKD	30-Nov-22	196,645,879,315	DAU		30-Nov-23	208,931,421,615.00
		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat		100%				100%	
		Persentase kualitas laporan keuangan daerah		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
														8
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah	BPKD	100%	1,365,213,000	DAU		100%	1,433,473,650.00
5	02	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	BPKD	2 Dokumen	50,000,000	DAU		2 Dokumen	52,500,000.00
5	02	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKD	2 Dokumen	50,000,000	DAU		2 Dokumen	52,500,000.00
5	02	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	BPKD	44 OPD	50,000,000	DAU		44 OPD	52,500,000.00
5	02	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	BPKD	44 OPD	50,000,000	DAU		44 OPD	52,500,000.00
5	02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	BPKD	44 OPD	32,909,000	DAU		44 OPD	34,554,450.00
5	02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	BPKD	44 OPD	24,758,000	DAU		44 OPD	25,995,900.00
5	02	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD	BPKD	2 Dokumen	952,791,000	DAU		2 Dokumen	1,000,430,550.00
5	02	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD perubahan	BPKD	2 Dokumen	100,000,000	DAU		2 Dokumen	105,000,000.00
5	02	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	BPKD	2 dokumen	54,755,000	DAU		2 dokumen	57,492,750.00
5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah	BPKD	100%	630,000,000	DAU		100%	661,500,000.00
5	02	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah	BPKD	48 kali	110,000,000	DAU		48 kali	115,500,000.00
					Jumlah dokumen kerjasama dengan Bank		4 dokumen		4 dokumen					
					Jumlah koordinasi jumlah aplikasi SP2D online		1 aplikasi		1 aplikasi					
					Jumlah pengajuan BKK prov		1 dokumen		1 dokumen					
					Jumlah laporan BKK prov		1 dokumen		1 dokumen					
5	02	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan dengan anggaran kas belanja	BPKD	800 dokumen	55,000,000	DAU		800 dokumen	57,750,000.00
5	02	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan	BPKD	8000 dokumen	75,000,000	DAU		8000 dokumen	78,750,000.00
					Jumlah daftar penguji SP2D yang diterbitkan		800 dokumen		800 dokumen					
					Jumlah dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan benar		8000 dokumen		8000 dokumen					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
										1	2	3	4
		Jumlah SKPP yang diterbitkan sesuai dengan data PNS pensiun dan pindah keluar		300 dokumen				300 dokumen					
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi dana DAK fisik	BPKD	111 dokumen	80,000,000	DAU		111 dokumen	84,000,000.00
						Jumlah laporan realisasi dana DAK Non fisik		32 dokumen				32 dokumen	
						Jumlah laporan realisasi DID		4 dokumen				4 dokumen	
						Jumlah laporan realisasi DBH		24 dokumen				24 dokumen	
						Jumlah laporan DAU		12 dokumen				12 dokumen	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melakukan transaksi non tunai	BPKD	100 %	55,000,000	DAU		100 %	57,750,000.00
						Jumlah dokumen perbup tentang transaksi non tunai		1 dokumen				1 dokumen	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi pemungutan/pemotongan PFK	BPKD	12 dokumen	40,000,000	DAU		12 dokumen	42,000,000.00
						Jumlah dokumen penyetoran PFK		144 dokumen				144 dokumen	
						Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi PFK		12 kali				12 kali	
						Jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		12 dokumen				12 dokumen	
						Jumlah laporan aliran kas		12 dokumen				12 dokumen	
						Jumlah penerbitan SKPP		300 dokumen				300 dokumen	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah	BPKD	25 kali	50,000,000	DAU		25 kali	52,500,000.00
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas	BPKD	12 dokumen	50,000,000	DAU		12 dokumen	52,500,000.00
						Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi tunjangan guru		3 kali				3 kali	
						Jumlah rekonsiliasi penerimaan dan penyerapan dana DAK non isik dengan instansi terkait		32 kali				32 kali	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan	BPKD	2 dokumen	50,000,000	DAU		2 dokumen	52,500,000.00
						Jumlah sosialisasi petunjuk teknis administrasi keuangan		2 kali				2 kali	
						Jumlah SK penatausahaan keuangan		8 dokumen				8 dokumen	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya aplikasi pengelolaan data gaji	BPKD	1 aplikasi	65,000,000	DAU		1 aplikasi	68,250,000.00
						Jumlah bendahara gaji yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMgaji		91 orang				91 orang	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	2	3	4		5	6
		Jumlah tersedianya data gaji yang akurat secara elektronik		6.040 orang				6.040 orang	
		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis kepada bendahara		44 OPD				44 OPD	
5	02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	100%	625,405,000	DAU		100%	656,675,250.00
5	02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKD	44 dokumen	40,000,000	DAU		44 dokumen	42,000,000.00
5	02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKD	16 dokumen	40,000,000	DAU		16 dokumen	42,000,000.00
5	02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD	100 %	120,000,000	DAU		100 %	126,000,000.00
		Jumlah laporan keuangan BLUD		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah laporan keuangan SKPKD		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		1 dokumen				1 dokumen	
5	02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKD	1 dokumen	150,000,000	DAU		1 dokumen	157,500,000.00
		Jumlah dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 dokumen				1 dokumen	
5	02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	1 kali	20,000,000	DAU		1 kali	21,000,000.00
5	02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKD	1 dokumen	65,000,000	DAU		1 dokumen	68,250,000.00
5	02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD	1 dokumen	40,405,000	DAU		1 dokumen	42,425,250.00
5	02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	44 OPD	150,000,000	DAU		44 OPD	157,500,000.00
5	02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	100%	193,876,562,315	DAU		100%	206,023,638,765.00
5	02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	103 nagari	177,689,084,815	DAU		103 nagari	189,026,787,390.00
5	02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	100%	10,049,977,000	DAU		100%	10,552,475,850.00
5	02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKD	103 nagari	6,137,500,500	DAU		103 nagari	6,444,375,525.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
														4
5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah	BPKD	100%	148,699,000	DAU		100%	156,133,950.00
5	02	02	2.05	02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang meningkat kualitas pengguna SIPD	BPKD	44 OPD	148,699,000	DAU		44 OPD	156,133,950.00
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	BPKD	100%	575,614,700	DAU		100%	604,395,435.00
						Persentase BMD yang memanfaatkan dengan tepat	100%							
						Persentase BMD yang tertib	65%							
5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	BPKD	1 dokumen	575,614,700	DAU		1 dokumen	604,395,435.00
5	02	03	2.01	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga yang sesuai dengan kondisi pasar	BPKD	1 dokumen	150,000,000	DAU		1 dokumen	157,500,000.00
5	02	03	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan OPD yang terorganisir dengan baik	BPKD	1 dokumen	10,302,000	DAU		1 dokumen	10,817,100.00
5	02	03	2.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang yang terinventarisir	BPKD	70 %	36,800,000	DAU		70 %	38,640,000.00
5	02	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengamanan aset secara administrasi dan fisik	BPKD	70 %	20,000,000	DAU		70 %	21,000,000.00
5	02	03	2.01	08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	BPKD	2 Dokumen	50,000,000	DAU		2 Dokumen	52,500,000.00
5	02	03	2.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang terkoordinir BMD secara administrasi dan fisik	BPKD	44 OPD	54,604,700	DAU		44 OPD	57,334,935.00
5	02	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang terlaksananya penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	44 OPD	87,118,000	DAU		44 OPD	91,473,900.00
5	02	03	2.01	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekon penyusunan laporan BMD	BPKD	44 OPD	19,315,000	DAU		44 OPD	20,280,750.00
5	02	03	2.01	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang tersusun dengan baik	BPKD	1 dokumen	54,840,500	DAU		1 dokumen	57,582,525.00
5	02	03	2.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKD	44 OPD	92,634,500	DAU		44 OPD	97,266,225.00
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	BPKD	95%	1,149,848,000	PAD, DBHCHT		95%	1,207,340,400.00
						Persentase Pencapaian Target PAD	100%							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	BPKD	1 dokumen	1,149,848,000	PAD, DBHCHT		1 dokumen	1,207,340,400.00
						Persentase Penerimaan PAD		100%				100%	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPKD	1 Dokumen	50,000,000	PAD		1 Dokumen	52,500,000.00
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah perda dan perbup tentang pajak dan retribusi yang disahkan	BPKD	2 Dokumen	11,113,000	PAD		2 Dokumen	11,668,650.00
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	BPKD	1 kali	49,845,000	DBHCHT		1 kali	52,337,250.00
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi sistem online pajak daerah (SOPD) yang dibuat	BPKD	2 Aplikasi	50,000,000	PAD		2 aplikasi	52,500,000.00
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data wajib pajak yang diinventarisir dan di update	BPKD	1 tahun	193,200,000	PAD		1 tahun	202,860,000.00
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB yang dinilai dan dimutakhirkan	BPKD	100 objek pajak	115,535,000	PAD		100 objek pajak	121,311,750.00
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT, DHKP dan SKP yang dicetak	BPKD	103 Nagari	70,000,000	PAD		103 Nagari	73,500,000.00
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilayani	BPKD	17 Kecamatan	50,000,000	PAD		17 Kecamatan	52,500,000.00
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pajak yang diverifikasi dan dimonitoring valid	BPKD	1 tahun	60,000,000	PAD		1 tahun	63,000,000.00
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi pemungutan PAD	BPKD	100 %	381,605,000	PAD		100 %	400,685,250.00
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKD	100%	50,000,000	PAD		100%	52,500,000.00
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi di keca	BPKD	17 kecamatan	18,550,000	PAD		17 kecamatan	19,477,500.00
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah OPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	BPKD	12 OPD	50,000,000	PAD		13 OPD	52,500,000.00

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Padang Pariaman**

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19,403,816,904				21,813,416,356				
5	03	KEPEGAWAIAN											
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,998,496,904.00			100%	15,137,730,356.00				
		Outcome: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah											
		Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			A			A					
		Outcome : Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			100%			100%					
	xx	01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	145,000,000		100%	152,250,000			
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	BKPSDM	6 dokumen	85,000,000	DAU		6 dokumen	89,250,000
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap Capkin, Lap Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun	BKPSDM	5 dokumen	60,000,000	DAU		5 dokumen	63,000,000
	xx	01	2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,111,839,904		100%	14,184,740,506			
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Selama 14 Bulan	BKPSDM	60 PNS + 114 CPNS + 53 CPNS 2022	11,949,319,904	DAU		60 PNS + 53 CPNS + 114 CPNS 2023	13,987,844,506
		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola administrasi keuangan yg dibayarkan	BKPSDM	23 orang	107,520,000	DAU		23 orang	112,896,000
		01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi Keuangan BKPSDM	BKPSDM	3 Dokumen		DAU		3 Dokumen	15,750,000
		01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDM	3 Laporan		DAU		3 Laporan	10,500,000
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	BKPSDM	4 Laporan	45,000,000	DAU		4 Laporan	47,250,000
		01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Jenis Laporan, Tanggapan, Pemeriksaan BKPSDM	BKPSDM	5 Laporan	5,000,000	DAU		5 Laporan	5,250,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan BKPSDM	BKPSDM	4 Laporan	5,000,000	DAU		4 Laporan	5,250,000
	xx	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	BKPSDM	80%	60,000,000			82%	75,000,000
		01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasaran untuk Peningkatan Disiplin	BKPSDM	5 Paket		DAU		5 Paket	0
		01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	60 Orang		DAU		60 Orang	0
		01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPSDM	60 Dokumen		DAU		60 Dokumen	0
		01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	4 kali		DAU		4 kali	0
		01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM	12 Kali		DAU		12 Kali	0
		01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	BKPSDM	5 Orang		DAU		5 Orang	0
		01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	BKPSDM	3 Orang		DAU		3 Orang	0
		01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah SK Pemindahan Tugas ASN	BKPSDM	5 SK		DAU		5 SK	0
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara BKPSDM yang Mengikuti Kursus dan Diklat singkat	BKPSDM	10 Orang	30,000,000	DAU		10 Orang	35,000,000
		01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	BKPSDM	40 Orang	10,000,000	DAU		40 Orang	15,000,000
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	40 Orang	20,000,000	DAU		40 Orang	25,000,000
	xx	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	146,000,000	DAU		100%	163,300,000
		01	2.06	01	Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan	BKPSDM	12 Bulan	15,000,000	DAU		12 Bulan	15,750,000
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana	BKPSDM	5 Unit	15,000,000	DAU		5 Unit	15,750,000
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun	BKPSDM	4000 Lembar		DAU		4000 Lembar	10,000,000
		01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan	BKPSDM	3 Eksemplar	3,000,000	DAU		3 Eksemplar	3,150,000
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	BKPSDM	285 Porsi	8,000,000	DAU		285 Porsi	8,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	166 Orang	100,000,000	DAU		166 Orang	105,000,000
	01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	25 Arsip	5,000,000	DAU		25 Arsip	5,250,000
xx	01 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		82%	119,457,000			84%	125,429,850
xx	01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	1 unit	0	DAU		1 unit	0
			BKPSDM	1 unit	35,000,000	DAU		1 unit	36,750,000
xx	01 2.07 05	Pengadaan Meubel	BKPSDM	3 paket		DAU		3 paket	0
	01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	2 Unit		DAU		2 Unit	0
	01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BKPSDM	2 Unit		DAU		2 Unit	0
	01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BKPSDM	2 Paket		DAU		3 Paket	0
	01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	1 Unit		DAU		1 Unit	0
xx	01 2.07 10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	BKPSDM	6 paket + 3 unit laptop + 2 unit komputer = 11 Paket	84,457,000	DAU		6 paket + 3 unit laptop + 2 unit komputer = 11 Paket	88,679,850
xx	01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	326,200,000			100%	342,510,000
xx	01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	4 Paket/Le mbar	27,000,000	DAU		4 Paket/Lemb ar	28,350,000
			BKPSDM	500 Dokumen	23,000,000	DAU		500 Dokumen	24,150,000
xx	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	12 bulan	3,000,000	DAU		12 bulan	3,150,000
xx	01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan perlengkapan Kantor	BKPSDM	4 Kali	17,000,000	DAU		4 Kali	17,850,000
xx	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	12 orang / 12 bulan	228,000,000	DAU		12 orang / 12 bulan	239,400,000
			BKPSDM	1 orang / 12 Bulan	25,200,000	DAU		2 orang / 12 Bulan	26,460,000
			BKPSDM	12 Bulan	3,000,000	DAU		12 Bulan	3,150,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	03	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	90,000,000			100%	94,500,000	
	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	BKPSDM	6 Unit	75,000,000	DAU		6 Unit	78,750,000	
	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	10 Unit		DAU		10 Unit	0	
	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	2 Unit		DAU		2 Unit	0	
	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	1 Gedung/Tahun		DAU		1 Gedung/Tahun	0	
	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	20 Unit/Tahun	15,000,000	DAU		20 Unit/Tahun	15,750,000	
	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	12 bulan		DAU		12 bulan	0	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Outcome: Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek		93%	3,917,320,000			93%	4,113,686,000	
					Outcome: Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	BKPSDM	92%					92%		
					Outcome: Parsentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan		75%					75%		
					Outcome: Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN		73%					73%		
5	03	02	2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		82%	2,034,320,000			84%	2,136,036,000	
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah SOP Pengadaan ASN	BKPSDM	1 Perbup	0	DAU		1 Perbup	15,000,000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan formasi Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Usulan Formasi	BKPSDM	1 Formasi	78,000,000	DAU		1 Formasi	81,900,000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pengadaan CPNS	BKPSDM	300 Orang	1,636,320,000	DAU		300 Orang	1,718,136,000	
					Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu,150 SK CPNS,165 SK PNS,150 SK PPPK	465 SK		465 SK						
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan proses pengadaan ASN	BKPSDM	1 Laporan		DAU		1 Laporan	15,000,000	
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah SOP Pemberhentian ASN	BKPSDM	1 Perbup		DAU		1 Perbup	15,000,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian ASN	BKPSDM	220 SK	70,000,000	DAU		220 SK	73,500,000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah laporan Proses Pemberhentian ASN	BKPSDM	1 Laporan		DAU		1 Laporan	15,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan KORPRI yang terselenggara	BKPSDM	2 Kegiatan	40,000,000	DAU		2 Kegiatan	42,000,000
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah SOP Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPSDM	1 Perbup		DAU		1 Perbup	15,000,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara kontinue	BKPSDM	6058 ASN	150,000,000	DAU		6058 ASN	157,500,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	BKPSDM	300 Kartu	60,000,000	DAU		300 Kartu	63,000,000
					Jumlah arsip kepegawaian kab. padang pariaman yg terkelola	6372 ASN		6372 ASN					
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Laporan		DAU		1 Laporan	15,000,000
5	03	02	2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		83%	550,000,000			86%	577,500,000
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam,50 SK Penempatan,50 SK Melepas , 50 SK Menerima)	BKPSDM	1500 SK Pelaksana, 150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan,dan 50 SK Melepas,50 SK Menerima	85,000,000	DAU		1500 SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan ,dan 50 SK Melepas,50 SK Menerima	89,250,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	BKPSDM	500 SK	55,000,000	DAU		500 SK	57,750,000
						Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	BKPSDM	800 SK	60,000,000	DAU		800 SK	63,000,000
						Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	BKPSDM	80 Orang	50,000,000	DAU		80 Orang	52,500,000
5	03	02	2.02	04	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN	BKPSDM	4 Kali	100,000,000	DAU		4 Kali	105,000,000
						Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	BKPSDM	3 Kali	200,000,000	DAU		3 Kali	210,000,000
5	03	02	2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		86%	608,000,000			88%	666,400,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural	BKPSDM	30 Orang	150,000,000	DAU		30 Orang	170,000,000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Pelaksanaan Assessment Centr bagi ASN Kab. Padang Pariaman	BKPSDM	2 Kali	198,000,000	DAU		2 Kali	207,900,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK tubel dan izin belajar yang diterbitkan	BKPSDM	50 SK	60,000,000	DAU		50 SK	66,000,000
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Jabatan	BKPSDM	5 Orang		DAU		6 Orang	0
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Jabatan	BKPSDM	5 Orang		DAU		5 Orang	0
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan	BKPSDM	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	0
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	BKPSDM	25 Orang	150,000,000	DAU		25 Orang	170,000,000
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	5 Orang		DAU		5 Orang	0
5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah DokumenEvaluasi Diklat & Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	0
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah SK penetapan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir dan pemberhentian Jabatan fungsional PNS	BKPSDM	500 SK	50,000,000	DAU		500 SK	52,500,000
5	03	02	2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur		85%	725,000,000			86%	733,750,000
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	BKPSDM	2 Perbup	110,000,000	DAU		2 Perbup	115,500,000
						Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi	BKPSDM	40 Orang		DAU		40 Orang	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Terlaksananya Penilaian Kinerja Online yang Terintegrasi dengan SAPK/SIASN	BKPSDM	6057 Orang		DAU		6057 Orang	0
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan	BKPSDM	4000 PAK	75,000,000	DAU		4000 PAK	78,750,000
						Jumlah ASN yang terukur Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	920 Orang	30,000,000	DAU		920 Orang	31,500,000
						Jumlah ASN yg penilaian kerjanya secara online	BKPSDM	6057 Orang	320,000,000	DAU		6057 Orang	336,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya	BKPSDM	200 Orang	60,000,000	DAU		200 Orang	63,000,000
						Jumlah Fasilitasi Pemberian TPP	BKPSDM	6057 ASN		DAU		6057 ASN	
						Jumlah Sertifikat Penghargaan kepada ASN pensiun	BKPSDM	220 SK		DAU		220 SK	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Tanda Jasa yang Diberikan	BKPSDM	220 Pin		DAU		220 Pin	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah LaporanPemberian Penghargaan dan Tanda Jasa ASN	BKPSDM	1 Laporan		DAU		1 Laporan	0
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Monitoring dan Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	4 Laporan	50,000,000	DAU		4 Laporan	52,500,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN yg tertangani	BKPSDM	5 Kasus	50,000,000	DAU		5 Kasus	25,000,000
						Jumlah pelaksanaan sidang MPP	BKPSDM	4 Kali		DAU		4 Kali	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah pembinaan perkawinan dan perceraian ASN yg dilaksanakan	BKPSDM	10 Kasus	30,000,000	DAU		10 Kasus	31,500,000
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM	2 Laporan		DAU		2 Laporan	0
					2,488,000,000							2,562,000,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN		90%	2,488,000,000			90%	2,562,000,000
5	04	02	2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis		92%	190,000,000			93%	212,000,000
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti Dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen,Perangkat Daerah Penunjang,Dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	1 Dokumen	40,000,000	DAU		1 Dokumen	42,000,000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi , Teknis Umum,Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yg mengikuti Diklat Teknis	BKPSDM	30 Orang	150,000,000	DAU		30 Orang	170,000,000
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	BKPSDM	1 Laporan		DAU		1 Laporan	0
5	04	02	2.02		Sertifikasi, kelembagaan, kompetensi manejerial dan fungsional	Persentase Terlaksananya Sertifikasi, kelembagaan, kompetensi manejerial dan fungsional		92%	2,298,000,000			93%	2,350,000,000
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional.	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi ASN	BKPSDM	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	0
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi	BKPSDM	20 Orang		DAU		25 Orang	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
5	03	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yg mengikuti diklat prajabatan CPNS Gol II dan III	BKPSDM	60 Orang	2,298,000,000	DAU		100 Orang	2,350,000,000
				Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan penjurangan struktural kepemimpinan		BKPSDM	43 orang	DAU			43 orang		
				Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional		BKPSDM	26 Orang	DAU			26 Orang		

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERANGKAT DAERAH: **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	7	8	11			
1 05	Urusan Pemerintah Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Perlindungan Masyarakat		Pagu					
				Total	7,459,772,170			8,023,873,667	
X XX	BELANJA RUTIN			Sisa					
X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	BPBD	100%	6,029,772,170			100%	
		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat	BPBD	BB				A	
		Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti	BPBD	100%				100%	
X XX 01 2.01	Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penggagaran Perangkat Daerah	BPBD	92%	75,000,000	DAU			
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKA P, DPA P, PK Perangkat daerah	BPBD	6 Dokumen	40,000,000	DAU			
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (laporan keuangan, LAKIP, LPPD, laporan realisasi anggaran dan kinerja perbulan) yang disusun	BPBD	4 Dokumen	35,000,000	DAU			
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	100%	3,854,538,022	DAU			
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	BPBD	1 Tahun	3,770,898,022	DAU			
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan	BPBD	12 Bulan	83,640,000	DAU			
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		92%	-				
X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan	Jumlah Aparatur BPBD yang mengikuti Bimtek,Sosialisasi, dan Workshop	BPBD	10 orang/12 bulan		DAU			
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	278,413,148				
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	BPBD	100 Buah	5,000,000	DAU			
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	1 Paket (1 Unit Laptop dan Perangkatnya)		DAU			
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BPBD	Buah	10,000,000	DAU			
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan surat Kabar dan Buku Perundang- undangan yang disediakan	BPBD	Eksemplar	8,000,000	DAU			
X XX 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat Kantor yang disediakan	BPBD	285 Porsi	10,000,000	DAU			
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	BPBD	500 Orang	245,413,148	DAU			
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		82%	-				
X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dians atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	1 Unit Kendaraan Roda 2 (Kasubag Program)		DAU			
X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor (Meja, Kursi kerja,Lemari Arsip,dll)	BPBD	10 Meja dan Kursi Kerja serta 5 Unit lemariArsip		DAU			
X XX 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Unit AC dan CCTV		DAU			
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daera		100%	1,616,821,000				
X XX 01 2.08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip Surat Yang diarsipkan	BPBD	200 Arsip Surat	25,000,000	DAU			
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik yang disediakan	BPBD	12 Tagihan / Thn	265,821,000	DAU			
X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki /seervise	BPBD	1 Laptop, 1 Printer	30,000,000	DAU			
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang Tenaga Supir	BPBD	1 orang/12 Bulan		DAU			
		60 Orang Anggota Tim Reaksi Cepat /Tenaga Harian Lepas	BPBD	60 orang/12 Bulan	1,296,000,000	DAU			
		Asuransi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	BPBD	61 orang/12 Bulan		DAU			
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	205,000,000				
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	6 Unit / Tahun	75,000,000	DAU			

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	8 Unit / Tahun	60,000,000	DAU				
X	XX	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah emeliharaan peralatan dan mesin lainnya		37 Unit / Tahun (16 EWS, 2 Reapeater, 8 Chainsaw, Pompa portabel pemadam, dll.)	-					
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran untuk Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor	BPBD	1 Gedung/Tahun	40,000,000	DAU				
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Gudang Logistik Kebencanaan	BPBD	9 Unit AC, 15 Unit CCTV, 1 Unit Finger Print, 9 Unit TV / Tahun	30,000,000	DAU				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana		25	1,430,000,000			30 Nagari	5,771,000,000	
						Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana		79%				82%		
						Persentase Relawan yang ikut Pelatihan		24.3%				29.12%		
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan BencanaKabupaten/Kota	Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti		1	135,000,000				
1	05	03	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang terbentuk	BPBD	1 Dokumen		DAU				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah lokasi yang dilaksananya sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi rawan bencana pada masyarakat	BPBD	10 Lokasi	135,000,000	DAU				
						Jumlah terpantaunya lokasi rawan bencana dan tersebarluasnya informasi kebencanaan melalui papan informasi, media cetak dan media elektronik	BPBD	Lokasi		DAU				
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		85%	865,000,000					
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari Tangguh Bencana yang terbentuk	BPBD	1 Nagari	325,000,000	DAU				
						Jumlah biaya operasional pendamping pembentukan Nagari Tangguh Bencana	BPBD	1 Nagari		DAU				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BPBD	5 kali	175,000,000	DAU				
					Jumlah Pelatihan dan Pendidikan Kelompok Siaga Bencana (Peningkatan Kapasitas anggota Kelompok) di Nagari Campago Kec. V Koto Kampung Dalam	BPBD	1 Kali	DAU						
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah operasional kesiapsiagaan Posko bencana yang di laksanakan	BPBD	OPS/ Tahun	10,000,000	DAU				
						Jumlah operasional kesiapsiagaan Anggota TRC yang dilaksanakan	BPBD	OPS/ Tahun		DAU				
						Jumlah operasional dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Ops peralatan / Tahun		DAU				
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan kebencanaan (EWS/Repeater)	BPBD	4 Unit EWS	215,000,000	DAU				
						Jumlah Alat Komunikasi dan Peringatan Dini yang disediakan		4 Unit Radio RIG		DAU				
						Jumlah Peralatan Evakuasi Bencana Masyarakat yang disediakan di Kec. Sungai Limau	BPBD	5 Unit		DAU				
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	BPBD	1 Dokumen		DAU				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Database Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana yang tercatat	BPBD	2000 Rumah	125,000,000	DAU				
						Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Iitu Pasna	BPBD	2 Nagari		DAU				
						Jumlah lokasi bencana yang ditanggulangi		6 Lokasi						
						Jumlah dokumen pembuatan Zonasi kerentanan bangunan terhadap bahaya gempa (400 titik)	BPBD	1 Dokumen			DAU			
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Latihan yang diukiti Tim Reaksi Ceoat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	1 Pelatihan		DAU				
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dibuat	BPBD	1 Dokumen		DAU				
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang dipersiapkan	BPBD	1 Kali	15,000,000	DAU				
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang terbentuk	BPBD	1 Dokumen		DAU				

KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani		100%	415,000,000				
1	05	03	2.03	02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah inovasi/aplikasi tentang kebencanaan di BPBD yang disediakan		inovasi					
1	05	03	2.03	03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian yang ditangani	BPBD	350 Kali Kejadian	400,000,000	DAU			
1	05	03	2.03	04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	Paket	5,000,000	DAU			
1	05	03	2.03	06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah Biaya yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana non alam epidemii/ wabah penyakit	BPBD	Ops	10,000,000	DAU			
1	05	03	2.04	Penataan Sistim Dasar Penanggulangan bencana	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana		100%	15,000,000				
1	05	03	2.04	01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana yang disusun	BPBD	1 Dokumen	15,000,000	DAU			
1	05	03	2.04	02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana	BPBD	1 Kali		DAU			
1	05	03	2.04	03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan kemitraan didalam Penanggulagna bencana	BPBD	12 Bulan		DAU			
1	05	03	2.04	04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistim Informasi Kebencanaan	Persentasi tingkat pengelolaan dan pemanfaatan sistem nformasi kebencanaan	BPBD	75%		DAU			
1	05	03	2.04	05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	BPBD	3 Kegiatan		DAU			

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	100%	1,456,122,606	DAU		100%	1,180,000,000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A			A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%			100%		
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			80,000,000	DAU			
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra, renja	Kesbangpol	2 Dokumen	20,000,000	DAU		2 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	Kesbangpol	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA perubahan	Kesbangpol	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	Kesbangpol	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA perubahan	Kesbangpol	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen LPPD, lakip, Lap Capkin	Kesbangpol	3 Dokumen	30,000,000	DAU		3 Dokumen	35,000,000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbangpol		989,188,406	DAU			
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Kesbangpol	1 Perangkat Daerah	939,188,406	DAU		1 Perangkat Daerah	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kesbangpol	12 bulan	50,000,000	DAU		12 bulan	60,000,000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kesbangpol		26,900,000	DAU			
8.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	18 orang	-	DAU		18 orang	15,000,000
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Kantor Kesbangpol yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	Kesbangpol	5 orang	8,320,000	DAU		10 orang	50,000,000
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Kesbangpol	10 orang	-	DAU		10 orang	50,000,000
8.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	Kesbangpol	10 orang	18,580,000	DAU		10 orang	50,000,000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol		60,000,000	DAU			
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kesbangpol	25 buah	-	DAU		25 buah	20,000,000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	1 unit	-	DAU		1 unit	20,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kesbangpol	200 buah	-	DAU		200 buah	20,000,000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kesbangpol	100.000 lembar	-	DAU		100.000 lembar	20,000,000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kesbangpol	1100 Exemplar	-	DAU		1100 Exemplar	20,000,000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kesbangpol	300 porsi/kotak	15,000,000	DAU		600 porsi/kotak	30,000,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kesbangpol	325 orang hari	45,000,000	DAU		1000 orang hari	100,000,000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kesbangpol		-	DAU			
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kesbangpol	-	-	DAU		1 Unit R2	35,000,000
8.01.01.2.06.05	Pengadaan Mebelur	Jumlah Paket Mebel	Kesbangpol	3 Unit Filing Cabinet	-	DAU		3 Unit Filing Cabinet	20,000,000
8.01.01.2.06.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin	Kesbangpol	1 Unit laptop + printer	-	DAU		1 Unit laptop + printer	40,000,000
8.01.01.2.06.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	2 Unit TV LED 64'	-	DAU		2 Unit TV LED 64'	40,000,000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol		259,792,200	DAU			
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan	Kesbangpol	750 Arsip surat	29,874,900	DAU		1100 Arsip surat	40,000,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	12 bulan	10,880,000	DAU		12 bulan	40,000,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Kesbangpol	12 bulan	219,037,300	DAU		12 bulan	300,000,000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kesbangpol		40,242,000	DAU			
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	12 bulan	40,242,000	DAU		12 bulan	75,000,000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Kesbangpol	85%	-	DAU		100%	165,000,000
8.1.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Kesbangpol		-	DAU			
8.1.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Kesbangpol	150 orang	-	DAU		150 orang	80,000,000
		Jumlah Kegiatan PPWK, GNRM	Kesbangpol	1 kali	-	DAU		1 kali	85,000,000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Kesbangpol	100%	989,540,000	DAU		100%	1,286,510,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kesbangpol		989,540,000	DAU			
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan partai politik yang di verifikasi	Kesbangpol	10 Dok	33,030,000	DAU		10 Dok	50,000,000
		Jumlah dana bantuan keuangan parpol yang dibayarkan**)	Kesbangpol	10 parpol	956,510,000	DAU		10 parpol	956,510,000
8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Kesbangpol	30 orang	-	DAU		30 orang	80,000,000
		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu	Kesbangpol	150 orang	-	DAU		150 orang	75,000,000
		Fasilitasi Pemantauan Pemilu	Kesbangpol	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	125,000,000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	Kesbangpol	100%	16,437,500	DAU		100%	70,000,000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kesbangpol		16,437,500	DAU			
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Kesbangpol	1 kali	16,437,500	DAU		1 kali	20,000,000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Kesbangpol	1 kali	-	DAU		1 kali	50,000,000
			Kesbangpol			DAU			
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	Kesbangpol	100%	-	DAU		100%	345,000,000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kesbangpol		-	DAU			
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kesbangpol	1 kali	-	DAU		1 kali	50,000,000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman	Kesbangpol	1 kali	-	DAU		1 kali	120,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan kegiatan P4GN	Kesbangpol	1 kali	-	DAU		1 kali	175,000,000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Kesbangpol	100%	489,166,900	DAU		100%	750,000,000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kesbangpol		489,166,900	DAU			
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3] Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	Kesbangpol	6 kali	39,166,900	DAU		6 kali	450,000,000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kabuupaten/Kota*)	Jumlah Rapat Forkopimda	Kesbangpol	48 kali	450,000,000	DAU		48 kali	300,000,000
Jumlah pagu					2,951,267,006				3,796,510,000

TABEL MATRIK RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Keterangan		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01	SEKRETARIAT DAERAH			40,602,084,962				40,935,512,086			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	34,875,858,412	DAU	A	35,747,754,872			
4	01	01		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%			100%				
4	01	01		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B			BB				
4	01	01		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%			100%				
4	01	01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	100%	245,000,000		100%	251,125,000		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	75,000,000	DAU	1 Dokumen	76,875,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	27,000,000	DAU	1 Dokumen	27,675,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	30,000,000	DAU	1 Dokumen	30,750,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	28,000,000	DAU	1 Dokumen	28,700,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	24,000,000	DAU	1 Dokumen	24,600,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok laporan capaian kinerja yang di susun (Lakip Setda dan LPPD Setda)	2 Dokumen	61,000,000	DAU	2 Dokumen	62,525,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24,412,833,770		100%	25,023,154,614		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN lingkup Kecamatan yang dibayarkan	17 Kecamatan			17 Kecamatan		
4	01	01	2.02	01		Jumlah gaji ASN lingkup Setda yang dibayarkan	1 Perangkat Daerah	23,910,833,770	DAU	1 Perangkat Daerah	24,508,604,614	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02	01		Jumlah TPP ASN lingkup Setda yang dibayarkan	1 Perangkat Daerah			1 Perangkat Daerah		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml PNS yg dibayarkan honorarium jasa adm keuangan	53 ASN	390,000,000	DAU	53 ASN	399,750,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Adm gaji ASN yang dibayarkan	300 ASN			305 ASN		
4	01	01	2.02	03		Persentase verifikasi pertanggung jawaban & Perbendaharaan	100%	57,000,000	DAU	100%	58,425,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dok laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	55,000,000	DAU	2 Dokumen	56,375,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100%	254,930,000		100%	261,303,250		
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Pemahaman Hukum Perangkat Daerah	85%			90%		
4	01	01	2.05	04		Jumlah administrasi staf ahli yang terfasilitasi dengan baik	3 Staf Ahli			3 Staf Ahli		
4	01	01	2.05	04		Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	70,000,000	DAU	12 Bulan	71,750,000	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4 Kali			4 Kali		
4	01	01	2.05	10		Jumlah peserta Bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan	50 Peserta			50 Peserta		
4	01	01	2.05	10		Jumlah sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan	4 Kali	39,930,000	DAU	4 Kali	40,928,250	Bagian Umum dan Perlengkapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Keterangan		
		Jumlah Nagari dan Kelompok Sadar Hukum		3 Nagari dan 3 Kelompok Sadar Hukum			4 Nagari dan 4 Kelompok Sadar Hukum		Bagian Umum dan Perengkapan			
		Jumlah sekolah sadar hukum		5 Sekolah			7 Sekolah					
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek_Perundang-undangan	25 ASN	145,000,000	DAU	30 ASN	148,625,000	Bagian Renkeu
		Jumlah peserta bimtek perencanaan/keuangan lingkup setda		60 Peserta			60 Peserta					
4	01	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	1,564,502,250		100%	1,603,614,806	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik gedung dan kantor	12 Bulan	50,967,750	DAU	12 Bulan	52,241,944	Bagian Umum dan Perengkapan
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	2 Paket	585,000,000	DAU	2 Paket	599,625,000	Bagian Umum dan Perengkapan
		Jumlah pengadaan peralatan kerja		2 Paket			2 Paket					
		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		2 Paket			2 Paket					
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan pemenuhan protokol kesehatan di lingkup setda	12 Bulan	29,934,500	DAU	12 Bulan	30,682,863	Bagian Umum dan Perengkapan
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan baik	12 Bulan	216,900,000	DAU	12 Bulan	222,322,500	Bagian Umum dan Perengkapan
		Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terselenggara dengan baik dan lancar		6 hari Besar		6 hari Besar						
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	331,700,000	DAU	12 Bulan	339,992,500	Bagian Umum dan Perengkapan
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pembayaran perjalanan dinas untuk Staf Ahli, Asisten dan Bagian Renkeu Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	350,000,000	DAU	12 Bulan	358,750,000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100%	75,000,000		100%	76,875,000	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan dan perawatan taman kantor bupati dengan baik	12 Bulan	75,000,000	DAU	12 Bulan	76,875,000	Bagian Umum dan Perengkapan
		Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan baik		12 Bulan		12 Bulan						
4	01	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,888,000,000		100%	3,985,200,000	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dengan baik	12 Bulan	89,250,000	DAU	100%	91,481,250	Bagian Umum dan Perengkapan
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	750,000,000	DAU	12 Bulan	768,750,000	Bagian Umum dan Perengkapan
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung acara Pemkab. Padang Pariaman	12 Bulan	148,750,000	DAU	100%	152,468,750	Bagian Umum dan Perengkapan
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan gedung kantor	12 Bulan	2,900,000,000	DAU	12 Bulan	2,972,500,000	Bagian Umum dan Perengkapan
		Jumlah gaji tenaga swakelola lingkup setda yang dibayarkan		116 Swakelola		116 Swakelola						
4	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	991,388,750		100%	1,016,173,469	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perawatan kendaraan dinas lingkup setda	33 Kendaraan	976,388,750	DAU	35 Kendaraan	1,000,798,469	Bagian Umum dan Perengkapan
		Jumlah pembayaran bbm untuk KDH, WKDH, Sekda dan tamu daerah yang terfasilitasi		12 Bulan		12 Bulan						
		Jumlah pembayaran bbm untuk staf ahli dan asisten		12 Bulan		12 Bulan						
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas lingkup setda		33 Kendaraan		35 Kendaraan						
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	15,000,000	DAU	12 Bulan	15,375,000	Bagian Umum dan Perengkapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Keterangan
4 01 01 2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Terpenuhi nya medical Check Up KDH/WKDH		100%	648,784,698			100%	665,004,315	
		Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan KDH/WKDH		100%				100%		
		Persentase Terpenuhi nya Pakaian Dinas KDH/WKDH		100%				100%		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH		12 Bulan	588,784,698	DAU		12 Bulan	603,504,315	Bagian Renkeu
	Jumlah Pembayaran Operasional KDH/WKDH		12 Bulan				12 Bulan			
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH		1 Paket	30,000,000	DAU		1 Paket	30,750,000	Bagian Humas
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up yang dilakukan Bupati/Wakil Bupati		2 Paket	30,000,000	DAU		2 Paket	30,750,000	Bagian Umum dan Perlengkapan
4 01 01 2.12	FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH		100%	1,021,392,444			100%	1,046,927,255	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga KDH yang terfasilitasi		12 Bulan	605,213,300	DAU		12 Bulan	620,343,633	Bagian Umum dan Perlengkapan
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga WKDH yang terfasilitasi		12 Bulan	416,179,144	DAU		12 Bulan	426,583,623	Bagian Umum dan Perlengkapan
4 01 01 2.13	PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya		55%	489,026,500			60%	501,252,163	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		83.3				83.45		
		Persentase perangkat daerah dengan nilai sakin A ke atas		45%				50%		
		Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemennan		11.75				12		
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen data informasi jabatan yang tersedia per perangkat daerah		3 Dokumen	116,908,500	DAU		1 Dokumen	119,831,213	Bagian Organisasi & RB
		Jumlah dokumen pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunan		1 Dokumen				1 Dokumen		
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Yang Dikirim Pada Kompetisi Pelayanan Prima		4 Inovasi	190,830,000	DAU		5 Inovasi	195,600,750	Bagian Organisasi & RB
		Jumlah OPD Yang Dibina Dalam Penerapan Standar Pelayanan Prima		8 OPD				8 OPD		
		Jumlah Terfasilitasinya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap UKPP		8 UKPP				8 UKPP		
		Jumlah tersusunnya Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten		1 Dokumen				1 Dokumen		
		Jumlah OPD Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Standar Pelayanan (SP)		18 OPD				26 OPD		
		Jumlah OPD Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		18 OPD				26 OPD		
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dibina		44 OPD & Kecamatan	91,288,000	DAU		44 OPD & Kecamatan	93,570,200	Bagian Organisasi & RB
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP Kabupatyn Padang Pariaman yang tersusun		1 Dokumen	90,000,000	DAU		1 Dokumen	92,250,000	Bagian Organisasi & RB
4 01 01 2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran		80%	1,285,000,000			85%	1,317,125,000	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik		80%				85%		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolalan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop keprotokolalan		65 Peserta	315,000,000	DAU		70 Peserta	322,875,000	Bagian Humas
		Jumlah terlaksananya pembuatan naskah pidato pemerintah daerah		12 Bulan				12 Bulan		
		Jumlah acara Pemda yang terlaksana dengan keprotokolalan		12 Bulan				12 Bulan		
		Jumlah desiminasi informasi melalui baliho, spanduk dan kalender		12 Bulan				12 Bulan		
		Jumlah kerjasama dengan media cetak		25 Kerjasama				25 Kerjasama		
		Jumlah majalah internal pemerintah kabupaten yang dipublikasikan		6 Edisi				6 Edisi		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023								
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Keterangan						
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah media Informasi yang dipublikasikan dan di dokumentasikan melalui keluarga, iklan, advertorial, media cetak,online dan elektronik		25 Media	930,000,000	DAU		25 Media	953,250,000	Bagian Humas		
						Jumlah pengaduan masyarakat melalui pesan singkat penduduk (PESDUK) melalui SMS gateway		65 pengaduan				70 pengaduan				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kliping berita Pemkab Padang Pariaman secara digital dan manual		100 Bundel Kliping	40,000,000	DAU		100 Bundel Kliping	41,000,000	Bagian Humas		
						Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman		12 Bulan				12 Bulan				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan		100%	4,957,828,750			100%	4,400,149,469			
						Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah		75%						75%		
						Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri		2,700 (tinggi)						2,800 (tinggi)		
4	01	02	2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi		25%	265,000,000			30%	271,625,000			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Peringkat camat Padang Pariaman berprestasi di tingkat Provinsi		Peringkat 6	50,000,000			Peringkat 5	51,250,000			
					Jumlah terselenggara rapat kerja camat		2 kali					2 kali				
					Jumlah terselenggara rapat koordinasi pemerintahan		1 kali					1 kali				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah data Rupabumi unsur buatan yang terdata		5 Kecamatan	50,000,000	DAU		8 Kecamatan	51,250,000	Bagian Pemerintahan Umum		
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan		5 Kecamatan					8 Kecamatan				
					Jumlah terlaksana fasilitasi batas daerah		1 Segmen					1 Segmen				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD kabupaten padang pariaman yang tersusun		1 Dokumen	165,000,000	DAU		1 Dokumen	169,125,000	Bagian Pemerintahan Umum		
					Jumlah buku LKPJ Bupati Padang Pariaman yang tersusun		1 Dokumen								1 Dokumen	
					Jumlah dookumen koordinasi penerapan standar pelayanan minimal		1 Dokumen								1 Dokumen	
					Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Otonomi Daerah dengan DPRD		8 Kali								8 Kali	
4	01	02	2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi			4,311,520,000			Peringkat 3	3,737,683,000			
						Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pema Kab.Padang Pariaman		50%						60%		
						Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman		10%						10%		
					Jumlah kegiatan hari besar islam yang terfasilitasi		5 Hari Besar					5 Hari Besar				
					Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi		2 Kegiatan MTQ					1 Kegiatan MTQ				
					Jumlah kegiatan MUI yang terfasilitasi		1 Kegiatan					1 Kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023						
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Keterangan			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatann LPTQ yang terfasilitasi	2 Kegiatan	4,165,000,000	DAU		2 Kegiatan	3,587,500,000	Bagian Kesra
						Jumlah pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang difasilitasi	340 Jamaah Haji				350 Jamaah Haji		
						Jumlah terlaksananya operasional Masjid Agung Kab. Padang Pariaman	12 Bulan				12 Bulan		
						Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	2 Lembaga				2 Lembaga		
						Jumlah rumah tahfiz yang terbentuk	5 Rumah Tahfiz				5 Rumah Tahfiz		
						Jumlah pembinaan majelis Taklim Tingkat Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman	17 Kecamatan				17 Kecamatan		
						Jumlah kegiatan pembinaan terhadap guru TPA/TPSA	2 Kali				2 Kali		
						Jumlah Hafiz/Hafizah di Kabupaten Padang Pariaman	1200 Hafiz/Hafizah				1300 Hafiz/Hafizah		
						Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan baca tulis Al-Quran	17 Kecamatan				17 Kecamatan		
						Jumlah terlaksananya monitoring pesantren Ramadhan dan penyaluran bantuan safari ramadhan	100%				100%		
Jumlah Bantuan fasilitas keagamaan	9 Paket		9 Paket	Pokir 450 juta									
Jumlah pengadaan tenda kursi dan sarapa prasarana masjid di 3 Lokasi	3 Paket		3 Paket	Musrenbang 215 jt									
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti Rakor kesetaraan masjid di 3 Lokasi	60 Peserta	50,000,000	DAU		120 Peserta	51,250,000	Bagian Kesra
					Jumlah sosialisasi bahaya narkoba dan LGBT	3 Kegiatan				3 Kegiatan			
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah terbinanya program UKS di 4 tingkatan jenjang pendidikan masing-masing kecamatan dan sekretariat TP UKS Kecamatan	68 Sekolah	96,520,000	DAU		68 Sekolah	98,933,000	Bagian Kesra
						Jumlah terpilihnya sekolah sehat (Sekolah Pelaksana) UKS yang mewakili Kabupaten di tingkat propinsi dan tingkat nasional	4 Sekolah				4 Sekolah		
						Jumlah terpilihnya sekolah yang berwawasan ber PHBS sesuai dengan 8 indikator PHBS di sekolah	4 Sekolah				4 Sekolah		
						Jumlah terlaksananya koordinasi dan pendampingan program kerja Bagian Kesra	12 Bulan				12 Bulan		
4	01	02	2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus	85%	343,808,750			90%	352,403,969	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan Bupati yang tersusun	35 Perbup	72,260,000	DAU		40 Perbup	74,066,500	Bagian Hukum
						Jumlah peraturan daerah yang tersusun	5 Perda				5 Perda		
						Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan	5 Produk Hukum				5 Produk Hukum		
						Jumlah Ranperda yang tersusun	5 Ranperda				5 Ranperda		
						Jumlah surat keputusan bupati yang tberhasil tersusun	400 SK				410 SK		
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah tim kuasa hukum Bupati yang lebih terampil dalam beracara di Pengadilan	3 Orang	237,348,750	DAU		3 Orang	243,282,469	Bagian Hukum
						Jumlah penyelesaian kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah baik di dalam Pengadilan maupun di Luar Pengadilan	7 Kasus				7 Kasus		
						Jumlah terbantunya masyarakat miskin di Kab. Padang Pariaman dalam Penyelesaian Kasus Hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan	5 Kasus				6 Kasus		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023							
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Keterangan				
		Jumlah penghargaan Kabupaten peduli HAM		1 Penghargaan				1 Penghargaan						
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah		210 Buku LD BD SJDIH			210 Buku LD BD SJDIH			
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan		20 Produk Hukum	34,200,000	DAU		30 Produk Hukum	35,055,000	Bagian Hukum				
		Jumlah Produk Hukum dalam Sistem JDH		5 Perda, 40 Perbup				5 Perda, 45 Perbup						
4	01	02	2.04		FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi		80%	37,500,000			85%	38,437,500	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah yang terjalan bersama		5 Kerjasama	37,500,000	DAU		6 Kerjasama	38,437,500	Bagian Pemerintahan Umum
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman		100%	768,397,800			100%	787,607,745	
		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu		100%		100%								
		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD		11%		12%								
		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu		100%		100%								
4	01	03	2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksana kebijakan perekonomian		100%	119,370,000			100%	122,354,250	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen pengawasan terhadap BPR dan PDAM		2 Dokumen	20,000,000	DAU		2 Dokumen	20,500,000	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen laporan Pengawasan inflasi daerah		1 Dokumen	69,530,000	DAU		1 Dokumen	71,268,250	Bagian Perekonomian
		Jumlah event Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Daerah yang diikuti		4 Event		4 Event								
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang serta jasa bersubsidi		17 Kecamatan	29,840,000	DAU		17 Kecamatan	30,586,000	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman		100%	185,000,000			100%	189,625,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan perangkat daerah		3 Kali	40,000,000	DAU		3 Kali	41,000,000	Bagian Fispra
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pembinaan pengendalian administrasi pembangunan		55 ASN	75,000,000	DAU		60 ASN	76,875,000	Bagian Fispra
		Jumlah terlaksananya pembinaan dan kelengkapan administrasi kontrak		110 Paket	DAU	120 Paket								
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan OPD/SKPD		26 OPD	70,000,000	DAU		26 OPD	71,750,000	Bagian Fispra
4	01	03	2.03		PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa		96%	399,719,800			97%	409,712,795	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen RUP yang disusun		1 Dokumen	249,720,000	DAU		1 Dokumen	255,963,000	Bagian LPBJ
		Jumlah paket pengadaan secara SPSE yang dikelola		160 Paket		170 Paket								
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik yang terintegrasi	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terintegrasi		170 Paket	80,000,000	DAU		180 Paket	82,000,000	Bagian LPBJ
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa		55 Peserta	69,999,800	DAU		60 Peserta	71,749,795	Bagian LPBJ
4	01	03	2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam		100%	64,308,000			100%	65,915,700	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD yg terfasilitasi,terkoordinasi,terkonsultasi terkait dibawah lingkup koordinasi di bagian pembangunan ekonomi ,serta pemerintaha tingkat propinsi dan pusat		6 OPD	29,158,000	DAU		6 OPD	29,886,950	Bagian Perekonomian

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
			4	5	6	7		8	9
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Padang Pariaman	100%	24,003,993,597	DAU		100%	27,944,699,885
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Padang Pariaman	BB				BB	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Padang Pariaman	100%				100%	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	85,000,000	DAU		94%	105,000,000
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Padang Pariaman	2 dokumen	25,000,000	DAU		2 dokumen	30,000,000
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA APBD, RKA Perubahan, DPA APBD, DPA APBD Perubahan, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun	Padang Pariaman	7 Dokumen	60,000,000	DAU		7 Dokumen	75,000,000
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	3,137,365,430	DAU		100%	3,451,101,973
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	2,937,365,430	DAU		1 Perangkat Daerah	3,231,101,973
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Padang Pariaman	12 Bulan	200,000,000	DAU		12 Bulan	220,000,000
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Padang Pariaman	92%	130,000,000	DAU		94%	130,000,000
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Pariaman	30 Stel	30,000,000	DAU		30 Stel	30,000,000
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	Padang Pariaman	26 Orang	100,000,000	DAU		26 Orang	100,000,000
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Padang Pariaman	100%	435,000,000	DAU		100%	780,000,000
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Padang Pariaman	12 bulan	20,000,000	DAU		12 bulan	30,000,000
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Pariaman	1 Paket	150,000,000	DAU		5 Paket	400,000,000
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Padang Pariaman	12 bulan	100,000,000	DAU		12 bulan	150,000,000
4 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Padang Pariaman	12 Bulan	40,000,000	DAU		12 Bulan	50,000,000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Padang Pariaman	12 bulan	125,000,000	DAU		12 bulan	150,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4	02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Padang Pariaman	82%	50,000,000	DAU	84%	250,000,000
4	02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Paket Mebeleur Kantor (Kursi, Meja, Lemari Arsip, Dll)	Padang Pariaman	1 Paket	50,000,000	DAU	4 Paket	250,000,000
4	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Pariaman	100%	1,340,175,520	DAU	100%	1,500,000,000
4	02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Padang Pariaman	12 Bulan	80,000,000	DAU	12 surat	100,000,000
4	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Padang Pariaman	12 Bulan	168,000,000	DAU	12 bulan	200,000,000
4	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan	Padang Pariaman	12 bulan/45 orang	1,092,175,520	DAU	12 bulan/45 orang	1,200,000,000
02	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Padang Pariaman	100%	380,000,000	DAU	100%	850,000,000
4	02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Pariaman	12 bulan	100,000,000	DAU	12 bulan	200,000,000
4	02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Pariaman	12 bulan	80,000,000	DAU	12 bulan	150,000,000
4	02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Padang Pariaman	12 bulan	200,000,000	DAU	12 bulan	500,000,000
4	02 02 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Padang Pariaman	86%	17,146,452,647	DAU	88%	18,978,597,912
4	02 02 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	16,571,452,647	DAU	1 Perangkat Daerah	18,228,597,912
4	02 02 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Adat Anggota DPRD, Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Resmi Anggota DPRD, PIN Anggota DPRD yang disediakan	Padang Pariaman	4 stel	450,000,000	DAU	5 stel	600,000,000
4	02 02 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Frekuensi pelaksanaan medical check up bagi anggota DPRD	Padang Pariaman	1 Kali/Tahun	125,000,000	DAU	1 Kali/Tahun	150,000,000
4	02 02 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Padang Pariaman	86%	1,300,000,000	DAU	88%	1,900,000,000
4	02 02 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat AKD, Rapat Paripurna, Rapat-rapat Acara tertentu yang dilaksanakan	Padang Pariaman	12 bulan	600,000,000	DAU	12 bulan	900,000,000
4	02 02 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	Padang Pariaman	12 bulan	700,000,000	DAU	12 bulan	1,000,000,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Padang Pariaman	8	17,880,400,000			8	23,750,000,000
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	Padang Pariaman	82%	400,000,000	DAU		84%	400,000,000
4	02	02	2.01	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Ranperda yang disetujui oleh DPRD	Padang Pariaman	12 bulan	400,000,000	DAU		12 bulan	400,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Padang Pariaman	100%	1,800,000,000	DAU		100%	2,600,000,000
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS	Padang Pariaman	1 Kali/Tahun	300,000,000	DAU		1 Kali/Tahun	400,000,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Frekuensi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Padang Pariaman	1 Kali/Tahun	300,000,000	DAU		1 Kali/Tahun	400,000,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Frekuensi pembahasan APBD	Padang Pariaman	1 Kali/tahun	300,000,000	DAU		1 Kali/tahun	400,000,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan	Padang Pariaman	1 Kali/Tahun	300,000,000	DAU		1 Kali/Tahun	400,000,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Frekuensi Konsultasi Komisi-komisi	Padang Pariaman	12 Bulan dan 1 Kali/tahun	600,000,000	DAU		12 Bulan	1,000,000,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Padang Pariaman	82%	1,400,000,000	DAU		84%	1,400,000,000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pengawasan penggunaan anggaran, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan Urusan Pemerintahan bidang perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang sumber daya alam, frekuensi konsultasi Banggar DPRD (3 Kali/Tahun)	Padang Pariaman	12 bulan dan 3 Kali	1,400,000,000	DAU		12 bulan	1,400,000,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Padang Pariaman	82%	2,630,400,000	DAU		84%	2,900,000,000
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Orientasi Anggota DPRD yang difasilitasi	Padang Pariaman			DAU			
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi	Padang Pariaman	6 kali/tahun	2,100,000,000	DAU		6 kali/tahun	2,200,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Padang Pariaman	12 Bulan	250,000,000	DAU		12 Bulan	400,000,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honor Staf Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi	Padang Pariaman	12 bulan	280,400,000	DAU		12 bulan	300,000,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Padang Pariaman	100%	700,000,000	DAU		100%	1,200,000,000
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Padang Pariaman	3 kali/tahun		DAU		3 kali/tahun	400,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi	Padang Pariaman	3 kali/tahun	700,000,000	DAU		3 kali/tahun	800,000,000
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Padang Pariaman	84%	10,950,000,000	DAU		88%	15,250,000,000
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi (Komisi/Pansus 3x), (BK dan Bapemperda 3x), (Konsultasi Anggota DPRD 4x), (Konsultasi Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Propinsi), Kunjungan Kerja DPRD (3x) dan Pendamping AKD yang difasilitasi	Padang Pariaman	6 Kali/Tahun	8,500,000,000	DAU		15 Kali/Tahun	12,000,000,000
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Frekuensi Pelaksanaan Tugas Bamus (Jumlah Rapat Bamus 36x dan Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah 4x)	Padang Pariaman	36 Kali dan 4 Kali	1,200,000,000	DAU		3 Kali/Tahun	1,250,000,000
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD	Padang Pariaman	12 Bulan	1,250,000,000	DAU		12 Bulan	2,000,000,000
					41,884,393,597				51,694,699,885

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 2022	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH				8,488,741,931				11,498,017,948
4.02.4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Padang pariaman	90%	7,154,741,931	APBD		90%	8,143,812,948
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A				A	
		Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
4.02.4.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		90%	59,590,000	APBD		90%	69,155,000
4.02.4.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan		5 dokumen	49,700,000	APBD		5 dokumen	57,155,000
4.02.4.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin		1 dokumen	9,890,000	APBD		1 dokumen	12,000,000
4.02.4.02.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5,813,547,931	APBD		100%	6,451,040,948
4.02.4.02.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1 Perangkat Daerah	5,743,707,931	APBD		1 Perangkat Daerah	6,370,740,948
4.02.4.02.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan		12 Bulan	69,840,000	APBD		12 Bulan	80,300,000
4.02.4.02.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		70%	274,100,000	APBD		70%	367,500,000
4.02.4.02.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				APBD		1 jenis	52,000,000
4.02.4.02.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Inspektorat Diklat dan Pelatihan yang diikuti sesuai anggaran		20 ORANG	204,100,000	APBD		25 ORANG	235,000,000
4.02.4.02.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan Perundang - undangan yang dilaksanakan sesuai anggaran		2 kali	35,000,000	APBD		2 kali	40,250,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 2022	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
4.02.4.02.01.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang - undangan yang di laksanakan		2 kali	35,000,000	APBD		2 kali	40,250,000
4.02.4.02.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	374,000,000	APBD		100%	425,500,000
4.02.4.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100 buah	12,000,000	APBD		100 buah	13,800,000
4.02.4.02.01.06.03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai anggaran		6 unit	15,000,000	APBD		6 unit	17,250,000
4.02.4.02.01.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia		50 buah	25,000,000	APBD		50 buah	28,750,000
4.02.4.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai anggaran		50 eksemplar	15,000,000	APBD		50 eksemplar	17,250,000
4.02.4.02.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan		24 eksemplar	12,000,000	APBD		24 eksemplar	9,200,000
4.02.4.02.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		porsi	145,000,000	APBD		100 porsi	51,750,000
4.02.4.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah		1000 orang hari	150,000,000	APBD		1000 orang hari	287,500,000
4.02.4.02.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		50%	75,000,000	APBD		50%	355,000,000
4.02.4.02.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional yang tersedia				APBD		3 kendaraan roda 2	80,000,000
4.02.4.02.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubiler yang diadakan sesuai anggaran				APBD		20 bh kursi kerja. 1 bh Lemari arsip	65,000,000
4.02.4.02.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia		0		APBD		1 set front office	50,000,000
4.02.4.02.01.07.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung yang tersedia		2buah infokus, 1 bh laptop	75,000,000	APBD		3bh laptop, 2 bhprinter	160,000,000
4.02.4.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90%	328,504,000	APBD		90%	406,410,000
4.02.4.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan		300 arsip surat	50,104,000	APBD		300 arsip surat	86,250,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 2022	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
4.02.4.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 bulan	72,000,000	APBD		12 bulan	82,800,000
4.02.4.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran		6 orang	206,400,000	APBD		6 orang	237,360,000
4.02.4.02.01.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik		90%	230,000,000	APBD		90%	69,207,000
4.02.4.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tersedia sesuai anggaran, jumlah pengurusan STNK dan pajak kendaraan bermotor		12 bulan	170,000,000	APBD		90%	207,000
4.02.4.02.01.08.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah biaya perawatan peralatan gedung kantor yang tersedia sesuai anggaran		1 gedung / tahun	15,000,000	APBD		1 gedung / tahun	17,250,000
4.02.4.02.01.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah biaya perawatan peralatan peralatan gedung kantor yang tersedia sesuai anggaran		12 bulan	10,000,000	APBD		12 bulan	11,500,000
4.02.4.02.01.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah biaya perawatan perlengkapan gedung kantor yang tersedia sesuai anggaran		12 bulan	35,000,000	APBD		12 bulan	40,250,000
6:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang dilakukan		60%	921,500,000	APBD		60%	2,516,200,000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		60%	760,500,000	APBD		60%	2,252,850,000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Riview renstra, BMD, SSH, SPIP, PUG yang dilakukan sesuai anggaran		16 PD	146,500,000	APBD		16 PD	574,252,500
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan atas keuangan dan aset daerah		43 SKPD	61,000,000	APBD		43 SKPD	103,672,500
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah riview RPJMD, RKP, RKA, Lakip, LPPD yang dilakukan		43 SKPD	244,000,000	APBD		43 SKPD	521,525,000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan review atas laporan keuangan		43 SKPD	43,000,000	APBD		43 SKPD	66,700,000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan desa yang dilakukan sesuai anggaran		10 nagari	33,000,000	APBD		10 nagari	144,900,000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal		43 SKPD	132,000,000	APBD		43 SKPD	662,400,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 2022	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP yang dilaksanakan sesuai anggaran		85 % , 80 %	101,000,000	APBD		85 % , 82 %	179,400,000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu		60%	161,000,000	APBD		60%	263,350,000
6.01.02.2.02.01	Penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian kerugian negara / daerah yang dilakukan sesuai anggaran		2 kasus	38,000,000	APBD		2 kasus	55,200,000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan sesuai anggaran		10 pengawasan	123,000,000	APBD		10 pengawasan	208,150,000
6.01.03.2.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan		60%	412,500,000	APBD		60%	838,005,000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase perumusan kebijakan, teknis di bidang		60%	70,000,000	APBD		60%	165,025,000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dibuat sesuai anggaran		2 dokumen	43,000,000	APBD		2 dokumen	93,725,000
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang di buat sesuai anggaran		1 dokumen	27,000,000	APBD		1 dokumen	71,300,000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan		60%	342,500,000	APBD		60%	672,980,000
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan asistensi bidang pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai anggaran		2 SKPD	59,000,000	APBD		2 SKPD	138,000,000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi Birokrasi yang dilaksanakan sesuai anggaran		10 SKPD	115,000,000	APBD		10 SKPD	244,950,000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan sesuai anggaran		10 SKPD	82,000,000	APBD		10 SKPD	230,230,000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, asistensi dan Verrifikasi penegakan integritas yang dilaksanakan sesuai anggaran		10 SKPD	86,500,000	APBD		10 SKPD	59,800,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN NAN SABARIS

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				798,024,639				2,197,400,000
7 01 04	Program : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator Program : Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	4,000,000	DAU		100%	90,000,000
7 01 04 2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Nan Sabaris	100%	4,000,000	DAU		100%	90,000,000
7 01 04 2.01 01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		12 kali	60,000,000
7 01 04 2.01 02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Nan Sabaris	12 kali	4,000,000	DAU		100%	30,000,000
7 01 03	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator Program : Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	25,000,000	DAU		100%	169,400,000
7 01 03 2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	presentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Nan Sabaris	100%	25,000,000	DAU		100%	169,400,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah pembinaan organisasi PKK di kecamatan dan nagari	Kecamatan Nan Sabaris	12 kali	15,000,000	DAU		12 kali	72,600,000
7 01 03 2.01 02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	18 usulan	10,000,000	DAU		12 usulan	24,200,000
7 01 03 2.01 03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah goro yang di koordinir oleh kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		12 kali	72,600,000
7 01 06	Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator Program : Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nan Sabaris	100%	3,000,000	DAU		100%	50,000,000
7 01 06 2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Nan Sabaris	100%	3,000,000	DAU		100%	50,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan Nan Sabaris	30 kali	3,000,000	DAU		24 kali	10,000,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	BIMTEK pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		12 bamus	15,000,000
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah Perna yang diverifikasi	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		1 kali	25,000,000
7 01 02	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator Program : Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	77,000,000	DAU		100%	92,100,000
7 01 02 2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tigkat Kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	74,000,000	DAU		100%	92,100,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kecamatan Nan Sabaris	3 kegiatan	71,000,000	DAU		3 kegiatan	80,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan Nan Sabaris	40 UKS	3,000,000	DAU		40 UKS	12,100,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Persentase koordinasi dan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat	Kecamatan Nan Sabaris	100%	3,000,000	DAU			0
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat izin ,Rekomendasi,surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan Nan Sabaris	1000 Exemplar	3,000,000	DAU			
7 01 05	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator Program : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	13,000,000	DAU		100%	116,800,000
7 01 05 2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	13,000,000	DAU		100%	116,800,000
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	5 kegiatan	10,000,000	DAU		5 kegiatan	55,000,000
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah konflik sosial yang diselesaikan	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		6 kasus	1,800,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	12 kali	3,000,000	DAU		12 kali	60,000,000
X XX 01	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	676,024,639	DAU		100%	1,679,100,000
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB		A					
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		100%					
X XX 01 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	92%	11,000,000	DAU		94%	33,500,000
X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (perencanaan) yang mengikuti BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan Nan Sabaris	10 orang	3,000,000	DAU		25 orang	9,000,000
X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Nan Sabaris	16 orang	8,000,000	DAU		20 orang	17,500,000
X XX 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya fingerprint online	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		1 unit	7,000,000
X XX 01 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	347,137,136	DAU		100%	620,500,000
X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan, Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kecamatan Nan Sabaris	4 Laporan	2,000,000	DAU		1 laporan	11,000,000
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Nan Sabaris	1 tahun	53,520,000	DAU		1 tahun	65,000,000
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kecamatan Nan Sabaris	1 tahun	291,617,136	DAU		1 tahun	544,500,000
X XX 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	64,500,000	DAU		100%	137,100,000
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kecamatan Nan Sabaris	400 kotak	2,500,000	DAU		400 kotak	20,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		2 exemplar	5,000,000
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Nan Sabaris	20 buah	1,000,000	DAU		200 buah	10,000,000
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Nan Sabaris	1 Tahun	0	DAU		6 unit	70,000,000
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Nan Sabaris	30 buah	1,000,000	DAU		35 buah	20,000,000
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Kecamatan Nan Sabaris	1800 exemplar	60,000,000	DAU		1800 exemplar	12,100,000
X XX 01 2.07	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	40,000,000	DAU		100%	176,000,000
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		1 gedung	100,000,000
X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		1 tahun	20,000,000
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Nan Sabaris	12 bulan	40,000,000	DAU		12 bulan	56,000,000
X XX 01 2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	50,149,550	DAU		84%	460,000,000
X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas R4/R2	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		1 unit R2	350,000,000
X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel	Kecamatan Nan Sabaris	0	0	DAU		2 paket	40,000,000
X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Nan Sabaris	2 unit Laptop dan 2 unit AC	40,149,550	DAU		2 unit	30,000,000
X XX 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Nan Sabaris	1 unit tempat Parkir	10,000,000	DAU		1 unit tempat wudhu	40,000,000
X XX 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	160,237,953	DAU		100%	202,000,000
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Nan Sabaris	12 bulan	12,000,000	DAU		12 bulan	25,000,000
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga swakelola, tenaga IT, sopir dan kebersihan perkantoran	Kecamatan Nan Sabaris	6 orang	132,000,000	DAU		6 orang	132,000,000
X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Nan Sabaris	12 bulan	3,000,000	DAU		12 bulan	30,000,000
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Nan Sabaris	12 bulan	13,237,953	DAU		12 bulan	15,000,000
X XX 01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prsentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Prangkat Daerah	Kecamatan Nan Sabaris	92%	3,000,000	DAU		94%	50,000,000
X XX 01 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Kecamatan Nan Sabaris	1 dokumen	500,000	DAU		1 dokumen	10,000,000
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, SAKIP	Kecamatan Nan Sabaris	2 dokumen	1,500,000	DAU		2 dokumen	10,000,000
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Kecamatan Nan Sabaris	6 dokumen	1,000,000	DAU		6 dokumen	30,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN VII KOTO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				670,010,807	DAU			1,182,849,550
7 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Kecamatan VII Koto	100% BB 100%	645,510,807	DAU		100% BB 100%	871,849,550
7 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan VII Koto	92%	7,000,000	DAU		94%	21,500,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Kecamatan VII Koto	6 Dokumen	4,000,000	DAU		6 Dokumen	15,000,000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dok Renja,Renja-P, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, yang disusun	Kecamatan VII Koto	4 Dokumen	3,000,000	DAU		4 Dokumen	6,500,000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan VII Koto	100%	414,310,807	DAU		100%	417,300,000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan VII Koto	Kecamatan VII Koto	11 orang/ 14 bulan	387,010,807	DAU	DILUAR GAJI ASN	1 tahun	390,000,000
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honorarium pengelola keuangan	Kecamatan VII Koto	11 orang/12 bulan	27,300,000	DAU		1 tahun (10 Bulan)	27,300,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan VII Koto	92%	1,000,000	-		-	3,000,000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	Kecamatan VII Koto	3 orang	1,000,000	-		5 orang	3,000,000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan VII Koto	14 Stel	-	-		14 Stel	10,000,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya finther print online	Kecamatan VII Koto	1 Unit	-				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan VII Koto	100%	28,000,000	DAU		100%	87,100,000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Alat penerangan yang disediakan	Kecamatan VII Koto	1 tahun	500,000	DAU		1 tahun	600,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat rumah tangga yang disediakan	Kecamatan VII Koto	1 tahun	500,000	DAU		1 tahun	1,500,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan VII Koto	exemplar	-	-		-	-
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu yang disediakan	Kecamatan VII Koto	1 tahun	2,000,000	DAU		1 tahun	5,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan VII Koto	6 Unit	-				
7 01 01 2.06 09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Fasilitas rapat-rapat dan Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan VII Koto	100 orang/tahun	25,000,000	DAU		200 orang/tahun	80,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan VII Koto	82%	0	DAU		100%	43,100,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kecamatan VII Koto	1 Unit Kendaraan Roda 2	-	DAU		2 Unit kendaraan roda 2	600,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kecamatan VII Koto	Unit	-	DAU		Unit	1,500,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan VII Koto	3 Unit	-	-		3 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan VII Koto	Unit	-	DAU		Unit	5,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan VII Koto	Unit	-	DAU		Unit	36,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan VII Koto	100%	113,200,000	DAU		100%	134,200,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip Surat yang diarsipkan	Kecamatan VII Koto	700 arsip	7,000,000	DAU		800 Arsip	8,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kecamatan VII Koto	12 tagihan/tahun	15,000,000	DAU		12 tagihan/tahun	15,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan VII Koto	15 unit/tahun	-	DAU		15 unit/tahun	20,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Adminstras Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan VII Koto	4 orang (S1=2 Org ,dan SMA=2 Org)	91,200,000	DAU		4 orang (S1=2 Org ,dan SMA=2 Org)	91,200,000
X	XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan VII Koto	100%	60,500,000	DAU		100%	208,149,550
7	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan VII Koto	3 Unit/Tahun	58,000,000	DAU		1 bh roda empat dan 1 bh roda dua	50,000,000
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan VII Koto	10buah/Tahun	-	-		2 Laptop, 1 AC ,	38,149,550
7	01 01 2.09 06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan VII Koto	4 bh AC, 1 bh sound system, 1 bh komputer, 7 bh printer, 8 bh Laptop, 1 bh pingerpirnt	2,000,000	DAU		4 bh AC, 1 bh sound system, 3 bh komputer, 5 bh printer, 5 bh Laptop, 1 bh pingerpirnt	95,000,000
7	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Laninnya	Kecamatan VII Koto	1 tahun	500,000	DAU		1 tahun	25,000,000
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan VII Koto	100%	3,000,000	DAU		100%	7,500,000
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan VII Koto	100%	1,500,000	DAU		100%	4,500,000
7	01 02 2.01 01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan VII Koto	8 Kali	-	DAU		8 Kali	30,000,000
7	01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan VII Koto	42 UKS	1,500,000	DAU		42 UKS	4,500,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan VII Koto	100%	1,500,000	DAU		100%	3,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan VII Koto	500 surat	1,500,000	DAU		500 surat	3,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan VII Koto	100%	17,000,000	DAU		100%	22,000,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan VII Koto	100%	17,000,000	DAU		100%	22,000,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan VII Koto	12 Kegiatan	7,000,000	DAU		12 Kegiatan	10,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royong jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina	Kecamatan VII Koto	13 organisasi PKK	10,000,000	DAU		13 Organisasi PKK	12,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan VII Koto	100%	1,500,000	DAU		100%	5,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan VII Koto	100%	1,500,000	DAU		100%	5,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor	Kecamatan VII Koto	12 kali	1,500,000	DAU		12 kali	5,000,000
7 01 04 2.01 2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah koordisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Kecamatan VII Koto	12 kali	-	DAU		12 kali	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan VII Koto	100%	-	DAU		100%	255,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan VII Koto	100%	-	DAU		100%	255,000,000
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan VII Koto	3 Kali	-	DAU			35,000,000
7 01 05 2.01 04	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kecamatan VII Koto	100%	-	DAU			5,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kecamatan VII Koto	3 Kali	-	DAU			150,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan VII Koto	12 Kali	-	DAU			65,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan VII Koto	100%	3,000,000	DAU		100%	21,500,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan VII Koto	100%	3,000,000	DAU		100%	21,500,000
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kecamatan VII Koto	5 Perna	1,500,000	DAU		5 Perna	3,500,000
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan VII Koto	1 Kali	1,500,000	DAU		1 Kali	3,000,000
7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kecamatan VII Koto	12 bamus	-	DAU		12 bamus	15,000,000
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan VII Koto	24 kali	0	DAU		24 kali	15,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7									
7	01								
7	01	04							
7	01	04	2.01						
7	01	04	2.01	01					
7	01	03							
7	01	03	2.01						
7	01	03	2.01	03					
7	01	03	2.01	01					
7	01	06							
7	01	06	2.01						
7	01	06	2.01	02					
7	01	02							
7	01	02	2.01						
7	01	02	2.01	02					
7	01	05							
7	01	05	2.01						
7	01	05	2.01	07					
7	01	1							
7	01	01	2.05						
7	01	01	2.05	11					
7	01	01	2.05	01					
7	01	01	2.02						
7	01	01	2.02	01					
			01	2.02	05				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kec 2x11 KAYU TANAM	14 Bulan	424,730,597	DAU	DILUAR GAJI ASN	1 Tahun	432,766,588
7 01 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec 2x11 KAYU TANAM	100%	35,440,000	DAU		100%	123,000,000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kec 2x11 KAYU TANAM	400 porsi	7,000,000	DAU		202 porsi	33,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec 2x11 KAYU TANAM	30 Buah	1,000,000	DAU		30 Buah	30,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kec 2x11 KAYU TANAM	1 Tahun	27,440,000	DAU		1 Tahun	60,000,000
7 01 01 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec 2x11 KAYU TANAM	100%	32,000,000	DAU		100%	60,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec 2x11 KAYU TANAM	12 Bulan	32,000,000	DAU		12 Bulan	60,000,000
7 01 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec 2x11 KAYU TANAM	100%	118,600,000	DAU		100%	257,480,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kec 2x11 KAYU TANAM	12 Bulan	10,000,000	DAU		12 Bulan	22,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola dan Kebersihan perkantoran	Kec 2x11 KAYU TANAM	4 Orang	93,600,000	DAU		6 Orang	150,480,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec 2x11 KAYU TANAM	12 Bulan	5,000,000	DAU		12 Bulan	50,000,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kec 2x11 KAYU TANAM	12 Bulan	10,000,000	DAU		12 Bulan	35,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN				767,981,496	DAU					
7	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	100% BB 100%	697,102,396	DAU	100% A 100%		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Pengangara dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		6,920,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	9 Dokumen	6,920,000	DAU	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		461,421,496			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima TPP, honor kegiatan, gaji tiga belas dan gaji empat belas selama 1 Tahun	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 tahun	461,421,496	DAU	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		2,750,000			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	11 orang	2,750,000	DAU	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		42,321,000	DAU		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Alat penerangan yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 tahun	1,500,000	DAU	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat rumah tangga yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 tahun	1,500,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1.440 esemplar	1,200,000	DAU	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	350 tamu/orang	3,498,000		
7	01	01	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Makan minum rapat dan Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 tahun	34,623,000	DAU	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		145,399,900			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 tahun	15,499,900	DAU	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 tahun	12,300,000	DAU	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	4 Orang/ 1 tahun	117,600,000	DAU	
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		38,290,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	1 bh roda empat dan 1 bh roda dua	30,000,000	DAU	
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	2 Laptop, 2 Printer, 2 AC	0	DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	6 bh AC, 1 bh sound system, 3 bh komputer, 6 bh printer, 6 bh Laptop, 1 bh warles, 1 bh kipas angin besar, 2 bh pingerpirnt, 1 bh TV	5,290,000	DAU			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Laninnya	Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	1 tahun	3,000,000	DAU			
7 01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		0	DAU			
7 01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	54 stel	0	DAU			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		7,000,000	DAU			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		0	DAU			
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	TK 5, SD 14, SMP 2, SMA	0	DAU			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		7,000,000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		7,000,000				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	100%	36,489,100			100%	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		36,489,100	DAU			
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	210 Kegiatan	11,000,000	DAU			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royong	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	3 Nagari	0	DAU			
		Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	4 organisasi PKK	25,489,100	DAU			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	75%	7,000,000	DAU		80%	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		7,000,000	DAU			
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	12 kali	7,000,000	DAU			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	100%	6,390,000	DAU		100%	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		6,390,000	DAU			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	6 hari	6,390,000	DAU			
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah fasilitasi dan pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	12 kali		DAU			
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1. Jumlah peserta Pesantren Ramadhan	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	(1). 500 orang. (2). 15 mesjid dan surau	0	DAU			
		2. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung		0	DAU			
		Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi	Kecamatan 2X11 Enam Lingsung	17 kali	0	DAU			

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	100%	14,000,000	DAU		100%	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		14,000,000	DAU			
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan keaungan nagari yang dilaksanakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	9 Kali	7,000,000	DAU			
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	100%	7,000,000	DAU			
7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan dan Permusawaratan Desa	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	3 kali	0	DAU			

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUB								
7	UNSUB								
7	01				692,872,322	DAU			1,109,556,554
7	01	1	KECAMATAN		616,522,322	DAU		100%	903,371,554
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kecamatan Enam Lingkung			100%	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				A	
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti				100%	
			Perencanaan, Pengangara dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	10,000,000	DAU	94%	12,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, dan DPA Perubahan	Kecamatan Enam Lingkung	8,500,000	DAU	6 Dokumen/ Tahun	10,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan	Kecamatan Enam Lingkung	1,500,000	DAU	4 Dokumen/ Tahun	2,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	387,622,322	DAU	100%	393,351,554
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kecamatan Enam Lingkung	30,030,000	DAU	1 tahun	33,033,000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Enam Lingkung	Kecamatan Enam Lingkung	357,592,322	DAU	DILUAR GAJI ASN 1 tahun	393,351,554
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	3,200,000	DAU	94%	13,520,000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Enam Lingkung	0		20 Orang	15,000,000
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang -Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	3,200,000	DAU		3,520,000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Finger Print Online	Kecamatan Enam Lingkung	0		1 Unit	10,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	41,500,000	DAU	100%	6,050,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	35,000,000	DAU	1 tahun	50,000,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Enam Lingkung	1,000,000	DAU	50 buah	1,500,000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Enam Lingkung	0	DAU	1 tahun	5,000,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Enam Lingkung	0	DAU	7 Unit	80,000,000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Enam Lingkung	3,500,000	DAU	1 tahun	3,850,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu yang disediakan	Kecamatan Enam Lingkung	2,000,000	DAU	1 tahun	2,200,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	20,000,000	DAU	100%	435,000,000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Enam Lingkung	0	DAU	1 unit	10,000,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Enam Lingkung	0	DAU	1 unit	20,000,000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kecamatan Enam Lingkung	0	DAU	1 Paket	20,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Enam Lingsung	1 AC, 1 Laptop, 2 Printer	20,000,000	DAU		1 AC, 1 Laptop, 2 Printer	22,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kecamatan Enam Lingsung	0	0	DAU		1 Unit R4, 1 Unit R2	420,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Enam Lingsung	2 unit	0	DAU		2 unit	15,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Enam Lingsung	100%	124,700,000	DAU		100%	13,200,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	Kecamatan Enam Lingsung	4 Orang/ 1 tahun (2 SMA 2 S1)	91,200,000	DAU		4 Orang/ 1 tahun (2 SMA 2 S1)	100,320,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Enam Lingsung	15 Unit/ Tahun	0	DAU		12 Bulan	15,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Enam Lingsung	24 Tagihan / 1 tahun	21,500,000	DAU		1 tahun	23,650,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip Surat Yang di arsipkan	Kecamatan Enam Lingsung	2.000 arsip	12,000,000	DAU		1 tahun	13,200,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Enam Lingsung	100%	29,500,000	DAU		100%	30,250,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan Bangunan Lanjutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	Kecamatan Enam Lingsung	20 buah/ tahun	2,000,000	DAU		20 buah/ tahun	1,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kecamatan Enam Lingsung	2 Unit / Tahun	27,500,000	DAU		2 unit/ Tahun	30,250,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor								
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitas	Kecamatan Enam Lingsung	1 gedung/ Tahun	0	DAU			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kecamatan Enam Lingsung	100%	5,500,000	DAU		100%	6,050,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Enam Lingsung	100%	2,500,000	DAU		100%	2,750,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan Enam Lingsung	5 Uks	2,500,000	DAU		10 Uks	2,750,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Parsentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Enam Lingsung	100%	3,000,000	DAU		100%	3,300,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan Enam Lingsung	850 surat	3,000,000	DAU		1.000 Surat	3,300,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Enam Lingsung	100%	38,500,000	DAU		100%	57,350,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Enam Lingsung	100%	38,500,000	DAU		100%	57,350,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan Pembangunan Daerah di kecamatan	Kecamatan Enam Lingsung	5 Usulan	16,000,000	DAU		8 Usulan	17,600,000
	Sinkronisi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang di Koordinir oleh Kecamatan	Kecamatan Enam Lingsung	11 Kali	0			11 kali	15,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Enam Lingsung	6 PKK	22,500,000	DAU		8 PKK	24,750,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dapat dibina	Kecamatan Enam Lingsung	100%	7,350,000	DAU		100%	8,085,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Enam Lingsung	100%	7,350,000	DAU		100%	8,085,000

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, di Evaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Enam Lingkungan	12 kali	7,350,000	DAU		12 kali	8,085,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan	Kecamatan Enam Lingkungan	100%	17,000,000	DAU		100%	109,700,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Enam Lingkungan	100%	17,000,000	DAU		100%	109,700,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kecamatan Enam Lingkungan	3 Kali	0	DAU		5 Kali	50,000,000
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kecamatan Enam Lingkungan	100%	0	DAU		100%	6,000,000
	Pelaksanaan semua rusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Pendampingan Pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Enam Lingkungan	3 Kali	17,000,000	DAU		5 Nagari	18,700,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Enam Lingkungan	12 kali	0	DAU		12 kali	35,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kecamatan Enam Lingkungan	100%	8,000,000	DAU		100%	25,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Enam Lingkungan	5 Nagari	8,000,000	DAU		5 Nagari	25,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Nagari	Kecamatan Enam Lingkungan	5 nagari	5,000,000	DAU		5 nagari	10,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Enam Lingkungan	1 kali	3,000,000	DAU		1 kali	15,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				710,207,227				1,836,219,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	2,500,000	DAU		100%	81,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	2,500,000	DAU		100%	81,000,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Persantren Ramadhan	Kec. Ulakan Tapakis	1 kali	0	DAU		1 kali	70,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kec. Ulakan Tapakis	40 UKS	2,500,000	DAU		40 UKS	11,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	2,500,000	DAU		100%	85,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ulakan Tapakis	100%	2,500,000	DAU		100%	85,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	2,500,000	DAU		100%	25,000,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kec. Ulakan Tapakis	12 kali	-	DAU		12 kali	60,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	5,000,000	DAU		100%	105,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	5,000,000	DAU		100%	105,000,000
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	1 kali	5,000,000	DAU		1 kali	50,000,000
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kec. Ulakan Tapakis	2 kali	-	DAU		2 kali	-
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	4 kali	-	DAU		4 kali	55,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	32,000,000	DAU		100%	132,000,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec. Ulakan Tapakis	100%	32,000,000	DAU		100%	132,000,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	24 usulan	12,000,000	DAU		24 usulan	22,000,000
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	9 kali	-	DAU		9 kali	66,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Target	Kebutuhan	Sumber	Target		Kebutuhan	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kec. Ulakan Tapakis	9 PKK	20,000,000	DAU		9 PKK	44,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ulakan Tapakis	100%	-	DAU		100%	74,000,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ulakan Tapakis	100%	-	DAU		100%	74,000,000
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kec. Ulakan Tapakis	24 Perna	-	DAU		24 Perna	24,000,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kec. Ulakan Tapakis	1 kali	-	DAU		1 kali	25,000,000
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kec. Ulakan Tapakis	8 Nagari	-	DAU		8 Nagari	15,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kec. Ulakan Tapakis	8 Nagari	-	DAU		8 Nagari	10,000,000
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kec. Ulakan Tapakis	100%	668,207,227	DAU		100%	1,359,219,000
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kec. Ulakan Tapakis	90%	6,000,000	DAU		92%	45,000,000
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan	Kec. Ulakan Tapakis	6 Dok	6,000,000	DAU		6 Dok	25,000,000
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP	Kec. Ulakan Tapakis	2 Dok	0	DAU		2 Dok	10,000,000
X XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Kec. Ulakan Tapakis	1 Dok	0	DAU		1 Dok	10,000,000
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	435,947,227	DAU	100%	100%	565,000,000
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	403,187,227	DAU		1 Tahun	495,000,000
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Kec. Ulakan Tapakis	10 Bulan	32,760,000	DAU		12 Bulan	60,000,000
X XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Ulakan Tapakis	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	10,000,000
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	-	DAU	100%	100%	31,500,000
X XX 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya pinger print online	Kec. Ulakan Tapakis	1 Unit	-	DAU		1 Unit	6,000,000
X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Ulakan Tapakis	15 Orang	-	DAU		15 Orang	17,500,000
X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Inplementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	8 Orang	-	DAU		8 Orang	8,000,000
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	57,056,700	DAU	100%	100%	121,000,000
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	3,056,700	DAU		1 Tahun	15,000,000
X XX 01 2.06 03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	5,000,000	DAU		1 Tahun	15,000,000

Kode Rekening					Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
							Target	Kebutuhan	Sumber	Target		Kebutuhan	
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	-	DAU		1 Tahun	10,000,000
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Ulakan Tapakis	-	0	DAU		-	0
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ulakan Tapakis	6 UNIT	-	DAU		6 UNIT	70,000,000
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	49,000,000	DAU		1 Tahun	11,000,000
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	-	DAU	100%	100%	334,000,000
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kec. Ulakan Tapakis	Unit	-	DAU		Unit	120,000,000
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kec. Ulakan Tapakis	Paket	-	DAU		2 Paket	50,000,000
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulakan Tapakis	Unit	-	DAU		Unit	80,000,000
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulakan Tapakis	Unit	-	DAU		1 Unit	40,000,000
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ulakan Tapakis	Unit	-	DAU		2 Unit	44,000,000
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	129,203,300	DAU	100%	100%	146,200,000
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	15,003,300	DAU		1 Tahun	10,000,000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	18,000,000	DAU		1 Tahun	20,000,000
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	5,000,000	DAU		1 Tahun	25,000,000
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Kec. Ulakan Tapakis	4 Orang	91,200,000	DAU		4 Orang	91,200,000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Ulakan Tapakis	100%	40,000,000	DAU	100%	100%	116,519,000
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulakan Tapakis	2 Unit	40,000,000	DAU		2 Unit	51,519,000
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kec. Ulakan Tapakis	1 Tahun	0	DAU		1 Tahun	50,000,000
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kec. Ulakan Tapakis	Tahun	-	DAU		1 Tahun	15,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN LUBUK ALUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	UNSUB	UNSUB									
7	UNSUB	UNSUB									
7	UNSUB	UNSUB			762,609,631				1,419,250,000		
X	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kec. Lubuk Alung	100%	732,609,631	DAU	100%	1,160,250,000	
						BB			A		
						100%			100%		
	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Alung	92%	5,300,000	DAU	94%	40,000,000	
5	01	01	2.01	02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Alung	6 Dokumen	4,000,000	DAU	6 Dok	30,000,000	
5	01	01	2.01	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lubuk Alung	4 Dokumen	1,300,000	DAU	4 Dokumen	10,000,000	
	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Alung	100%	530,909,631	DAU	-	100%	619,850,000
5	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kec. Lubuk Alung	15 orang /14 bulan	513,409,631	DAU	15 orang /14 bulan	564,850,000	
5	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Lubuk Alung	11 orang/tahun	17,500,000	DAU	11 orang/tahun	55,000,000	
	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Alung	92%	1,500,000	DAU	94%	9,000,000	
5	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Lubuk Alung	11 orang/tahun	1,500,000	DAU	25 orang	9,000,000	
	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Alung	100%	41,200,000	DAU	100%	103,400,000	
5	01	01	2.06	04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Lubuk Alung	75 buah/ tahun	1,500,000	DAU	75 buah/ tahun	20,000,000	
5	01	01	2.06	09 Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Lubuk Alung	142 kotak	4,000,000	DAU	142 kotak	20,000,000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lubuk Alung	20 buah	1,000,000	DAU	40 Buah	10,000,000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lubuk Alung	4 unit	1,000,000	DAU	4 unit	5,000,000	
5	01	01	2.06	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lubuk Alung	67 orang / tahun	33,700,000	DAU	100 orang / tahun	48,400,000	
	01	01	2.07	01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Lubuk Alung	82%	3,500,000	DAU	84%	30,000,000	
5	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lubuk Alung	2 printer	3,500,000	DAU	2 Unit komputer	30,000,000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Lubuk Alung	100%	111,700,000	DAU		100%	202,000,000
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip surat yang diarsipkan	Kec. Lubuk Alung	950 arsip	9,000,000	DAU		12 Bulan	15,000,000
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kec. Lubuk Alung	24 tagihan/ tahun	10,000,000	DAU		24 tagihan/ tahun	25,000,000
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lubuk Alung	15 buah	1,500,000	DAU		17 buah	30,000,000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Kec. Lubuk Alung	4 orang (\$1 3 orang dan SMA 1 orang)	91,200,000	DAU		6 orang	132,000,000
01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Lubuk Alung	100%	38,500,000	DAU		100%	156,000,000
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Lubuk Alung	3 unit Kendaraan/ tahun	38,000,000	DAU		3 unit Kendaraan/ tahun	56,000,000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ Rehabilitasi	Kec. Lubuk Alung	1 Gedung/ tahun	0	DAU		1 Gedung/ tahun	100,000,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana Gedung Kantor yang dipelihara	Kec. Lubuk Alung	5 unit	500,000				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec. Lubuk Alung	100%	5,000,000	DAU		100%	155,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lubuk Alung	100%	3,000,000	DAU		100%	155,000,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kec. Lubuk Alung	9 kali	2,000,000	DAU		3 bulan	125,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kec. Lubuk Alung	10 sekolah	1,000,000	DAU		15 sekolah	10,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan	Kec. Lubuk Alung	1 tahun	2,000,000			1 tahun	10,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi surat KTM (keterangan tidak mampu) dan surat masuk yang diterima	Kec. Lubuk Alung	1 tahun	2,000,000	DAU		1 tahun	10,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec. Lubuk Alung	100%	17,000,000	DAU		100%	55,000,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec. Lubuk Alung	100%	17,000,000	DAU		100%	55,000,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kec. Lubuk Alung	9 usulan	7,500,000	DAU		9 usulan	30,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kec. Lubuk Alung	9 PKK	9,500,000	DAU		9 PKK	25,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec. Lubuk Alung	100%	2,000,000	DAU		100%	30,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lubuk Alung	12 kali	2,000,000	DAU		12 kali	30,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi penanganan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor	Kec. Lubuk Alung	12 kali	2,000,000	DAU		12 kali	30,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kec. Lubuk Alung	100%	4,000,000	DAU		100%	4,000,000
7 01 05 2.01	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec. Lubuk Alung	100%	4,000,000	DAU		100%	4,000,000
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kec. Lubuk Alung	5 kali	2,000,000	DAU		5 kali	2,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ ,safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kec. Lubuk Alung	3 kali	2,000,000	DAU		3 kali	2,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lubuk Alung	100%	2,000,000	DAU		100%	15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lubuk Alung	100%	2,000,000	DAU		100%	15,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kec. Lubuk Alung	36 kali	2,000,000	DAU		36 kali	15,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				701,181,378				2,466,500,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	688,181,378	DAU		100%	1,951,500,000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				A	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	4,500,000	DAU			40,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			5 Dok	19,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 Dokumen	4,500,000	DAU		2 Dok	14,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1Dok	7,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	508,117,328	DAU			886,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 tahun	476,657,328	DAU		1 Tahun	800,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 tahun	31,460,000	DAU		1 Tahun	80,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 Laporan	6,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU			38,500,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya finger print online	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 Unit	8,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			25 Orang	12,500,000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 orang	1,000,000	DAU		12 orang	18,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	21,364,050	DAU			188,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 tahun	1,000,000	DAU		25 Buah	16,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 tahun	3,364,050	DAU		500 Kotak	16,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			50 Buah	12,000,000

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 tahun	10,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			6 Unit	70,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 tahun	17,000,000	DAU		1 tahun	64,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			100%	474,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 Unit R4 , 1 Unit R2	420,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 Paket	20,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 Unit TV LED 64"	10,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			"-	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1 Unit	24,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	104,200,000	DAU		100%	180,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 Bulan	6,000,000	DAU		12 Bulan	28,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 Bulan	7,000,000	DAU		12 Bulan	15,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			12 Bulan	17,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Adminstras Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	4 orang (2 orang S1, 2 orang SMA)	91,200,000	DAU		5 orang	120,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	49,000,000	DAU		100%	145,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 Bulan	48,000,000	DAU		12 Bulan	75,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			1Gedung/Tahun	50,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 tahun	1,000,000	DAU		1 Tahun	20,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2,000,000	DAU		100%	117,000,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU		100%	102,000,000
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			3 Kali	90,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 UKS	1,000,000	DAU		30 UKS	12,000,000
	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU		100%	15,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang Diterima	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	800 surat	1,000,000	DAU		1000	15,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU			55,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU			55,000,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1.63%	1,000,000	DAU		1.63%	25,000,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			7 Kali	30,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	0	DAU		100%	185,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	0			100%	185,000,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			5 Kali	55,000,000
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			100%	5,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ ,pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			7 Nagari	90,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			7 Kali	35,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	9,000,000	DAU		100%	92,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	9,000,000	DAU		100%	92,000,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 usulan	6,000,000	DAU		7 Usulan	22,000,000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			7 Kali	35,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	6 PKK	3,000,000	DAU		8 PKK	35,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU			66,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	1,000,000	DAU			66,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			14 Perna	14,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 Kali	1,000,000	DAU		1 Kali	25,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			7 bamus	15,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	0			14 kali	12,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN BATANG ANAI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN				798,024,639				2,621,100,000					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kecamatan Batang Anai	100%	775,874,639	DAU		100%	1,808,500,000					
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				A						
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarsasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Anai	92%	7,000,000	DAU		94%	76,000,000					
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Kecamatan Batang Anai	6 Dokumen	4,000,000	-		6 Dokumen	46,000,000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	Kecamatan Batang Anai	4 Dokumen	3,000,000	DAU		4 Dokumen	30,000,000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Anai	100%	597,440,000	DAU		100%	760,000,000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kec. Batang Anai	Kecamatan Batang Anai	18 orang/14 bulan	560,000,000	DAU		18 orang/14 bulan	700,000,000
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Batang Anai	11 orang/12 bulan	37,440,000	DAU		11 orang/12 bulan	60,000,000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Anai	92%	9,480,000	DAU		94%	34,500,000
7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya finther print online	Kec. Batang Anai	1 Unit	7,000,000	-		1 Unit	8,000,000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Batang Anai	20 stel	-	DAU		25 stel	17,500,000
7	01	01	2	05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang	Kecamatan Batang Anai	3 orang	2,480,000	DAU		3 orang	9,000,000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Anai	100%	39,654,639	DAU		100%	184,000,000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Batang Anai	20 buah/tahun	3,400,000	DAU		55 buah/tahun	16,000,000
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kecamatan Batang Anai	80 kotak	4,100,000	DAU		450 kotak	16,000,000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Kecamatan Batang Anai	10 buah	1,000,000	DAU		50 Buah	12,000,000
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Batang Anai	Exemplar	-	DAU		Exemplar	5,000,000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batang Anai	6 Unit	-	DAU		6 Unit	70,000,000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kecamatan Batang Anai	200 orang/tahun	31,154,639	DAU		400 orang/tahun	65,000,000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan Batang Anai	82%	-			84%	395,000,000
7	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kecamatan Batang Anai	1 Unit Kendaraan	-	DAU		4 Unit R2	100,000,000
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kecamatan Batang Anai	Unit	-	DAU		4 Unit	80,000,000

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Target	Kebutuhan	Sumber	Target		Kebutuhan	
7 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batang Anai	3 Unit	-	DAU	12 Unit	125,000,000	
7 01 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batang Anai	Unit	-	DAU	1 Unit	40,000,000	
7 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batang Anai	Unit	-	DAU	1 Unit	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Batang Anai	100%	86,800,000	DAU	100%	189,000,000	
7 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip Surat yang diarsipkan	Kecamatan Batang Anai	700 arsip	7,000,000	DAU	1500 arsip	15,000,000	
7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kecamatan Batang Anai	12 tagihan/tahun	15,000,000	DAU	12 tagihan/tahu	25,000,000	
7 01 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batang Anai	unit/tahun	-	DAU	15 unit/tahun	30,000,000	
7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Swakelola,Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Administras Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Batang Anai	3 orang/12 bulan	64,800,000	DAU	3 orang/12 bulan	119,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Batang Anai	100%	35,500,000	DAU	100%	170,000,000	
7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kecamatan Batang Anai	2 Unit/tahun	34,500,000	DAU	2 Unit/tahun	45,000,000	
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Batang Anai	1 Gedung/tahun	-	-	1 Gedung/tahu	100,000,000	
7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Batang Anai	10 buah/tahun	1,000,000	DAU	25 buah/tahun	25,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Batang Anai	100%	3,000,000	DAU	100%	113,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batang Anai	100%	1,500,000	DAU	100%	98,000,000	
7 01 02 2 01 01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kecamatan Batang Anai	8 Kali	-	-	8 Kali	80,000,000	
7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan Batang Anai	9 UKS	1,500,000	DAU	9 UKS	18,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Batang Anai	100%	1,500,000	DAU	100%	15,000,000	
7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang	Kecamatan Batang Anai	180 surat	1,500,000	DAU	1000 surat	15,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Batang Anai	100%	1,530,000	DAU	100%	90,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Batang Anai	100%	1,530,000	DAU	100%	90,000,000	
7 01 04 2 03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Batang Anai	12 Kali	1,530,000	DAU	12 Kali	30,000,000	
7 01 04 2 03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kecamatan Batang Anai	12 Kali	-	DAU	12 Kali	60,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan Batang Anai	100%	-	-	100%	271,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Batang Anai	100%	-	-	100%	271,000,000	
7 01 05 2 01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kecamatan Batang Anai	3 Kali	-	DAU	3 Kali	55,000,000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
								Target	Kebutuhan	Sumber	Target		Kebutuhan	
7	01	05	2	01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kecamatan Batang Anai	100%	-	DAU		100%	6,000,000
7	01	05	2	01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Batang Anai	3 Kali	-	DAU		3 Kali	150,000,000
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batang Anai	12 Kali	-	DAU		12 Kali	60,000,000
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Batang Anai	100%	16,080,000	DAU		100%	223,600,000
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Batang Anai	100%	16,080,000	DAU		100%	223,600,000
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan Batang Anai	10 usulan	8,580,000	DAU		10 usulan	102,600,000
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan	Kecamatan Batang Anai	12 Kali	-	DAU		12 Kali	72,600,000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Batang Anai	9 PKK	7,500,000	DAU		9 PKK	48,400,000
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batang Anai	100%	1,540,000	DAU		100%	115,000,000
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batang Anai	100%	1,540,000	DAU		100%	115,000,000
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kecamatan Batang Anai	5 Perna	-	-		16 Perna	25,000,000
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Batang Anai	1 Kali	1,540,000	DAU		1 Kali	50,000,000
7	01	06	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kecamatan Batang Anai	8 bamus	-	-		8 bamus	20,000,000
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan Batang Anai	16 kali	-	-		16 kali	20,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN PATAMUAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				639,838,104				704,066,914
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kecamatan Patamuan	100% A 100%	630,368,104	DAU		100% A 100%	693,649,914
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke inspektorat	Kecamatan Patamuan	10 Dokumen	4,150,000	DAU		10 Dokumen	4,810,000
7 01 01 2.01 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Kecamatan Patamuan	6 Dokumen	2,100,000	DAU		6 Dokumen	2,310,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, dan Laporan Keuangan	Kecamatan Patamuan	4 Dokumen	2,050,000	DAU		4 Dokumen	2,500,000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Kecamatan Patamuan	1 tahun	447,013,306	DAU		1 tahun	491,714,637
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Patamuan	Kecamatan Patamuan	13 orang/ 1 tahun	419,713,306	DAU		13 orang/ 1 tahun	461,684,637
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Patamuan	Kecamatan Patamuan	1 tahun	27,300,000	DAU		1 tahun	30,030,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran selama 1 Tahun	Kecamatan Patamuan	1 tahun	53,420,298			1 tahun	58,762,328
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan	Kecamatan Patamuan	10 buah/ tahun	728,500	DAU		10 buah/ tahun	801,350
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang dibayarkan	Kecamatan Patamuan	50 kotak/ tahun	750,000	DAU		10 kotak/ tahun	825,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Rapat, Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dibayarkan	Kecamatan Patamuan	1 00 orang /tahun	51,941,798	DAU		1 00 orang /tahun	57,135,978
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kecamatan Patamuan	1 tahun	89,779,500	DAU		1 tahun	98,757,450
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Patamuan	4557 buah/tahun	11,029,500	DAU		4557 buah/tahun	12,132,450
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Pembayaran sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Kecamatan Patamuan	12 Tagihan / 1 tahun	6,750,000	DAU		12 Tagihan / 1 tahun	7,425,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga swakelola dan tenaga kebersihan yang dibayarkan dalam 1 tahun	Kecamatan Patamuan	3 orang/tahun	72,000,000	DAU		3 orang/tahun	79,200,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas dalam 1 Tahun	Kecamatan Patamuan	1 tahun	36,005,000	DAU		1 tahun	39,605,500
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dibayarkan selama 1 tahun	Kecamatan Patamuan	3 Unit/ tahun	34,585,000	DAU		3 Unit/ tahun	38,043,500
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor yang disediakan	Kecamatan Patamuan	1 tahun	1,420,000	DAU		1 tahun	1,562,000
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Patamuan	100%	1,980,000	DAU		100%	2,178,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kecamatan Patamuan	2 uks	990,000	DAU		2 uks	1,089,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan Patamuan	2 uks	990,000	DAU		2 uks	1,089,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	Kecamatan Patamuan	1 tahun	990,000	DAU		1 tahun	1,089,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah koordinasi yang dibayarkan	Kecamatan Patamu	11 orang/ tahun	990,000	DAU		11 orang/ tahun	1,089,000
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Patamu	100%	4,520,000	DAU		100%	4,972,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang dibina	Kecamatan Patamu	1 tahun	4,520,000	DAU		1 tahun	4,972,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kecamatan Patamu	1 Tahun (7 usulan)	2,220,000	DAU		1 Tahun (7 usulan)	2,442,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari yang dibina	Kecamatan Patamu	1 Tahun (7 bulan)	2,300,000	DAU		1 Tahun (7 bulan)	2,530,000
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Patamu	100%	990,000	DAU		100%	1,089,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kantrantibmas dan Tindak kriminal di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Patamu	1 tahun (6 bulan)	990,000	DAU		1 tahun (6 bulan)	1,089,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Patamu	1 tahun (6 bulan)	990,000	DAU		1 tahun (6 bulan)	1,089,000
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan Patamu	100%	990,000	DAU		100%	1,089,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Kecamatan Patamu	1 tahun (6 bulan)	990,000	DAU		1 tahun (6 bulan)	1,089,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Kecamatan Patamu	1 tahun (6 bulan)	990,000	DAU		1 tahun (6 bulan)	1,089,000
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Patamu	100%	990,000	DAU		100%	1,089,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina	Kecamatan Patamu	1 tahun (6 bulan)	990,000	DAU		1 tahun (6 bulan)	1,089,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Keuangan Nagari yang dilaksanakan	Kecamatan Patamu	1 tahun (6 bulan)	990,000	DAU		1 tahun (6 bulan)	1,089,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN PADANG SAGO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				638,287,927				1,378,673,900
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Padang Sago Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	KECAMATAN PADANG SAGO	100% BB 100%	634,837,927	DAU		100% A 100%	1,053,623,900
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	466,067,927	DAU		100%	589,040,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN PADANG SAGO	1 Laporan	2,000,000	DAU		1 Laporan	11,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	KECAMATAN PADANG SAGO	1 tahun	41,180,000	DAU		1 tahun	65,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN		14 bulan	422,887,927	DAU		14 bulan	513,040,000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	21,500,000	DAU		100%	48,600,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	KECAMATAN PADANG SAGO	500 Kotak	6,000,000	DAU		500 Kotak	16,500,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KECAMATAN PADANG SAGO	200 Buah/ tahun	5,000,000	DAU		35 Buah	20,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	1800 Examplarr	10,500,000	DAU		1800 Examplarr	12,100,000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	36,000,000	DAU		100%	165,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	KECAMATAN PADANG SAGO	1 Gedung Tahun	1,000,000	DAU		1 Gedung Tahun	100,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	KECAMATAN PADANG SAGO	5 Unit	1,000,000	DAU		1 Tahun	20,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN PADANG SAGO	2 Unit/tahun	34,000,000	DAU		12 Bulan	45,000,000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	97,020,000	DAU		100%	200,983,900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Jumlah Alat Listrik, dan Elektronik (Lampu Pijar/ Bateray Kering	KECAMATAN PADANG SAGO	12 Tagihan/ tahun	11,050,000	DAU		12 Bulan	20,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	KECAMATAN PADANG SAGO	3 Orang	69,600,000	DAU		5 Orang	117,600,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN PADANG SAGO	12 Unit/ Tahun	6,000,000	DAU		12 Bulan	30,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang di Arsipkan	KECAMATAN PADANG SAGO	200 Arsip	10,370,000	DAU		12 Bulan	33,383,900

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	92%	14,250,000	DAU		94%	50,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	KECAMATAN PADANG SAGO	1 Dokumen	1,000,000	DAU		1 Dokumen	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP	KECAMATAN PADANG SAGO	2 Dokumen	3,250,000	DAU		2 Dokumen	10,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	KECAMATAN PADANG SAGO	6 Dokumen	10,000,000	DAU		5 Dokumen	30,000,000
	Program : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator Program : Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	500,000	DAU		100%	17,500,000
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	500,000	DAU		100%	17,500,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	500,000	DAU		100%	17,500,000
	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator Program : Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	1,250,000	DAU		100%	78,650,000
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	1,250,000	DAU		100%	78,650,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	KECAMATAN PADANG SAGO	7 PKK	500,000	DAU		7 PKK	54,450,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan Yang Dilaksanakan	KECAMATAN PADANG SAGO	1 Kali	750,000	DAU		12 Usulan	24,200,000
	Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator Program : Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	300,000	DAU		100%	18,150,000
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	300,000	DAU		100%	18,150,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN PADANG SAGO	1 Kali	300,000	DAU		1 Kali	18,150,000
	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator Program : Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	500,000	DAU		100%	60,000,000
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	500,000	DAU		100%	60,000,000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	KECAMATAN PADANG SAGO	3 Kali	500,000	DAU		3 Kali	60,000,000
	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator Program : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	900,000	DAU		100%	150,750,000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SAGO	100%	900,000	DAU		100%	150,750,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ, pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	KECAMATAN PADANG SAGO	6 Nagari	500,000	DAU		6 Nagari	90,750,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PADANG SAGO	12 Kali	400,000	DAU		12 Kali	60,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				712,860,000	DAU			784,146,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kec. Sungai Geringging	100% BB 100%	680,360,000	DAU		100% BB 100%	748,396,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	100%	430,760,000	DAU		100%	473,836,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kec. Sungai Geringging	1 Tahun	397,000,000	DAU	JUMLAH TPP	1 Tahun	436,700,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Kec. Sungai Geringging	1 Tahun	32,760,000	DAU		1 Tahun	36,036,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Sungai Geringging	1 Laporan	1,000,000	DAU		1 Laporan	1,100,000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	92%	12,000,000	DAU		94%	13,200,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Kec. Sungai Geringging	7 Dok	11,000,000	DAU		7 Dok	12,100,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP	Kec. Sungai Geringging	2 Dok	500,000	DAU		2 Dok	550,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Kec. Sungai Geringging	1Dok	500,000	DAU		1Dok	550,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sungai Geringging	100%	115,400,000	DAU		100%	126,940,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diarsipkan	Kec. Sungai Geringging	150 arsip	15,000,000	DAU		150 arsip	16,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air dan listrik yang dibayarkan	Kec. Sungai Geringging	24 tagihan	10,000,000	DAU		24 tagihan	11,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang akan dipelihara	Kec. Sungai Geringging	14 unit	4,000,000	DAU		14 unit	4,400,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Kec. Sungai Geringging	4 orang	86,400,000	DAU		4 orang	95,040,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	92%	11,000,000	DAU		94%	12,100,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya CCTV	Kec. Sungai Geringging	1 set	8,000,000	DAU		1 set	8,800,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sungai Geringging	14 Orang	-	DAU		14 Orang	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Sungai Geringging	8 orang	3,000,000	DAU		8 orang	3,300,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	100%	59,200,000	DAU		100%	65,120,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Sungai Geringging	1 unit	2,000,000	DAU		5 unit	2,200,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Sungai Geringging	1 unit	2,000,000	DAU		4 unit	2,200,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Kec. Sungai Geringging	10rb lb dan 4 rim serta 4 spanduk	5,000,000	DAU		10rb lb dan 4 rim serta 4 spanduk	5,500,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kec. Sungai Geringging	350 porsi	10,000,000	DAU		350 porsi	11,000,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Sungai Geringging	360 eks	7,200,000	DAU		360 eks	7,920,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kec. Sungai Geringging	1.400 orang/hari	33,000,000	DAU		1.400 orang/hari	36,300,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	82%	10,000,000	DAU		84%	11,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Sungai Geringging	7 unit	10,000,000	DAU		7 unit	11,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Sungai Geringging	100%	42,000,000	DAU		100%	46,200,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sungai Geringging	2 unit	40,000,000	DAU		2 unit	44,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kec. Sungai Geringging	2 unit	2,000,000	DAU		2 unit	2,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	100%	2,000,000	DAU		100%	2,200,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	100%	1,000,000	DAU		100%	1,100,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kec. Sungai Geringging	40 UKS	1,000,000	DAU		40 UKS	1,100,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Kec. Sungai Geringging	100%	1,000,000	DAU		100%	1,100,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kec. Sungai Geringging	3000 Surat	1,000,000	DAU		3000 Surat	1,100,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec. Sungai Geringging	100%	21,500,000	DAU		100%	23,650,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec. Sungai Geringging	100%	21,500,000	DAU		100%	23,650,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	12 usulan	5,000,000	DAU		12 usulan	5,500,000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	12 kali	1,500,000	DAU		12 kali	1,650,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kec. Sungai Geringging	13 PKK	15,000,000	DAU		13 PKK	16,500,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec. Sungai Geringging	100%	1,500,000	DAU		100%	1,650,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sungai Geringging	100%	1,500,000	DAU		100%	1,650,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kec. Sungai Geringging	6 laporan	1,000,000	DAU		6 laporan	1,100,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kec. Sungai Geringging	12 kali	500,000	DAU		12 kali	550,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kec. Sungai Geringging	100%	3,500,000	DAU		100%	3,850,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec. Sungai Geringging	100%	3,500,000	DAU		100%	3,850,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan di Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	5 kali	2,000,000	DAU		5 kali	2,200,000
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah an tidak dilaksnakan oleh instansi vertikal	Jumlah konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	8 kasus	500,000	DAU		8 kasus	550,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ , pendmpingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	Kec. Sungai Geringging	12 Nagari	500,000	DAU		12 Nagari	550,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	12 Kali	500,000	DAU		12 Kali	550,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Geringging	100%	4,000,000	DAU		100%	4,400,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Geringging	100%	4,000,000	DAU		100%	4,400,000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kec. Sungai Geringging	24 perna	500,000	DAU		24 perna	550,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sungai Geringging	12 kali	1,500,000	DAU		12 kali	1,650,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kec. Sungai Geringging	12 bamus	1,500,000	DAU		12 bamus	1,650,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kec. Sungai Geringging	24 kali	500,000	DAU		24 kali	550,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				748,960,807				1,179,340,000
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	647,460,807	DAU		100%	985,840,000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	BB				BB	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%				100%	
7 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	92%	22,500,000	DAU		94%	36,000,000
7 01 01 1 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja,Renja P, RKA, RKA Perubahan, DPA,DPA Perubahan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	6 Dok	15,000,000	DAU		6 Dok	19,000,000
7 01 01 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD,Lap Keuangan,/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	4 Dok	7,500,000	DAU		4 Dok	17,000,000
7 01 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	256,320,807	DAU		100%	345,000,000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	13 Orang/ 14 Bulan	223,560,807	DAU	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kec IV KOTO AMAL	13 Orang/ 14 Bulan	300,000,000
7 01 01 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	11 Orang/12 Bulan	32,760,000	DAU		11 Orang/12 Bulan	45,000,000
7 01 01 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	92%	18,000,000	DAU		94%	35,000,000
7 01 01 3 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya pinger print online	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Unit	8,000,000	DAU		1 Unit	15,000,000
7 01 01 3 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	18 Orang	5,000,000	DAU		20 Orang	10,000,000
7 01 01 3 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	10 Orang / Tahun	5,000,000	DAU		20 Orang / Tahun	10,000,000
7 01 01 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	63,340,000	DAU		100%	74,840,000
7 01 01 4 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	15 Buah	7,000,000	DAU		20 Buah	8,000,000
7 01 01 4 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100 Kotak	3,000,000	DAU		200 Kotak	6,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 4 03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100 Buah	2,000,000	DAU		200 Buah	3,000,000
7 01 01 4 04	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	24 eksemplar	3,840,000	DAU		24 eksemplar	3,840,000
7 01 01 4 04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	12 Unit / Tahun	2,500,000	DAU		15 Unit / Tahun	4,000,000
7 01 01 4 05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100 Orang / Tahun	45,000,000	DAU		120 Orang/Tahun	50,000,000
7 01 01 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	82%	62,500,000	DAU		84%	200,000,000
7 01 01 5 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Unit R2	20,000,000	DAU		3 Unit R2	80,000,000
7 01 01 5 02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	4 Buah / filling kabinet	10,000,000	DAU		4/6 Buah / filling kabinet/kursi pejabat	45,000,000
7 01 01 5 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 / Unit/ laptop dan Printer	12,500,000	DAU		2 Unit Ac/, 1 Unit Laptop	25,000,000
7 01 01 5 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Unit/Tempat Parkir R2 dan R4	20,000,000	DAU		Rehabilitasi Halaman	50,000,000
7 01 01 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	174,800,000	DAU		100%	205,000,000
7 01 01 6 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip yang di Arsipkan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	600 arsip	15,000,000	DAU		800 arsip	25,000,000
7 01 01 6 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	12 Tagihan/ Tahun	5,000,000	DAU		12 Tagihan/ Tahun	10,000,000
7 01 01 6 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	7 Orang / 12 Bulan	154,800,000	DAU		8 orang	170,000,000
7 01 01 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	50,000,000	DAU		100%	90,000,000
7 01 01 7 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	2 Unit / Tahun	40,000,000	DAU		2 Unit / Tahun	55,000,000
7 01 01 7 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1Gedung/Tahun	5,000,000	DAU		1Gedung/Tahun	25,000,000
7 01 01 7 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Tahun	5,000,000	DAU		1 Tahun	10,000,000
7 01 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	15,000,000	DAU		100%	45,000,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	01	01	8		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	15,000,000	DAU		100%	45,000,000
7	01	01	8	01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	3 Kali	10,000,000	DAU		3 Kali	30,000,000
7	01	01	8	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	28 UKS	5,000,000	DAU		28 UKS	15,000,000
7	01	01			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	5,000,000	DAU		100%	10,000,000
7	01	01	9		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	5,000,000	DAU		100%	10,000,000
7	01	01	9	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	12 Kali	5,000,000	DAU		12 Kali	10,000,000
7	01	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	40,000,000	DAU		100%	60,000,000
7	01	01	10		penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	40,000,000	DAU		100%	60,000,000
7	01	01	10	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Kali	15,000,000	DAU		5 Kali	30,000,000
7	01	01	10	02	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah ,pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Kali	20,000,000	DAU		1 Kali	20,000,000
7	01	01	10	03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	12 Kali	5,000,000	DAU		12 Kali	10,000,000
7	01	01			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	30,000,000	DAU		100%	50,000,000
7	01	01	11		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	30,000,000	DAU		100%	50,000,000
7	01	01	11	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	7 Usulan	10,000,000	DAU		10 Usulan	20,000,000
7	01	01	11	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	6 PKK	20,000,000	DAU		6 PKK	30,000,000
7	01	01			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	11,500,000	DAU		100%	28,500,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	11,500,000	DAU		100%	28,500,000
7	01	01	12	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	10 Perna	2,000,000	DAU		10 Perna	5,000,000
7	01	01	12	02 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1 Kali	5,000,000	DAU		1 Kali	10,000,000
7	01	01	12	03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	5 Bamus	2,000,000	DAU		5 Bamus	7,500,000
7	01	01	12	04 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	24 kali	2,500,000	DAU		24 kali	6,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN BATANG GASAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				689,797,322				1,387,592,000
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec Batang Gasan	100%	655,797,322	DAU		100%	1,121,092,000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Kec. Batang Gasan	B		DAU		B	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kec. Batang Gasan	100%		DAU		100%	
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kec. Batang Gasan	92%	9,000,000	DAU		94%	22,990,000
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA,DPA Perubahan	Kec. Batang Gasan	6 Dok	4,000,000	DAU		5 Dok	12,100,000
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP dan LPPD	Kec. Batang Gasan	3 Dok	5,000,000	DAU		2 Dok	10,890,000
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batang Gasan	100%	443,760,000	DAU		100%	620,500,000
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Batang Gasan	Kec. Batang Gasan	12 orang /14 bulan	408,000,000	DAU		1 Tahun	544,500,000
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kec. Batang Gasan	11 orang / tahun	32,760,000	DAU		1 Tahun	65,000,000
X XX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Batang Gasan	1 Laporan	3,000,000	DAU		1 Laporan	11,000,000
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec. Batang Gasan	100%	45,100,000	DAU		100%	54,450,000
X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kec. Batang Gasan	12 Buah	600,000	DAU		200 Buah	9,680,000
X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Batang Gasan	240 buah	4,000,000	DAU		35 Buah	8,470,000
X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kec. Batang Gasan	1000 lembar	2,000,000	DAU		1 Tahun	6,050,000
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat- rapat kantor yang tersedia	Kec. Batang Gasan	100 kotak	3,500,000	DAU		500 Kotak	18,150,000
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan	Kec. Batang Gasan	70 orang / tahun	35,000,000	DAU		1800 Exampplar	12,100,000
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kec. Batang Gasan	82%	7,000,000	DAU		84%	96,800,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batang Gasan	1 unit Finger Print On Line	7,000,000	DAU		Finger Print On Line 1 Unit,Komputer PC 2 Unit,Kipas Angin 5 Unit,Printer 5 Unit,CCTV	96,800,000
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batang Gasan	100%	105,837,322	DAU		100%	150,352,000
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diarsipkan	Kec. Batang Gasan	600 arsip surat	6,037,322	DAU		12 Bulan	15,000,000
X XX 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Batang Gasan	12 tagihan / tahun	11,000,000	DAU		12 Bulan	25,000,000
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Batang Gasan	4 orang/tahun	88,800,000	DAU		5 orang	110,352,000
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Batang Gasan	100%	45,100,000	DAU		100%	176,000,000
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Batang Gasan	2 unit/tahun	40,600,000	DAU		12 Bulan	56,000,000
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	Kec. Batang Gasan	2 unit/Tahun	1,500,000	DAU		1Gedung/Tahun	100,000,000
X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kec. Batang Gasan	16 Unit/Tahun	3,000,000	DAU		1 Tahun	20,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec Batang Gasan	100%	4,500,000	DAU		100%	18,150,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batang Gasan	100%	2,500,000	DAU		100%	12,100,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat di bina	Kec. Batang Gasan	10 UKS	2,500,000	DAU		30 UKS	12,100,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batang Gasan	12 Bulan	2,000,000	DAU			6,050,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kec. Batang Gasan	900 surat izin/ rekomendasi/ ket	2,000,000	DAU		850 surat izin/ rekomendasi/ ket	6,050,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Kec Batang Gasan	100%	13,000,000	DAU		100%	72,600,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec. Batang Gasan	100%	13,000,000	DAU		100%	72,600,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kec. Batang Gasan	12 usulan	3,000,000	DAU		15 Usulan	24,200,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan organisasi PKK di kecamatan dan nagari	Kec. Batang Gasan	4 PKK	10,000,000	DAU		4 PKK	48,400,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec Batang Gasan	100%	1,500,000	DAU		100%	30,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Batang Gasan	100%	1,500,000	DAU		100%	30,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kec. Batang Gasan	10 Laporan	1,500,000	DAU		10 Laporan	30,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kec Batang Gasan	100%	14,000,000	DAU		100%	127,600,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec. Batang Gasan	100%	14,000,000	DAU		100%	127,600,000
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	Kec. Batang Gasan	1 kali	4,000,000	DAU		5 Kali	55,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kec. Batang Gasan	11 kali	10,000,000	DAU		3 Nagari	72,600,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbinaanya dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Batang Gasan	100%	1,000,000	DAU		100%	18,150,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batang Gasan	100%	1,000,000	DAU		100%	18,150,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan	Kec. Batang Gasan	3 Nagari/ tahun	1,000,000	DAU		24 kali	18,150,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kec. Batang Gasan	1 Kali	0	DAU		1 Kali	0
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kec. Batang Gasan	3 Nagari/ tahun	0	DAU		3 bamus	0

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN V KOTO TIMUR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				684,736,146			982,009,761	
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kecamatan V KotoTimur	100%	666,736,146	DAU		100%	865,409,761
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Kecamatan V KotoTimur	B				B	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kecamatan V KotoTimur	100%				100%	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan V KotoTimur	92%	8,000,000	DAU		92%	8,800,000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP dan LPPD	Kecamatan V KotoTimur	3 Dok	8,000,000	DAU		3 Dok	8,800,000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan V KotoTimur	100%	478,846,146	DAU		100%	526,730,761
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kecamatan V KotoTimur	100%	446,086,146	DAU		100%	490,694,761
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Kecamatan V KotoTimur	12 Bulan	32,760,000	DAU		12 Bulan	36,036,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran selama 1 Tahun	Kecamatan V KotoTimur	1 tahun	36,000,000	DAU		100%	55,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan V KotoTimur	240 buah	2,000,000	DAU		240 buah	5,500,000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat - rapat kantor yang tersedia	Kecamatan V KotoTimur	100 Porsi	4,000,000	DAU		100 Porsi	16,500,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan V KotoTimur	1.152 orang	30,000,000	DAU		1.152 orang	33,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kecamatan V KotoTimur	1 tahun	108,890,000	DAU		100%	119,779,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diarsipkan	Kecamatan V KotoTimur	600 arsip surat	9,090,000	DAU		600 arsip surat	9,999,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan V KotoTimur	12 Bulan	5,400,000	DAU		12 Bulan	5,940,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor yang disediakan	Kec. V koto Timur		2,000,000				2,200,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan V KotoTimur	4 orang / tahun	92,400,000			4 orang / tahun	101,640,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahn Daerah	Persentase Perawatan Kendaraan Dinas dalam 1 Tahun	Kecamatan V KotoTimur	1 tahun	35,000,000	DAU		100%	38,500,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan V KotoTimur	2 Unit (1 Unit roda empat, 1 unit roda 2)	35,000,000	DAU		2 Unit (1 Unit roda empat, 1 unit roda 2)	38,500,000
7 01 01 2.09 24	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Belanja Modal yang diadakan	Kec. V koto Timur		0	DAU		4 Unit	0
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		100%	6,600,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		100%	1,100,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat di bina	Kecamatan V KotoTimur		-	DAU		10 UKS	1,100,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Parsentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		12 Bulan	5,500,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan V KotoTimur		-	DAU		1500 surat izin/ rekomendasi/	5,500,000
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah	Kecamatan V KotoTimur	100%	17,000,000	DAU		Kecamatan V KotoTimur	24,200,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan V KotoTimur	100%	17,000,000	DAU		Kecamatan V KotoTimur	24,200,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kecamatan V KotoTimur	12 usulan	7,000,000	DAU		Kecamatan V KotoTimur	13,200,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan organisasi PKK di kecamatan dan nagari	Kecamatan V KotoTimur	4 PKK	10,000,000	DAU		Kecamatan V KotoTimur	11,000,000
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		100%	5,500,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		100%	5,500,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan V KotoTimur		-	DAU		10 Laporan	5,500,000
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan	Kecamatan V KotoTimur	100%	1,000,000	DAU		100%	77,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan V KotoTimur	100%	1,000,000	DAU		100%	77,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	1. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi	Kec. V koto Timur	1 tahun	1,000,000	DAU		11 kali	77,000,000
		Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi						1 kali	
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		100%	3,300,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan V KotoTimur		0	DAU		100%	3,300,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan	Kecamatan V KotoTimur		-	DAU		3 Nagari/ tahun	3,300,000
		Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan	Kecamatan V KotoTimur					100%	
		Jumlah pembinaan Badan permusyawaratan Nagari yang dilaksanakan dilaksanakan	Kecamatan V KotoTimur					3 Nagari/ tahun	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN SUNGAI LIMAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7									
7	01					775,070,880	DAU		841,500,000
X	XX	01				717,070,880	DAU		778,000,000
X	XX	01	2.01			9,070,880	DAU		13,000,000
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Kecamatan Sungai Limau	6 Dok	4,000,000
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP dan LPPD	Kecamatan Sungai Limau	3 Dok	9,000,000
X	XX	01	2.02						
X	XX	01	2.02						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kecamatan Sungai Limau	14 bulan/ pertahun	408,000,000
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Kecamatan Sungai Limau	13 orang/ pertahun	32,000,000
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Sungai Limau	1 Laporan	5,000,000
X	XX	01	2.06						
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kecamatan Sungai Limau	12 Buah	2,000,000
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Sungai Limau	240 buah	3,000,000
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kecamatan Sungai Limau	1000 lembar	3,000,000
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minumann tamu dan rapat - rapat kantor yang tersedia	Kecamatan Sungai Limau	100 Porsi	10,000,000
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau	60 orang/ tahun	60,000,000
X	XX	01	2.07						
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sungai Limau	1 unit sound sistem	8,000,000
X	XX	01	2.08						
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diarsipkan	Kecamatan Sungai Limau	600 arsip surat	20,000,000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Sungai Limau	12 tagihan/ tahun	5,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Sungai Limau	5 orang/tahun	120,000,000	DAU		5 orang/tahun	144,000,000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Sungai Limau	100%	58,000,000	DAU		100%	65,000,000
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sungai Limau	2 Unit (1 Unit roda empat, 1 unit roda 2)	45,000,000	DAU		2 Unit (1 Unit roda empat, 1 unit roda 2)	45,000,000
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sungai Limau	1 unit/Tahun	3,000,000	DAU		1 unit/Tahun	10,000,000
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sungai Limau	10 Unit/Tahun	10,000,000	DAU		10 Unit/Tahun	10,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Sungai Limau	100%	4,500,000	DAU		100%	7,000,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Limau	100%	2,000,000	DAU		100%	2,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat di bina	Kecamatan Sungai Limau	10 kali	2,000,000	DAU		10 UKS	2,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sungai Limau	12 Bulan	2,500,000	DAU		12 Bulan	5,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan Sungai Limau	900 surat izin/ rekomendasi/ ket	2,500,000	DAU		900 surat izin/ rekomendasi/ ket	5,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah	Kecamatan Sungai Limau	100%	25,000,000	DAU		100%	25,000,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Sungai Limau	100%	25,000,000	DAU		100%	25,000,000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kecamatan Sungai Limau	12 usulan	5,000,000	DAU		12 usulan	5,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan organisasi PKK di kecamatan dan nagari	Kecamatan Sungai Limau	5 PKK	20,000,000	DAU		5 PKK	20,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau	100%	2,500,000	DAU		100%	2,500,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sungai Limau	100%	2,500,000	DAU		100%	2,500,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Sungai Limau	12 Laporan	2,500,000	DAU		12 Laporan	2,500,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan	Kecamatan Sungai Limau	100%	17,000,000	DAU		100%	17,000,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Sungai Limau	100%	17,000,000	DAU		100%	17,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau	1 kali	7,000,000	DAU		1 kali	7,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	1. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi	Kecamatan Sungai Limau	5 kali	10,000,000	DAU		5 kali	10,000,000
		Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi	Kecamatan Sungai Limau	1 kali		DAU		1 kali	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Kecamatan Sungai Limau	100%	9,000,000	DAU		100%	12,000,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sungai Limau	100%	9,000,000	DAU		100%	12,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau	4 Nagari/ tahun	6,000,000	DAU		4 Nagari/ tahun	6,000,000
		Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Sungai Limau	100%		DAU		100%	
		Jumlah pembinaan Badan permusyawaratan Nagari yang dilaksanakan dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau	4 Nagari/ tahun		DAU		4 Nagari/ tahun	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Nagari	Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari dan Administrasi keuangan Nagari	Kecamatan Sungai Limau	100%	1,500,000	DAU		100%	3,000,000
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan dan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau	4 Nagari/ tahun	1,500,000	DAU		4 Nagari/ tahun	3,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				718,516,588				1,173,559,588
7 01 04	Program : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator Program : Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,200,000	DAU		100%	25,000,000
7 01 04 2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,200,000	DAU		100%	25,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kec V Koto Kampung Dalam	12 Kali/ Tahun	1,200,000	DAU		1 Tahun	25,000,000
7 01 03	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator Program : Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	16,940,000	DAU		100%	70,730,000
7 01 03 2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	16,940,000	DAU		100%	70,730,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kec V Koto Kampung Dalam	13 PKK	6,980,000	DAU		13 PKK	48,730,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kec V Koto Kampung Dalam	20 Usulan/Tahun	9,960,000	DAU		30 Usulan/Tahun	22,000,000
7 01 06	Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator Program : Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,000,000	DAU		100%	10,000,000
7 01 06 2.01	Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terpenuhinya fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,000,000	DAU		100%	10,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kec V Koto Kampung Dalam	12 Kali/Tahun	1,000,000	DAU		12 Kali	10,000,000
7 01 02	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator Program : Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,000,000	DAU		100%	15,000,000
7 01 02 2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,000,000	DAU		100%	15,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina Dan Pelayanan	Kec V Koto Kampung Dalam	6 UKS	1,000,000	DAU		6 UKS	15,000,000
7 01 05	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator Program : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,000,000	DAU		100%	107,850,000
7 01 05 2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	1,000,000	DAU		100%	107,850,000

Kode Rekening					Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kec V Koto Kampung Dalam	8 Nagari	1,000,000	DAU		8 Nagari	107,850,000
7	01	1			Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	697,376,588	DAU		100%	944,979,588
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				A	
						Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
7	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program : Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	92%	6,000,000	DAU		92%	15,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Kec V Koto Kampung Dalam	1 dok	2,000,000	DAU		1 dok	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, RENSTRA	Kec V Koto Kampung Dalam	2 dok	2,000,000	DAU		2 dok	5,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan	Kec V Koto Kampung Dalam	6 dok	2,000,000	DAU		6 dok	5,000,000
7	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	6,000,000	DAU		100%	7,700,000
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya pinger print online	Kec V Koto Kampung Dalam	1 Unit	6,000,000	DAU		1 Unit	7,700,000
7	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	467,526,588	DAU		100%	480,799,588
7	01	01	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec V Koto Kampung Dalam	1 Laporan	2,000,000	DAU		1 Laporan	15,000,000
			2.02	05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kec V Koto Kampung Dalam	11 Orang/Tahun	32,760,000	DAU		11 Orang	33,033,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Kec V Koto Kampung Dalam	14 Bulan	432,766,588	DAU	DILUAR GAJI ASN	1 Tahun	432,766,588
7	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	20,360,000	DAU		100%	120,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kec V Koto Kampung Dalam	200 porsi	4,000,000	DAU		202 porsi	30,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec V Koto Kampung Dalam	30 Buah	1,000,000	DAU		30 Buah	30,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	15 Orang/ Tahun	15,360,000	DAU		1 Tahun	60,000,000
7	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	37,121,000	DAU		100%	70,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara /Rehabilitasi	Kec V Koto Kampung Dalam	10 Unit/ Tahun	2,000,000	DAU		1 Tahun	10,000,000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec V Koto Kampung Dalam	4 Unit/Tahun	35,121,000	DAU		12 Bulan	60,000,000
7	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec V Koto Kampung Dalam	100%	160,369,000	DAU		100%	251,480,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kec V Koto Kampung Dalam	12 Tagihan/Tahun	12,000,000	DAU		12 Bulan	20,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola dan Kebersihan perkantoran	Kec V Koto Kampung Dalam	6 Orang	132,000,000	DAU		6 Orang	150,480,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec V Koto Kampung Dalam	15 Unit/Tahun	3,000,000	DAU		12 Bulan	48,000,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diarsipkan	Kec V Koto Kampung Dalam	600 Arsip	13,369,000	DAU		12 Bulan	33,000,000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

 SUHARTO BUR



LAMPIRAN 2

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
INDIKATOR MAKRO DAERAH									
1	Pertumbuhan PDRB Menurut harga konstan								
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	-10,46	5,3	8,36	7,82	4,04	4,14	4,27
3	Laju inflasi								
4	PDRB								
4.1	Atas harga berlaku								
4.2	Atas harga konstan								
4.3	PDRB per kapita (Juta Rp)	Juta	41,66	44,63	46,98	49,46	52,71	55,35	58,72
4.4	Atas harga berlaku								
4.5	Atas harga konstan								
4.6	Pertumbuhan PDRB per Kapita								
5	Indeks Gini Ratio								
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan								
6.1	Jumlah Penduduk Miskin								
6.2	Tingkat kemiskinan	%	7,26	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,61	7,15	7,17	7,15	7,1	7,1
8	Indek Pembangunan Manusia	Angka	70,61	71,07	71,53	72,19	72,85	73,52	74,09
8.1	Rata-rata Lama Sekolah								
8.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,79	68,89	68,99	69,29	69,50	69,75	70,00
8.3	Angka Harapan Lama Sekolah								
8.4	Pengeluaran perkapita								
9	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,92	93,3	93,6	94	94,3	94,7	95

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Ribu	330.598.007,30	365.100.000	403.300.000	445.400.000	491.900.000	543.700.000	600.000.000
A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
ASPEK PELAYANAN UMUM									
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
1.	URUSAN PENDIDIKAN								
1.1	Pendidikan Dasar								
1.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Angka	72,92	74,8	76,7	78,7	80,7	82,8	85
1.1.2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka	2,79	2,87	2,96	2,53	2,18	1,19	1,18
1.1.3	Rasio Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	%	50,28	52,50	54,80	57,20	59,70	62,30	65,00
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini 3-6 th	Angka	50,28	52,5	54,8	57,2	59,7	62,3	65
1.2.2	Rasio Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	%	50,28	52,50	54,80	52,20	59,70	62,30	65,00
1.3	Mutu Pendidikan								
1.3.1	Rasio Pengelolaan Pendidikan Dasar	%	53,47	55,61	70,96	56,31	60,61	45,69	64,30
1.3.2	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	53,22	55,61	57,21	58,89	60,62	60,62	64,30
2.	URUSAN KESEHATAN								
2.1	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	70	7500	80	85	90	95	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	%	58,80	62	65	68	72	76	80
2.3	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	55	60	65	70	75	80	85
2.4	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase Rumah Tangga yang BerPHBS	%	70	72	74	76	78	80	82
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	%	58,65	60,65	62,87	64,70	66,85	67,90	68,90
3.2	Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah Kawasan	9	9	9	9	9	9	9
3.3	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	64,28	65,30	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,98	54,82	58,72	62,72	66,74	71,04	75,54
3.5	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten	%	6,67	7,02	7,43	7,95	8,53	9,29	9,94
3.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,98	54,82	58,72	62,72	66,74	71,04	75,54
3.7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan	%	6,67	7,02	7,43	7,95	8,53	9,29	9,94

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kabupaten								
3.8	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	20	55	60	70	75	80	85
3.9	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	%	N/A	10	20	25	30	35	40
3.10	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan perkotaan	%	22	35	43	52	65	78	87
3.11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	58	63	68	70	75	83	90
3.12	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00
3.13	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	%	20	25	30	40	45	50	60
3.14	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.15	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	71,86	88	90	92	95	97	100
3.16	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,03	81	85	87	93	96	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
4.1	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,66	0,55	0,44	0,33	0,22	0,11	0,00
4.2	Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	850	852	854	856	858	860	862
4.3	Rasio permukiman layak huni	Nilai	N/A	N/A	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14
4.4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00
4.5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	N/A	N/A	20	21	22	23	24
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	N/A	N/A	1,23	3,11	3,85	4,66	5,59
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	N/A	N/A	1,75	1,72	1,70	1,68	1,66
4.9	Persentase pemukiman yang tertata	%	N/A	N/A	20,00	20,10	20,20	20,30	20,40
4.10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	N/A	N/A	50	55	60	65	70
4.11	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	N/A	N/A	3,40	6,80	10,00	10,00	16,90
4.12	Persentase Pengembang Perumahan yang telah terregistrasi	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100
4.13	Timbulan sampah yang ditangani	%	0,0227	0,0019	0,0224	0,0223	0,0222	0,022	0,0218
4.14	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,422	0,419	0,417	0,414	0,412	0,41	0,408
4.15	Persentase cakupan area pelayanan	%	0,28	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38
4.16	Rasio rumah layak huni	%	0,129	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,185

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	persentase penegakkan perda	%	50,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
5.2	persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	%	60,00	62,00	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
5.4	Nagari tangguh bencana	Nagari	14	15	16	17	18	19	20
5.5	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	Nagari	14 Nagari	20 Nagari	25 Nagari	30 Nagari	35 Nagari	40 Nagari	45 Nagari
5.6	Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana	%	75	75	79	82	85	90	98
5.7	Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	%	14,5	19,4	24,3	29,12	33,98	38,83	43,68
5.8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Nagari	20	17,8	15,8	14,1	12,6	11,2	10
5.9	Persentase Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	N/A	80	85	85	90	90	95
6	URUSAN SOSIAL								
6.1	PersentaseTerpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	65	65	80	82	85	87	90
6.3	Persentase PPKS Mandiri	%	21	23	25	27	28	30	33

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	100	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	%	7	7	10	12	14	16	18
6.6	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	72	75	73	76	79	83	85
6.7	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	%	100	100	100	100	100	100	100
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Dengan Pelayanan Dasar									
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR									
1	URUSAN TENAGA KERJA								
1.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	N/A	70	70	70	70	70	72
1.3	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	N/A	2.400	2.400	2.430	2.500	2.500	2.500
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	N/A	51	51	51	51	51	51
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.1	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	35	35	36	37	38	39	40
2.2	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	35	35	35	37	38	39	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kabupaten/kota.								
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,56	4,56	4,57	4,57	4,57	4,58
6.2	Persentase Penerbitan KTP EL	%	98,68	30	99	99	99	99	99
6.3	Persentase Penerbitan KK	%	99,31	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase Penerbitan KIA	%	20,06	30	35	40	45	50	50
6.5	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	91,73	93	95	95	97	98	99
6.6	Persentase Penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentasi penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase database kependudukan yang disusun	%	N/A	90	90	90	90	90	90
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	4	4	1	1	1	1	1
7.2	Persentase Nagari yang tertata	%	60	100	100	100	100	100	100
7.3	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	%	55	100	100	100	100	100	100
7.4	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	60	100	100	100	100	100	100
7.5	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	65	100	100	100	100	100	100
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	10	15	20	25	30
16	URUSAN KEBUDAYAAN								
16.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	N/A	35	36	38	38	40	42
16.2	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya	Rasio	5	6	6	7	7	7	7
16.3	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya	Rasio	5	6	6	7	7	7	7
16.4	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	Rasio	45	50	50	50	50	50	50
16.5	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Rasio	45	50	50	50	50	50	50
17	URUSAN PERPUSTAKAAN								
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,62	18,8	18,85	18,88	18,97	19,08	19,36
17.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	Indeks	90,17	90,20	90,25	90,30	90,40	90,50	91,00
17.3	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	2,87	2,90	2,95	3,00	3,20	3,50	4,00
17.4	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	0,30	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,80
17.5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,14	0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,45
17.6	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	%	0,33	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perpustakaan								
17.7	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	%	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
18	URUSAN KEARSIPAN								
18.1	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan	Indeks	73,48	73,48	60,80	63,95	65,00	68,50	70,00
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	8,84	10,88	13,95	16,27	18,60	20,93	23,25
18.3	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan	%	N/A	5	10	15	20	25	30
18.4	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	40	45	50	55	60	65	70
18.5	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	20	30	40	45	50	60	70
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1	URUSAN PERIKANAN								
1.1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	%	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	18.080,30	18.441,90	18.810,73	19.186,93	19.570,66	19.962,06	20.361,29
1.3	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Ton/ Tahun	52.511,60	53.561,83	54.633,06	55.725,72	56.840,23	57.977,03	59.136,57
1.4	Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)	Ekor/ Tahun	687.828.985	480.000.000	495.000.000	510.000.000	525.000.000	540.000.000	555.000.000
1.5	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	%	N/A	60	70	80	90	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	%	N/A	100	100	100	100	100	100
1.7	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	Kg/ Kapita / Tahun	42,04	43,04	43,54	44,04	44,54	45,04	45,54
1.8	Produksi Ikan Olahan (ton/ tahun)	Ton/ Tahun	176,30	179,82	183,41	187,07	190,81	194,62	198,51
2.	URUSAN PARIWISATA								
2.1	PAD Sektor Wisata (juta)	Rp./Juta	1.759	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
2.2	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Objek Wisata	4	4	5	5	6	6	6
2.3	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	41	41	45	50	55	60	60
2.4	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36	36	40	45	50	55	60
2.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	208.872	250.000	265.000	275.000	300.000	330.000	350.000
2.6	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Paket	2	2	3	4	5	6	7
3	URUSAN PERTANIAN								
3.1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Rp./Juta	2.668.793,67	2.731.777,20	2.796.247,14	2.862.238,58	2.929.787,41	2.998.930,39	3.069.705,15
3.2	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	%	70	75	80	85	90	95	100
3.3	Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	%	30	35	40	45	50	55	60
3.4	Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	Varietas	0	2	1	0	0	0	0
3.5	Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	%	90	91	92	93	94	95	96
3.6	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	%	0	5	5	5	5	5	5
3.7	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	%	N/A	11,40	23,50	35,20	47,00	58,82	70,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	Ha	250	300	350	400	450	500	550
3.9	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	%	N/A	0	100	100	100	100	100
3.10	Peningkatan kelas kelompok tani	Poktan	25	34	34	34	34	34	34
3.11	Jumlah Produksi Daging	Ton	2.305	2.340	2.375	2.410	2.446	2.483	2.520
3.12	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	%	6	12	17	23	29	35	48
3.13	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
3.14	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	0	1	1	1	1	1	1
3.15	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	25	30	35	40	45	50	55
4	URUSAN PERDAGANGAN								
4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	8,30	8,52	8,58	8,60	8,64	8,69	8,71
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	N/A	60	60	62	62	63	63
4.3	Jumlah Pasar yang Kondusif	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1
4.4	jumlah pasar yang diawasi	Kecamatan	N/A	17	17	17	17	17	17
4.5	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Pedagang	N/A	1	1	2	2	2	2
4.6	Pasar tertib ukur	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1
4.7	Terwujudnya pasar BANA	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	URUSAN PERINDUSTRIAN								
5.1	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11,19	11,8	12,6	13,3	14,2	15,0	16,0
5.2	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Sentra	1	1	1	1	1	1	1
5.3	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi
5.4	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	Dokumen Ranperda	1	1	1	1	1	1	1
D. PENUNJANG URUSAN									
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1.5	Indeks kualitas perencanaan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
1.6	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	N/A	90	92	93	94	95	95
2	KEUANGAN								
2.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2024	30/11/2025	30/11/2026
2.3	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase BMD yang tertib	%	65	65	70	75	80	85	90
2.8	Jumlah PAD	Rp.	124.387.421.851	131.417.232.	138.908.014.22	147.103.587.06	156.076.905.874	165.909.750.944	176.693.884.756

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				000	4	3			
2.9	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	%	95	95	95	95	95	95	95
2.10	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%	90,21%	89%	90%	89,3%	89,1%	88,96%	89,48%
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	76	78	80	82	84	86	88
3.2	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
3.3	Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
3.4	Persentase peningkatan dokumen ASN yang tersiapkan	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
3.5	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
3.6	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	FUNGSI PENGAWASAN								
4.1	INSPEKTORAT								
4.1.1	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	level 3 dengan catatan	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
4.1.2	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Nilai	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
4.1.3	Persentase pengawasan yang dilakukan	%	N/A	60	60	60	60	60	60
4.1.4	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	%	N/A	60	60	60	60	60	60

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.1	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	60	65	70	75	80	85	90
6.1	SEKRETARIAT DEWAN								
6.1.1	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Perda	11	8	8	8	8	8	8
6.2	SEKRETARIAT DAERAH								
6.2.1	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	54	60	63	63	64	65	66
6.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,15	83,15	83,3	83,43	83,6	84,75	85,9
6.2.3	Jumlah TPA/TPSA, TPQ/TPSQ, MDA/MDTA dan Pondok Al-quran/Tahfizh yang dibina	Sekolah Agama	830	844	854	864	874	884	894
6.2.4	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.5	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.6	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.7	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	%	N/A	10%	11%	12%	13%	14%	15%
6.2.8	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.9	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	BB
6.2.10	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	10	10	11	12	13	14	15
6.2.11	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,700 (tinggi)	2,800 (tinggi)	2,900 (tinggi)	3,000 (sangat tinggi)	3,050 (sangat tinggi)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	N/A	-	-	100	100	100	100
8.2	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
8.3	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
8.4	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	%	N/A	100	100	100	100	100	100
8.5	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	N/A	100	100	100	100	100	100

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR